PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK
Jl. Basuki Rachmat No. 1 Nganjuk - 64412

RPD
KAB. NGANJUK

TAHUN 2024 - 2026



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026 ..... **1**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 – 2026 ..... **1**

BAB I PENDAHULUHAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 5
1.3. Hubungan Antar Dokumen 9
1.4. Maksud dan Tujuan 16
1.5. Sistematika Penulisan 17

BAB II GAMBARAN UMUM 19
2.1. Aspek Geografi dan Demografi 19
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 65
2.3. Aspek Pelayanan Umum 94
2.4. Aspek Daya Saing 196

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH **222**
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 223
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 246
3.3. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 250

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 260
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah..... 260
4.2. Isu Strategis 277

BAB V TUJUAN DAN SASARAN 289
5.1. Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 -2025..... 289
5.2. Arah Kebijakan Tahap ke-IV RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025..... 295
5.3. Tujuan dan Sasaran 298
5.3. Cascading Kinerja RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026... 308
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS 316

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 448
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan..... 448
7.2. Program Perangkat Daerah 451

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 515
8.1. Indikator Kinerja Utama 515
8.2. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah..... 515

BAB IX PENUTUP 530
9.1. Pedoman Transisi 530
9.2. Kaidah Pelaksanaan 530

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemilihan Umum Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024;

b. bahwa agar pembangunan di Kabupaten Nganjuk dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Daerah periode Tahun 2024-2026;

c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, mengamanatkan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagai pedoman bagi Pj. Kepala Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabililitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Nganjuk - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

37. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
4. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
8. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
9. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistemik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

16. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program Perangkat Daerah.
20. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
21. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
22. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
23. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
24. Program Proritas adalah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD.
25. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.
26. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati, khususnya tujuan dan sasaran RPD, serta target pembangunan nasional.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

27. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
28. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran *(output)*, hasil *(outcome)*, dampak *(impact)*.
29. Keluaran *(Output)* adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil *(outcome)* dapat terwujud.
30. Hasil *(*Outcome*)* adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
31. Dampak *(Impact)* adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* beberapa program.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah Daerah yang bersifat transisi berdasarkan visi dan misi RPJPD, dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program prioritas, kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, serta kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2) RPD digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.
(3) RPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) Dalam penyusunan RPD memperhatikan:
    a. penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
    b. kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 sampai dengan tahun 2025;
    c. hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

d. RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
e. isu-isu strategis yang berkembang;
f. kebijakan nasional; dan
g. regulasi yang berlaku.

(2) Penyusunan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan saran dan/atau masukan dari Pemangku Kepentingan pembangunan Daerah, termasuk DPRD.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) RPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I PENDAHULUAN;
b. BAB II GAMBARAN UMUM;
c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
e. BAB V TUJUAN DAN SASARAN;
f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS;
g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
i. BAB IX PENUTUP.

(2) Isi beserta uraian sistematika RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD.

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
b. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

(3) Pelaksanaan teknis atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BAPPEDA.
(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPD

Pasal 6

(1) Perubahan RPD dapat dilakukan apabila:
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
    b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
    c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

(1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPD.
(2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman penyusunan RKPD.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Maret 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024, maka diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang mengamanatkan agar Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Selanjutnya dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja

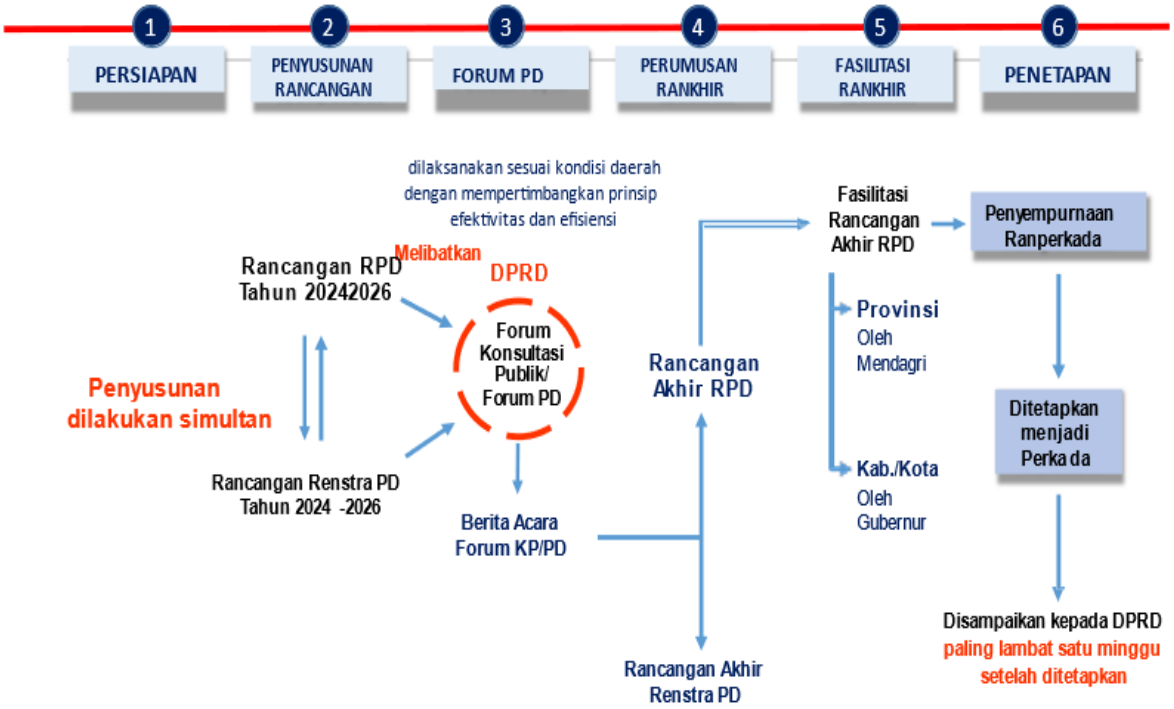
Pemerintah Daerah (RKPD) dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD.

Sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2018-2023;
4. RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi;
5. Isu-isu strategis yang berkembang; dan
6. Kebijakan nasional.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Diagram penyusunan Rencana Pembangunan Daerah



Disamping itu sesuai dengan amanat sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan juga menggunakan pendekatan proses yaitu tematik-holistik, integratif, dan spasial, dengan kebijakan alokasi anggaran belanja berdasarkan *money follow program*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kinerja dan pencapaian sasaran program prioritas. selain itu, penyusunan dokumen rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 juga menggunakan 4 (empat) pendekatan yaitu **pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, serta pendekatan *top down* dan *bottom-up*.**

Pendekatan politik dalam penyusunan RPD dilakukan dengan cara mengedepankan proses politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya pendekatan politik bertujuan agar proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus

mengedepankan penyelesaian permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pendekatan politik juga dilakukan melalui pelibatan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk dalam forum konsultasi publik rancangan RPD, dan sinkronisasi subtansi materi RPD terkait program prioritas pembangunan.

Pendekatan teknokratik dalam penyusunan RPD pada prinsipnya mengedepankan penggunaan metoda dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematik dalam melakukan analisis masalah, menyusun proyeksi ekonomi makro, kebijakan pendapatan daerah, maupun dalam menyusun rencana program prioritas pembangunan berdasarkan evaluasi capaian pembangunan RPJMD Tahun 2018-2023 dan identifikasi permasalahan strategis serta proyeksi terhadap kondisi 3 (tiga) tahun ke depan.

Pendekatan teknokratik dilakukan melalui forum diskusi, *Focus Group Discussion (FGD)*, pembahasan dan konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pejabat fungsional perencana, tenaga ahli dari lembaga/institusi, akademisi perguruan tinggi; serta melibatkan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Pendekatan *top-down* dilakukan dengan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Pendekatan *bottom-up* dilakukan dengan memperhatikan usulan masyarakat yang disampaikan dalam setiap pelaksanaan musrenbang RKPD maupun dari forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah.

Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengembangkan forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024-2026. Penyusunan RPD Tahun 2024-2026 juga

mempertimbangkan pendekatan berbasis kewilayahan sesuai dengan permasalahan dan potensi wilayah, terutama dalam pengembangan sistem administrasi pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan Kawasan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 – 2041. Dengan menerapkan seluruh pendekatan perencanaan tersebut, RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi dokumen perencanaan pembangunan strategis yang dapat dijadikan pedoman dalam perumusan prioritas dan pencapaian sasaran pembangunan daerah yang bertujuan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat kabupaten Nganjuk, mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabililitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Nganjuk - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;

25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041; dan
39. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

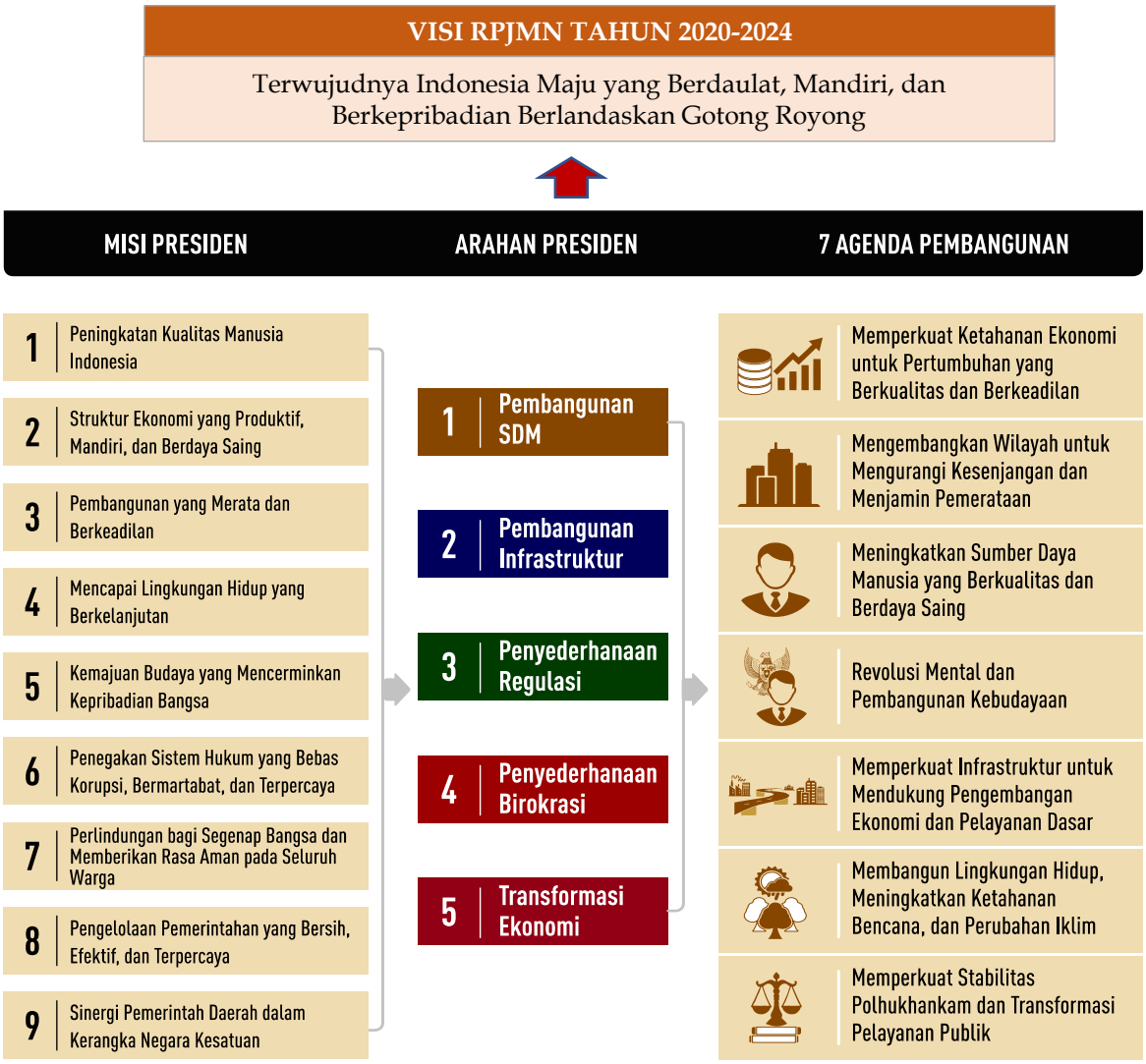
1.3.1. Hubungan RPD dengan RPJM Nasional

Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dilaksanakan dengan Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Rencana pembangunan nasional tahun 2020-2024 yang tertuang dalam RPJMN yang ditetapkan

melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Program-program Nasional disinergikan dengan sasaran program/kegiatan di antaranya sebagai berikut:

a. Infrastruktur pelayanan dasar dan Infrastruktur penunjang perekonomian sesuai dengan sasaran meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum, perumahan rakyat dan perhubungan yang handal;
b. Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta upaya penurunan stunting sesuai dengan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat termasuk menurunkan stunting serta pengendalian penduduk; dan
c. Penataan struktur kelembagaan birokrasi sesuai dengan sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Gambar 1.1.
Visi RPJMN Tahun 2020-2024



Mengacu pada gambar di atas, maka dapat ditarik benang merah arah pembangunan nasional yang dapat dijadikan sebagai *guidance* bagi perumusan arah pembangunan Kabupaten Nganjuk yang sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

1.3.2. Hubungan RPD Kabupaten Nganjuk dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur

Hubungan antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk tahun 2024-2026 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, dilakukan dengan mengidentifikasi visi, misi dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur sebagai panduan untuk merumuskan arah pembangunan Kabupaten Nganjuk. Adapun visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

"Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berkarakter dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris, Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong".

Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Sedangkan misi RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 sebagai penjabaran dari visi Pembangunan adalah;

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.

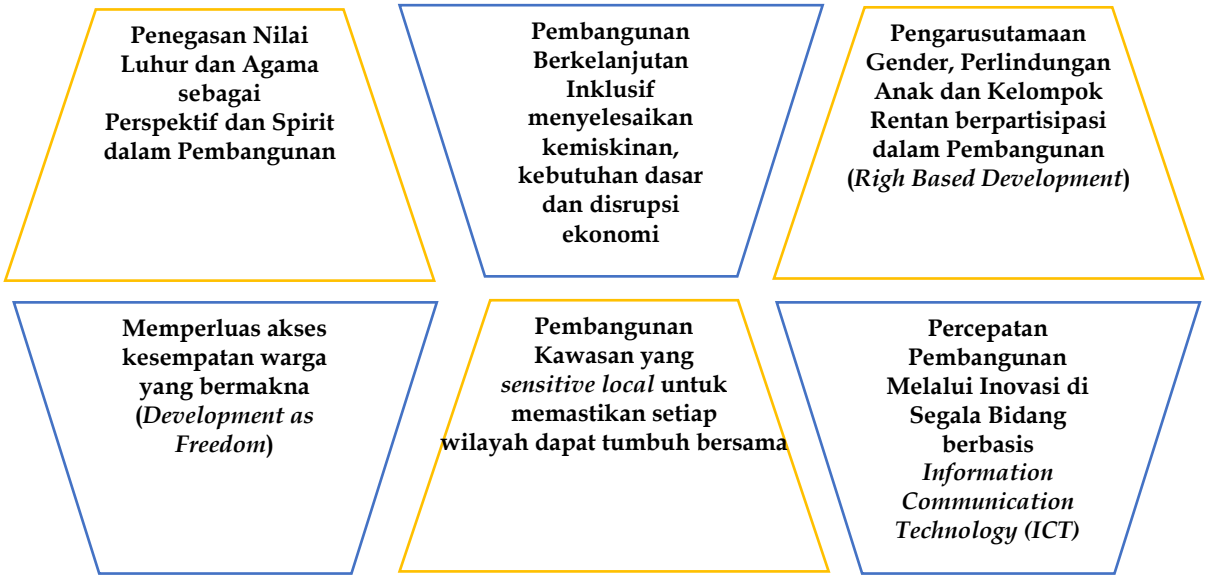
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Strategi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Guna mendukung pencapaian keempat misi di atas, maka dilakukan melalui serangkaian Strategi Pembangunan sebagai berikut:

Gambar 1.2

Strategi RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024

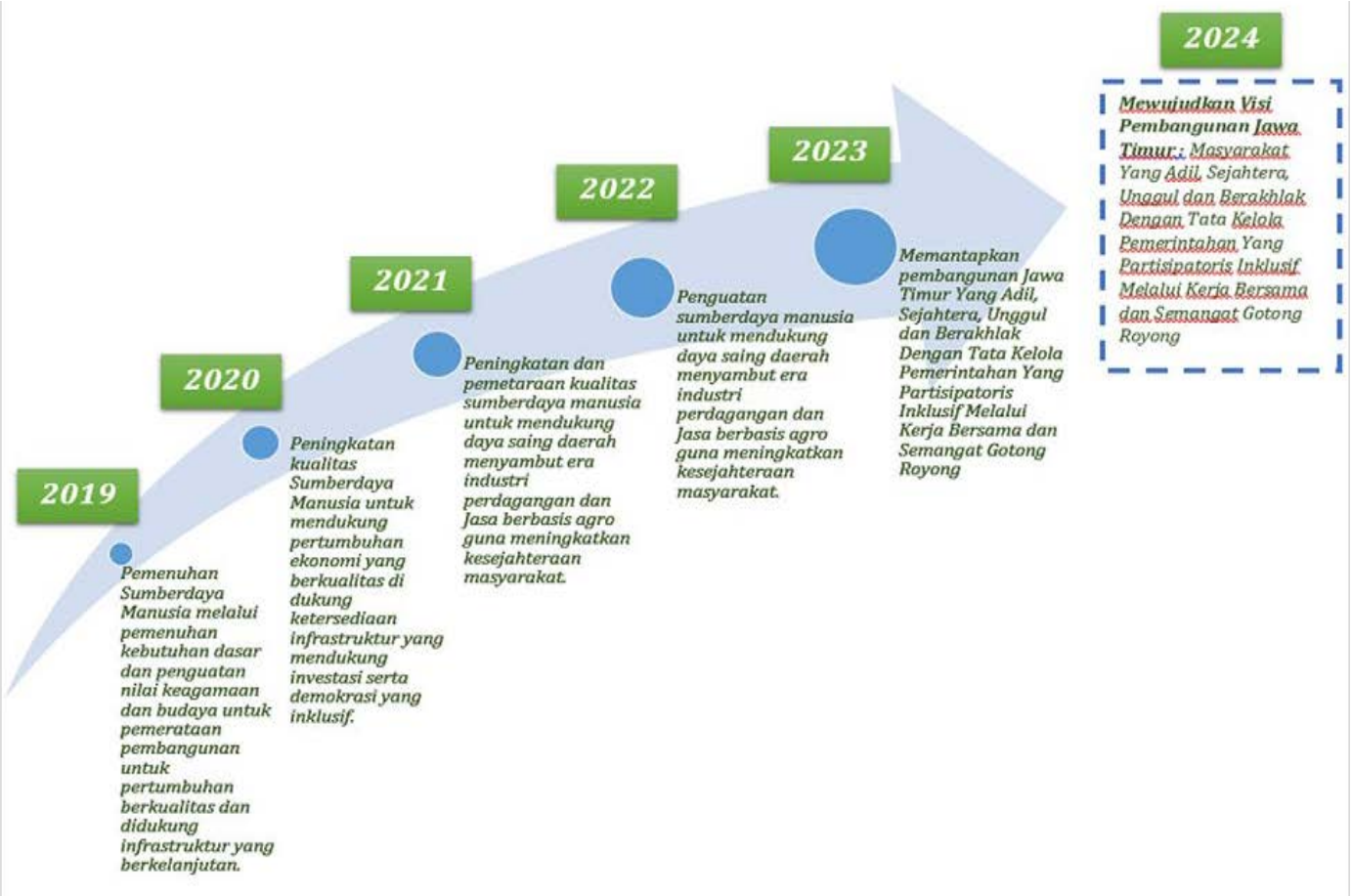


Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Mengacu pada Visi, Misi, dan Strategi Pembangunan di atas, maka Arah Kebijakan Pembangunan Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagaimana disajikan dalam ilustrasi *milestone* di bawah ini:

Gambar 1.3

Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024



Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 di atas dapat memberikan peta mengenai orientasi dan arah pengembangan pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026. Diantaranya yaitu peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer dengan cara meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perikanan, serta kesejahteraan petani.

1.3.3. Hubungan RPD dengan RPJPD Kabupaten Nganjuk

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 merupakan periode terakhir pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

mempedomani visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Tahun 2005-2025. Pada RPJPD Kabupaten Nganjuk memiliki visi yang akan dicapai adalah **"Nganjuk yang Maju, Adil dan Sejahtera"**.

Visi RPJPD ini mengandung makna bahwa pada akhir tahun 2025 mendatang diharapkan Kabupaten Nganjuk mencapai kondisi masyarakat yang lebih Maju, Adil dan Sejahtera. RPD disusun untuk mencapai tujuan dan prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Nganjuk tahun keempat yang sudah ditetapkan.

RPD tahun 2024-2026 terletak pada periodisasi RPJPD 2005-2024 periode RPJMD 4 tahun pertama, yaitu:

RPJMD 4 : Mewujudkan masyarakat Nganjuk yang maju, adil, dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif yang didukung sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Dengan penekanan pada peningkatan daya saing kompetitif perekonomian yang berdasarkan pada keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk percepatan pembangunan Nganjuk yang maju, adil, sejahtera.

1.3.4. Hubungan RPD dan RTRW

Selain RPJPD, penyusunan RPD juga memperhatikan dan mempertimbangkan rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah dan penetapan kawasan strategis kabupaten yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 – 2041. Pada proses perumusan RPD Tahun 2024-2026 RTRW Kabupaten

digunakan sebagai dasar untuk menetapkan indikasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah.

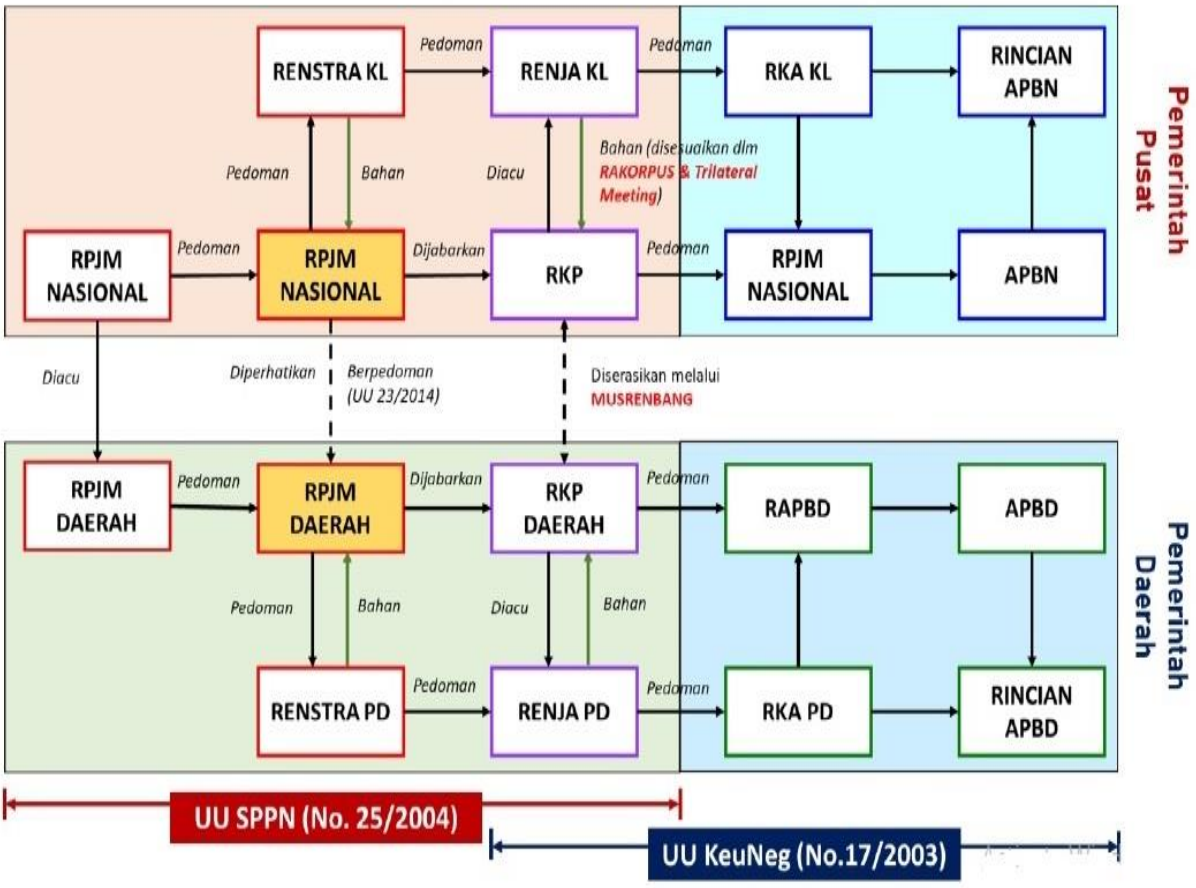
RTRW Kabupaten Nganjuk secara umum ditetapkan pada 2 kawasan, yaitu kawasan peruntukan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Peruntukan Lindung terdiri dari 3 jenis kawasan yaitu: kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat dan kawasan cagar budaya. Sedangkan, kawasan budidaya meliputi 8 kawasan, yaitu : kawasan hutan produksi, kawasan perkebunan rakyat, kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan.

1.3.5. Hubungan RPD dan Dokumen Penganggaran

Mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka RPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah pada periode transisi dijabarkan dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan RKPD yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD. Penyusunan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renja PD tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat daerah. Berikut bagan alur keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penganggaran:

Gambar 1.4

Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 adalah untuk menjadi pedoman dan arah pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Dengan berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 adalah:

1. Menjadi landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024-2026;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra maupun Renja Perangkat Daerah, dan sebagai

tolok ukur dalam mengukur kinerja tahunan;

3. Menjamin terciptanya sinergi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan daerah baik antar wilayah, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, maupun antara pusat dan daerah; dan
4. Instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi pemangku kepentingan terkait.

1.5. Sistematika Penulisan

Penyajian dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dimuat dengan sistematika sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN**

   Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen dalam perencanaan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan RPD Kabupaten Nganjuk tahun 2024-2026.

2. **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

   Menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah yang memaparkan tentang kondisi Kabupaten Nganjuk yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

3. **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

   Menjelaskan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2018-2022 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2024-2026.

4. **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

   Menjelaskan tentang identifikasi permasalahan pembangunan dan berbagai isu strategis sektoral serta isu strategis kabupaten berdasarkan analisis kondisi lingkungan strategis eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap kebijakan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan Isu-isu Strategis tersebut, maka diidentifikasi dan dirumuskan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

5. **BAB V TUJUAN DAN SASARAN**

   Menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran beserta indikator kinerja tujuan dan sasaran. Perumusan Tujuan dan sasaran didasarkan pada Visi misi, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD serta isu strategis actual

6. **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS**

   Menjelaskan tentang bagaimana strategi dan arah kebijakan serta program-program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang didukung Perangkat Daerah.

7. **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

   Menjelaskan kebijakan alokasi pendanaan/anggaran program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui penentuan pagu indikatif kepada perangkat daerah, sehingga alokasi anggaran ke dalam program benar-benar dapat mendukung pencapaian kinerja tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.

8. **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

   Menjelaskan apa dan bagaimana pengukuran kinerja Pemerintah Daerah dengan indikator dan target kinerja yang terukur dan tepat dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah

9. **BAB IX PENUTUP**

   Merupakan kata penutup, catatan serta arahan rekomendasi kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

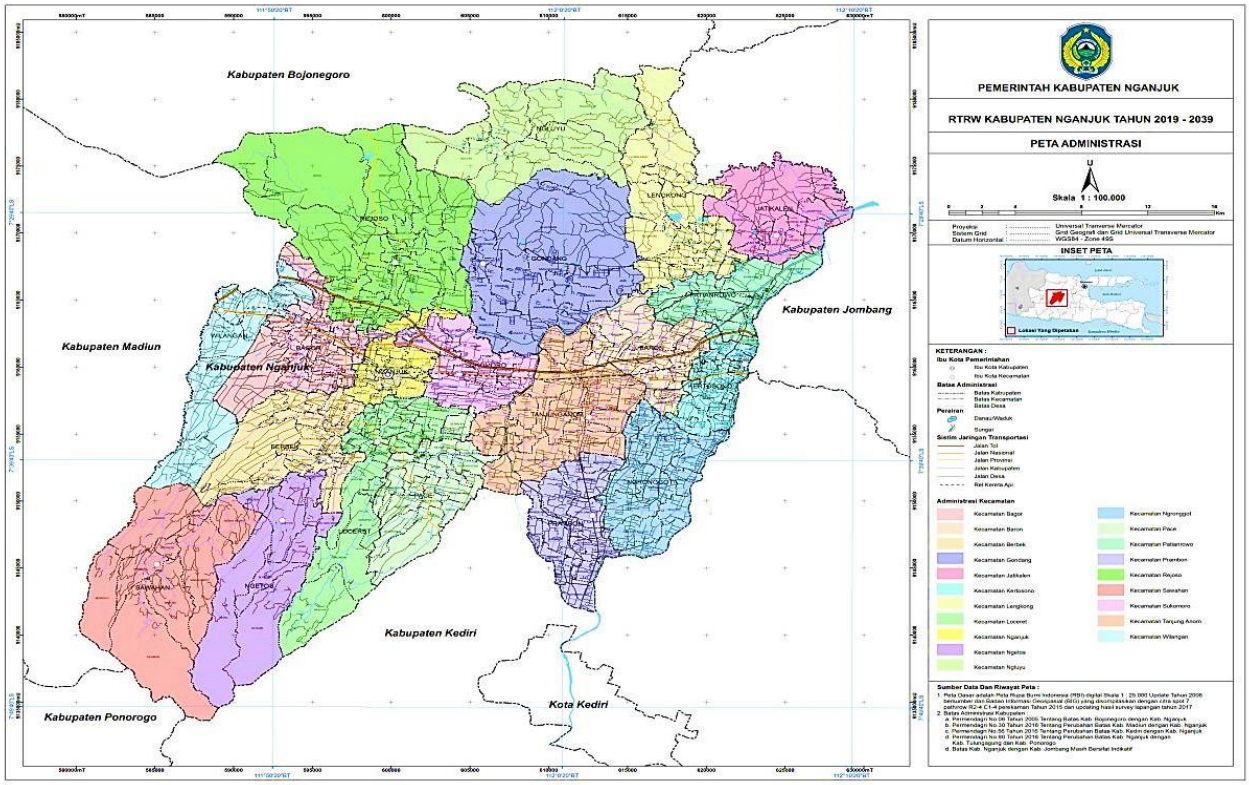
2.1.1. Kondisi Geografi

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Secara Astronomis Kabupaten Nganjuk terletak pada koordinat 111°5' sampai dengan 111°13' Bujur Timur dan 7°20' sampai dengan 7°50' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Nganjuk adalah seluas 1.288,22 km². Kabupaten Nganjuk memiliki 20 kecamatan, dimana wilayah yang paling luas berada di Kecamatan Rejoso, yaitu sebesar 156,82 km² dan paling kecil di wilayah Kecamatan Nganjuk dengan luas 23,49 km². Posisi Kabupaten nganjuk dibatasi oleh beberapa kabupaten lain, yaitu:

- Sebelah utara : Kabupaten Bojonegoro,
- Sebelah selatan : Kabupaten Kediri dan Tulungagung.
- Sebelah timur : Kabupaten Jombang dan Kediri.
- Sebelah barat : Kabupaten Ponorogo dan Madiun.

Geografis Kabupaten Nganjuk berada pada titik tengah persimpangan jalan Provinsi Jawa Timur. Keberadaannya menjadi penghubung antara Ibukota Provinsi, Surabaya, dengan wilayah Jawa Timur bagian barat. Hal ini menjadikan Kabupaten Nganjuk memiliki potensi sektor jasa dan perdagangan yang besar sebagai daerah penghubung perdagangan. Selain itu, kondisi geografis yang luas dengan jenis wilayah yang beragam, maka jumlah kecamatan juga cukup banyak dan variatif, sehingga membutuhkan adanya pendekatan dalam pengembangan tata ruang.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Nganjuk



Secara rinci luas wilayah Kabupaten Nganjuk per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Ketinggian dan Luas Wilayah Kabupaten Nganjuk Per Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1	Sawahan	Sawahan	111,38	8,56
2	Ngetos	Ngetos	78,41	6,22
3	Berbek	Berbek	57,48	4,30
4	Loceret	Loceret	68,65	5,31
5	Pace	Pace	51,05	4,03
6	Tanjunganom	Tanjunganom	75,54	6,01
7	Prambon	Prambon	44,94	3,42

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
8	Ngronggot	Ngronggot	52,94	4,13
9	Kertosono	Kertosono	24,79	1,93
10	Patianrowo	Patianrowo	35,14	2,74
11	Baron	Baron	40,05	2,87
12	Gondang	Gondang	114,18	8,75
13	Sukomoro	Sukomoro	37,53	2,90
14	Nganjuk	Nganjuk	23,49	1,90
15	Bagor	Bagor	54,35	4,18
16	Wilangan	Wilangan	51,44	4,05
17	Rejoso	Rejoso	156,82	12,65
18	Ngluyu	Ngluyu	89,77	6,66
19	Lengkong	Lengkong	71,99	5,89
20	Jatikalen	Jatikalen	48,28	3,51
	JUMLAH		**1.288,22**	**100,00**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Nganjuk 2022

2.1.1.1. Topografi

Topografi Kabupaten Nganjuk berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dikompilasikan dengan citra *spot 7 path/row*, RTRW Kabupaten Nganjuk tahun 2021-2041 meliputi, Topografi wilayah menjadi salah satu pertimbangan untuk melihat kesesuaian penggunaan lahan. Wilayah Kabupaten Nganjuk merupakan daratan yang memiliki kontur datar, bergelombang dan berbukit. Kondisi topografi ini terbagi menjadi dua bagian menurut ketinggiannya yaitu 25 – 100 meter dari permukaan laut (dpl) dan 100 – 1.000 meter dpl. Wilayah dengan ketinggian 25 – 100 meter dpl seluas 62%, sedang ketinggian 100 – 1.000 meter dpl seluas 34,05%. Kondisi luasan topografi tersebut tersebar keseluruh wilayah dengan rincian sebagai berikut:

- Kondisi wilayah yang berada diketinggian 25 – 100 meter di atas permukaan air laut dengan luas wilayah sekitar 798,670 Km^2 atau 62% dari seluruh luas wilayah. Wilayah kecamatan yang berada pada ketinggian ini sebanyak 15 kecamatan, yaitu Kecamatan: Wilangan, Bagor, Nganjuk, Sukomoro, Rejoso, Gondang, Loceret, Pace, Tanjunganom, Prambon, Ngronggot, Kertosono, Patianrowo, Lengkong, dan Kecamatan Jatikalen.
- Kondisi wilayah yang berada diketinggian 100 – 1.000 meter di atas permukaan air laut dengan luas wilayah sekitar 437,99 Km^2 atau 34,05% dari seluruh luas wilayah. Wilayah kecamatan yang berada pada ketinggian ini sebanyak 11 kecamatan, yaitu Kecamatan: Ngluyu, Lengkong, Gondang, Rejoso, Wilangan, Bagor, Berbek, Ngetos, Pace, sawahan, dan Kecamatan Loceret. Adapun wilayah Kecamatan Rejoso, Ngluyu, Gondang, Jatikalen berada di bagian utara Kabupaten Nganjuk merupakan daerah pegunungan (Pegunungan Kendeng) dengan ketinggian 60-897 m DPL, yang merupakan daerah hutan jati, lahan potensial untuk tanaman tembakau, bahan galian kapur, hutan produksi, dan hutan lindung. Sedangkan wilayah Kecamatan Ngetos, Sawahan, Brebek, Loceret, Pace, dan Wilangan berada di sebelah selatan dan Barat wilayah Kabupaten Nganjuk berada di lereng Gunung Wilis potensial untuk tanaman perkebunan, hortikultura, hutan produksi dan hutan lindung.
- Wilayah dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan air laut dengan luas wilayah 631,23 Km^2 atau 4,89% dari luas wilayah terdiri atas 2 wilayah kecamatan saja, yaitu : Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Ngetos. Wilayah ini berada di bagian Selatan Kabupaten Nganjuk merupakan daerah pegunungan (Gunung Wilis) dengan ketinggian 1.000 sampai dengan 2.563 m DPL, potensial untuk hutan produksi dan hutan lindung. Terdapat enam kecamatan memiliki dua jenis topografi yaitu berada pada ketinggian 25 – 100 meter dpl dan 100 – 1.000

meter dpl. Keenam kecamatan tersebut yaitu Kecamatan : Lengkong, Rejoso, Wilangan, Bagor, Pace, dan Loceret. Selain dikelompokkan dari kondisi konturnya, wilayah Kabupaten Nganjuk juga terbagi menurut kelerengannya. Menurut kelerengannya wilayah ini dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu:

- Wilayah dengan kelerengan antara 0 % – 2 %, luasnya meliputi 52,95 % dari luas wilayah Kabupaten Nganjuk yang tersebar di hampir seluruh wilayah. Wilayah ini cukup baik untuk kegiatan budidaya berupa pertanian maupun untuk kegiatan permukiman.
- Wilayah dengan kelerengan 2 % – 15 %, luasnya meliputi 29,86% dari seluruh luas wilayah kabupaten dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Wilayah ini cukup sesuai untuk kegiatan pertanian dan permukiman.
- Wilayah dengan kelerengan 15 % – 40 %, luasnya meliputi 10,50% dari luas wilayah kabupaten yang tersebar di Kecamatan Ngetos, Sawahan, Berbek, Loceret, Wilangan, Rejoso, Gondang, Ngluyu dan Lengkong. Wilayah ini sesuai untuk kegiatan pertanian tanaman tahunan/tanaman keras.
- Wilayah dengan kelerengan > 40 %, luasnya meliputi sekitar 6,68% dari luas wilayah kabupaten yang tersebar di Kecamatan Sawahan, Ngetos, Wilangan dan Ngluyu. Merupakan wilayah yang seharusnya dihutankan karena merupakan kawasan penyangga tanah, air dan menjaga keseimbangan ekosistem.

2.1.1.2. Geologi dan Jenis Tanah

Kondisi geologi daerah dapat menggambarkan potensi sumberdaya alam, serta beberapa kemungkinan bencana yang mungkin timbul. Wilayah Kabupaten Nganjuk termasuk dalam Zona Solo dengan Sub Zona Ngawi. Zona ini ditempati oleh gunung api yang berumur kwarter dengan puncak seperti Wilis, Lawu, dll. Diantaranya terdapat dataran seperti dataran Madiun, Kediri, Jember, yang

umumnya tersusun oleh endapan lahar dan batuan gunung api. Dataran tersebut merupakan cekungan air tanah produktif yang didominasi oleh endapan alluvium vulkanik.

Batuan di sebagian wilayah Kabupaten Nganjuk umumnya terdiri dari endapan alluvium, sedangkan sebagian lainnya terdiri dari batuan berumur piosen sampai plistosen. Wilayah Kabupaten Nganjuk berdasarkan ciri-ciri fisik dan batuan penyusunnya secara garis besar terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Perbukitan Kendeng

   Di daerah ini tersusun oleh batuan sedimen pasir sampai lempung liat setebal 40 – 80 meter dengan sisipan tipis pasir.

2. Gunung api Wilis

   Pada daerah ini terdapat batu pasir tufa yang mengandung sisipan pasir atau breksi. Batuan di daerah ini berupa lapisan batuan yang berasal dari rombakan material letusan gunung api, breksi, lahar dan batu pasir bersifat andesit. Pada daerah ini tanahnya terdiri dari bahan-bahan asal pegunungan dengan ketebalan 80 – 110 meter berupa pasir tufa berbutir halus sisipan kasar atau kerikil dengan sisipan lempung tufaan atau pasir lempung di dalamnya.

3. Dataran Rendah

   Di daerah ini bagian atas setebal 30 – 70 meter terdiri dari lempung abu-abu hitam dengan pasiran coklat yang dipisahkan oleh lapisan tipis pasiran sebagai pengandung air. Bagian bawah berupa lapisan batu pasir tufaan atau lempung tufaan dengan sisipan pasir atau kerikil.

Kabupaten Nganjuk terbagi menjadi tiga bagian menurut jenis tanah, yaitu tanah sawah (35%), tanah kering (27%) dan tanah hutan (38%). Sebagian besar kecamatan berada pada dataran rendah dengan ketinggian antara 46 sampai dengan 95 meter di atas permukaan laut. Sedangkan 4 (empat) kecamatan yang berada pada daerah pegunungan terletak pada ketinggian 150 sampai dengan 750 meter di

atas permukaan laut. Daerah tertinggi yaitu desa Ngliman di Kecamatan Sawahan.

Bila di lihat dari tipe sebaran tanah yang ada, maka wilayah Kabupaten Nganjuk terbagi ke dalam 3 asal jenis tanah berdasarkan pembentukannya, yaitu berasal dari Jenis tanah yang pembentukannya berasal dari material gunung berapi seperti tanah andosol, latosol, grumosol dan regosol tersebar hampir di seluruh kecamatan-kecamatan, jenis tanah yang berasal dari endapan aliran sungai yang sering disebut dengan tanah aluvial di dataran rendah dan tanah yang berasal dari pelapukan bebatuan besar dengan jenis tanah litosol. Wilayah yang memiliki jenis tanah tersebut adalah Rejoso dan Ngluyu. Sebaran jenis tanah ini pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jenis Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Nganjuk

Kecamatan	Jenis Tanah
1. Sawahan	Andosol, Latosol
2. Ngetos	Andosol, Latosol
3. Berbek	Latosol, Gromosol
4. Loceret	Andosol, Latosol, Gromosol, Aluvial
5. Pace	Latosol, Gromosol, Aluvial
6. Tanjunganom	Gromosol, Aluvial
7. Prambon	Aluvial
8. Ngronggot	Aluvial
9. Kertosono	Aluvial
10. Patianrowo	Aluvial, Regosol
11. Baron	Aluvial
12. Gondang	Aluvial, Regosol
13. Sukomoro	Aluvial, Regosol
14. Nganjuk	Gromosol, Aluvial, Regosol
15. Bagor	Gromosol, Regosol
16. Wilangan	Latosol, Gromosol, Regosol
17. Rejoso	Latosol, Regosol, Litosol
18. Ngluyu	Latosol, Regosol, Litosol
19. Lengkong	Regosol
20. Jatikalen	Aluvial, Regosol

Sumber: Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2022

2.1.1.3. Iklim

Iklim Kabupaten Nganjuk secara umum, curah hujan di Kabupaten Nganjuk dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Jawa Timur tidak terlalu jauh berbeda. Kabupaten Nganjuk pada bulan Mei sampai dengan September/Oktober terjadi musim kemarau dan pada bulan November/Desember sampai bulan April mengalami musim penghujan. Pada bulan-bulan tertentu pada musim kemarau yaitu bulan Juli - September berhembus angin kencang dari Gunung Wilis menuju kota Nganjuk, karena itu pula kota Nganjuk dikenal dengan sebutan kota angin.

Tabel 2.3.
Rata-Rata Curah Hujan Per Bulan Tahun 2022

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
Januari	419	20
Februari	310	18
Maret	368	27
April	181	18
Mei	203	13
Juni	193	11
Juli	19	3
Agustus	80	4
September	18	6
Oktober	511	23
Nopember	680	23
Desember	238	9

Tabel 2.4.
Rata-Rata Curah Hujan per Kecamatan

Kecamatan	Dpl	Rata-rata Curah Hujan Per Tahun (mm)				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sawahan	750*)	16	26	20	22	18
Ngetos / klodan	500*)	22	29	22	23	18
Berbek	85	16	23	24	16	13
Loceret/Jatirejo	63	21	14	22	14	13
P a c e	60	11	15	23	18	17
Tanjunganom/warujayeng	47	19	15	20	20	18
Prambon	56	17	15	17	14	10
Ngronggot/Dingin	45	23	16	17	28	22
Kertosono	40	32	36	27	26	23
Patianrowo	46*)	-	42	36	-	-
Baron	46*)	-	-	-	15	16
Gondang	60	22	18	28	20	22
Sukomoro	54*)	-	16	25	-	-
Nganjuk	56	18	19	20	21	17
Bagor/sumbersoko	100	19	16	22	22	17
Wilangan/glatik	123	20	14	22	20	19
Rejoso	62	19	23	26	22	21
Ngluyu/tempuran	155	30	16	23	22	21
Lengkong	40	23	29	29	20	20
Jatikalen/Ngansem	39	23	23	23	17	25

Sumber : Dinas PUPR, 2023

2.1.1.4 Hidrologi

Secara hidrologis, Kabupaten Nganjuk terdiri atas 41 sungai. Dengan jumlah sungai tersebut menyebabkan kondisi dan struktur tanah Kabupaten Nganjuk cukup produktif.

Tabel 2.5.
Kondisi Sungai Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

NO	Nama Sungai	Panjang (Km)	Luas daerah Pengairan (Km^2)	Debit Air (liter/detik)
1	Sungai Widas	91,00	430.15	2.643
2	Sungai Sopang	4,70	6.562	-
3	Sungai Butuh	4,20	2	-
4	Sungai Manyung	8,30	19.24	100
5	Sungai Ngumpul	12,00	15.75	100
6	Sungai Mencaro	6,75	16.2	337
7	Sungai Kedungmaron	7,50	15	180
8	Sungai Semantok	18,50	27	905
9	Sungai Wedekan	6,10	7	250
10	SungaiWengkal	12,00	24	320
11	Sungai Kedungpadang	11,00	122.845	499
12	Sungai Senggowar	22,00	76.6	2.151
13	Sungai Babadan	7,00	1.4	300
14	Sungai Tretes	15,00	30	407
15	Sungai Kedungsengon	7,20	14.4	148
16	Sungai Jarakan	4,25	8.5	30
17	Sungai Jaan	5,10	10.2	45
18	Sungai Nglempoh	5,12	4.5	155
19	Sungai Jurangdandang	2,75	19.7	149
20	Sungai Logawe	3,00	2.45	45
21	Sungai Sumberkepuh	5,60	34.3	160
22	Sungai Sumbersono	5,00	3.25	140
23	Sungai Perning	3,50	36.77	155
24	Sungai Kedungsoko	6,50	80.85	783
25	Sungai Kedungpedet	5,25	70.71	223
26	Sungai Puh Salak	12,60	14.624	126
27	Sungai Kedung Galih	18,20	24.375	77
28	Sungai Logo	11,50	4.5	-
29	Sungai Konang	31,70	28.05	118
30	Sungai Tunggak	15,20	18.562	46
31	Sungai Gandu	4,90	7.875	458

NO	Nama Sungai	Panjang (Km)	Luas daerah Pengairan (Km^2)	Debit Air (liter/detik)
32	Sungai Kuncir Kanan	18,41	50.204	2.772
33	Sungai Kuncir Kiri	9,55	26.05	2.035
34	Sungai Bodor	16,00	21.8	31
35	Sungai Watulanang	7,00	14.6	46
36	Sungai Sumber Kemiri	5,00	3.75	45
37	Sungai Sumber Doko	3,00	1.5	-
38	Sungai Sumberklampok	3,00	1.25	20
39	Sungai Beng	20,00	14	30
40	Sungai Rejoso	5,00	2.3	917
41	Sungai Margomulyo	7,00	3.2	377
42	Sungai Kedung Gupit	4,00	1	119
43	Sungai Kuncir	19,45	12.875	566

Sumber : Dinas PUPR, 2023

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa sungai yang berada di Kabupaten Nganjuk terdiri atas 43 sungai dengan panjang antara 2,75 Km (Sungai Jurangdandang) sampai 91 Km (Sungai Widas). Sedangkan, Kabupaten Nganjuk memiliki debit air tertinggi 2.772 liter/detik. Sungai yang memiliki luas daerah pengairan tertinggi yaitu Sungai Widas dengan luas 430.150 Km2, sedangkan sungai yang memiliki daerah pengairan paling kecil yaitu Sungai Kedung Gupit dengan luas 1 Km^2.

2.1.1.5 Tataguna Lahan

Penggunaan lahan Kabupaten Nganjuk merupakan informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan. Luas wilayah administrasi Kabupaten Nganjuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 adalah 1.288,22 Km^2 / 128.822 Ha yang terbagi menjadi 20 kecamatan, 264

desa 20 kelurahan. Pemanfaatam lahan sampai dengan akhir tahun 2022 meliputi Permukiman 19.413,78 Ha, Industri dan Pergudangan 388,02 Ha, Pertambangan 252,46 Ha, Sungai 941,21 Ha, Waduk/Embung 555,78 Ha, Peternakan 112,30 Ha, Sawah 51.358,37 Ha, Ladang/Tegalan 27.393,39 Ha, Hutan 28.406,69 Ha. Dalam beberapa tahun terakhir penggunaan lahan tersebut mengalami perubahan penggunaan lahan yang cukup signifikan terjadi pada jenis tanah sawah. Alih fungsi lahan sawah tidak hanya pada daerah sub urban, akan tetapi telah masuk ke daerah pedesaan. Jika ditinjau dari aspek pertanian, meskipun terjadi perubahan penggunaan lahan sawah namun luas lahan pertanian yang ada masih mampu untuk mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk, namun demikian alih fungsi lahan tersebut harus dikendalikan secara ketat agar tidak mengancam potensi pertanian dan ketersediaan bahan pangan.

Pemanfaatan lahan di Kabupaten Nganjuk, kawasan perkotaan berpusat di sekitar Alun-Alun dan Pendopo Kabupaten Nganjuk, kemudian berkembang kesemua arah. Penggunaan lahan berupa tegalan masih cukup luas berlokasi di sebelah selatan dan barat Kabupaten Nganjuk. Penggunaan lahan berupa sawah yang tidak luas terutama terdapat di sekitar Kaliulo di sebelah utara kabupaten.

Untuk kawasan terbangun didominasi oleh kawasan permukiman, perkantoran dan perdagangan; sedangkan untuk kawasan tidak terbangun didominasi oleh kebun campuran/tegalan, ladang, sawah di pinggiran kota. Secara lebih rinci penyebaran penggunaan lahan adalah sebagai berikut:

1. Perumahan

   Kawasan perumahan umumnya menyebar mengikuti pola jaringan jalan utama kota. Pada kawasan pusat kota, kawasan perumahan ini bersifat masif (memenuhi seluruh ruang) bersamaan dengan penggunaan lahan intensif lainnya (perkantoran, perdagangan, jasa, dan fasilitas kota). Pada kawasan bukan pusat kota,

penyebaran kawasan permukiman ini terlihat jelas mengikuti jaringan jalan, sehingga membentuk kantong-kantong kawasan tidak terbangun berupa kebun campuran, tegalan, dan ladang.

2. Kawasan Perkantoran

   Kawasan perkantoran pemerintah seperti instansi pemerintah sektoral (Kanwil dan Kandep) serta Perangkat Daerah, umumnya beraglomerasi di kawasan pusat kota.

3. Kawasan Perdagangan dan Jasa

   Kawasan perdagangan dan jasa terutama berlokasi di pusat kota. Penyebaran kawasan perdagangan ini tampak membentuk pola berbentuk pita *(ribbon).*

4. Fasilitas Umum

   Untuk fasilitas kota, baik fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perdagangan, lokasinya menyebar di seluruh wilayah kota, sesuai dengan lingkup pelayanannya.

Berdasarkan analisis pemanfaatan lahan di atas, nampak bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Nganjuk adalah sawah yaitu sebesar 39,87 persen dari luas wilayah keseluruhan, dan kemudian hutan sebesar 22 persen di tahun 2022. Pemanfaatan lahan sebagai sawah mendominasi 11 kecamatan dari 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk.

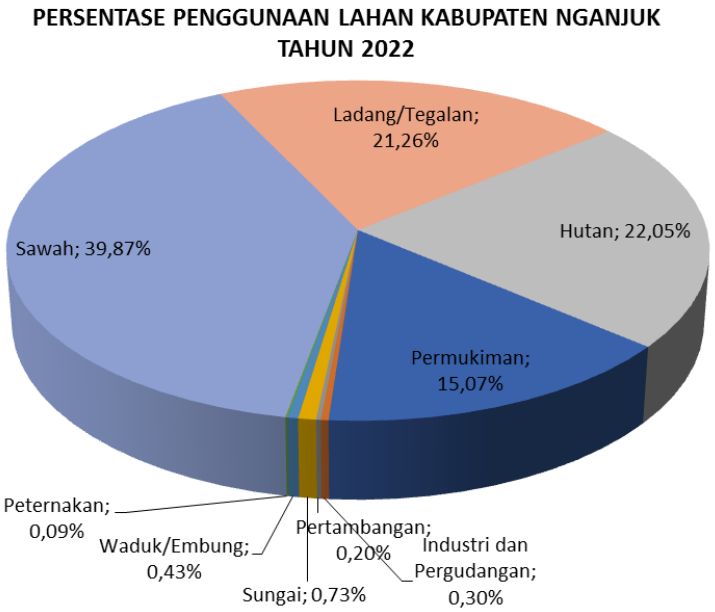
Wilayah kecamatan yang didominasi pemanfaatan lahannya oleh hutan ada 8 wilayah kecamatan, dan satu-satu kecamatan yang didominasi penggunaan lahan kering adalah Kecamatan Ngronggot.. Maka dengan analisis pemanfaatan lahan di Kabupaten Nganjuk sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pemanfaatan lahan Kabupaten Nganjuk memiliki *core competence* (unggulan) daerah sebagai daerah Pertanian dalam arti luas.

Tabel 2.6.
Tata Guna Lahan di Kabupaten Nganjuk

Penggunaan Lahan	Tahun 2018 Luas (Ha)	Tahun 2019 Luas (Ha)	Tahun 2020 Luas (Ha)	Tahun 2021 Luas (Ha)	Tahun 2022 Luas (Ha)
Permukiman	19.362,83	19.374,34	19.387,47	19.389,47	19.413,78
Industri dan Pergudangan	265,90	336,57	367,82	368,11	388,02
Pertambangan	144,23	120,08	241,39	252,46	252,46
Embung	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Sungai	941,21	941,21	941,21	941,21	941,21
Waduk/ Embung	124,88	127,78	127,78	555,78	555,78
Peternakan	72,65	96,80	97,94	97,94	112,30
Sawah	51.505,84	51.453,32	51.418,72	51.416,82	51.358,37
Ladang/ Tegalan	27.569,76	27.537,20	27.404,98	27.393,51	27.393,39
Hutan	28.834,69	28.834,69	28.834,69	28.406,69	28.406,69
TOTAL LUAS	**128.822,00**	**128.822,00**	**128.822,00**	**128.822,00**	**128.822,00**

Sumber: Perda Kabupaten Nganjuk No. 2 Tahun 2021 dan Dinas PUPR

Persentase luas lahan Kabupaten Nganjuk digambarkan dalam grafik berikut :



2.1.1.6 Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.1.6.1 Daya Dukung Penyedia Bahan Pangan

Secara umum analisis daya dukung dan daya tampung kebutuhan pangan tergantung dari fungsi atau tujuan yang akan diukur apakah menyangkut aspek ekonomi, demografi dan sebagainya. Setiap tujuan ini memiliki formulasi tersendiri karena karakteristik unit dan ukuran yang berbeda. Dalam kajian daya dukung dan daya tampung ketersediaan pangan bagi Kabupaten Nganjuk akan memfokuskan pada sektor pertanian, dimana dominansi dari kebutuhan pangan Kabupaten Nganjuk masih tergantung pada sektor pertanian tanaman pangan yakni padi, jagung, ketela pohon dan ubi rambat.

Daya dukung lahan pertanian merupakan perbandingan antara lahan yang tersedia dan jumlah petani. Untuk itu perlu diketahui berapa luas lahan rata-rata yang dibutuhkan per kepala keluarga, potensi lahan yang tersedia dan penggunaannya untuk kegiatan pertanian. Berikut ini akan disajikan perhitungan daya dukung lahan pertanian Kabupaten Nganjuk:

$$\alpha = \frac{Lp/Pd}{KFM/Pr} = \frac{122.511/1.048.799}{114/44.607,09} = 45,71$$

Kabupaten Nganjuk masuk klasifikasi mampu swasembada pangan, dikarenakan nilai α >1. Detail daripada kajian daya dukung dan daya tampung kesediaan pangan di Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Kesediaan Pangan di Kabupaten Nganjuk

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Luas Panen (Ha)	Kebutuhan Fisik Minimum (*) (Kg/Kapita/ Tahun)	Produksi (Ton)	DD-Lahan Pertanian	Status
1	Sawahan	38,67	5.802	114	45.467,19	62,37	Swasembada
2	Ngetos	37,57	4.167	114	63.719,87	66,86	Swasembada
3	Berbek	58,96	7.082	114	24.653,76	27,85	Swasembada
4	Loceret	75,32	8.669	114	12.999,84	14,05	Swasembada
5	Pace	65,71	8.812	114	36.565,92	47,46	Swasembada
6	Tanjunganom	117,01	11.968	114	26.001,92	24,11	Swasembada
7	Prambon	72,79	7.608	114	13.722,42	12,89	Swasembada
8	Ngronggot	83,04	6.216	114	62.168,08	43,12	Swasembada
9	Kertosono	56,18	3.032	114	12.350,85	6,17	Swasembada
10	Patianrowo	44,37	6.851	114	13.749,66	19,64	Swasembada
11	Baron	54,07	6.418	114	51.597,26	58,71	Swasembada
12	Gondang	55,03	9.063	114	20.224,07	31,56	Swasembada
13	Sukomoro	45,99	5.998	114	13.593,39	16,29	Swasembada
14	Nganjuk	69,01	2.420	114	13.341,06	4,13	Swasembada
15	Bagor	61,18	4.827	114	24.085,89	17,35	Swasembada
16	Wilangan	30,22	3.754	114	33.644,13	40,38	Swasembada
17	Rejoso	71,35	9.593	114	13.474,87	16,53	Swasembada
18	Ngluyu	14,16	3.668	114	11.248,90	26,16	Swasembada
19	Lengkong	33	4.359	114	39.640,67	47,21	Swasembada
20	Jatikalen	20,29	2.204	114	13.015,20	12,54	Swasembada
Jumlah Total		**1.103.92**	**122.511**	**114**	**44.607,09**	**45,71**	**Swasembada**

Sumber: Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2021

2.1.1.6.2 Daya Tampung Air Sungai

Kualitas air sungai pada tahun 2022 di Kabupaten Nganjuk untuk wilayah sungai-sungai yang ada adalah sebagai berikut.

Tabel 2.8.
Kualitas Air Sungai di Kabupaten Nganjuk

Parameter	Satuan	Lokasi Sampling						
		Sungai Widas	Sungai Lengkongwidar	Kuncir Kiri	Sungai Kedungsoko	Sungai Kuncir kanan	Sungai Klinter	Sungai Singokrano
pH	-	7,83	7,65	7,55	7,13	7,69	7,74	8,82
Suhu	°C	28,7	28,4	29,2	28,5	29,5	28,2	29,1
TSS	mg/l	22,3	7,80	12,7	29,2	38,1	14,4	4,10
TDS	mg/l	327	272	93,2	240	214	392	55,6
BOD	mg/l	19,3	<1	29,7	<1	<1	<1	2,93
COD	mg/l	68,4	<1,49	76,1	<1,49	<1,49	<1,49	8,81
DO	mg/l	4,1	4,4	5	4,3	4,5	4,4	4,2
Klorin Bebas	mg/l	<0,01	0,02	<0,001	0,2	0,21	0,05	0,01
Minyak dan Lemak	µg/L	<0,17	<0,17	<0,17	<0,17	<0,17	<0,17	0,25

Parameter	Satuan	Lokasi Sampling						
		Sungai Widas	Sungai Lengkong widar	Kuncir Kiri	Sungai Kedungsoko	Sungai Kuncir kanan	Sungai Klinter	Sungai Singokrano
Detergen	µg/L	<0,02	<0,02	<0,02	<10	<0,02	<0,02	<0,10
Fecal Coliform	MPN/ 100 ml	920	460	2800	740	720	940	790
Sianida	mg/l	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
H2S	mg/l	<0,002	<0,003	0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, 2022

Berdasarkan hasil kualitas air sungai diatas, menunjukkan sungai yang memiliki derajat keasaman baik/netral yaitu Sungai Widas, Sungai Lengkong Widar, Sungai kuncir kanan dan Sungai Klinter karena memiliki nilai mendekati 8 sedangkan sungai yang memiliki pH basa di Kabupaten Nganjuk adalah sungai Singokrano dengan nilai pH 8,82.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Lampiran I adalah 30 mg/L, hasil pengukuran kualitas air limbah sungai untuk parameter TSS menunjukkan nilai yang melebihi baku mutu di 1 lokasi yaitu Sungai Kuncir Kanan dengan nilai 38,1. Sedangkan Nilai standar baku mutu parameter TDS kualitas air bersih berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 adalah 1.000 mg/L, hasil pengukuran air sungai untuk parameter TDS menunjukkan nilai jauh dibawah baku mutu.

Nilai standar baku mutu BOD berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur untuk baku mutu air kelas II yaitu 3 mg/L. Hasil pengukuran kualitas air sungai untuk parameter BOD menunjukkan nilai nilai yang belum memenuhi baku mutu di 2 lokasi yaitu Sungai Widas dengan nilai 19,3 mg/L dan Sungai Kuncir Kiri dengan nilai 29,7 mg/L.

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa pada parameter *Chemical Oxygen Demand* (COD) yang mengukur kandungan oksigen untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air,

maka kualitas air sungai pada beberapa segmen di Kabupaten Nganjuk terdapat 2 lokasi yang melebihi baku mutu sebesar 25 mg/l, yaitu Sungai Widas dan Kuncir Kiri. Dikarenakan masih terdapat nilai yang dibawah baku mutu maka perlu dilakukan upaya tambahan untuk mengembalikan kualitas air tersebut.

2.1.2. Demografi

Penduduk Kabupaten Nganjuk pada tahun 2022 sebesar 1.120.637 jiwa, dengan perincian 563.434 jiwa penduduk laki – laki dan 557.203 jiwa penduduk perempuan. Dalam lima tahun terakhir ini, jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk bertambah terus, dari 1.051.900 jiwa pada tahun 2018 menjadi 1.117.033 pada tahun 2022, yang berarti pertumbuhan Penduduk selama 5 tahun rata-rata sebesar 0,61 persen sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9.
Jumlah Penduduk Kabupaten Nganjuk

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Tingkat Pertumbuhan Penduduk (%)
2018	523.006	528.894	1.051.900	0,34 %
2019	524.282	530.329	1.054.611	0,49 %
2020	555.280	548.622	1.103.902	1,05 %
2021	558.087	551.596	1.109.683	0,52%
2022	561.677	555.356	1.117.033	0,66%

Sumber: Susenas dan Sensus Penduduk BPS

Tabel 2.10.
Jumlah Penyebaran Penduduk per Kecamatan

Kecamatan	Luas wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sawahan	111,38	37.203	37.293	38.67	38.831	39.05
Ngetos	78,41	34.888	34.929	37.574	37.824	38.13
Berbek	57,48	55.101	55.183	58.955	59.324	59.78
Loceret	68,65	70.469	70.551	75.315	75.759	76.31
P a c e	51,05	59.549	59.523	65.706	66.215	66.82
Tanjunganom	75,54	113.757	114.22	117.014	117.538	118.23

Kecamatan	Luas wilayah (km^2)	Jumlah Penduduk Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Prambon	44,94	71.33	71.571	72.788	73.015	73.34
Ngronggot	52,94	79.006	79.378	83.038	83.622	84.33
Kertosono	24,79	53.314	53.342	56.182	56.407	56.71
Patianrowo	35,46	42.17	42.263	44.37	44.6	44.89
Baron	40,04	49.609	49.723	54.068	540.538	55.09
Gondang	114,18	51.008	51.049	55.026	55.384	88.82
Sukomoro	37,52	44.179	44.442	45.988	46.313	46.71
Nganjuk	23,48	68.889	69.155	69.011	69.129	69.34
Bagor	54,34	58.975	59.161	61.181	61.459	61.82
Wilangan	51,43	27.472	27.499	30.222	30.48	30.78
Rejoso	156,82	68.832	69.057	71.347	71.673	72.1
Ngluyu	89,77	13.838	13.834	14.16	14.168	14.2
Lengkong	71,99	32.187	32.258	32.998	33.086	33.22
Jatikalen	48,71	20.124	20.18	20.289	20.318	20.38

Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk, 2023

Dilihat dari data sebaran penduduk di 20 Kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Tanjunganom, Ngronggot dan Loceret, sedangkan jumlah penduduk yang terkecil berada di Kecamatan Ngluyu, Jatikalen dan Wilangan. Laju pertumbuhan penduduk di setiap Kecamatan tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11.
Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sawahan	0,28	0,24	0,71	1,74	0,55
Ngetos	0,15	0,12	0,97	2,50	0,80
Berbek	0,19	0,15	0,93	0,34	0,77
Loceret	0,15	0,12	0,89	0,54	0,73
Pace	0,00	-0,04	1,09	0,61	0,91
Tanjunganom	0,45	0,41	0,75	0,57	0,59
Prambon	0,37	0,34	0,61	0,93	0,45
Ngronggot	0,51	0,47	1,01	1,90	0,84
Kertosono	0,09	0,05	0,70	-0,28	0,54

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Patianrowo	0,26	0,22	0,82	-0,02	0,66
Baron	0,27	0,23	1,18	0,62	1,01
Gondang	0,12	0,08	0,96	0,27	0,79
Sukomoro	0,63	0,60	1,02	-0,31	0,85
Nganjuk	0,42	0,39	0,46	-0,59	0,31
Bagor	0,35	0,32	0,75	-0,50	0,59
Wilangan	0,13	0,10	1,17	0,96	0,99
Rejoso	0,37	0,33	0,76	0,49	0,60
Ngluyu	0,01	-0,03	0,34	0,80	0,19
Lengkong	0,26	0,22	0,56	-0,36	0,40
Jatikalen	0,30	0,28	0,43	-0,65	0,14
Jumlah	**0,30**	**0,26**	**0,82**	**0,50**	**0,66**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

3 (tiga) wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi berturut-turut adalah Kecamatan Nganjuk, Kertosono, dan Prambon. Sedangkan 3 (tiga) wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah berturut-turut adalah Ngluyu, Sawahan, dan Lengkong. Data kepadatan penduduk per Kecamatan dapat dilihat di berikut ini:

Tabel 2.12.
Kepadatan penduduk per Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sawahan	111,38	321,03	321,81	333,68	335,07	336,92
Ngetos	78,41	579,42	580,10	624,05	628,20	633,23
Berbek	57,48	1.140,81	1.142,51	1220,60	1228,24	1237,64
Loceret	68,65	1.025,87	1.027,06	1096,29	1102,75	1110,76
P a c e	51,05	1.228,90	1.228,37	1355,88	1366,38	1378,85
Tanjunganom	75,54	1.605,78	1.612,32	1651,81	1659,20	1668,94
Prambon	44,94	1.773,08	1.738,93	1768,42	1773,93	1781,90
Ngronggot	52,94	1.491,10	1.498,12	1567,05	1578,07	1591,38
Kertosono	24,79	2.351,22	2.352,46	2477,16	2487,08	2500,53
Patianrowo	35,46	1.184,78	1.187,40	1246,70	1253,16	1261,39
Baron	40,04	1.348,00	1.351,10	1469,24	1482,01	1496,93

Kecamatan	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)				
		2018	2019	2020	2021	2022
Gondang	114,18	531,65	532,08	573,55	577,28	581,83
Sukomoro	37,52	1.248,42	1.255,85	1299,46	1308,65	1319,72
Nganjuk	23,48	3.050,08	3.061,85	3054,94	3060,16	3069,59
Bagor	54,34	1.152,91	1.156,55	1196,11	1201,54	1208,68
Wilangan	51,43	542,51	543,04	596,80	601,90	607,88
Rejoso	156,82	453,85	455,33	470,44	472,59	475,41
Ngluyu	89,77	160,63	160,58	164,36	164,46	164,77
Lengkong	71,99	369,23	370,05	378,55	379,56	381,08
Jatikalen	48,71	478,74	480,08	482,61	483,30	484,66
Jumlah	**1.288,22**	**859,16**	**861,38**	**901,64**	**906,36**	**912,36**

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

Penduduk di Kabupaten Nganjuk mayoritas memeluk agama Islam. Pada tahun 2021 persentase jumlah penduduk yang beragama Islam sebesar 99 %. Islam menjadi agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Nganjuk. Jumlah pemeluk agama berikutnya adalah Kristen Protestan dengan persentase jumlah pemeluk sebesar 0.6%. persentase jumlah penduduk berikutnya adalah beragama Kristen Katolik sebesar 0,2 %, sisanya adalah penduduk yang memeluk agama Hindu 0,03%, agama Budha sebesar 0,02% dan sisanya adalah Kong Hu Cu 0,001% dan Lain-lain kepercayaan sebesar 0,017%. Komposisi Ini menunjukkan bahwa agama Islam menjadi agama mayoritas dan penentu bagi stabilitas sosial masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Data jumlah pemeluk agama bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.13.
Penganut Agama Per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama (Jiwa)											
	Islam		Kristen		Katolik		Hindu		Buddha		Lainnya	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Sawahan	39.41	39.43	156	156	17	15	-	-	-	-	3	3
Ngetos	38.865	39.082	33	28	9	10	-	1	-	-	2	2
Berbek	60.423	60.518	128	133	107	108	5	4	-	-	5	4

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama (Jiwa)											
	Islam		Kristen		Katolik		Hindu		Buddha		Lainnya	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Loceret	76.174	76.375	388	392	362	360	266	264	9	9	19	20
Pace	67.648	67.716	333	336	51	52	1	1	2	2	14	13
Tanjunganom	119.278	119.374	539	497	330	322	5	5	12	11	20	19
Prambon	73.933	74.128	158	150	102	94	-	2	1	1	8	6
Ngronggot	85.637	85.753	176	166	34	33	4	2	2	5	17	16
Kertosono	54.778	54.669	1.561	1.523	381	376	13	13	58	56	4	4
Patianrowo	45.405	45.336	296	273	35	34	4	4	1	1	3	2
Baron	55.057	55.216	248	242	82	79	-	-	1	-	4	3
Gondang	56.127	56.316	239	246	39	35	3	3	5	5	1	1
Sukomoro	47.378	47.583	199	197	22	25	3	3	7	7	3	3
Nganjuk	67.441	67.301	1.452	1.416	824	803	21	21	115	113	14	13
Bagor	62.66	62.565	307	293	101	98	1	1	3	4	1	-
Wilangan	31.121	31.123	41	41	35	34	-	-	2	2	3	-
Rejoso	73.196	73.196	209	201	48	44	1	1	4	5	4	4
Ngluyu	14.37	14.394	21	19	5	5	2	2	-	-	1	1
Lengkong	33.734	33.777	139	143	22	27	1	2	3	3	4	4
Jatikalen	20.964	20.998	34	35	7	7	-	-	-	-	2	2
Jumlah	**1.123.599**	**1,124,896**	**6.657**	**6,487**	**2.613**	**2,561**	**330**	**329**	**225**	**224**	**132**	**120**

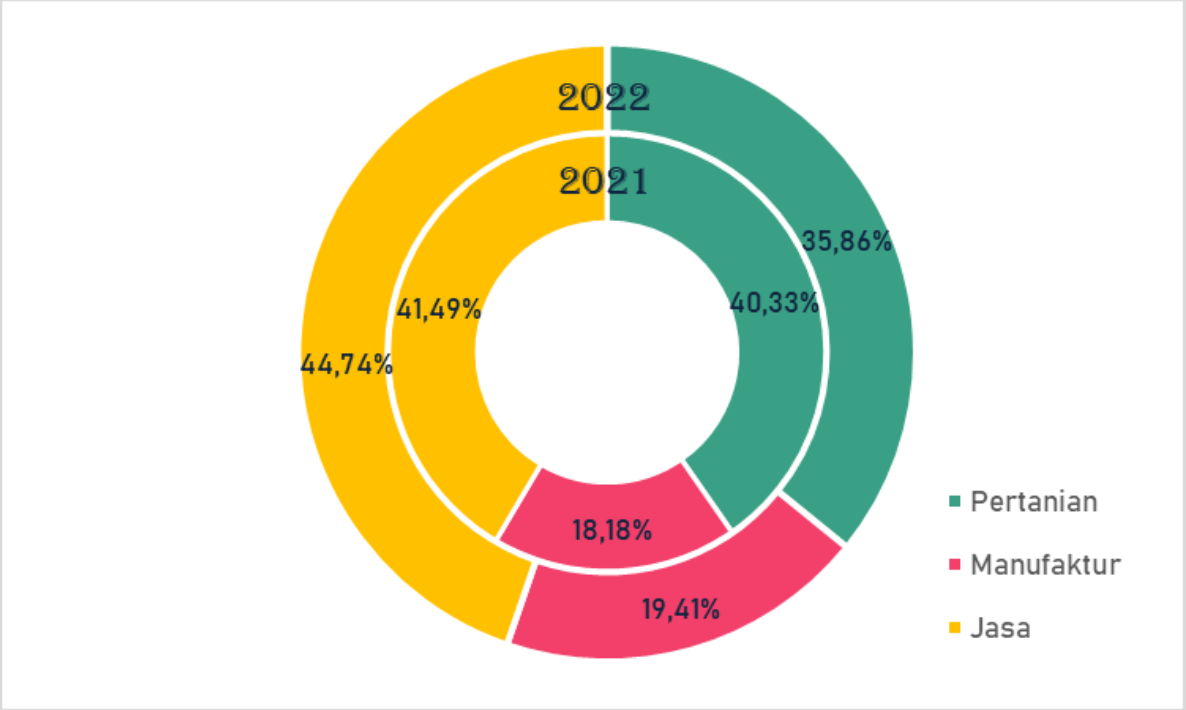
Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

Pekerjaan utama yang paling banyak ditekuni oleh penduduk Nganjuk pada Tahun 2022 adalah lapangan usaha jasa sebesar 44,74 persen, kemudian disusul oleh lapangan usaha pertanian (35,86 persen) dan lapangan usaha manufaktur (19,41 persen). Kondisi ini cukup berbeda dengan lapangan usaha utama penduduk Nganjuk pada tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2021 lapangan usaha jasa dan pertanian menjadi lapangan usaha hamper sama persentasenya. Pada Tahun 2022, penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja di lapangan usaha pertanian mengalami penurunan, yaitu dari 40,33 persen pada tahun 2021 menjadi 35,86 persen pada tahun 2022. Sebaliknya, lapangan usaha jasa mengalami peningkatan dari 41,49 persen pada tahun 2021 menjadi 44,74 persen di tahun 2022. Penduduk yang bekerja di lapangan usaha

manufaktur juga mengalami sedikit penambahan dari 18,18 persen pada 2021 menjadi 19,41 persen pada 2022.

Gambar 2.2

Penduduk Usia 15 Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 (Persen)

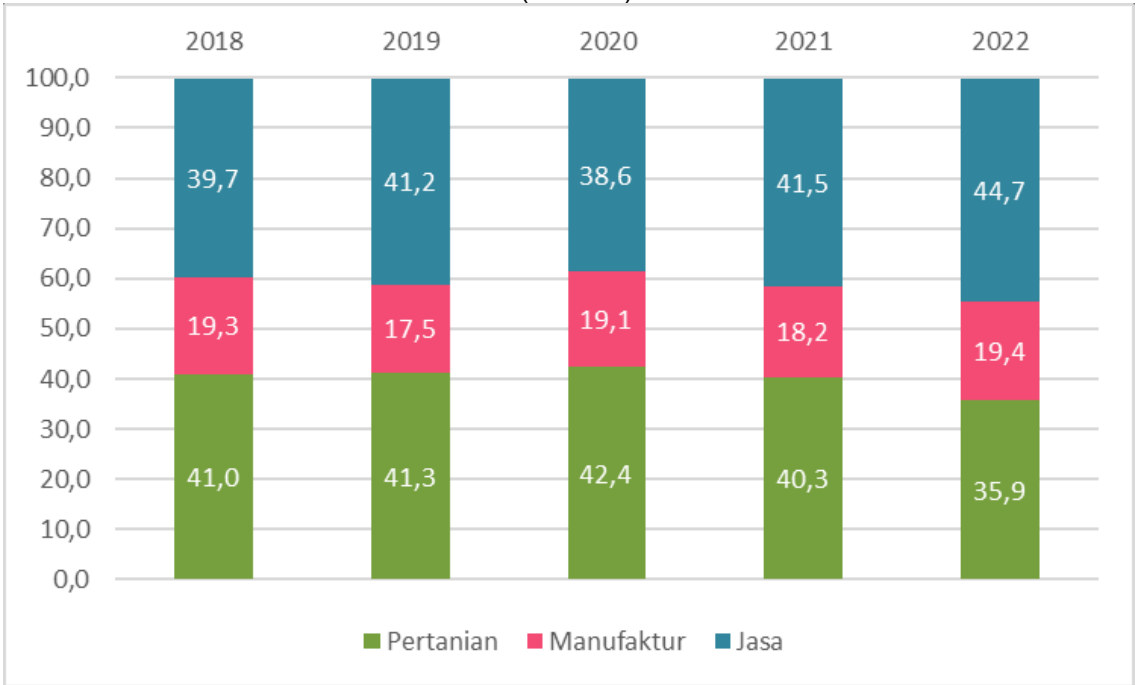


Sumber : Sakernas BPS, 2022

Pada tahun 2022, penduduk usia kerja yang bekerja di lapangan usaha jasa lebih banyak dibandingkan penduduk yang bekerja di lapangan usaha pertanian. Dalam dua tahun terakhir, sector pertanian terus berkurang sedangkan sector jasa semakin bertambah. Dapat dikatakan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Nganjuk sudah mulai banyak perubahan, dimana sektor pertanian yang tadinya mendominasi penyerapan tenaga kerja, saat ini mulai digantikan oleh sector jasa. Perlahan tapi pasti penyerapan tenaga kerja di sector manufaktur mulai tumbuh, seiring dengan semakin tumbuhnya sektor perindustrian diharapkan pasokan tenaga kerja yang melimpah dapat terserap semua. Selama tiga tahun terakhir yakni 2018-2020, jumlah pekerja di sektor pertanian masih bertahan

dan tidak mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2022, sektor pertanian justru mengalami penurunan sekitar 5 persen. Sedangkan sector manufaktur baru bertambah sekitar 1 persen. Artinya, penambahan tenaga kerja di sector manufaktur belum sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang keluar dari sector pertanian. Penduduk yang bekerja di sektor jasa mengalami peningkatan sekitar 3 persen. Adapun sektor manufaktur juga cenderung menurun. Sector jasa terdiri dari kegiatan perdagangan, transportasi pergudangan dan komunikasi, keuangan, jasa kemasyarakatan dan jasa lainnya.

Gambar 2.3
Penduduk Usia 15 Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2022
(Persen)

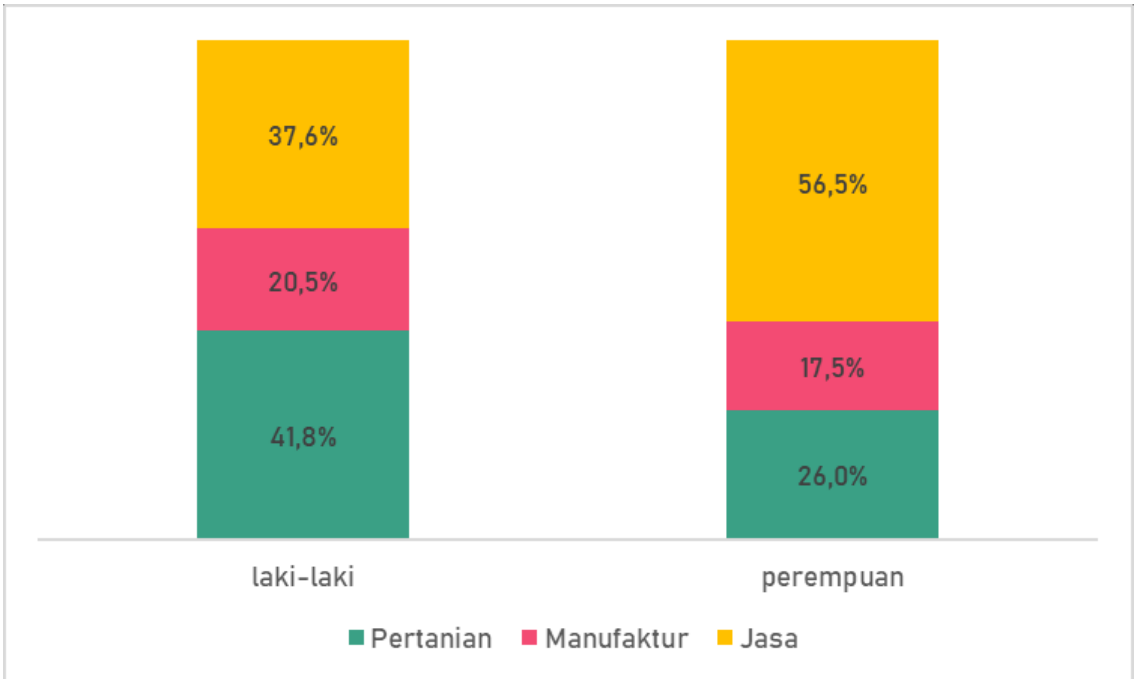


Sumber:BPS Kabupaten Nganjuk, Sakernas 2018-2022

Jika ditinjau menurut jenis kelamin, 41,8 persen penduduk laki-laki bekerja di sektor pertanian yang sangat rentan terhadap gejolak iklim, sementara persentase perempuan pada sektor ini sebesar 26 persen. Ternyata, perempuan Kabupaten Nganjuk lebih senang bekerja di sektor jasa dengan persentase 56,5 persen

sedangkan untuk laki-laki pada sektor ini sebesar 37,6 persen. Urutan terakhir lapangan pekerjaan utama penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Nganjuk adalah sektor manufaktur dengan persentase berturut-turut sebesar 20,5 dan 17,5 persen. Melihat persentase tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tahun 2022 ada sektor pekerjaan yang mendominasi gender tertentu. Dimana laki-laki mendominasi sektor pertanian sedangkan perempuan di sektor jasa. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa relokasi pabrik-pabrik dari kabupaten/kota konsentrasi industri ke Kabupaten Nganjuk sedikit banyak membawa pengaruh pada pekerjaan utama yang ditekuni penduduk.

Gambar 2.4
Penduduk Usia 15 Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 (Persen)



Sumber:BPS Kabupaten Nganjuk, 2022

2.1.3.1. Potensi Pengembangan Wilayah

Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan dalam mendorong pertumbuhan wilayah dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, meliputi :

a. menetapkan sistem pusat pelayanan kegiatan skala wilayah kabupaten, skala kawasan dan skala lingkungan;
b. meningkatkan fungsi pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan dalam mendorong pengembangan potensi ekonomi unggulan; dan
c. menyediakan pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan dengan sekurang-kurangnya seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat

Strategi untuk penyediaan prasarana yang layak dan terpadu dalam mendukung sistem perkotaan dan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi :

a. mengembangkan dan membangun jaringan jalan dalam menghubungkan pusat permukiman yang ada;
b. mengembangkan ketersediaan energi listrik dan pengembangan sistem jaringan transmisi listrik;
c. mengembangkan jaringan pelayanan telekomunikasi;
d. mengembangkan ketersediaan jaringan sumber daya air;
e. mengembangkan cakupan pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
f. mengembangkan pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan pengendalian dampak lingkungan.

Strategi untuk pemantapan fungsi lindung dalam meningkatkan kebertahanan dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam, meliputi:

a. memantapkan batas kawasan lindung;
b. meningkatkan fungsi lindung sesuai dengan fungsi masing-masing kawasan yang berkelanjutan;

c. meningkatkan fungsi lindung melalui alih fungsi lahan yang mempunyai kemampuan untuk konservasi tanah dan air dalam mendukung kebertahanan kualitas lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim global;
d. meningkatkan kualitas udara melalui program penghijauan, reboisasi dan penanaman dalam skala besar,
e. meningkatkan ketersediaan air tanah dan air permukaan melalui pengelolaan tanah dan sistem drainase; dan
f. meningkatan kelestarian kawasan hutan sebagai fungsi lindung untuk menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan hidup.

Strategi untuk penetapan dan pengaturan pengelolaan kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi :

a. mengatur pola pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produktivitas lahan pada peruntukan pertanian perdagangan, jasa, industri dsan pariwisata;
b. mengendalikan perubahan alih fungsi lahan untuk mendukung pengembangan peruntukan pertanian, perdagangan dan jasa, industri dan pariwisata dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
c. mengembangkan dan mengendalikan pertumbuhan permukiman yang aman, nyaman, serta seimbang dengan mempertimbangkan kemampuan daya dukung lingkungan.

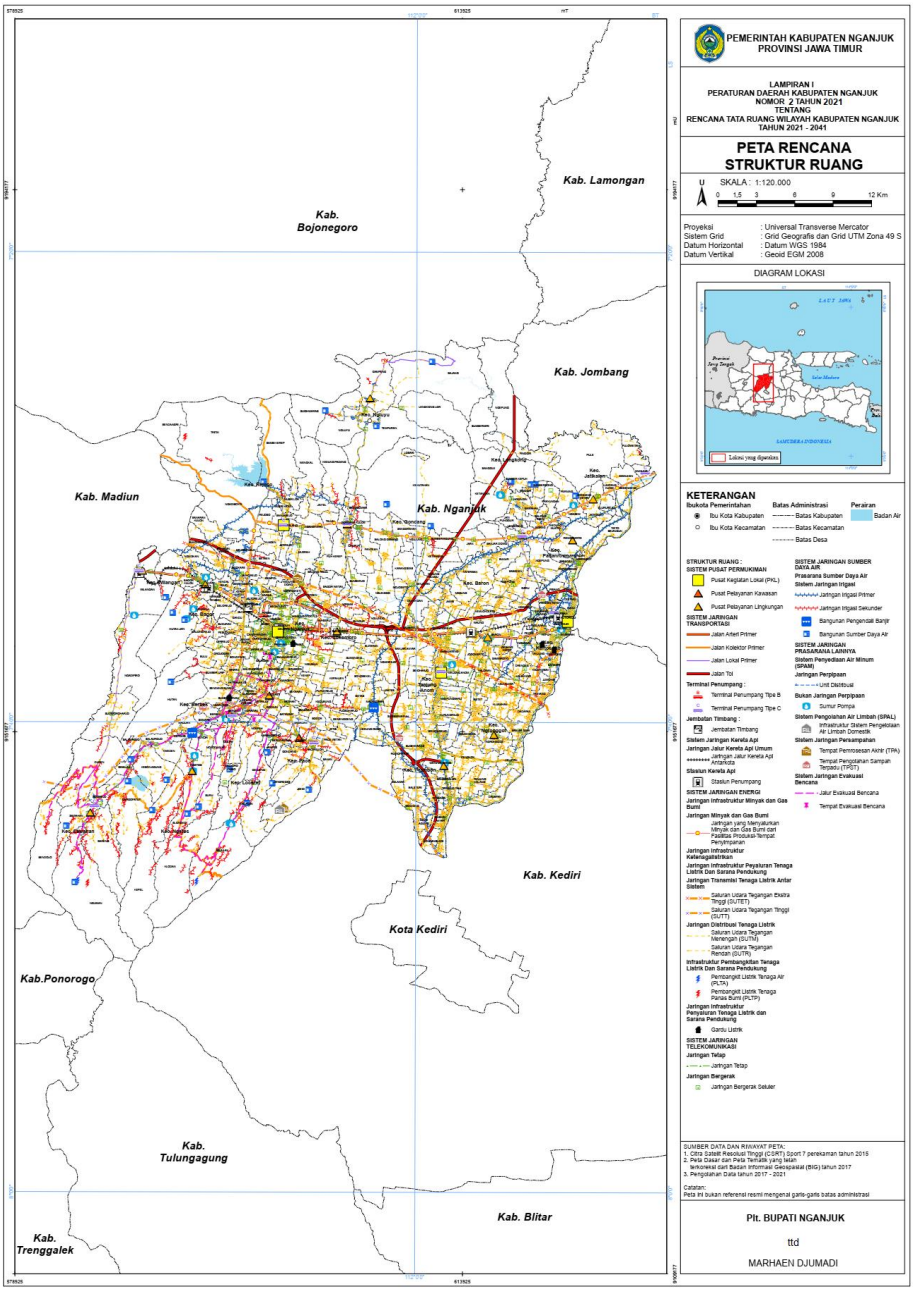
Strategi untuk mengidentifikasi sumber-sumber ekonomi potensial pada kawasan srategis meliputi :

a. mengembangkan potensi sumber-sumber ekonomi dalam rangka mendorong pengembangan kawasan agropolitan;
b. mengembangkan potensi sumber-sumber ekonomi dalam rangka mendorong pengembangan kawasan minapolitan;
c. mengembangkan potensi sumber-sumber ekonomi dalam rangka mendorong pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh;

d. mengembangkan potensi pariwisata daerah dengan meningkatkan infrastruktur pendukung pariwisata; dan
e. mengembangkan dan pengaturan serta pengendalian peruntukan kawasan industri terhadap optimalisasi dan pengembangan sistem jaringan transportasi

Gambar 2.5

Peta Rencana Struktur Ruang



Sumber : Perda RTRW Nomor 2 Tahun 2021

Sistem Jaringan Jalan

sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas :

a. jalan umum;
b. jalan tol;
c. terminal penumpang; dan
d. jembatan timbang

Jalan umum terdiri atas :

a. jalan arteri primer terdiri atas:
    1. ruas jalan batas Kabupaten Madiun-Batas Kota Nganjuk;
    2. jalan Gatot Subroto;
    3. jalan Lingkar Nganjuk;
    4. ruas jalan batas Kota Nganjuk-Kertosono; dan
    5. ruas jalan Kertosono-Batas Kabupaten Jombang.
b. jalan kolektor primer terdiri atas :
    1. ruas jalan Batas Kabupaten Nganjuk (Simpang 4 Candi) – Batas Kabupaten Kediri;
    2. ruas jalan Guyangan – Simpang Empat Candi;
    3. ruas jalan Batas Kabupaten Bojonegoro (Pajeng) – Nganjuk (Guyangan);
    4. ruas batas kabupaten Kediri – Magersari;
    5. ruas jalan Magersari – Pogoh;
    6. ruas jalan Pogoh - Selopuro;
    7. ruas jalan Selopuro – Kepel;
    8. ruas jalan Kepel - Bulak;
    9. ruas jalan Bulak– Sidorejo;
    10. ruas jalan Sidorejo – Proliman;
    11. ruas jalan Proliman - Bendolo – Bendolo (Batas Kab.Madiun).
    12. ruas jalan Jetis – Watudandang;
    13. ruas jalan Tanjungtani-Gondanglegi;
    14. ruas jalan Warujayeng – Jetis; dan
    15. ruas jalan Waung – Warujayeng.

16. ruas jalan Gondang Kulon-Ngujung;
17. ruas jalan Ngangkatan-Gondang Kulon;
18. ruas jalan Ngujung – Lengkong;
19. ruas jalan Lengkong-Ngasem;
20. ruas jalan Ngasem-Munung;
21. ruas jalan Kemaduh-Lengkong;
22. ruas jalan Banaran-Kemaduh;
23. jalan Gatot Subroto (Kecamatan Kertosono);
24. jalan A Yani (Kecamatan Kertosono);
25. ruas jalan Rejoso – Ngangkatan;
26. ruas jalan Tamanan - Rondokuning - Klangon (batas Kabupaten Madiun).
27. ruas batas kabupaten Kediri – Magersari.
28. ruas jalan Magersari – Pogoh;
29. ruas jalan Pogoh - Selopuro;
30. ruas jalan Selopuro – Kepel;
31. ruas jalan Kepel - Bulak;
32. ruas jalan Bulak– Sidorejo;
33. ruas jalan Sidorejo – Proliman;dan
34. ruas jalan Proliman - Bendolo – Bendolo (Batas Kab.Madiun).

c. jalan lokal primer terdiri atas :
1. ruas jalan Banjarsari – Kurungrejo;
2. ruas jalan Banjarsari –Kelutan;
3. ruas jalan Baron – Kwajon;
4. ruas jalan Berbek – Kuncir;
5. ruas jalan Berbek – Nglajer;
6. ruas jalan Cerme – Berbek;
7. ruas jalan Gajahbelur – Jetis;
8. ruas jalan Gareman-Babadan;
9. ruas jalan Gebangkerep-Kaloran;
10. ruas jalan Gondangkulon-Ngluyu;
11. ruas jalan Jekek – Kemaduh;

12. ruas jalan Kandeg – Jekek;
13. ruas jalan Kandeg-Kandangan;
14. ruas jalan Kudu-Tambak;
15. ruas jalan Kuncir – Sidorejo;
16. ruas jalan Loceret-Berbek;
17. ruas jalan Mungkung – Berbek;
18. ruas jalan Ngluyu – Bajang;
19. ruas jalan Ngrami – Gondangkulon;
20. ruas jalan Ngrombot – Tirobinangun;
21. ruas jalan Patihan-Gajah Belur;
22. ruas jalan Semanding – Berbek;
23. ruas jalan Sidorejo-Ngliman;
24. ruas jalan Siwalan – Sawahan;
25. ruas jalan Tirtobinangun – Begendeng;
26. ruas jalan Trayang –Kelutan;
27. ruas jalan Warujayeng – Jetis;
28. ruas jalan Warujayeng – Trayang;
29. ruas jalan Watudandang-Kelutan;
30. ruas jalan Wilangan - Bomo (Proliman);
31. ruas jalan Baron – Gareman;
32. ruas jalan Gajahbelor – Watudandang;
33. Jalan Supriadi;
34. ruas jalan Kandeg-Demangan;
35. ruas jalan Kandeg-Jekek;
36. ruas jalan Kedunglo –Tanjungtani;
37. ruas jalan Kelutan – Jabon;
38. ruas jalan Kudu – Ngrombot;
39. ruas jalan Kuncir – Pogoh;
40. ruas jalan Loceret-Ngepeh;
41. ruas jalan Mangunsari – Bajulan;
42. ruas jalan Ngepung-Babadan;
43. ruas jalan Ngrajeg – Ngujung;

44. ruas jalan Sekaran-Patihan;
45. ruas jalan Tamanan – Sambikerep;
46. ruas jalan Tanjungrejo-Sekaran;
47. ruas jalan Dukuhan-Tambak;
48. ruas jalan Bukur-Pakucen; dan
49. ruas jalan Kedung Ingas-Kedung Mlaten.

Jalan tol, terdiri atas:

a. ruas jalan Tol Ngawi-Kertosono;
b. ruas jalan Kertosono-Kediri; dan
c. ruas jalan Kertosono- Babat.

Terminal penumpang terdiri atas :

a. Terminal penumpang tipe B Anjuk Ladang di Kecamatan Nganjuk.
b. Terminal penumpang tipe C terdapat di Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Ketosono, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Pace, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Nganjuk,

Jembatan timbang, terdapat di Kecamatan Bagor.

Sistem Jaringan Kereta Api

Sistem jaringan kereta api terdiri atas:

a. jaringan jalur kereta api; dan
b. stasiun kereta api; dan

Jaringan jalur kereta api berupa jaringan jalur kereta api umum yaitu jaringan jalur kereta api antarkota jalur ganda Surabaya-Jember-Banyuwangi dan Bangil-Malang-Blitar-Kertosono yang melintasi di Kecamatan Wilangan-Kecamatan Bagor-Kecamatan Nganjuk-Kecamatan Sukomoro-Kecamatan Tanjunganom -Kecamatan Baron-Kecamatan Kertosono.

Stasiun kereta api berupa stasiun penumpang terdapat di Kecamatan Nganjuk, di perbatasan Kecamatan Baron dan Kecamatan Tanjunganom; Kecamatan Kertosono, Kecamatan Bagor, Kecamatan Sukomoro dan di Kecamatan Wilangan.

Sistem Jaringan energi

Sistem jaringan energi meliputi :

a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan yaitu yaitu jalur minyak dan gas bumi yang melalui Kecamatan Kertosono-Kecamatan Baron-Kecamatan Tanjunganom-Kecamatan Sukomoro-Kecamatan Nganjuk-Kecamatan Bagor-Kecamatan Wilangan-Kecamatan Rejoso-Kecamatan Gondang-Kecamatan Lengkong-Kecamatan Jatikalen

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri atas :

a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung, terdiri atas :
    1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terdapat di Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Loceret.
    2. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi/Geothermal (PLTP) terdapat di Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Rejoso.
b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, terdiri atas :
    1. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem terdiri atas :
        a) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) terdapat di Kecamatan Ngronggot Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Bagor dan Kecamatan Wilangan; dan
        b) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) terdapat di Kecamatan Prambon, Kecamatan Pace, Kecamatan Locoret, Kecamatan Berbek dan Kecamatan Sawahan.
    2. jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri atas :
        a) Saluran Udara Tengangan Menengah (SUTM) terdapat di seluruh kecamatan; dan

b) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terdapat di seluruh kecamatan.

3. gardu induk terdapat di Kecamatan Berbek, Kecamatan Kertosono dan Kecamatan Nganjuk.

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

(1) Sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana sumber daya air meliputi:
   a. sistem jaringan irigasi;
   b. sistem pengendalian banjir; dan
   c. bangunan sumber daya air.

(2) Sistem jaringan terdiri atas :
   a. jaringan irigasi primer terdiri atas :
      1. saluran primer Widas Utara di Daerah Irigasi (D.I) Waduk Bening;
      2. saluran primer Warujayeng-Kertosono (W-K) di Daerah Irigasi (D.I) Mrican Kiri;
      3. saluran primer Ngudikan Kiri dan Ngudikan Kanan di Daerah Irigasi (D.I) Waduk Bening; dan
      4. saluran primer Bulakmojo di Daerah Irigasi (D.I) Bulakmojo.
   b. jaringan irigasi sekunder dan tersier tersebar di seluruh kecamatan.

(3) sistem pengendali banjir berupa bangunan pengendali banjir di Bendungan Semantok Kecamatan Rejoso, Bendungan Margopatut Kecamatan Sawahan, Dam Kuncir Kecamatan Ngetos dan Dam Malangsari Kecamatan Tanjunganom.

(4) Bangunan sumber daya terdiri atas :
   a. bendungan, terdiri atas :
      1. bendungan Semantok di Kecamatan Rejoso; dan
      2. bendungan Margopatut di Kecamatan Sawahan.
   b. embung terdiri atas :

1. embung Kulak Secang, embung Gondang (Pojok Dua) dan embung Joho, di Kecamatan Pace;
2. embung Oro-oro Ombo, embung Suru dan embung Sekarlangit di Kecamatan Ngetos;
3. embung Bajulan di Kecamatan Loceret;
4. embung Estu Mulyo, embung Suwaru dan embung Klonggean di Kecamatan Sawahan.
5. embung Tempuran dan embung Bajang di Kecamatan Ngluyu;
6. embung Bangle di Kecamatan Lengkong; dan
7. embung Sumberurip di Kecamatan Berbek.

c. waduk, terdiri atas:
1. waduk Mbah Irun atau Puhsalak, waduk Sumber Suko di Kecamatan Bagor;
2. waduk Sumberkepuh, waduk Sumbersono dan waduk Logawe di Kecamatan Lengkong;
3. waduk Kedungsengon dan waduk Sumberagung di Kecamatan Gondang;
4. waduk Perning di Kecamatan Jatikalen; dan
5. waduk Manggarejo di Kecamatan Wilangan

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
c. sistem jaringan persampahan; dan
d. sistem jaringan evakuasi bencana.

(2) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi Sistem Penyediaan Air Minum regional lintas kabupaten/kota dan Sistem Penyediaan Air Minum dalam kabupaten.
a. Sistem Penyediaan Air Minum regional lintas kabupaten/kota terdiri atas :

1. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Klaster Besar merupakan SPAM Regional Lintas Tengah memanfaatkan Sungai Brantas meliputi Kabupaten/Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang;
2. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Klaster Kecil terdiri atas :
   a) Kabupaten Madiun - Kabupaten Nganjuk; dan
   b) Kabupaten Kediri - Kabupaten Nganjuk - Kabupaten Jombang.

b. Sistem Penyediaan Air Minum dalam kabupaten terdiri atas :
   a. jaringan perpipaan meliputi :
      1. unit air baku terdapat di Kecamatan Wilangan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace, Kecamatan Loceret, Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Nganjuk;
      2. unit produksi terdapat di Kecamatan Wilangan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace, Kecamatan Loceret, Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Nganjuk;
      3. unit distribusi terdapat di Kecamatan Wilangan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace, Kecamatan Loceret, Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Nganjuk; dan
      4. unit pelayanan terdapat di Kecamatan Wilangan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan

Rejoso, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Pace, Kecamatan Loceret, Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Nganjuk.

b. bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa terdapat di Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Berbek, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Baron, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Bagor, Kecamatan Wilangan, Kecamatan Jatikalen dan Kecamatan Lengkong.

(3) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) , berupa sistem pengelolaan air limbah domestik yaitu Intalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) terdapat di Kecamatan Pace.

(4) Sistem jaringan persampahan terdiri atas :

a. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) terdapat di Kecamatan Prambon.

b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terdapat di Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Pace, Kecamatan Berbek dan Kecamatan Kertosono

(5) Sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:

a. jalur evakuasi bencana banjir dari titik lokasi banjir melalui jalan utama menuju ke tempat evakuasi bencana;

b. jalurevakuasi bencana bahaya cuaca ekstrim terdiri atas :

1. jalur evakusai bencana puting beliung dari titik lokasi puting beliung melalui jalan utama menuju ke tempat evakuasi bencana;

2. jalur evakuasi bencana angin dari titik lokasi angin melalui jalan utama menuju ke tempat evakuasi bencana;

c. jalur evakusai bencana longsor dari titik lokasi longsor melalui jalan utama menuju ke tempat evakuasi bencana;

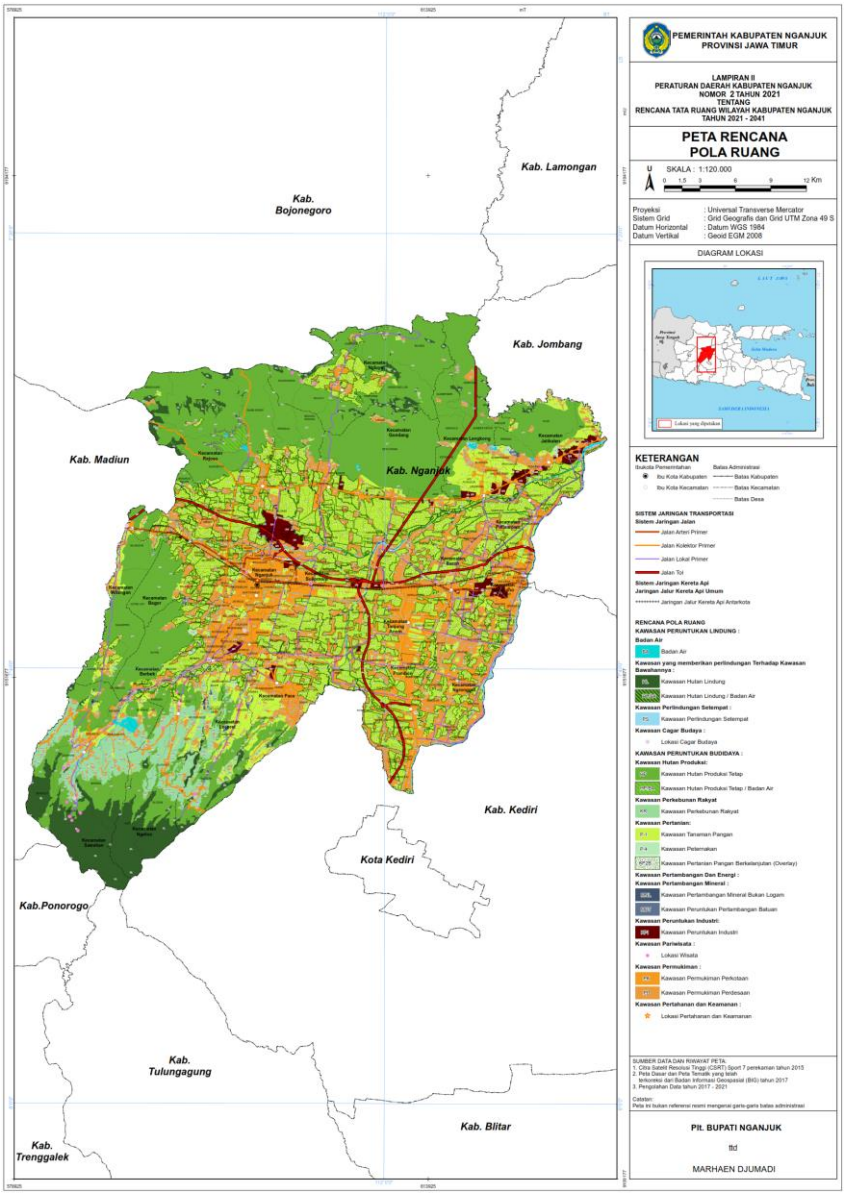
d. jalur evakuasi bahaya bencana leletusan gunung berapi dari titik lokasi melalui jalan utamamenuju ke tempat evakuasi bencana

e. tempat evakuasi bencana sebagimana dimaksud pada huruf a, b dan c terdapat di Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Loceret, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Pace dan Kecamatan Prambon; dan

f. tempat evakuasi bencana sebagaimana di tertulis pada huruf d terdapat di fasilitas umum kecuali sarana Pendidikan

Gambar 2.6

Peta Rencana Pola Ruang



Sumber : Perda RTRW Nomor 2 Tahun 2021

Kawasan Budidaya

(1) Kawasan hutan produksi meliputi :
   a. kawasan hutan produksi tetap; dan
   b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

(2) kawasan hutan produksi tetap terdapat di Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Pace, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Sawahan, dan Kecamatan Wilangan dengan luasan kurang lebih 42.324 Ha.

(3) kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di Kecamatan Rejoso dengan luasan kurang lebih 428 Ha.

Kawasan perkebunan rakyat terdapat di Kecamatan Berbek, Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Pace, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Sawahan dengan luasan kurang lebih 5.000 Ha (lima ribu hektar).

(1) Kawasan pertanian terdiri atas :
   a. kawasan tanaman pangan; dan
   b. kawasan peternakan.

(2) Kawasan tanaman pangan terdapat di seluruh kecamatan dengan luasan kurang lebih 37.781 Ha dengan kawasan yang ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) terdapat di Kecamatan Bagor, Kecamatan Baron, Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Loceret, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Pace, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Prambon, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Ngluyu dan Kecamatan Wilangan dengan luasan kurang lebih 27.542 Ha.

(3) Kawasan peternakan terdapat di Kecamatan Berbek, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Loceret, Kecamatan Pace, Kecamatan

Lengkong dan Kecamatan Patianrowo dengan luasan kurang lebih 151 Ha.

Kawasan pertambangan dan energi, berupa kawasan pertambangan mineral terdiri atas :

a. kawasan pertambangan mineral bukan logam terdapat di Kecamatan Berbek, Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngetos dan Kecamatan Sawahan dengan luasan kurang lebih 50 Ha; dan
b. kawasan peruntukan pertambangan batuan terdapat di Kecamatan Bagor, Kecamatan Berbek, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Loceret, Kecamatan Pace dan Kecamatan Wilangan dengan luasan kurang lebih 104 Ha.

Kawasan peruntukan industri terdapat di Kecamatan Bagor, Kecamatan Baron, Kecamatan Berbek, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Loceret, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Pace, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Prambon, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Tanjunganom dan Kecamatan Wilangan.dengan luasan kurang lebih 1.918 Ha.

(1) Kawasan pariwisata terdiri atas :
    a. lokasi pariwisata alam;
    b. lokasi pariwisata budaya;
    c. lokasi pariwisata buatan.

(2) Lokasi pariwisata alam, terdiri atas :
    a. Air terjun Sedudo, wisata Watu Lawang, agrowisata lingkar Gunung Wilis, air terjun Watu Lumbung, air terjun Banyu Anjlok, air terjun Selo Leter, wisata agroforestry, wisata alam Watu Belah, air terjun Singokromo, air terjun Gedangan, kebun mawar (Agrowisata Ganter), embung estumulyo, Bukit Persinggahan Jend. Sudirman (BPJS), wisata hutan Bambu, bukit batu Songgong, Petungulung *Tubing Adventure* dan Gua Ndalem Kebonagung di Kecamatan Sawahan;

b. Air Merambat Roro Kuning, air terjun Pring Jowo, pendakian Sekartaji, air terjun Coban Unut, pemandian Sri Tanjung Wisata Tirta, wisata Jolotundo, Gua Alap-alap dan Bukit Gua Dali Sumber Klampok di Kecamatan Loceret;

c. Air Terjun Ngebleng di Kecamatan Jatikalen;

d. Grojogan Dhuwur Sumbermiri di Kecamatan Lengkong.

e. Wisata bukit Salju, sumber mata air Banyu Towo, air terjun Coban Tretes dan air terjun Sumber Manik di Kecamatan Ngetos;

f. Gua Margo Tresno dan wisata watu Gandul di Kecamatan Ngluyu;

g. Gua dan Grojogan Putri ayu di Kecamatan Rejoso; dan

h. Lokasi pariwisata wisata alam lainnya yang terdapat di seluruh kecamatan.

(3) Lokasi pariwisata budaya terdiri atas:

a. Makam Kanjeng Djimat dan Masjid Al-Arfiyyah di Kecamata Berbek;

b. Petilasan Gajah Mada di Kecamatan Kertosono;

c. Candi Lor, monumen DR. Soetomo, pura Kerta Bhuwana Giri Wilis, monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Gua Romusha di Kecamatan Loceret;

d. Gedung Juang 45, klenteng Hok Yoe Kiong dan museum Anjuk Ladang di Kecamatan Nganjuk;

e. Makam Kyai Poleng, pertapaan Argojali, makam Sunan Ngatas Angin, kampung Mangga, candi Ngetos dan Makam Para Aulia Ngetos di Kecamatan Ngetos;

f. Makam Sono Gedong dan makam Rajeg Wesi di Kecamatan Ngluyu;

g. Makam Nyi Ageng Sepet dan makam Sentono Kacek di Kecamatan Pace;

h. Petilasan Kadipaten Posono, makam Tumenggung Kopek dan Masjid Pakuncen Kecamatan Patianrowo;

i. Situs Condrogeni, makam Ki Ageng Ngaliman, makam Gedhong Wetan, petilasan Watu Banteng, makam Eyang Kabul Misuwur, pertapaan Sadepok dan Makam Menteri Supeno di Kecamatan Sawahan;
j. Makam Keniten dan Padepokan Langen Tayub di Kecamatan Tanjunganom; dan
k. Makam Syech Sulukhi di Kecamatan Wilangan.

(4) Lokasi pariwisata buatan terdapat di seluruh kecamatan.

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g terdiri atas :

a. kawasan permukiman perkotaan; dan
b. kawasan permukiman perdesaan.

(1) Kawasan permukiman perkotaan terdapat di seluruh kecamatan dengan luasan kurang lebih 12.010 Ha.
(2) Kawasan permukiman perdesaan terdapat di seluruh kecamatan direncanakan dengan luasan kurang lebih 17.888 Ha.

Kawasan Strategis

Kawasan Strategis yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas:

a. kawasan Agropolitan Selingkar Wilis meliputi Kecamatan Sawahan, Kecamatan Ngetos, Kecamatan Loceret dan Kecamatan Berbek;
b. Kawasan agropolitan meliputi Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Bagor, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Gondang;
c. kawasan industri meliputi Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Nganjuk dan Kecamatan Sukomoro;
d. kawasan pariwisata Bendungan Semantok di Kecamatan Rejoso;
e. kawasan minapolitan meliputi Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Sawahan; dan
f. kawasan ekonomi cepat tumbuh di Kecamatan Pace.

2.1.4.Wilayah Rawan Bencana

Ancaman Bahaya merupakan pemicu eksternal maupun internal terhadap kejadian yang bisa menimbulkan bencana di Nganjuk. Untuk ancaman, terdapat dua komponen penting yang dihadapi yaitu: 1) jumlah masyarakat terpapar yaitu komposisi kelompok masyarakat yang berpotensi terkena bencana, dan 2)ancaman yang berasal dari peta ancaman.

Dari jumlah masyarakat terpapar, menurut dokumen KRB Kabupaten Nganjuk, bencana yang terjadi di Kabupaten Nganjuk tersebar hampir merata di semua wilayah kecamatan, kecuali kecamatan Tanjunganom. Data dalam tabel berikut bisa menggambarkan penyebaran bencana yang kerap terjadi di wilayah Kabupaten Nganjuk dan perkiraan jumlah masyarakat terpapar di wilayah tersebut.

Tabel 2.14.

Penyebaran Potensi Ancaman Bencana di Kabupaten Nganjuk

No	Kecamatan	ANCAMAN BAHAYA					
		Banjir	Tanah Longsor	Kebakaran gedung dan pemukiman	Kekeringan	Kebakaran hutan dan lahan	Cuaca Ekstrim
1	Sawahan			-	-		-
2	Ngetos						
3	Berbek					-	-
4	Loceret					-	-
5	Pace			-	-	-	
6	Tanjunganom	-	-	-	-	-	-
7	Prambon	-	-		-	-	-
8	Ngronggot	-	-		-	-	
9	Kertosono	-	-		-	-	
10	Patianrowo	-	-	-	-	-	
11	Baron	-	-	-	-	-	
12	Gondang	-	-			-	-
13	Sukomoro		-		-	-	
14	Nganjuk		-	-		-	

No	Kecamatan	ANCAMAN BAHAYA					
		Banjir	Tanah Longsor	Kebakaran gedung dan pemukiman	Kekeringan	Kebakaran hutan dan lahan	Cuaca Ekstrim
15	Bagor		-	-	-		-
16	Wilangan	-	-	-	-		-
17	Rejoso		-	-		-	
18	Ngluyu	-	-	-		-	
19	Lengkong	-	-	-		-	
20	Jatikalen		-		-	-	-

Sumber : BPBD Kabupaten Nganjuk, 2022

Dari tabel tersebut diatas hampir semua kecamatan mengalami potensi ancaman bencana, dengan jenis potensi ancaman bencana yang berbeda-beda.

Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) BPBD Kabupaten Nganjuk menyebutkan bahwa potensi ancaman risiko bencana di Kabupaten Nganjuk ada 6 yaitu Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran gedung dan pemukiman, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan serta Cuaca ekstrim (sesuai tabel ancaman bencana diatas).

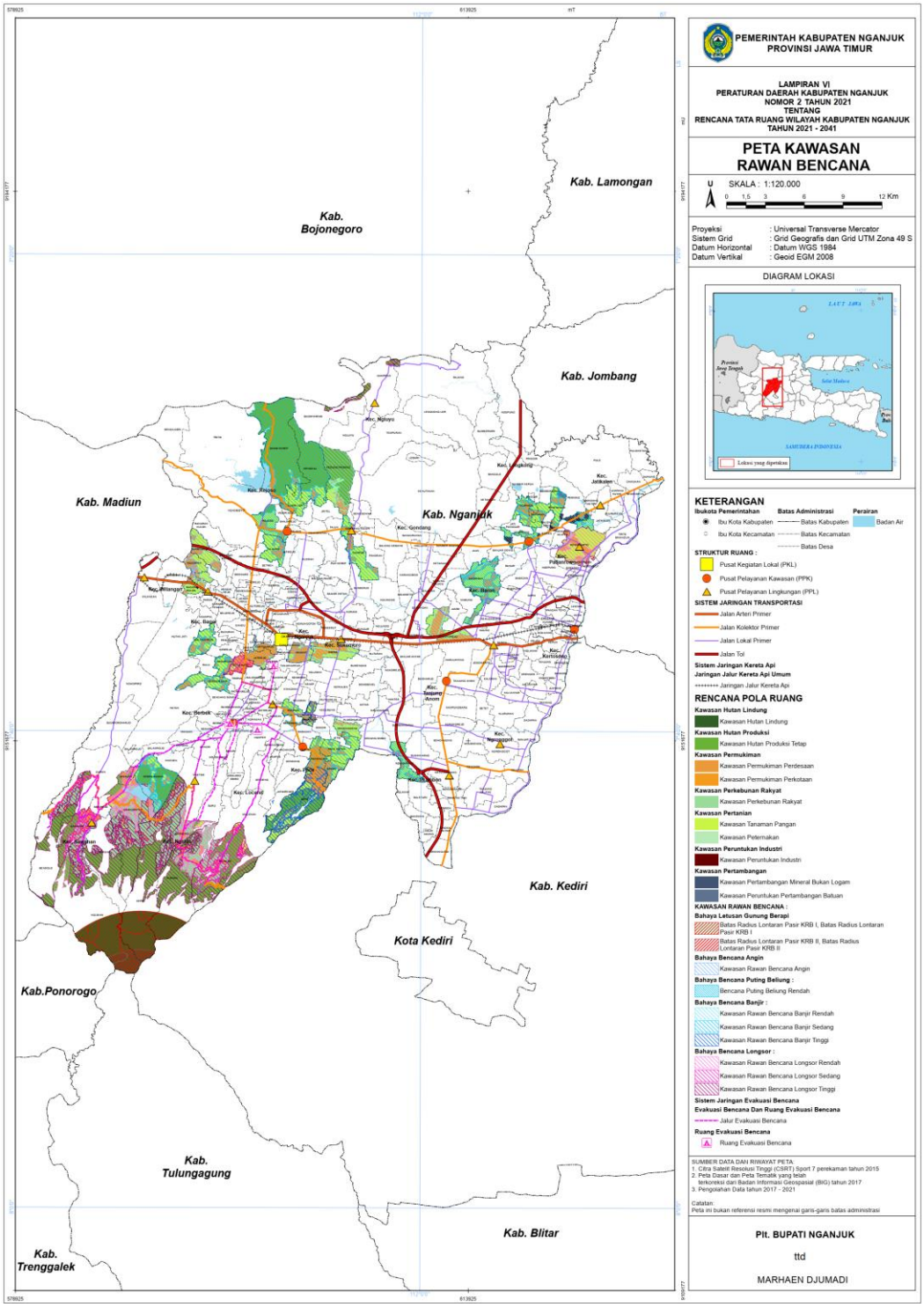
Potensi ancaman bencana yang diperkirakan atau kemungkinan terjadi sebagai berikut :

1) Bencana Alam Banjir Bandang, bencana ini rutin setiap tahun terjadi akibat hujan lebat dihulu sungai pada sungai semantok, sungai kuncir, sungai widas, sungai kledungsuko, sungai bodor, dan sungai konang yang menimbulkan erosi dasar dan tanggul sungai yang berdampak kerusakan tanggul, badan jalan, permukiman di daerah aliran sungai dan bangunan pengairan/ bangunan sungai lainnya
2) Bencana Alam genangan banjir, bencana ini merupakan akibat dari meluapnya sungai akibat curah hujan merata di atas normal yang berlangsung lama, sehingga menggenangi permukiman dan areal persawahan yang berdampak banyaknya tanaman puso dan gagal panen.

3) Bencana Alam Angin Kencang dan puting beliung, bencana ini terjadi pada awal musim penghujan dan akhir musim kemarau, yang rutin sebagai dampak angin turun gunung dan perubahan suhu yang mendadak sehingga terjadi peningkatan kecapatan angin. Bencana ini sering berdampak rumah permukiman roboh, pohon roboh dan gangguan penyakit akibat debu yang menyertainya.
4) Bencana Alam Kekeringan, bencana rutin di musim kemarau ini terjadi akibat ketidakseimbangan kawasan resapan air dengan kapasitas curah hujan yang secara umum cukup tinggi, sehingga di musim kemarau selalu kekurangan air irigasi sekitar 300 juta m3 sementara kandungan air tanah kurang mendukung kebutuhan air bersih.
5) Bencana kebakaran hutan dan lahan, lokasi yang kerap terjadi yaitu di Kecamatan Berbek, Bagor, Rejoso, Wilangan, Ngetos, Sawahan, Lengkong dan Loceret. Untuk kebakaran rumah lebih cenderung terjadi di daerah padat penduduk seperti Kecamatan Wilangan, Nganjuk dan Tanjunganom yang disebabkan hubungan arus pendek listrik ataupun api kompor dapur.

Gambar 2.7

Peta Kawasan Rawan Bencana



Sumber : Perda RTRW Nomor 2 Tahun 2021

Salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam menaruh perhatian dan kepedulian terhadap tingkat ancaman adalah adanya data-data

yang teradministrasi dengan baik tentang penyebaran wilayah yang terpapar bencana. Dari data tersebut bisa diambil kebijakan untuk penanganan kesiapsiagaan terhadap bencana. Kegiatan yang sudah dilakukan selain pada saat bencana terjadi, diantaranya penyebarluasan informasi tentang kebencanaan di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk baik melalui pengumuman broadcast media sosial dan grup kebencanaan antar lintas sektor (Dinas dan LSM/Komunitas Relawan Bencana) juga melalui pemasangan rambu peringatan, banner dan spanduk informasi kesiapsiagaan bencana dan lewat pamflet atau brosur agar masyarakat siaga dan aware terhadap kondisi lingkungannya. Selain itu juga melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pencegahan ke masyarakat, pelajar/guru dan para relawan bencana. Telah dilaksanakannya mitigasi struktural seperti penanaman bibit pohon juga merupakan upaya mengurangi ancaman bahaya seperti longsor.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan otonomi daerah memberikan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki di daerah untuk tujuan otonomi daerah dimaksud yaitu meliputi:

(i). peningkatan kesejahteraan masyarakat,
(ii). peningkatan pelayanan umum (*public service*), dan
(iii). peningkatan daya saing daerah.

Dalam rangka melaksanakan tanggungjawab itu Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, baik urusan yang bersifat wajib maupun urusan pilihan. Pemerintah daerah memiliki *local discretion* (keleluasaan bertindak) yang lebih besar untuk menyusun kebijakan daerah guna memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta,

prakarsa dan memberdayakan masyarakat agar tujuan peningkatan kesejahteraan dapat diwujudkan.

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di daerah dapat diukur antara lain dengan dua indikator penting, yaitu:

(i) Indikator Makro Ekonomi Regional, yang antara lain meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun tertentu, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat perkembangan harga (inflasi), tingkat pendapatan perkapita (PDRB Perkapita), tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan pendapatan dan lain sebagainya;

(ii) Indikator Makro Sosial Regional, antara lain berupa indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), tingkat pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kemampuan daya beli masyarakat.

Secara makro ekonomi, maka indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari:

2.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan jumlah seluruh nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di wilayah Kabupaten Nganjuk dalam waktu satu tahun. Apabila ditinjau dari segi pendapatan, merupakan jumlah dari semua pendapatan yang timbul karena ikut sertanya faktor-faktor produksi dalam proses produksi. Perekonomian Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 30.819,74 miliar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 19.543,17 miliar.

Tabel 2.15.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nganjuk
Atas Dasar Harga Berlaku 2018-2022

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022*)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,232,657.7	7,522,361.2	7,767,690.5	7,950,246.1	8,422,272.2
B	Pertambangan dan Penggalian	513,605.1	536,073.9	509,708.7	533,883.3	575,583.2
C	Industri Pengolahan	3,402,670.8	3,761,418.4	3,783,711.8	4,188,847.0	4,897,907.1
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12,077.2	13,003.2	13,018.7	13,784.8	15,017.3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26,934.6	28,384.0	29,958.5	32,385.2	35,508.3
F	Konstruksi	2,705,409.7	2,873,467.9	2,742,974.9	2,870,138.8	3,274,804.5
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,924,270.9	5,410,105.3	5,206,089.5	5,636,348.0	6,235,160.1
H	Transportasi dan Pergudangan	384,162.5	430,594.6	407,616.0	450,610.4	552,980.8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	481,154.6	526,937.2	496,893.3	540,959.5	596,761.6
J	Informasi dan Komunikasi	1,068,240.2	1,163,011.8	1,254,051.9	1,334,424.9	1,426,802.8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	558,437.8	588,087.5	590,470.4	614,313.2	665,208.1
L	Real Estate	407,795.5	444,094.5	461,042.4	473,511.9	505,352.6
M,N	Jasa Perusahaan	82,973.9	90,761.6	86,170.5	88,813.9	95,032.1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,209,317.3	1,340,857.0	1,371,094.2	1,374,859.2	1,427,867.5
P	Jasa Pendidikan	927,775.6	1,011,466.0	1,043,122.7	1,050,940.3	1,075,407.7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	148,254.2	162,917.5	181,500.0	195,224.0	210,304.6
R,S,T,U	Jasa lainnya	696,555.3	747,574.6	656,047.8	704,040.1	807,777.7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		24,782,292.7	26,651,116.1	26,601,161.8	28,053,330.7	30,819,748.3

Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

Tabel 2.16.
Persentase PDRB Kabupaten Nganjuk
Atas Dasar Harga Berlaku 2018-2022 dalam (%)

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022*)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29.18	28.23	29.20	28.34	27.33
B	Pertambangan dan Penggalian	2.07	2.01	1.92	1.90	1.87
C	Industri Pengolahan	13.73	14.11	14.22	14.93	15.89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12
F	Konstruksi	10.92	10.78	10.31	10.23	10.63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19.87	20.30	19.57	20.09	20.23
H	Transportasi dan Pergudangan	1.55	1.62	1.53	1.61	1.79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.94	1.98	1.87	1.93	1.94
J	Informasi dan Komunikasi	4.31	4.36	4.71	4.76	4.63
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.25	2.21	2.22	2.19	2.16
L	Real Estate	1.65	1.67	1.73	1.69	1.64
M,N	Jasa Perusahaan	0.33	0.34	0.32	0.32	0.31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.88	5.03	5.15	4.90	4.63
P	Jasa Pendidikan	3.74	3.80	3.92	3.75	3.49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.60	0.61	0.68	0.70	0.68
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.81	2.81	2.47	2.51	2.62
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk tahun 2023

Struktur perekonomian Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 27,33 persen, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,23 persen, Industri pengolahan sebesar 15,89 persen, Konstruksi sebesar 10,63 persen, serta Administrasi Pemerintahan dan Informasi dan komunikasi sama-sama sebesar 4,63 persen. Peranan enam lapangan

usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Nganjuk mencapai 83,34 persen.

kontribusi sektor usaha pada PDRB menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menempati urutan tertinggi meskipun dengan kontribusi yang semakin menurun, yaitu 29,18% Tahun 2018 menurun menjadi sebesar 27,33% pada Tahun 2022. Apabila dilihat dari kelompok sektor, yaitu kelompok sektor primer (agraris), sekunder (industri dan pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa), maka PDRB Kabupaten Nganjuk menunjukkan adanya perkembangan yang menarik di mana kontribusi kelompok sektor terbesar adalah sektor tersier. Namun demikian, secara umum pertumbuhan sektor-sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2022 ini mengindikasikan bahwa perekonomian mulai pulih setelah pada Tahun 2020 mengalami kontraksi dikarenakan situasi pandemi Covid-19.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2017-2019 menunjukkan adanya kenaikan setiap tahun, hal ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah berkembang semakin membaik. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan pertumbuhan yang minus pada tahun 2020 dikarenakan situasi pandemi covid-19 yang melanda secara global dan berdampak langsung pada sektor-sektor riil ekonomi produktif. Pada tahun 2022, Proyeksi BPS perekonomian secara umum mengalami *rebound* ditandai dengan pertumbuhan hampir di semua sektor.

Tabel 2.17.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nganjuk Menurut Harga Konstan 2018-2022

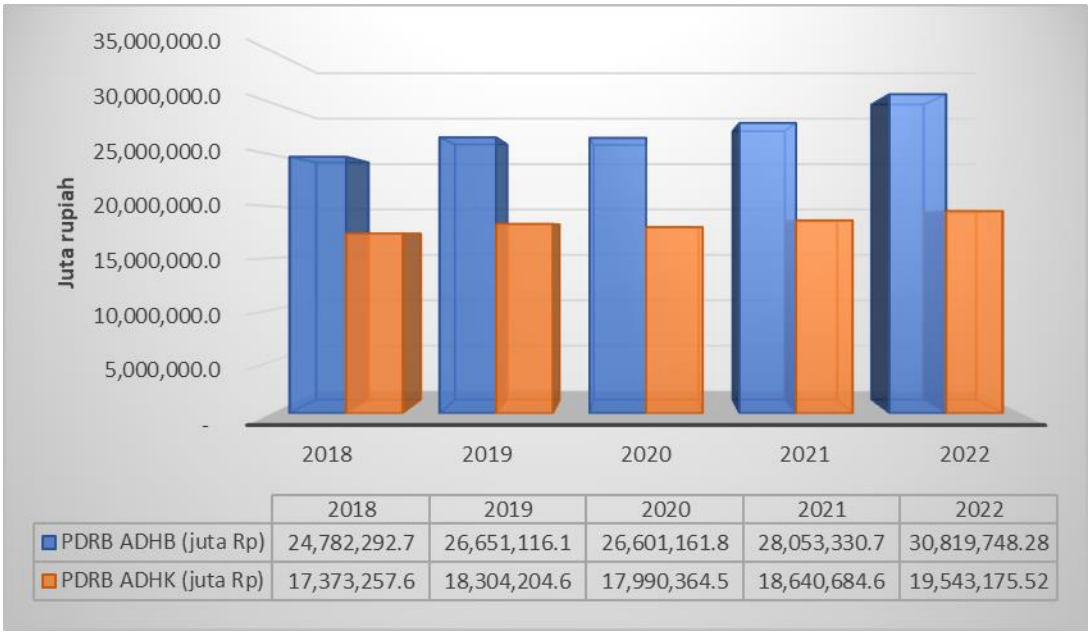
Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022*)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,861,809.0	4,954,056.4	5,031,962.8	5,115,750.6	5,090,055.1
B	Pertambangan dan Penggalian	340,993.9	347,101.4	324,512.9	330,483.0	348,618.8

C	Industri Pengolahan	2,417,792.7	2,613,175.3	2,575,937.4	2,731,333.3	3,050,732.0
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,861.3	9,374.4	9,258.1	9,538.1	10,245.4
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,936.9	20,918.8	21,807.8	23,200.1	24,655.2
F	Konstruksi	1,771,580.0	1,877,237.3	1,764,063.0	1,816,233.7	1,954,898.9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,534,584.8	3,786,127.8	3,606,881.0	3,799,328.7	3,999,516.1
H	Transportasi dan Pergudangan	269,325.6	295,086.8	276,165.3	303,221.7	351,152.7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	344,563.4	370,410.9	343,732.1	360,520.3	386,816.3
J	Informasi dan Komunikasi	927,298.0	995,943.1	1,071,738.7	1,138,115.1	1,200,321.2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	414,008.1	431,618.3	427,496.7	429,852.6	442,568.9
L	Real Estate	307,515.2	326,344.1	334,458.9	340,904.7	359,491.5
M,N	Jasa Perusahaan	60,584.0	64,635.4	60,343.6	61,562.2	63,596.3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	832,403.7	863,905.9	847,809.7	852,754.7	865,164.8
P	Jasa Pendidikan	629,978.5	675,880.3	685,039.9	689,421.7	695,316.5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	107,539.7	115,719.0	127,379.6	134,581.1	140,615.8
R,S,T,U	Jasa lainnya	524,482.7	556,669.6	481,777.1	503,883.0	559,410.0
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		17,373,257.6	18,304,204.6	17,990,364.5	18,640,684.6	19,543,175.5

Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk tahun 2023

Gambar 2.8

Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK tahun 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB ADHB (juta Rp)	24,782,292.7	26,651,116.1	26,601,161.8	28,053,330.7	30,819,748.28
PDRB ADHK (juta Rp)	17,373,257.6	18,304,204.6	17,990,364.5	18,640,684.6	19,543,175.52

Sumber : BPS Kab. Nganjuk Tahun 2023

Dari PDRB pendekatan pengeluaran, Pertumbuhan ekonomi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 8,98 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 7,36 persen, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) sebesar 5,47 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 6,88 persen, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 0,14 persen. Sedangkan Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran yang tumbuh sebesar 10,64 persen.

Struktur PDRB Nganjuk menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku Tahun 2022 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Nganjuk masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Bangkalan yaitu sebesar 72,19 persen, diikuti Ekspor Barang dan Jasa sebesar 45,39 persen, PMTB sebesar 28,86 persen, PK-P sebesar 7,27 persen, PK-LNPRT sebesar 1,48 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki kontribusi sebesar 57,12 persen.

Tabel 2.18.
PDRB Pengeluaran Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2022

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	18.618,41	19.526,86	22.247,72	13.050,87	13.452,77	14.377,75
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	404,35	420,93	457,30	251,62	257,23	276,17
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.317,31	2.346,59	2.240,35	1.440,34	1.450,51	1.452,59
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.604,12	7.960,18	8.894,07	5.006,94	5.094,52	5.372,96
5. Perubahan Inventori	276,24	522,98	596,44	161,41	294,41	320,21
6. Ekspor Barang dan Jasa	12.488,59	13.395,41	13.989,63	8.086,49	8.658,84	9.435,99
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	15.107,87	16.119,62	17.605,75	10.007,30	10.567,59	11.692,50
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	26.601,16	28.053,33	30.819,75	17.990,36	18.640,68	19.543,18

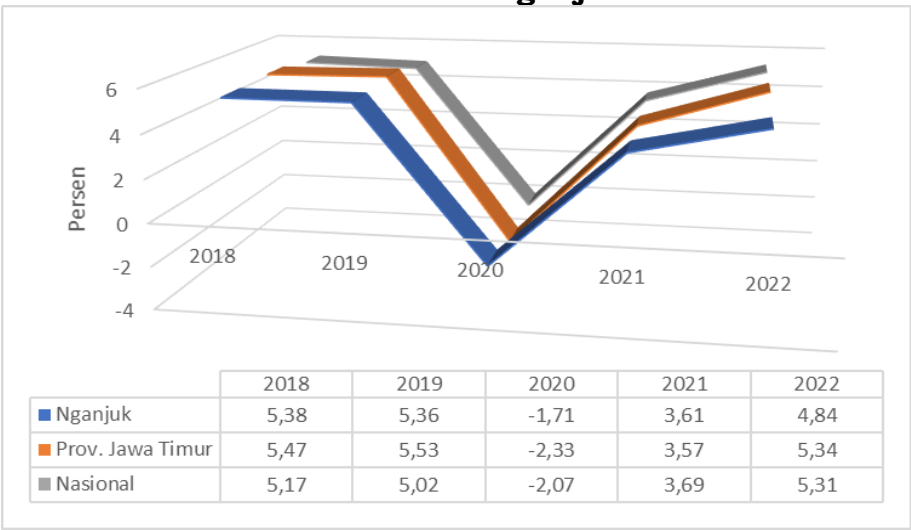
Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk, 2023

2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Nganjuk dihitung dari perkembangan PDRB menurut harga konstan. Pertumbuhan sektoral paling tinggi adalah sektor jasa transportasi dan sektor jasa kesehatan yaitu rata-rata tumbuh 7,4 dan 7 persen kemudian sektor informasi dan komunikasi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,7 persen per tahun. Sedangkan pertumbuhan yang paling kecil adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu rata-rata sebesar 0,8 persen pertahun. Hal ini menunjukkan pola pergeseran komoditas dari sektor primer ke sektor tersier (jasa). Selain itu, Pembatasan mobilitas masyarakat melalui kebijakan PPKM sepanjang Tahun 2020 dan awal Tahun 2021 ketika puncak pandemi Covid-19 menjadi faktor dominan yang berpengaruh pada kontraksi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, Sektor jasa kesehatan serta sektor komunikasi dan informasi menjadi sektor yang tetap tumbuh pada Tahun 2020 atau selama pandemic covid-19. Pertumbuhan ekonomi Nganjuk Tahun 2022 diproyeksikan tumbuh 4,84 % sedikit dibawah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan tumbuh 5,31 % dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2022 yang diproyeksikan tumbuh 5,34 %.

Gambar 2.9

Pertumbuhan Ekonomi Nganjuk Tahun 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
Nganjuk	5,38	5,36	-1,71	3,61	4,84
Prov. Jawa Timur	5,47	5,53	-2,33	3,57	5,34
Nasional	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31

Sumber : BPS Nganjuk, 2023

Ekonomi Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 mengalami pertumbuhan lebih cepat sebesar 1,23 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, namun ada satu-satunya lapangan usaha yang terkontraksi yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar -0,5 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan pergudangan sebesar 15,81 persen, Industri Pengolahan sebesar 11,69 persen, Jasa lainnya sebesar 11,02 persen, Konstruksi sebesar 7,63 persen, Pengadaan listrik dan gas 7,41 persen, Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 7,29 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,27 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha lainnya masih tumbuh di bawah 6 persen.

Tabel 2.19.

Pertumbuhan Per sektor PDRB

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0.49	1.90	1.57	1.67	-0.50
B	Pertambangan dan Penggalian	3.09	1.79	-6.51	1.84	5.49
C	Industri Pengolahan	9.92	8.08	-1.43	6.03	11.69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.37	5.79	-1.24	3.02	7.41
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.02	4.93	4.25	6.38	6.27
F	Konstruksi	11.55	5.96	-6.03	2.96	7.63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.65	7.12	-4.73	5.34	5.27
H	Transportasi dan Pergudangan	8.59	9.57	-6.41	9.80	15.81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.53	7.50	-7.20	4.88	7.29
J	Informasi dan Komunikasi	6.84	7.40	7.61	6.19	5.47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.19	4.25	-0.95	0.55	2.96
L	Real Estate	6.01	6.12	2.49	1.93	5.45
M,N	Jasa Perusahaan	7.29	6.69	-6.64	2.02	3.30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.57	3.78	-1.86	0.58	1.46

P	Jasa Pendidikan	5.40	7.29	1.36	0.64	0.86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.37	7.61	10.08	5.65	4.48
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.93	6.14	-13.45	4.59	11.02
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.38	5.36	-1.71	3.61	4.84

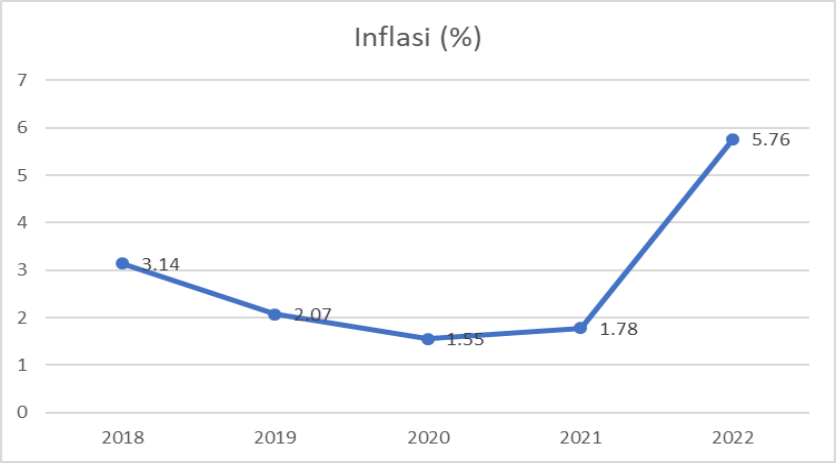
Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk, 2023

2.2.3. Laju Inflasi

Laju Inflasi Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2022 sebesar 5,76 persen. Inflasi Kabupaten Nganjuk banyak dipengaruhi oleh fluktuasi sektor Transportasi sebagai dampak kebijakan kenaikan harga BBM. Ekonomi yang tumbuh dengan inflasi yang terkendali menunjukkan terjadi pemulihan ekonomi pada Tahun 2021 setelah pada tahun 2020 ekonomi Kabupaten Nganjuk dan nasional tumbuh minus dikarenakan puncak pandemic covid-19. Pada Tahun 2022, ini ekonomi tumbuh 4,84 % sedangkan laju inflasi 5,76%. Secara teoritis, Laju inflasi yang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi menunjukkan masih tingginya faktor-faktor produksi atas barang dan jasa. Dari sisi hulu kebijakan pengendalian inflasi adalah pengendalian terhadap rantai distribusi bahan-bahan baku. Dari sisi hilir, kebijakan yang tepat adalah pengendalian harga komoditas pokok untuk menjaga daya beli masyarakat.

Gambar 2.10

Laju Inflasi Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2022



Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Tabel 2.20.

Inflasi Bulanan Tahun 2022 (%)

Bulan	makanan, minuman dan tembakau	Pakaian dan alas kaki	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	Pendidikan	Penyediaan makanan dan minuman/restoran	Perawatan pribadi dan jasa lainnya	Inflasi Umum
Januari	0,47	0,05	0,38	0,94	0,97	-0,02	-0,23	0,04	0,00	0,91	1,40	0,43
Februari	-0,04	0,25	0,10	0,09	0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	1,04	1,06	0,20
Maret	0,88	0,23	0,02	0,38	1,01	0,08	0,00	0,14	0,00	0,00	1,85	0,43
April	1,36	0,40	0,06	0,48	0,23	1,77	0,35	-0,07	0,00	3,60	2,31	1,15
Mei	-0,19	0,02	0,03	0,20	0,39	0,41	0,14	0,00	0,00	0,00	0,75	0,08
Juni	2,02	-0,01	0,30	0,49	0,08	-0,08	0,00	0,04	0,00	0,88	1,26	0,78
Juli	1,01	0,11	0,30	0,55	0,11	0,09	0,00	0,17	0,00	1,54	0,52	0,55
Agustus	-1,55	0,00	0,26	0,12	0,00	-0,08	0,00	0,00	4,69	0,68	0,47	-0,01
September	-0,16	0,00	0,20	1,91	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,07	1,36
Oktober	-1,26	0,00	0,19	0,06	0,05	0,63	0,02	0,01	0,00	0,00	-0,02	-0,21
November	0,86	0,00	0,00	0,52	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,29
Desember	1,83	0,01	0,08	-0,01	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,25	0,88	0,59
Nganjuk	**5,28**	**1,07**	**1,93**	**5,86**	**2,92**	**14,71**	**0,28**	**0,33**	**4,69**	**9,21**	**10,26**	**5,76**

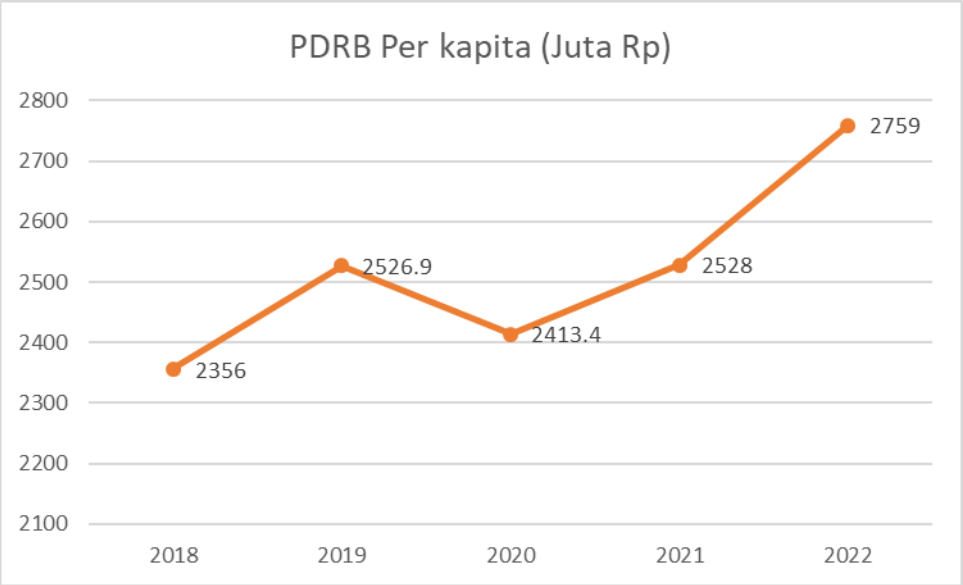
Sumber : BPS Nganjuk 2023

2.2.4. PDRB Perkapita

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Nganjuk selama tahun 2016-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 PDRB per kapita Kabupaten Nganjuk atas dasar harga berlaku sebesar 25,280 juta Rp atau naik 1.146 Juta Rp dibanding tahun sebelumnya. Akan tetapi pada tahun 2020, PDRB per kapita menurun dibandingkan Tahun 2019. Menurunnya PDRB per kapita tahun 2020 ini banyak dipengaruhi oleh pandemi covid-19 pada Tahun 2020. PDRB per kapita Tahun 2022 Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 27,59 juta.

Gambar 2.11

PDRB Perkapita Kabupaten Nganjuk 2018-2022 (Juta Rupiah)



Sumber : BPS Nganjuk, 2023

PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas ekonomi. Nilainya diperoleh dari PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah dalam periode tahun tertentu. Walaupun nilai PDRB per kapita dapat dijadikan salah satu ukuran kemakmuran suatu daerah, akan tetapi data tersebut tidak dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan karena pada dasarnya pemilik pendapatan tersebut adalah mereka yang memiliki faktor produksi. Terlebih lagi apabila faktor produksi seperti pekerja atau pemilik modal bukan merupakan penduduk setempat, maka nilai tambah yang dihasilkan belum tentu mencerminkan tingkat kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.

Ukuran kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dapat dilihat dengan menggunakan tingkat pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Sesungguhnya tingkat pendapatan dapat berpengaruh

terhadap daya beli masyarakat. Pendapatan yang rendah, tentunya mempersempit pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga pada kelompok masyarakat dengan penghasilan terbatas, pemenuhan konsumsi yang bersifat primer (makanan) menjadi pilihan alternatif yang utama. Sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat sekunder seperti rekreasi atau membeli barang-barang penunjang hobi. Dengan keterbatasan penghasilan itu pula yang dapat mempengaruhi rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Pada umumnya data yang menunjukkan pendapatan masyarakat sangat sulit untuk diperoleh. Sehingga pengeluaran, dalam hal ini pengeluaran rumah tangga merupakan proxy (pendekatan) dari pendapatan. Pendekatan pengeluaran konsumsi penduduk digunakan dalam setiap survei, karena sulitnya untuk memperoleh data tentang penghasilan/pendapatan penduduk dan ada kecenderungan masyarakat memberikan jawaban yang kurang relevan. Sebaliknya apabila ditanyakan tentang pengeluaran konsumsinya penduduk/masyarakat memberikan jawaban dengan jujur dan relevan.

Pola pengeluaran konsumsi penduduk merupakan informasi untuk melihat kesejahteraan penduduk. Besarnya nilai nominal (rupiah) yang dibelanjakan baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (non makanan), secara tidak langsung dapat mencerminkan kemampuan ekonomi rumah tangga, untuk mencukupi kebutuhan yang mencakup barang dan jasa.

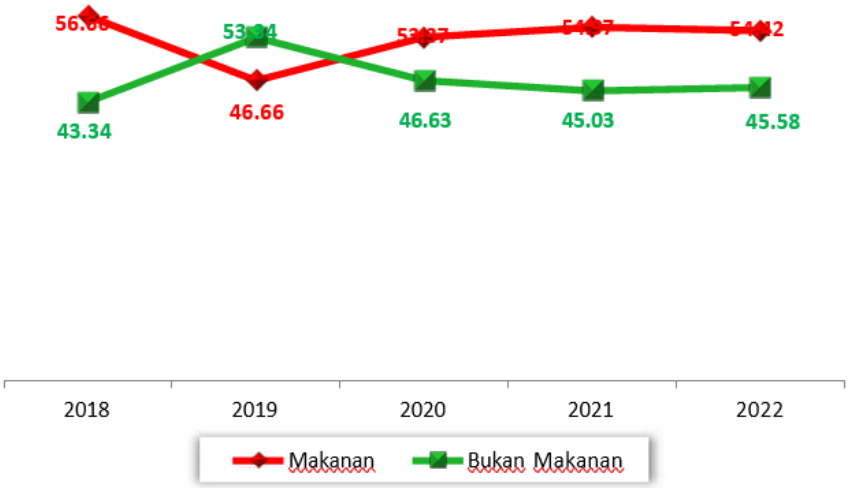
Biasanya pengeluaran makanan dapat mencapai titik jenuh, sementara pengeluaran untuk non makanan hampir tidak terbatas. Tarik-menarik antara dua pengeluaran tersebut, dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin besar pengeluaran untuk non makanan, berarti tingkat kesejahteraan semakin baik.

Argumentasi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan maka akan semakin kecil porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan. Menurut literatur, tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat bila pengeluaran untuk non makanan sudah lebih dari 60 persen. Sehingga pola pengeluaran rumah tangga dapat mencerminkan besar dan kecilnya daya beli masyarakat.

Data BPS memberikan informasi kondisi kesejahteraan masyarakat yang direpresentasikan melalui pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dalam 2 tahun terakhir rata- rata pengeluaran perkapita sebulan di Kabupaten Nganjuk menunjukkan masih berorientasi pemenuhan kebutuhan dasar, dimana jumlah pengeluaran makanan lebih besar dibanding non makanan artinya dilihat dari sisi pengeluaran tingkat kemakmuran masyarakat masih rendah. Tahun 2022, rata-rata pengeluaran makanan per kapita sebulan sebesar 525.825 rupiah sementara non makanan sebesar 440.927 rupiah.

Pada Tahun 2022 pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Nganjuk sebesar 945.427 rupiah. Pengeluaran paling tinggi berada pada kelompok pengeluaran 20 persen keatas yang mencapai 1.933.786 rupiah, dan paling rendah berada pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang mencapai 541.416 rupiah.

Gambar 2.12
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Tahun 2022



Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

Tabel 2.21.

Prosentase Rata-rata pengeluaran per kapita perbulan per Komoditas

Kelompok Komoditas/*Commodity Group*	2021	2022
Makanan/Food		
Padi-padian/*Cereals*	6,93	6,56
Umbi-umbian/*Tubers*	0,56	0,46
Ikan/udang/cumi/kerang/*Fish/shrimp/common squid/shells*	1,81	1,88
Daging/*Meat*	2,14	2,17
Telur dan susu/*Eggs and milk*	3,63	2,79
Sayur-sayuran/*Vegetables*	6,06	4,75
Kacang-kacangan/*Legumes*	2,44	2,27
Buah-buahan/*Fruits*	2,45	2,24
Minyak dan kelapa/*Oil and coconut*	1,98	2,37
Bahan minuman/*Beverage stuffs*	2,08	1,97
Bumbu-bumbuan/*Spices*	1,43	1,44
Konsumsi lainnya/*Miscellaneous food items*	0,83	0,95
Makanan dan minuman jadi/*Prepared food and beverages*	16,18	16,84
Rokok/*Cigarettes*	6,43	7,72
Jumlah makanan/*Total food*	**54,97**	**54,42**
Bukan makanan/*Non-food*		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/*Housing and household facilities*	20,97	22,49
Aneka komoditas dan jasa/*Goods and services*	11,00	10,44

Kelompok Komoditas/*Commodity Group*	2021	2022
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/*Clothing, footwear, and headgear*	1,80	2,02
Komoditas tahan lama/*Durable goods*	6,66	5,30
Pajak, pungutan, dan asuransi/*Taxes and insurance*	3,71	3,25
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/*Parties and ceremonies*	0,88	2,09
Jumlah bukan makanan/*Total non-food*	**45,03**	**45,58**
Jumlah/*Total*	**100,00**	**100,00**

Sumber : BPS Kab.Nganjuk Tahun 2023

Berdasarkan data BPS, Tahun 2022 pengeluaran penduduk per kapita sebulan di Kabupaten Nganjuk tersebar pada golongan pengeluaran per Kuintil 1 s/d. 5. Golongan Kuintil 1 pengeluaran per kapitanya Rp.468.968, - dan Kuintil 5 pengeluaran per kapitanya Rp. 1.933.786,- dimana rata-rata pengeluaran perkapita pada tahun 2022 adalah Rp. 966.322,-

Tabel 2.22.

Rata-rata Pengeluaran Per kuintil

Kuintil Pengeluaran per apita Sebulan Monthly Expenditure Quantil per Capita	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Quintil 1	393 329	444 138	468 968
Quintil 2	525 585	604 291	614 273
Quintil 3	670 073	753 901	774 309
Quintil 4	922 105	997 143	1 042 802
Quintil 5	1 890 828	1 926 976	1 933 786
Rata-rata/Average	**880 818**	**945 427**	**966 322**

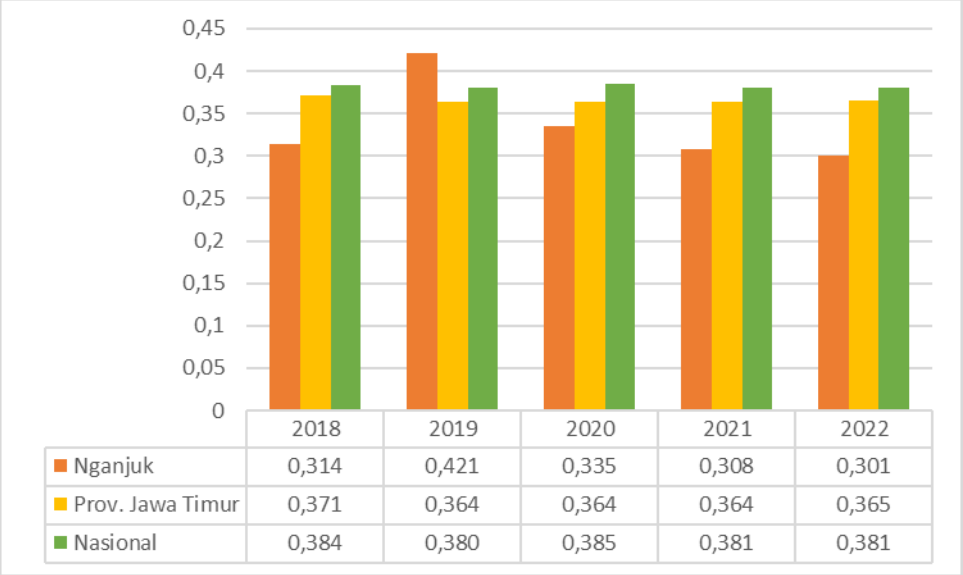
Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

2.2.5. Gini Rasio

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau

setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Indeks gini di Kabupaten Nganjuk tahun 2018 sebesar 0.314 dan pada tahun 2022 sebesar 0.301 hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan masyarakat Kabupaten Nganjuk rendah dan bahkan ketimpangan semakin menurun.

Gambar 2.13
Indeks Gini Kabupaten Nganjuk
Tahun 2018 – 2022



	2018	2019	2020	2021	2022
Nganjuk	0,314	0,421	0,335	0,308	0,301
Prov. Jawa Timur	0,371	0,364	0,364	0,364	0,365
Nasional	0,384	0,380	0,385	0,381	0,381

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk tahun 2023

Ket : Nasional dan Prov. Jawa Timur merupakan data per Maret 2023

2.2.6. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu isu penting yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah. Kemiskinan tidak terlepas dari karakter masyarakat yang cenderung lebih suka dianggap miskin agar mendapatkan bantuan dari pemerintah. Di masa pandemi covid yang di mulai pada tahun 2019 cenderung mengakibatkan meningkatnya kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia karena semua sektor usaha terdampak. Meskipun dampak dari pandemi covid sangat terasa, namun berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten Nganjuk dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi covid ini.

Tabel 2.23.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Nganjuk
Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	388.186	408.160	428.882	446.232	474.429
Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	127,28	118,51	122,73	125,5	113
Penduduk Miskin (%)	12,11	11,24	11,62	11,85	10,70
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,07	1,22	1,62	1,56	1,48
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,53	0,23	0,35	0,31	0,31
Kemiskinan ekstrim (%)			4,55	1,11	1,36

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk 2023

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, menunjukkan hasilnya dengan menurunnya angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Nganjuk, jumlah penduduk miskin menurun lebih dari 11.000 jiwa dari 125 ribu di tahun 2021 menjadi 113 ribu jiwa di tahun 2022. Secara prosentase menurun 1,15 poin dari 11,85 persen di tahun 2021 menjadi 10.70 persen di tahun 2022. Akan tetapi, yang harus diperhatikan adalah angka kemiskinan ekstrem menunjukkan kenaikan dari 1, 11 % pada tahun 2021 menjadi 1,36 % pada tahun 2022.

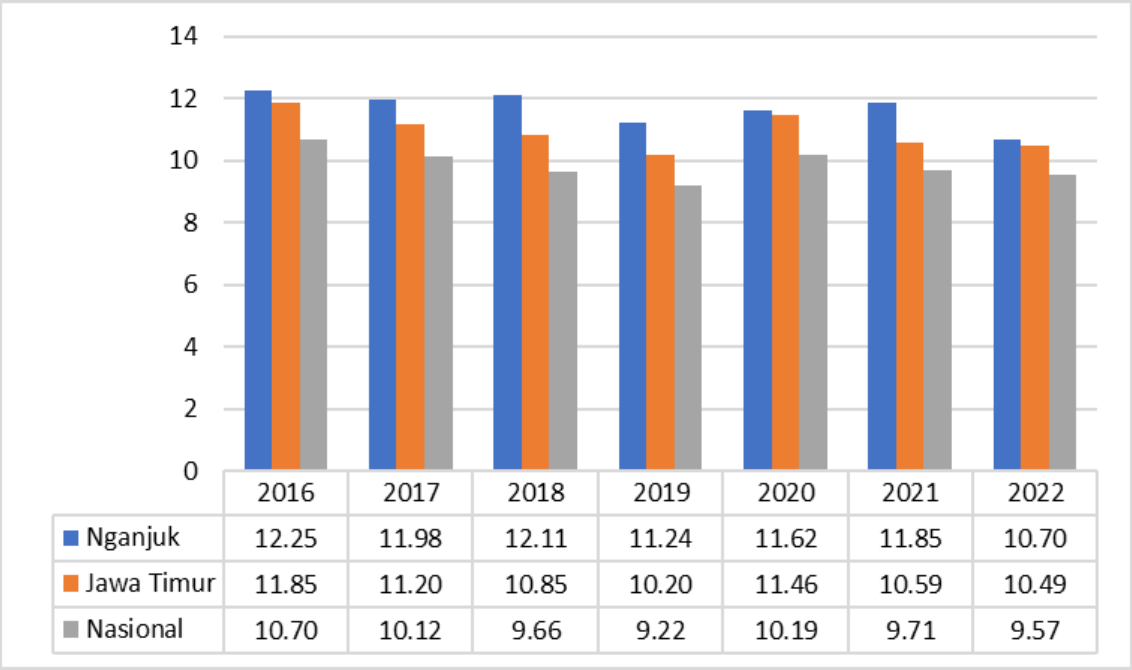
Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). Pada Maret 2021, Garis Kemiskinan

Ekstrem diperkirakan sebesar Rp11.941,12/orang/hari atau Rp358.233,6/orang/bulan (BPS, 2021)

Sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat, Penurunan kemiskinan menjadi prioritas nasional yang harus dilaksanakan oleh semua level Pemerintah terutama terkait target penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pada lima tahun terakhir rata rata angka kemiskinan di kabupaten Nganjuk masih relatif lebih tinggi dibanding dengan angka provinsi dan angka nasional. Meskipun secara umum presentasi kemiskinan di kabupaten Nganjuk menurun, tetapi penurunannya masih landai atau kurang tajam. Oleh karena itu perlu upaya yang lebih keras lagi dan dengan cara yang tetap untuk menurunkan angka kemiskinan.

Gambar 2.14
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Nganjuk,
Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016 – 2022



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nganjuk	12.25	11.98	12.11	11.24	11.62	11.85	10.70
Jawa Timur	11.85	11.20	10.85	10.20	11.46	10.59	10.49
Nasional	10.70	10.12	9.66	9.22	10.19	9.71	9.57

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2023

Ket : *Nasional dan Prov. Jatim merupakan data per September 2022
*Nganjuk merupakan data per Maret 2023

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Nganjuk perlu diketahui faktor-faktor yang berhubungan atau mempengaruhi

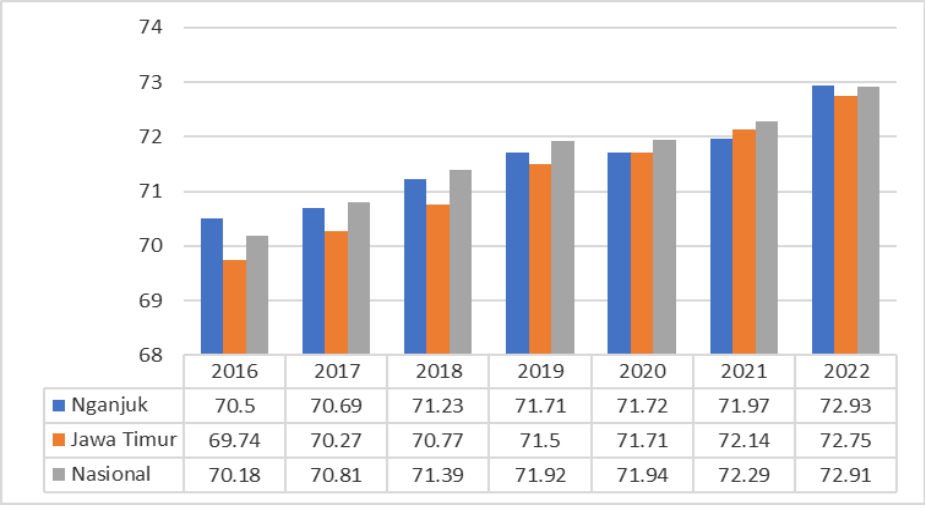
tingkat kemiskinan (jumlah penduduk miskin) di masing-masing wilayah sehingga dapat diformulasikan sebuah kebijakan publik yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini dan tidak hanya sekedar penurunan angka-angka saja melainkan secara kualitatif juga.

2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia

Indikator kesejahteraan rakyat antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Selain dari itu kesejahteraan masyarakat juga dapat tercermin dari faktor ketenagakerjaan, pengangguran dan kemiskinan.

Angka IPM Kabupaten Nganjuk Tahun 2016-2022 terus mengalami kenaikan. IPM Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 dengan nilai 70,05 pada Tahun 2022 IPM Kabupaten Nganjuk meningkat menjadi sebesar 72,93. Peningkatan IPM yang konsisten tersebut menunjukkan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.15
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2016 – 2022



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nganjuk	70.5	70.69	71.23	71.71	71.72	71.97	72.93
Jawa Timur	69.74	70.27	70.77	71.5	71.71	72.14	72.75
Nasional	70.18	70.81	71.39	71.92	71.94	72.29	72.91

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2023

Komponen IPM dengan metode penghitungan baru terdiri dari 3 aspek yang diukur dengan 4 indikator. Aspek dan indikator tersebut adalah aspek kesehatan yang diukur dengan Angka Harapan Hidup, aspek pendidikan yang diukur dengan Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dan aspek ekonomi yang diukur dengan Pengeluaran Perkapita Tahun yang disesuaikan.

Rata-rata usia harapan hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 adalah 71,95 Tahun meningkat apabila dibandingkan dengan rata-rata usia harapan hidup tahun 2021 sebesar 71,60 Tahun. Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya angka HLS dan RLS menunjukkan bahwa pembangunan manusia di sisi pendidikan lambat laun mengalami kemajuan di Kabupaten Nganjuk. Harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 adalah 13,07 Tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1 dan rata-rata lama sekolah (RLS) Tahun 2022 adalah 8,12 Tahun, ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022, rata-rata penduduk Kabupaten Nganjuk usia 25 tahun keatas telah bersekolah hingga kelas VII atau VIII (kelas I sampai kelas II setingkat SMP). Angka HLS dan RLS Tahun 2021 ini meningkat apabila dibandingkan dengan HLS dan RLS Tahun 2021 sebesar 12,87 Tahun dan 7,78 Tahun.

Dari aspek ekonomi, Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Nganjuk mencapai Rp 12,349 juta, atau naik dibandingkan dengan pengeluaran per kapita tahun 2021 sebesar Rp. 12,172 juta. Angka IPM Kabupaten Nganjuk sejak tahun 2016 relatif di atas Angka IPM rata-rata Provinsi Jawa Timur. Nilai IPM Tahun 2016 adalah sebesar 70,05 diatas nilai rata rata IPM provinsi Jawa Timur yaitu 69,74. Capaian angka IPM ini terus meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas pelayanan dasar baik pendidikan

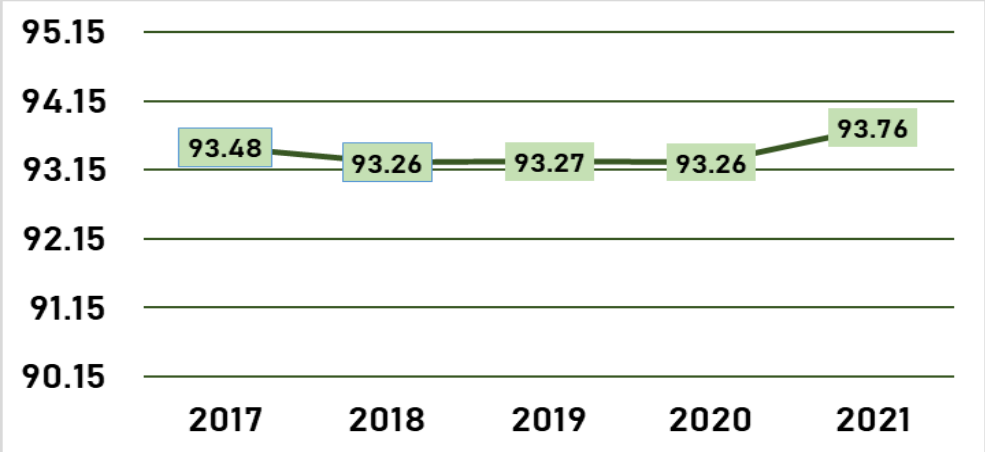
maupun kesehatan, sehingga pada tahun 2022 nilai IPM Kabupaten Nganjuk sebesar 72,93 dan Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 72,91 serta Nasional sebesar 72,75. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur.

2.2.8. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki.. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan semakin rendah. IPG digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM laki laki dan IPM perempuan sama seimbang.

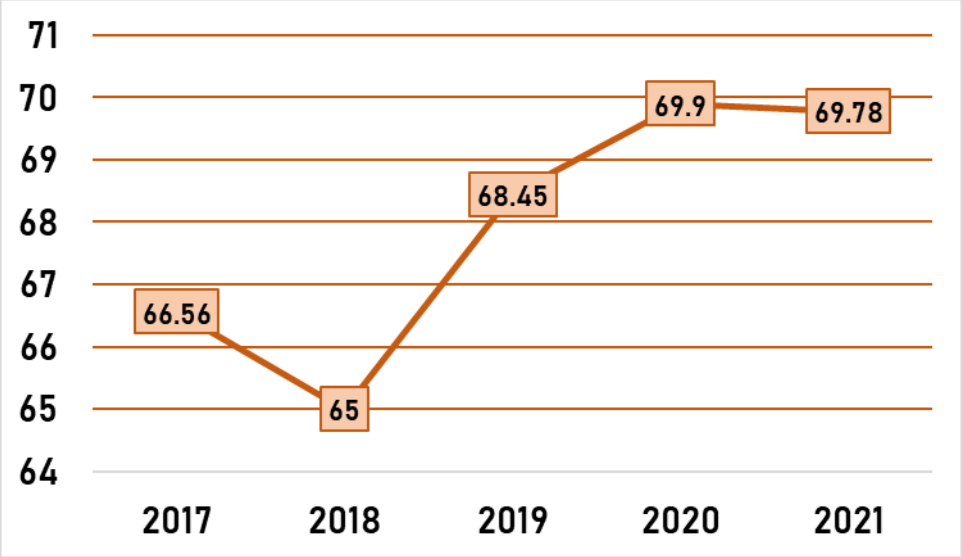
Gambar 2.16
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Nganjuk Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Gambar 2.17
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Nganjuk
Tahun 2017 – 2021



Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

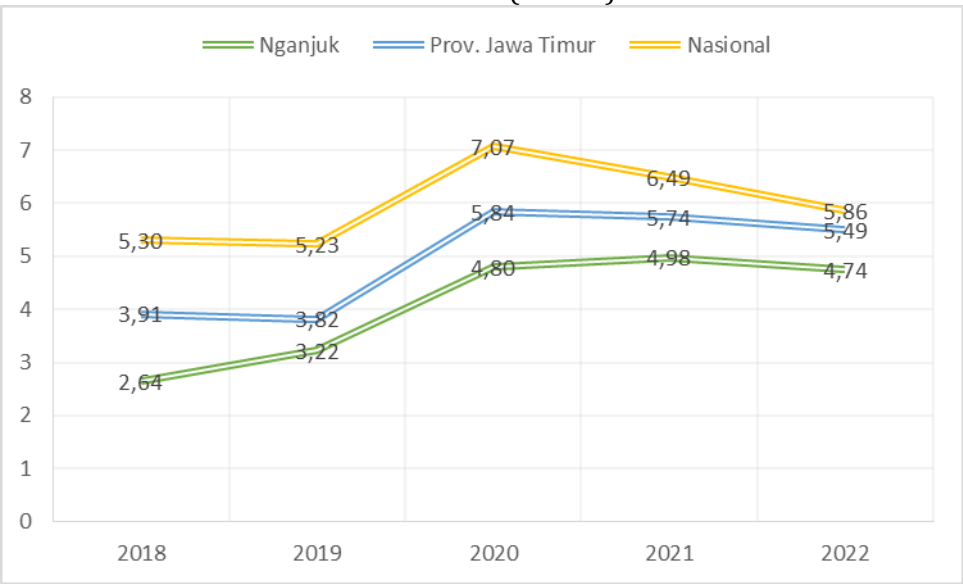
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender adalah salah satu ukuran untuk melihat tingkat kesejahteraan laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang signifikan tingkat kesejahteraan laki-laki dan perempuan di Kabupaten Nganjuk adalah perbedaan pendapatan rata-rata antara perempuan jauh lebih kecil dari laki-laki serta partisipasi perempuan dalam lembaga parlemen/DPRD serta jabatan-jabatan lain dalam pengambilan keputusan masih kurang.

2.2.9. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah

angkatan kerja. Tidak seperti anggapan umum, penganggur bukanlah orang-orang yang tidak melakukan apa-apa selama periode survei, namun penduduk yang aktif mencari kerja. Oleh karena itu, anak sekolah dan pengurus rumahtangga tidak tergolong penganggur karena tidak aktif mencari kerja.

Gambar 2.18
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Nganjuk
Tahun 2018-2022 (Persen)



Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk, Sakernas 2012 – 2022.

Sebagaimana terlihat pada Gambar di atas, TPT Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu 2018-2022 berfluktuasi dengan titik tertinggi pada tahun 2021 sebesar 4.98 persen dan mencapai titik terendah pada tahun 2018 sebesar 2,64 persen. Pada kurun waktu sepuluh tahun terakhir TPT tertinggi terjadi pada tahun 2021, bisa jadi hal tersebut adalah dampak dari pandemi Covid yang menyebabkan banyak usaha terhenti sementara dan banyak buruh dirumahkan.

Secara teoritis diartikan dengan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar kerja, dimana jumlah penawaran tenaga kerja melebihi jumlah

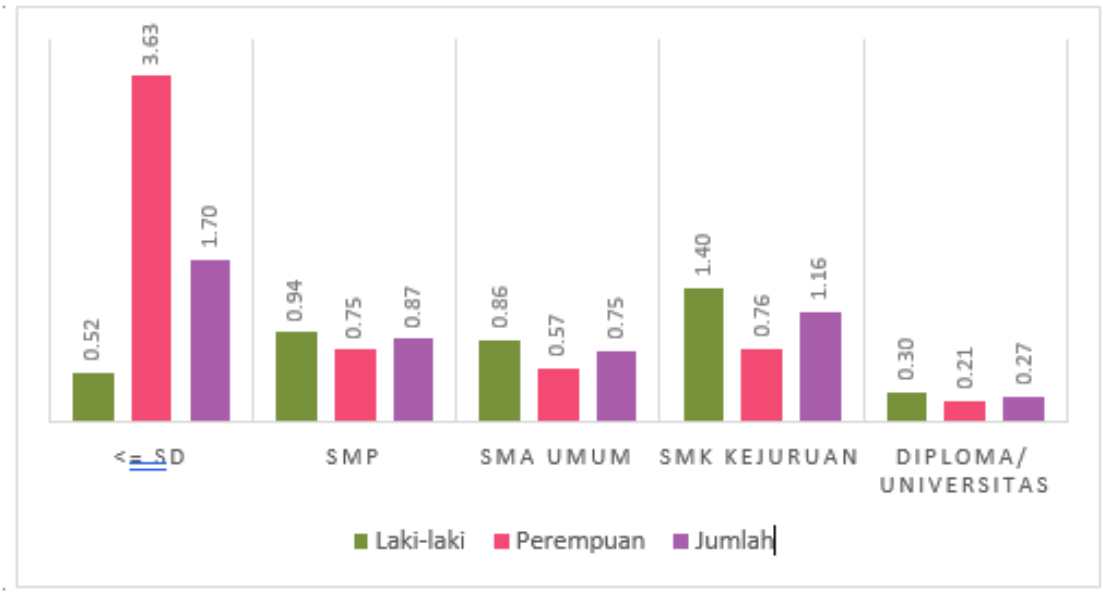
permintaan yang dibutuhkan. Pada tahun 2022 TPT turun 0.24 poin menjadi 4,74 persen hamper sama dengan kondisi tahun 2013. Kondisi pandemi Covid yang mereda, pertumbuhan ekonomi yang positif, pasokan tenaga kerja yang bertambah dan tingkat pengangguran terbuka yang berkurang menujukkan kondisi ketenagakerjaan yang mulai pulih.

ILO (2015) mengingatkan bahwa pengangguran bukanlah ukuran kesejahteraan atau kesulitan ekonomi, ia hanyalah ukuran kegagalan mendapatkan pekerjaan. Secara paradoks, pengangguran yang rendah kadangkala berhubungan dengan tingkat kemiskinan yang masif, sebaliknya pengangguran yang tinggi menjadi tanda pembangunan ekonomi yang pesat dan rendahnya kemiskinan.

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, semakin tinggi pendidikan semakin sedikit yang menganggur. TPT yang tertinggi adalah tingkat Pendidikan SD, Penduduk laki-laki yang memiliki tingkat pendidikan SD memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang berpendidikan SMP hingga SMA/SMK. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tenaga kerja berpendidikan lebih tinggi belum sepenuhnya maksimal. Selain itu, pencari kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih selektif terhadap pekerjaan yang akan diambil, sehingga ketidaksesuaian antara jurusan dengan kesempatan kerja sering terjadi dan akhirnya menjadi hambatan seseorang dalam mencari suatu pekerjaan. Bisa jadi karena ketrampilan atau keahlian yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, adanya mismatch antara keahlian yang dibutuhkan dengan yang supply lulusan tenaga kerja yang ada.

Gambar 2.19

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022



Namun, secara keseluruhan TPT paling rendah untuk laki-laki lulusan Diploma/Universitas dan yang tertinggi adalah lulusan SMK kejuruan. Sedangkan TPT terendah untuk perempuan adalah lulusan Diploma/Universitas akantetapi yang paling tinggi adalah lulusan SD. TPT pada tingkat pendidikan Diploma/Universitas baik pada laki-laki dan perempuan paling rendah dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya. Hal ini didukung oleh hipotesis dari Niemi (1974 : 339) yang mengatakan bahwa penduduk lulusan universitas lebih mengetahui informasi pasar kerja sehingga proses pencarian kerjanya lebih efisien. Tambahan lagi, lulusan universitas cenderung menerima on-the-job training dibanding lulusan lainnya sehingga mereka enggan keluar dari pasar kerja.

Sementara itu, lulusan SMA umum memiliki TPT terendah kedua. Sebenarnya, lulusan SMA diperuntukkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Akan tetapi, menurut kajian Bank Dunia, rata-rata kemampuan soft skill lulusan SMA lebih baik dari pada SMK sedangkan lulusan SMK kemampuan employeabilitynya tinggi. Kemampuan soft skill dapat dilihat dari cara individu untuk memahami kondisi psikologisnya sendiri, mengatur ucapan, pikiran, dan sikap sesuai dengan lingkungan sekitar.

TPT lulusan SMP menempati urutan terendah ketiga. Rendahnya TPT lulusan SMP diyakini sebagai upaya bertahan hidup. Lulusan SMP atau kurang cenderung tergolong sebagai penduduk miskin sehingga mereka harus bekerja untuk bertahan hidup (survival strategy). Kebanyakan dari mereka berada di sektor pertanian dengan status pekerja bebas. Dimana, dimasa pandemi ini sektor yang tidak terguncang dan cukup stabil adalah pertanian tentunya hal tersebut memberikan pengaruh positif bagi pekerja di sektor ini.

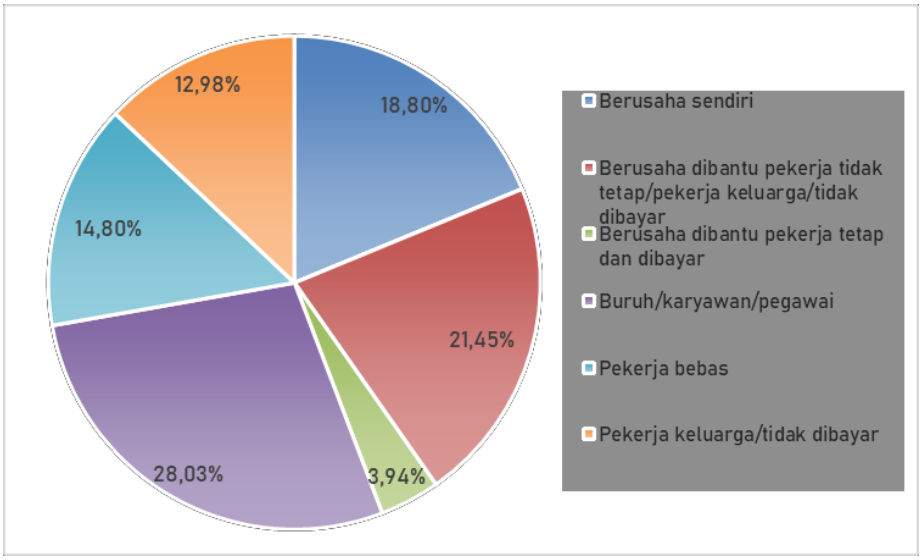
Sedangkan TPT lulusan SMK Kejuruan di Kabupaten Nganjuk menempati urutan tertinggi kedua. Jika salah satu penyebabnya adalah pandemi Covid, mungkin iya, karena banyak lulusan SMK yang belum bisa masuk ke pasar kerja karena kondisi usaha dan perekonomian yang melambat, akan tetapi ini juga sudah terjadi sebelum ada pandemi. Hal ini tentunya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan kementerian pendidikan, seharusnya ada link and match antara keterampilan lulusan SMK dengan kebutuhan dunia kerja, tetapi kenapa TPT masih cukup besar. Faktor penyebab lain karena jumlah lapangan kerja yang tersedia terbatas, akibat dari pandemi Covid yang baru saja mereda, dimana dua tahun terakhir banyak usaha yang tutup dan terjadi PHK besar-besaran, sehingga jumlah pekerjaan yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja.

TPT lulusan SD atau kurang menempati urutan tertinggi, penyumbang terbesarnya adalah TPT perempuan. Perempuan lulusan SD lebih sulit mendapatkan pekerjaan karena dengan tingkat pendidikan rendah pekerjaan yang tersedia terbatas pada pekerjaan kasar, sehingga kesempatan untuk mendapat pekerjaan lebih kecil. Hal ini juga menjadi konsekuensi logis dimana TPT laki-laki nya rendah, sebagai penanggungjawab ekonomi laki-laki dituntut untuk bekerja, apapun jenis pekerjaannya.

Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Ada tujuh status pekerjaan pada survei Sakernas yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non pertanian dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya dikategorikan sebagai pekerja informal.

Berdasarkan Gambar dibawah, sebesar 28 persen pekerja di Kabupaten Nganjuk berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Kemudian, sebanyak 21 persen memiliki usaha sendiri dengan dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar dan pengusaha mandiri sebanyak 19 % pada tahun 2022. Terlihat bahwa pekerja formal di Kabupaten Nganjuk mencapai hampir 32 persen dan sisanya merupakan pekerja informal. Sebagaimana diketahui, pekerja formal biasanya memiliki banyak manfaat seperti keberadaan kontrak kerja, jaminan sosial, kebebasan berserikat, dan jam kerja lebih teratur

Gambar 2.20
Penduduk Usia 15 Keatas yang Bekerja Menurut Status
Pekerjaan Pada Pekerjaan Utama Kabupaten Nganjuk Tahun 2022



Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk, 2022

Dengan komposisi status pekerja sebagaimana ditampilkan pada Gambar diatas, dapat dipastikan bahwa hampir dua per tiga pekerja di Kabupaten Nganjuk tidak menerima manfaat-manfaat sebagai seorang pekerja sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Tingginya porsi pekerja formal di suatu daerah dapat menjadi indikasi pembangunan ekonomi yang pesat. Sebaliknya, tingginya porsi pekerja keluarga menunjukkan masih dominannya sektor pertanian di wilayah tersebut. Jumlah pekerja keluarga/tidak dibayar masih sekitar 13 persen. Sedangkan yang berstatus sebagai pekerja bebas baik dari sector pertanian maupun non pertanian sebesar hampir 15 persen.

Menurut ILO (2015), tingginya jumlah pekerja berstatus pekerja mandiri mengisyaratkan masih besarnya peran sektor pertanian dalam perekonomian dan lambatnya pertumbuhan sektor formal. Sebaliknya, besarnya porsi pekerja berstatus buruh/karyawan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Pelayanan Umum Urusan Wajib Dasar

2.3.1.1. Pendidikan

Selama lima tahun terakhir, capaian bidang pendidikan dapat dilihat dari indikator-indikator makin meningkatnya angka kelulusan di tiap jenjang pendidikan dari SD hingga SMP/MTs, angka putus sekolah yang semakin menurun setiap tahun, angka kelulusan yang semakin meningkat di seluruh jenjang, dan persentase guru yang memiliki kualifikasi sarjana juga semakin meningkat. Berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan di Kabupaten Nganjuk sangat dinamis dan mampu bersaing dengan daerah lain. Angka Partisipasi Murni salah satu tolok ukur keberhasilan pendidikan karena dapat meningkatkan nilai indeks pendidikan yang merupakan bagian dari Indeks Pembangunan Manusia. Angka APM di Kabupaten Nganjuk di atas angka rata-rata APM Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun belakangan ini. Capaian indikator pembangunan di bidang pendidikan ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.24.

Data Bidang Pendidikan di Kabupaten Nganjuk
Tahun 2016 – 2022

No	Jenjang	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Partisipasi Murni							
-	SD/MI	94.43	95.03	98,65	98,80	99,20	98,48	89,37
-	SMP/MTs	79.57	97.28	92,57	94,44	96,50	99,97	94,79
2	Angka Partisipasi Kasar							
-	SD/MI	108.25	104.86	107,34	111,18	115,20	106,66	94,02
-	SMP/MTs	102.98	142.94	105,89	149,26	150,35	141,29	99,34

No	Jenjang	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3	Angka Putus Sekolah							
-	SD/MI	0.01	0.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	SMP/MTs	0.01	0.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Angka Kelulusan Sekolah							
-	SD/MI	100.00	100.00	99,75	100,00	100,00	100,00	100,00
-	SMP/MTs	100.00	99.98	99,34	99,94	99,89	99,87	100,00
5	Angka Melek Huruf	92.13	93.54	100,00	100,00	100,00		
6	Rata-rata Lama Sekolah	7.34	7.38	7,61	7,63	7,64	7,78	8,12
7	Persentase Guru Kualifikasi							
-	SD/MI	89.73	89.38	98,20	99,82	93,45		
-	SMP/MTs	95.83	95.76	98,63	98,98	91,91		
8	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	78.71	72.56	63,99	106,48	120,32	117,65	102,95
9	Indeks Pendidikan	0,601	0,602	0,610	0,611	0,612	0,620	0,630

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

Beberapa Faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pendidikan adalah rasio siswa terhadap daya tampung sekolah, kelayakan sarana dan prasarana serta kualitas pendidik. Pencermatan atas dasar sebaran Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) menunjukkan bahwa ketersediaan sarana prasarana, aksesibilitas, serta kondisi sosial ekonomi, berpengaruh pada peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)

a. Angka Partisipasi Sekolah

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur capaian kinerja bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator ini menunjukkan seberapa besar anak usia sekolah

menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan mendasar.

Tabel 2.25.

Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Nganjuk
Tahun 2018 – 2023

No	Data	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Anak Sekolah SD/MI 7 – 12	94.028	85.779	89.887	89.234	90.821
2	Jumlah Usia 7 – 12	95.318	86.821	90.612	90.612	101.625
APM SD/MI (%)		**98,65**	**98,80**	**99,20**	**98,48**	**89,37**
3	Jumlah Anak Sekolah SMP/MTs 13 – 15	44.420	31.477	35.374	36.643	49.281
4	Jumlah Usia 13 – 15	47.987	33.330	36.655	36.655	51.990
APM SMP/MTs (%)		**92,57**	**94,44**	**96,50**	**99,97**	**94,79**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

Tabel 2.26.

Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Nganjuk
Tahun 2018 – 2023

No	Data	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Anak Sekolah SD/MI	102.310	96.532	104.385	96.649	95.551
2	Jumlah Usia 7 – 12	95.318	86.821	90.612	90.612	101.625
APK SD/MI (%)		**107,34**	**111,18**	**115,20**	**106,66**	**94,02**
3	Jumlah Anak Sekolah SMP/MTs	50.815	49.747	55.111	51.790	51.648
4	Jumlah Usia 13 – 15	47.987	33.330	36.655	36.655	51.990
APK SMP/MTs (%)		**105,89**	**149,26**	**150,35**	**141,29**	**99,34**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

b. Angka Kelulusan

Angka kelulusan menggambarkan jumlah murid yang dapat menyelesaikan tingkatan pendidikan tertentu.

Tabel 2.27.

Jumlah Kelulusan Sekolah di Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023

No	Data	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Siswa Tingkat Akhir SD/MI	16.642	16.834	17.499	16.449	17.506
2	Lulusan Jenjang SD/MI	16.600	16.834	17.499	16.449	17.506
3	Jumlah Siswa Tingkat Akhir SMP/MTs	14.352	16.266	16.039	16.548	17.714
4	Lulusan Jenjang SMP/MTs	14.257	16.256	16.022	16.527	17.714

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk 2023

c. Rasio Guru/Murid

Rasio Guru/Murid dalam hal ini adalah perbandingan jumlah guru dengan jumlah murid untuk masing-masing tingkat pendidikan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

Tabel 2.28.

Rasio Guru terhadap Murid dalam 5 tahun terakhir di Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023

Tahun	Jenjang	
	SD	SMP
2016	1 : 13,30	1 : 17,42
2017	1 : 15,79	1 : 21,13
2018	1 : 12,24	1 : 13,41
2019	1 : 13,44	1 : 14,05
2020	1 : 14,13	1 : 13,70
2021	1 : 13,62	1 : 14,07
2022	1 : 12,88	1 : 14,57

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk 2023

Tabel 2.29.

Rasio Murid dan Guru di Kabupaten Nganjuk Tahun 2018– 2022

No	Data	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Siswa SD/MI	102.310	96.532	98.347	96.649	95.551
2	Jumlah Guru SD/MI	8.356	7.181	6.962	7.096	7.416
3	Jumlah Siswa SMP/MTs	50.815	49.747	49.772	51.619	51.648
4	Jumlah Guru SMP/MTs	3.790	3.540	3.633	3.668	3.543

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

Rasio guru terhadap jumlah siswa di Kabupaten Nganjuk pada semua jenjang Pendidikan sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan, yaitu setiap 1 (satu) orang Guru berbanding dengan 13-17 orang siswa. Dalam beberapa waktu ke depan, SPM ini akan ditingkatkan lagi melalui peningkatan kualitas Guru.

d. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menggambarkan jumlah siswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkatan tertentu (*Drop Out*). Angka putus sekolah di Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami perbaikan. Angka putus sekolah tertinggi terjadi pada tahun 2017. Namun pada tahun-tahun selanjutnya, angka putus sekolah tersebut berhasil ditekan hingga angka nol.

Tabel 2.30.

Jumlah Anak Putus Sekolah di Kabupaten Nganjuk
Tahun 2017 – 2022

No	Data	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Anak Sekolah SD/MI	101.356	102.310	96.532	98.347	96.649	95.551
2	Jumlah anak Putus Sekolah SD/MI	12	3	0	0	0	0
3	Jumlah Anak Sekolah SMP/MTs	49.856	50.815	49.747	49.772	51.619	51.648
4	Jumlah anak Putus Sekolah SMP/MTs	7	0	2	0	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk 2023

e. Profesionalitas Guru

Guru merupakan salah satu faktor strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan karena gurulah yang meletakkan dan mempersiapkan dasar perkembangan potensi peserta didik untuk masa depan bangsa. Untuk melaksanakan itu, tentu diperlukan guru yang berkualitas dan dan berdedikasi tinggi. Tabel dibawah menggambarkan kualitas guru di Kabupaten Nganjuk. Ada sebagaian kecil guru SD/MI dan SMP/MTs yang belum berijasah minimal S1 atau D4.

Tabel 2.31.

Kualifikasi Guru di Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2022

No	Data	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Guru SD/MI	8.356	7.181	6.962	7.096	7.416
2	Guru Berijazah S1/D IV	8.206	7.168	6.506	5.021	5.011
3	Jumlah Guru SMP/MTs	3.790	3.540	3.633	3.668	3.543
4	Guru Berijazah S1/D IV	3.738	3.504	3.339	2.093	1.787
5	Guru Berijazah S1/D IV	2.779	2.732	2.887		

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk 2023

f. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Tabel 2.32.

Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2022

No	Data	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Anak Sekolah TK/RA	34.083	33.250	41.598	40.674	31.157
2	Jumlah Usia 4 – 6	53.260	31.227	34.572	34.572	30.265

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk 2023

g. Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, bahwa dalam rangka pemenuhan capaian SPM Bidang Pendidikan diperlukan penetapan target pada awal perencanaan Tahun 2020. Penetapan target tersebut difungsikan sebagai langkah awal perencanaan serta pengukuran atas kemampuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan capaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan. Adapun penetapan target SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

Tabel 2.33.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

No	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	97,59%	*98,42%*	*83,73%*	*89,61%*
2	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	0,87%	*0%*	*0,14%*	*100,00%*
3	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	93,06%	*91,42%*	*97,73%*	*99,22%*

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk, Tahun 2022

2.3.1.2. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka secara langsung atau tidak langsung akan terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat. Mempertimbangkan bahwa pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian yang sangat penting bagi peningkatan SDM, pada calon generasi penerus, sejak dari kandungan dan balita. Indikator bidang kesehatan selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut

Tabel 2.34.

Indikator Bidang Kesehatan di Kabupaten Nganjuk
Tahun 2018 – 2022

No	Jenjang	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	6.73	7.2	8.14	5.81	13.28
2	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	77.63	63.42	83.47	242.5	171,14
3	Balita dengan gizi buruk	0.1	0.12	1.74	11.9	1.2
4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil	78.7	77.9	80.6	78.7	11.838
5	Penduduk miskin yang dilayani	73.13	74.10	-	0.5	-
6	Desa dengan cakupan UCI (%)	84.9	92.3	85.21	100	96,54
7	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit:					
	- Prevalensi HIV	0.060	0.001	0.01	0.01	0.02532
	- Penderita TBC BTA sembuh setelah pengobatan	78.41	78.8	74.5	45.8	50.18

No	Jenjang	2018	2019	2020	2021	2022
	- Prevalensi Penderita Kusta	0.43	0.4	0.19	0.1	0.3
8.	Indeks Kesehatan	0.788	0.791	0.792	0.79	0.80

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk 2023

Tabel 2.35.

Jumlah Kematian Bayi, Kematian Ibu dan Jumlah Kelahiran Hidup di Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2022

No	Data	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kematian Bayi	104	102	117	70	163
2	Jumlah Kematian Ibu	12	9	12	30	21
3	Jumlah Kelahiran Hidup	15.458	14.192	14.376	13.249	12.271

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk 2023

Dari data angka kematian bayi tahun 2018-2022 tercatat jumlah kematian bayi mengalami kenaikan dari angka 104 pada tahun 2018 dan 163 pada tahun 2022. Sedangkan jumlah kelahiran hidup juga cenderung menurun yaitu di tahun 2018 yaitu 15.458 dan di tahun 2022 adalah 12.271. Menurunnya jumlah kelahiran merupakan dampak dari menurunnya *Total Fertility Rate* (TFR).

Kematian ibu tahun 2017-2020 berflutuasi pada kisaran 11- 13 jiwa. Akan tetapi pada tahun 2021 angka kematian ibu naik signifikan sebanyak 30 kasus dan pada Tahun 2022 sebanyak 21 kasus.

Tabel 2.36.

Balita Gizi Buruk dan Balita Stunting di Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2020

No	Data	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Balita Gizi Buruk (jiwa)	5.308	5.354	7.776	618
2	Persentase balita stunting)* (%)	11,87	11,02	11.9	7.17
3	Jumlah Balita	61.186	51.974	65.342	72.919

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk 2023

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kabupaten

Nganjuk, dari data dinas kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 angka balita gizi buruk sebanyak 618 kasus balita gizi buruk.

Status balita stunting di Kabupaten Nganjuk berdasar hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilaksanakan setiap 5 tahun, di Tahun 2013 mencapai 44,3 % dan di Tahun 2018 menurun menjadi 29,7%. Angka ini relatif tinggi sehingga sejak tahun 2018 oleh karena itu pemerintah pusat Kabupaten Nganjuk di tetap kan sebagai 100 daerah kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi prioritas dalam penanganan stunting. Berdasarkan hasil pengukuran balita di Kabupaten Nganjuk pada saat bulan timbang yaitu bulan februari dan agustus status balita stunting dapat di lihat pada tabel 2.50. Terlihat bahwa prevalensi balita stunting Tahun 2019 sebesar 11,87 % dan di Tahun 2021 naik menjadi 11,9 % dan pada tahun 2022 turun menjadi 7,17%. Jika di Bandingkan dengan hasil rekesdas selisihnya dengan hasil pada bulan timbang memang cukup besar, tetapi yang jelas bahwa stunting masih menjadi masalah di Kabupaten Nganjuk.

Tabel 2.37.

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil di Kabupaten Nganjuk
Tahun 2018 – 2022

No	Data	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Ibu Hamil	17.004	16.619	16.434	15.678	15.519
2	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Kunjungan	13.381	12.950	13.247	12.451	11.838
	Cakupan (%)	78,7	77,9	80,6	79.4	76.28

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk 2022

Dari data cakupan ibu hamil Kabupaten Nganjuk tahun 2018 - 2022 tercatat jumlah ibu hamil terbanyak pada tahun 2018 dengan angka 17.004 dan ibu hamil yang mendapatkan kunjungan tertinggi pada tahun 2020 dengan angka 13.247 (80,6%) Jumlah kehamilan setiap tahun terus menurun dan terendah pada tahun 2022 sebesar 15.519 kehamilan.

Tabel 2.38.

Desa dengan cakupan UCI di Kabupaten Nganjuk
Tahun 2018 – 2022

No	Data	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Desa/Kelurahan	284	284	284	284	284
2	Desa/Kelurahan Cakupan UCI	184	262	242	209	247
	Cakupan	64,8	92,3	85,2	73,6	96.64

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk 2023

Pencapaian *Universal Child Immunization (UCI)* pada dasarnya merupakan proyeksi terhadap cakupan sasaran bayi yang telah mendapatkan imunisasi secara lengkap. Dari data Desa dengan cakupan UCI tahun 2018-2022 terlihat pada tabel tersebut diatas. Tahun 2018 dari sejumlah 284 Desa/Kelurahan cakupan UCI yaitu 184, tahun 2019 cakupan UCI 262, pada tahun 2020 menurun menjadi 242, Tahun 2021 menurun menjadi 209 dan terakhir tahun 2022 yaitu 247.

Tabel 2.39.

Prevalensi HIV di Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2022

No	Data	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penderita HIV Yang Masih Hidup	149	169	113	185	269
	Prevalensi	0,014	0,016	0,011	0.012	0.02532

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk 2023

Tabel 2.40.

Prevalensi Penderita Kusta di Kabupaten Nganjuk
Tahun 2017 – 2021

No	Data	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Temuan Baru (PB + MB)	3	5	20	10	30

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk 2022

Indikator ini menunjukkan jumlah kasus kusta terdaftar *Pausi Basiler (PB)* maupun *Multi Basiler (MB)* pada saat tertentu per 10.000 penduduk. Di Kabupaten Nganjuk pada data Prevalensi Penderita Kusta 2018-2022 pada tahun 2020 tercatat memiliki Jumlah Temuan Baru (PB + MB) paling tinggi dengan angka 20 kasus.

Tabel 2.41.

Jumlah Kasus TB Per Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2022

No	Data	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kasus TB	564	1.028	711	443	1050

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk 2023

Angka kematian bayi dan ibu melahirkan menunjukkan tren yang naik bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pelayanan dasar kesehatan, sehingga mampu menekan kematian ibu melahirkan dan bayi lahir. Namun bila dibandingkan dengan capaian SDGs (12 per 1000 kelahiran hidup) maka angka tersebut masih belum mencapai target yang diharapkan.

Demikian pula angka kematian ibu melahirkan yang standard capaian SDGs (70 per 100.000) maka angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Nganjuk 171,14 pada Tahun 2022 masih jauh berada diatas target. Capaian bidang kesehatan yang paling tampak adalah pada penurunan angka balita gizi buruk, penduduk yang memanfaatkan Puskesmas, dan peningkatan rumah sehat.

Kabupaten Nganjuk termasuk dalam 100 Kabupaten/Kota yang mendapat prioritas penanganan Stunting secara nasional. Hasil pendataan riset kesehatan dasar yang dilaksanakan pada tahun 2013 dan dipublikasikan tahun 2016 prevalensi stunting Kabupaten Nganjuk adalah 44,33 %. Hasil survey Provinsi Jawa Timur tahun 2018 prevalensi stunting di Kabupaten Nganjuk menurun menjadi 25,9% sedangkan menurut hasil pendataan bulan timbang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk bahwa prevalensi stunting Kabupaten Nganjuk adalah 16,1 %.

a. Jumlah Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak jumlah ketersediaan rumah sakit, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Ketersediaan rumah sakit diukur dari rasio jumlah rumah sakit dibagi dengan jumlah penduduk. Jumlah rumah sakit di Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.42.

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Nganjuk

Tahun	Fasilitas Kesehatan						
	RS	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Tempat Tidur	Balai Pengobatan	Rumah Bersalin	Klinik
2018	5	20	81	678	0	0	30
2019	5	20	82	1.023	0	0	31
2020	5	20	82	1.054	0	0	31
2021	5	20	82	961	0	0	34
2022	5	20	82	905	0	0	36

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Kab.Nganjuk 2023

b. Jumlah Tenaga Medis

Tenaga medis di rumah sakit yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk sangat menentukan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk. Dimana tenaga medis merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat menerima pelayanan kesehatan. Berikut adalah data secara lengkap mengenai jumlah tenaga medis pada tahun 2022:

Tabel 2.43.

Jumlah Tenaga Medis di Puskesmas Tahun 2022

Kecamatan	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi
Sawahan	3	9	19	2	1
Ngetos	6	5	13	1	1
Berbek	2	15	35	4	0
Loceret	2	16	34	1	1
Pace	6	11	30	2	1
Tanjunganom	6	12	37	2	1
Prambon	6	20	41	2	1
Ngronggot	6	19	26	1	1
Kertosono	3	11	19	2	2
Patianrowo	4	11	28	1	1
Baron	5	11	21	2	1
Gondang	7	12	28	0	1
Sukomoro	3	15	19	1	2
Nganjuk	1	11	27	3	1
Bagor	2	8	30	1	1
Wilangan	3	9	13	0	1
Rejoso	6	24	28	3	1
Ngluyu	4	9	15	2	3
Lengkong	3	16	18	1	1
Jatikalen	2	5	14	1	1
Nganjuk	1	11	27	3	3

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk 2023

Tabel 2.44.

Jumlah Tenaga Medis Dinas Kesehatan dan RSU Tahun 2022

No	Tenaga Kesehatan	Dinkes	RSU Nganjuk	RSU Kertosono
1	Dokter Spesialis		31	24
2	Dokter Umum	75	20	18
3	Dokter Gigi	19	2	3
4	Apoteker	32	10	4
5	Ahli Gizi	23	13	8
6	Pembantu Ahli Gizi			
7	Bidan	495	47	49
8	Perawat	248	250	160
9	Asisten Apoteker/SMF/Ak.F	32	20	11
10	Asisten Rontgen /APRO		12	9
11	Perawat Gigi			
12	SPPH (Hygiene)			
13	Kesehatan Masyarakat (SKM)	5	3	1
14	Analisis kesehatan/pranata laboratorium kesehatan	31	19	13

No	Tenaga Kesehatan	Dinkes	RSU Nganjuk	RSU Kertosono
15	Fisioterapis		4	3
16	Rekam Medik		4	4
17	Tenaga Kesehatan Lainnya			

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk 2023

Tabel 2.45.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No	Indikator	Realisasi			
		2019	2020	2021	2022
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	77,92%	69,63%	79,57%	76.28%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	89,26%	91,64%	*82,11%*	*84.84%*
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	94,84%	86,32%	90,56 %	86.98%
4	Pelayanan kesehatan balita	74,25%	50,40%	74,64%	80.08%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	99,63%	60,00%	49,26 %	77.34%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	11,99%	44,88%	23,52%	56.45%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	60,77%	40,51%	49.65%	54.78%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	9,06%	41,99%	14.53%	23.63%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	58,20%	78,05%	97.08%	101,04 %
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	125,40%	90,82%	76.11%	132,51 %
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	100%	76,19%	18.57%	31.74%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	99,93%	59,98%	105,50%	126,24%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Nganjuk, Tahun 2023

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sarana dan prasarana wilayah yang meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, telekomunikasi, listrik dan energi serta sarana dan prasarana dasar permukiman merupakan aspek utama dalam pembangunan suatu daerah serta memiliki peran yang penting bagi peningkatan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.

Prasarana transportasi merupakan tulang punggung pengembangan wilayah sehingga sangat penting untuk menunjang kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi. Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Pada saat ini prasarana transportasi masih belum maksimal dalam memfasilitasi tingginya pergerakan masyarakat yang ditunjukkan oleh masih terdapat jalan dalam kondisi yang rusak. Belum maksimalnya infrastruktur transportasi dalam memfasilitasi pergerakan masyarakat disebabkan rendahnya jumlah jalan dalam kondisi baik dan pembangunan jalan-jalan baru, serta belum maksimalnya struktur konstruksi jalan. Kondisi tersebut diperburuk dengan tingginya beban lalu lintas yang sering melampaui kapasitas. Namun demikian dari data yang dihimpun, selain peningkatan panjang jalan, dapat dilihat proporsi kondisi jalan yang baik tiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

a. Penyelenggaraan Jalan

Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang

meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Penyelenggaraan jalan diarahkan untuk mewujudkan kondisi jaringan jalan yang mantap dalam mendukung konektivitas antar wilayah, pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Penyelenggarakan jalan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan kewenangannya berada di jalan Kabupaten yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor : 188/21/K/411.013/2016 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten. Jalan Kabupaten tersebut yang tersebar di 20 Kecamatan dengan panjang ruas 1.153,482 km. selama kurun waktu 2019-2021 pemerintah kabupaten nganjuk telah berupaya melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, rekonstruksi dan pemeliharaan jalan dan bangunan perlengkapannya untuk mewujudkan kondisi jalan kabupaten mantab fungsional, dengan data realisasi sebagai berikut:

Tabel 2.46.

Capaian Kinerja Pengelolaan Prasarana Jalan Tahun 2020 - 2022 (Persen)

No	Data	2020	2021	2022
1	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten (Km)	1.153,482	1.153,482	1.153,482
2	Panjang jalan dalam kondisi mantab fungsional (Km)	982,923	1.004,358	1.016,419
3.	Presentase Panjang Jalan dalam kondisi mantab fungsional	85,21%	87,07%	88,12%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk 2023

Kinerja penyelenggaran jalan atau perawatan fasilitas jalan di Nganjuk sudah terbilang baik. Tingkat pemenuhan kebutuhan jalan dan Panjang jalan yang diperbaiki sesuai dengan target kinerja yang telah ditentukan. Panjang jalan dalam kondisi baik mencapai 1016,4 km atau setara

dengan 88,12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat cukup tinggi. Salah satunya diwujudkan dalam bentuk dukungan anggaran dan realisasi perbaikan kualitas jalan di Kabupaten Nganjuk.

b. Perkembangan Jaringan Irigasi

Pengelolaan jaringan irigasi dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan air irigasi guna mendukung ketahanan/kedaulatan pangan dengan meningkatkan produksi padi. Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaanya. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Berikut secara lengkap disajikan capaian kinerja pengelolaan jaringan irigasi di Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2022.

Tabel 2.47.

Capaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2022

No	Jenjang	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik (%)	93,42	70,83	79,08	75.74	78,55
2	Persentase Kelompok HIPPA yang aktif (%)	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31
3	Rasio ketersediaan air irigasi (indikator lama)	55.46	66.56	63.67	66.30	73.28
4	Indeks Kinerja Saluran Irigasi (indikator baru)	70,41	85,77	60,78	65.74	69,55

Sumber: Dinas PUPR, 2023

Pencapaian kinerja pengelolaan irigasi salah satunya diukur dengan indeks kinerja saluran irigasi (IKSI). Indeks Kinerja Saluran Irigasi

(IKSI) merupakan penilaian untuk mengetahui kondisi kinerja irigasi pada Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka mendukung produktivitas pertanian. Pengukuran IKSI berdasarkan petunjuk Peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/ PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, meliputi 6 indikator dengan dengan bobot masing-masing sebagai berikut:

1. Prasarana Fisik (45%).
2. Produktivitas tanam (15%).
3. Sarana Penunjang (10%).
4. Organisasi personalia (15%).
5. Dokumentasi (5%).
6. Kondisi Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) (10%)

Adapun IKSI Kabupaten Nganjuk didapatkan dari rata rata nilai IKSI 210 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Nganjuk, sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status daerah Irigasi.

Tabel 2.48.

Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2022

No	Data	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kelompok HIPPA	284	284	284	284	284
2	Realisasi Kelompok HIPPA Yang Aktif	220	222	228	235	238
3	Target Kelompok HIPPA Yang Aktif	221	225	230	240	240

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk 2021

Untuk mencapai ketersediaan air irigasi, selama periode Tahun 2018-2022 telah dilakukan pembangunan jaringan irigasi sepanjang 82.294,65 meter. Pencapaian tersebut telah meningkatkan panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik sampai Tahun 2022 sepanjang 325.657 meter atau 81,33% dari total panjang jaringan irigasi yang

ada yaitu 400.401 meter. Pengelolaan jaringan irigasi yang telah dilakukan selama periode 2018 - 2022 juga telah menjamin ketersediaan air irigasi pada Tahun 2012 mencapai 31.680 lt/det pada setiap musim tanam atau 73,28% dari 43.229 lt/det kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tanam Tahun 2022.

Tabel 2.49.

Jaringan Irigasi di Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2022

No	Data	2018	2019	2020	2021	2022
1	Realisasi Panjang Jaringan Irigasi Yang Ada*)	400.401	400.401	400.401	400.401 m	400.401 m
2	Realisasi Panjang Jaringan Irigasi yang dibangun	13.818	26.436	33.040,65	3.200	5.800
3	Realisasi Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	257.150,35	283.586,35	316.627,00	319.827	325.657

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk 2023

Selain meningkatkan daya guna air, pengelolaan jaringan irigasi juga diarahkan untuk mengendalikan daya rusak air. Melalui program pengendalian banjir telah dilaksanakan.

Tabel 2.50.

Ketersediaan Air Irigasi di Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2022

No	Data	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Total Kebutuhan Air Irigasi Berdasarkan Rencana Tanam (liter/Detik)	49.404	46.180	46.180	46.546	43.229
2	Total ketersediaan air irigasi yang sampai di petak tersier (liter/Detik)	23.825	26.727	25.566	26.836	27.548
3	Realisasi ketersediaan air irigasi pada setiap musim tanam (liter/Detik)	27.399	30.736	29.401	30.861	31.680

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk 2022

Berdasarkan data pada table 2.67 ketersediaan air irigasi di petak tersier cukup besar. Namun jika dilihat dari total kebutuhan dan realisasi air irigasi di musim tanam masih mengalami defisit. Artinya ke depan Pemerintah Kabupaten Nganjuk akan berusaha untuk memperbaiki tata kelola air irigasi, sehingga jumlah kebutuhan air irigasi di musim tanam dapat tercukupi.

c. Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan ketaatan terhadap pemanfaatan ruang daerah. Pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Nganjuk. Jumlah pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang merupakan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Pemanfaatan ruang di Kabupaten Nganjuk disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.51.

Pemanfaatan Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2022

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Luas yang dimohon (m2)	641.551	1.782.740	138.605	464.723
2	Luas yang disetujui (m2)	627.792	1.768.828	93.112	454.259

Sumber : Dinas PUPR tahun 2023

d. Daya Dukung Penyediaan Air Bersih (Air Minum) dan Sanitasi (Pengolahan Air Limbah Domestik)

Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen sangat kuat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu tujuan TPB/SDGs, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan. Dalam rangka menyiapkan implementasi SDGs, Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2019 akan menyusun *Road Map* / Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Road Map* SDGs) yang berpijak dari capaian MDGs. Sejalan dengan tujuan TPB/SDGs, pemerintah juga menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum (PU) yaitu pemenuhan Kebutuhan pokok Air Minum Sehari-hari dengan 60 liter/orang/hari serta penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No 29/2018 tentang SPM PUPR, Pemenuhan Kebutuhan pokok Air Minum Sehari-hari dipenuhi dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan perpipaan (JP) atau akses air minum aman baik melalui PDAM dan SPAM JP berbasis Masyarakat serta SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) terlindungi (sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, kran umum, hidran umum, terminal air yang jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja lebih dari 10

meter). Adapun penyelenggaraan SPAM JP (akses aman) dilaksanakan oleh beberapa stakeholder yaitu:

1. PDAM Nganjuk selaku BUMD Kabupaten Nganjuk sebagai penyelenggara (Pengelolaan dan Pengembangan) Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan (SPAM) di wilayah perkotaan .
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang selaku pengampu urusan PU melalui penyelenggaraan (Pengelolaan dan Pengembangan) SPAM wilayah perdesaan, baik melalui pendanaan APBD, DAK maupun APBN (program SPAM berbasis Masyarakat).
3. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan air minum berbasis masyarakat melalui kelompok HIPPAM dan KPSPAM.

Adapun SPAM BJP terlindungi diselenggarakan oleh masyarakat dan didorong dengan pemicuan melalui sosialisasi serta pendampingan kesadaran akan hidup bersih dan sehat oleh Dinas Kesehatan.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (dengan basis data Hasil Survey Keluarga PPKBS, 2021 serta updating pelaksanaan kegiatan 2022) Pada tahun 2022, persentase rumah tangga yang dengan akses air minum JP (akses aman) dan BJP terlindungi sebesar 95,52 % (80,32 % BJP terlindungi dan 15,20% JP). Capaian pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Kabupaten Nganjuk belum dapat mencapai 100 %, hal ini dikarenakan masih terdapat 4,48% rumah tangga yang mengakses sumber air minum melalui sumur tidak terlindung, air permukaan serta sumber lainnya yang tidak termasuk BJP terlindungi serta JP.

Sesuai dengan PUPR No 29/2018 tentang SPM PUPR, penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik meliputi rumah tangga dengan akses dasar, akses layak, akses aman Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) dan akses aman Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik terpusat (SPALDT). Sampai dengan saat ini Kabupaten Nganjuk belum memiliki IPLT maupun kerjasama pembuangan limbah domestik dengan IPLT terdekat sehingga capaian

penyediaan pengolahan air limbah domestik dihitung berdasarkan rumah tangga dengan akses dasar, akses layak SPALDS. Adapun kategorisasi akses dasar dan akses layak SPALDS berdasarkan Permen PUPR 29 Nomor Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.52.

Jenis Unit Pengolahan Setempat dan Lokasi Penerapannya

Jenis unit pengolahan setempat	Perkotaan	Perdesaan
Cubluk kembar	Tanpa Akses	Akses Dasar
Tangki septik individual	Akses Layak	Akses Layak
MCK	Akses Layak	Akses Layak
Tangki Septik Komunal	Akses Layak	Akses Layak

Sumber: lampiran 1 Permen PUPR 28/2019

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (dengan basis data Hasil Survey Keluarga PPKBS, 2021 serta updating pelaksanaan kegiatan 2022) pada tahun 2022, terdapat 99,85 % penduduk dengan akses penyediaan pengolahan air limbah domestik (layak 94,61 % serta dasar 5,24%) dam masih terdapat 0,15% rumah tangga di wilayah perkotaan yang memakai cublik kembar sebagai sarana pengolahan air limbah domestik.

Berikut data realisasi kinerja penyediaan air minum dan pengolahan air limbah domestik Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2022:

Tabel 2.53.

Realisasi Kinerja Penyediaan air minum dan pengolahan air limbah Domestik Kabupaten Nganjuk serta SPM Pekerjaan Umum Tahun 2021-2022

Indikator	2021	2022
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan terlindungi	95,37% (14,15% JP dan 81,22% BJP terlindungi)	95,52 % (15,20% JP dan 80,32 % BJP terlindungi)
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99,85 % (layak 94,35 % serta dasar 5,5%)	99,85 % (layak 94,61 % serta dasar 5,24%)

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Sanitasi lingkungan merupakan salah satu fokus pembangunan kesehatan. salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh Pemerintah daerah adalah sanitasi rumah tangga termasuk MCK. ketersediaan air bersih, fasilitas dan sarana menjadi faktor yang berpengaruh dalam perubahan perilaku BABS. Keberhasilan intervensi program MCK Komunal maupun Sanitasi Total Berbasis Lingkungan (STBM) dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Pemerintah daerah untuk menyediakan sarana prasarana dasar bagi masyarakat.

Tabel 2.54.

Prosentase Akses Jamban

Indikator	2020	2021	2022
Jumlah KK	310873/318112	311452	311145
JSP	217644	223970	224235
% Akses JSP	69.54	71.91	72.07
JSSP	64000	60448	60287
% Akses JSSP	20.83	19.41	19.38
Sharing	26867	27626	26623
% Akses Sharing	8.89	8.58	8.56
BABS	2362	0	0
% Akses BABS	0.74	0	0
% Akses Progres	99.26	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2023

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan Kabupaten Nganjuk telah berhasil menghilangkan kebiasaan BABS. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi pemenuhan infrastruktur dasar untuk sanitasi rumah tangga telah menunjukkan kinerja optimal yang didukung dengan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat

e. Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum

Dapat diambil kesimpulan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum khususnya kinerja penyediaan infrastruktur pekerjaan umum yang meliputi penyediaan akses air minum, pengolahan air limbah domestik, jalan, serta kinerja saluran irigasi, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggunakan pengukuran memakai Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum, dengan formulasi sebagai berikut:

Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum = ∑ Bobot perolehan Realisasi Kinerja Komponen Infrastruktur Pekerjaan Umum*)

Perhitungan terhadap Pembobotan Indeks Infrastuktur Pekerjaan Umum:

No	Komponen Indeks Infrastruktur Pekerjan Umum	Nilai maksimal	Bobot tiap komponen	Skor perolehan	Bobot perolehan
1.	Realisasi Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	100	25	a	(a/100) x25
2.	Realisasi Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi	100	25	b	(b/100) x25
3.	Realisasi Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik layak dan aman	100	25	c	(d/100) x25
4.	Realisasi IKSI Kewenangan Kabupaten	100	25	d	(e/100) x25

Perhitungan baseline Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2022

No	Komponen Indeks Infrastruktur Pekerjan Umum	Nilai maksimal	Bobot tiap komponen	Skor perolehan	Bobot perolehan
1.	Realisasi Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	100	25	68,58	17,145
2.	Realisasi Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi	100	25	95,52	23,88
3.	Realisasi Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik layak dan aman	100	25	94,61	23,6525
4.	Realisasi IKSI Kewenangan Kabupaten	100	25	69,55	17,3875
Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum					**82,065**

2.3.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perumahan dan kawasan permukiman didefinisikan sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan

peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menyelenggarakan Kegiatan pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kegiatan tersebut bermuara pada komitmen untuk mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat kabupaten Nganjuk. Berikut data hasil Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2022:

Tabel 2.55.

Data Hasil Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2022

Data	2021	2022
Jumlah Rumah di Kabupaten Nganjuk	316.942 Unit	318.930 Unit
Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Nganjuk (unit)	305.180 unit	307.587 Unit
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit)	11.762 Unit	11.343 Unit
Akumulasi Pengurangan luas Kawasan perumahan dan permukiman kumuh	28 Ha (21,34%) dari 131,2 Ha	62,74 Ha (47,82%) dari 131,2 Ha

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk, 2023

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan rumah juga mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.66 terdapat peningkatan jumlah rumah di Kabupaten Nganjuk yang juga berimplikasi pada peningkatan kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) penunjang fungsi hunian. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga terus berupaya mewujudkan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat kabupaten Nganjuk melalui kegiatan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi:

- Penyediaan rumah layak huni melalui kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dan/ atau korban bencana serta proyek pemerintah melalui pendanaan APBD, APBD Provinsi, APBN maupun CSR.
- Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas (PSU) perumahan untuk menunjang fungsi perumahan yang layak huni.
- Peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui beberapa intervensi, diantaranya perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU-nya. Adapun Lokasi Perumahan Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188/208/K/411.012/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Nganjuk, meliputi 18 Lokasi di enam kecamatan dengan luas total 131,2 Ha.
- Pembinaan teknis bagi masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Pertambahan kebutuhan hunian serta penurunan kualitas lingkungan permukiman juga menimbulkan potensi tumbuhnya kawasan perumahan dan permukiman kumuh baru. untuk itu pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dalam rangka monitoring dan evaluasi kondisi perumahan dan permukiman kumuh sebagai bahan perencanaan selanjutnya, melaksanakan kegiatan identifikasi lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh. Dari kegiatan pendataan tersebut terdapat 30 lokasi kawasan perumahan dan permukiman yang dalam kondisi/ memiliki potensi kumuh baru, dengan luas total 155,88 Ha.

Salah satu bentuk penyediaan rumah layak huni yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga untuk melaksanakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat 2 (dua) jenis SPM Bidang Perumahan Rakyat yaitu:

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Berikut data pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat yang dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2022:

Tabel 2.56.

Data Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat yang dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2022

No	Data	2021			2022			Catatan
		Target	realisasi	Capaian	Target	realisasi	Capaian	
a	Rumah Relokasi Proyek Pemerintah	-			210 unit Rumah	210 unit Rumah	100%	Ganti aset Proyek bendungan Semantok (141 Unit Rumah di Desa Sambikerep dan 69 Unit Rumah di Desa Tritik Kecamatan Rejoso
b	Rumah korban Bencana	24 Unit Rumah	24 Unit Rumah	100%	73 Unit Rumah	73 Unit Rumah	100%	Unit rumah yang terdampak bencana alam ditangani melalui Rehabilitasi (2021: tersebar di 24 desa; 2022 tersebar di 8 Desa)

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk (melalui aplikasi Sicalmers), 2023

2.3.1.5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka mensukseskan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan semakin dirasakan perlunya meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Nganjuk terutama upaya menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Nganjuk terutama upaya menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap, suatu kondisi dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, tentram dan teratur. Indikator urusan Trantibumlinmas mencakup 3 urusan, yaitu urusan ketentraman dan ketertiban dan urusan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan urusan berikutnya adalah urusan kebencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Capaian kinerja urusan trantibumlinmas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.57.

Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Pelaksanaan operasi penegakan Perda	100	100	100	100	100
2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	85,33	83,33	105,5	94,05	100
3.	Persentase konflik sosial yang tertangani			100	100	100

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
4.	Persentase forum antar umat beragama yang Difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana alam	100	100	100	100	100
6.	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk, Satpol PP, BPBD 2023

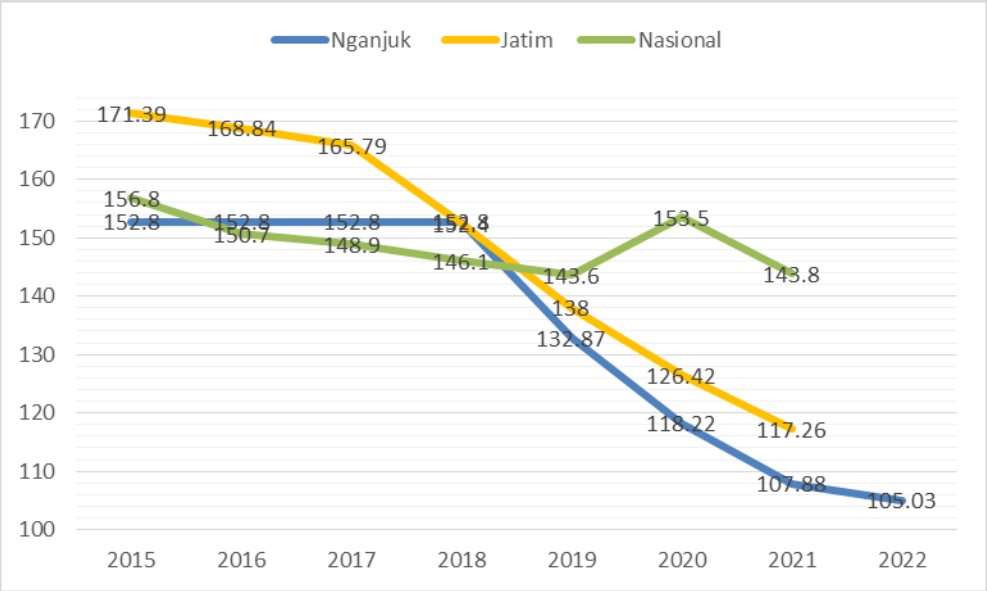
Berdasarkan data table di atas dapat dikatakan bahwa secara umum capaian kinerja di bidang urusan trantibum sudah sangat baik.

Fokus pada kebencanaan, selain diukur dengan indikator diatas indeks risiko bencana Kabupaten Nganjuk IRB Kabupaten Nganjuk mempunyai tren menurun dan nilainya rata-rata lebih kecil dari IRB Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Semakin kecil nilai IRB, semakin kecil risiko yang terjadi akibat bencana. Ini artinya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sudah berbenah, lebih tanggap dan tangguh terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kebencanaan. Perhatian dari Pemerintah Daerah telah dilakukan terhadap beberapa hal yaitu tingkat ancaman bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas kemampuan untuk mencegah dan mengatasi bencana.

Gambar 2.21

Diagram Indeks Risiko Bencana Kabupaten Nganjuk

Tahun 2022



Sumber : BPBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

Dan yang tak kalah pentingnya adalah membentuk Desa Tangguh Bencana. Sampai dengan akhir tahun 2022 sudah terbentuk 71 desa tangguh bencana. Desa Tangguh Bencana (DesTaNa) bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengikutsertakan perempuan dalam pelatihan relawan di desa rawan bencana. Dengan apa yang telah dilakukan Pemerintah Daerah seperti diatas dalam hal ini BPBD, diharapkan semua pihak siap terhadap potensi ancaman yang akan terjadi. Pada akhirnya tingkat potensi ancamanpun menjadi kecil sehingga harapannya bisa menurunkan nilai IRB. Data kejadian bencana sepanjang Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.58.

Kejadian Bencana Tahun 2022

No	Waktu	Tipe Kejadian	Lokasi	Cuaca	Meninggal	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan	Kerusakan	Tingkatan
1	29/03/2022 17.30.44	Angin Kencang	Kel. Kramat, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk	Hujan Sedang	0	0	0	0	- Pohon tumbang : 1 unit - Akses lalu lintas terhambat	RENDAH
2	25/04/2022 13.00.19	Kejadian Lain	Dsn. Ngelerep, Ds. Trayang, Kec. Ngronggot	Cerah	1	0	0	0	-	RENDAH
3	05/05/2022 08.00.00	Kejadian Lain	Sungai Kalikoso, Ds. Kedungombo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk	Berawan	1	0	0	0	Korban Meninggal Dunia : 1 Jiwa	RENDAH
4	12/05/2022 19.45.00	Angin Kencang	Dsn. Krajan, Ds. Ngronggot, Kec. Ngronggot.	Hujan Lebat	0	0	0	0	- Pohon tumbang : 1 Unit - Arus lalu lintas terhambat	RENDAH
5	26/05/2022 15.00.00	Angin Kencang	Jl. Gatot Subroto, Kel. Kauman, Kec. Nganjuk.	Hujan Lebat	0	0	0	0	pohon tumbang : 1 unit	RENDAH
6	05/06/2022 13.30.00	Kejadian Lain	Waduk Klitik, Ds. Gemenggeng, Kec. Pace	Berawan	2	0	0	0	-	RENDAH
7	13/06/2022 07.46.00	Pohon Tumbang	Jl. Bypass Nganjuk - Madiun, Ds. Ngrengket, Kec Sukomoro	Cerah	0	0	0	0	-	RENDAH

No	Waktu	Tipe Kejadian	Lokasi	Cuaca	Meninggal	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan	Kerusakan	Tingkatan
8	27/06/2022 10.00.00	Kejadian Lain	Sungai Brantas, Ds. Kelutan, Kec. Ngronggot, Kab.Nganjuk	Cerah Berawan	1	0	0	0	-	RENDAH
9	27/06/2022 11.00.00	Angin Kencang	Jl Mayjend D.I Panjaitan 24-30, RT.03/ RW.01 Dsn. Kartoharjo Ds. Kartoharjo, Kec. Nganjuk	Cerah Berawan	0	0	0	1	- Pohon tumbang : 1 unit - Sepeda Motor Rusak Ringan : 1 Unit	RENDAH
10	08/07/2022 06.00.00	Pohon Tumbang	Jl. Raya Surabaya - Nganjuk, Ds. Pehserut, Kec. Sukomoro.	Cerah	0	0	0	0	-	RENDAH
11	13/07/2022 15.00.57	Kejadian Lain	RT 03 RW 12 Dsn. Oro ombo, Ds. Sidoharjo Kec. Tanjunganom	Cerah	1	0	0	0	-	RENDAH
12	14/07/2022 09.00.00	Kejadian Lain	Dusun Puhtulis Ds. Suru Kec. Ngetos, Kabupaten Nganjuk.	Berawan	1	0	0	0	-	RENDAH
13	18/07/2022 12.30.28	Kebakaran	Ds. Tempel Wetan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk	Cerah Berawan	0	0	0	0	Material bekas gudang PT. Sang Hyang	RENDAH

No	Waktu	Tipe Kejadian	Lokasi	Cuaca	Meninggal	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan	Kerusakan	Tingkatan
14	20/07/2022 02.00.00	Pohon Tumbang	Jl. Raya Berbek Pace, RT.01/RW.01, Dsn. Sono, Ds. Ngepeh, Kec. Loceret	Cerah	0	0	0	0	- Sebagian Jalan Raya Ngepeh tertutup - Arus lalu lintas terhambat	RENDAH
15	28/07/2022 03.58.38	Gempa Bumi	20 km TimurLaut NGANJUK-JATIM	Cerah	0	0	0	0	-	RENDAH
16	28/07/2022 22.30.54	Kebakaran	Madrasah Ibtidaiyah Negri 1 Nganjuk Dsn. Kedungombo 1, Ds. Kedungombo, Kec. Tanj ...	Cerah	0	0	0	0	Fasum (Sekolahan) rusak ringan : 1	RENDAH
17	31/07/2022 12.30.00	Kebakaran	Dsn. Blimbing, Ds. Karangsono, Kec. Loceret	Cerah	0	0	0	0	Gudang terbakar	RENDAH
18	29/08/2022 09.15.00	Kebakaran Lahan	Rt.001/Rw 006, Jl. Raya Baron No. 10, Lobeser Barat, Ds. Baron, Kec. Baron.	Cerah	0	0	0	0	- Bahan triplek sebanyak 24 valet - Tempat Usaha Rusak Ringan : 1 Unit (Gudang)	RENDAH
19	29/08/2022 14.50.00	Kebakaran Hutan	145A-2 RPH Maguan, BKPH Berbek, KPH Nganjuk, Ds. Berbek, Kec. Berbek	Cerah Berawan	0	0	0	0	Luas wilayah terbakar ± 1.0 Ha	RENDAH

No	Waktu	Tipe Kejadian	Lokasi	Cuaca	Meninggal	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan	Kerusakan	Tingkatan
20	30/08/2022 09.30.00	Kejadian Lain	Sungai Brantas, Ds. Pelem. Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk	Cerah	1	0	0	0	Korban MD ; 1 Jiwa	RENDAH
21	03/09/2022 15.00.00	Kebakaran	RT.01 RW 03, Dsn. Mlaten, Ds. Blitaran, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk	Cerah	0	0	0	0	- Rumah Rusak Berat : 1 Unit	RENDAH
22	26/09/2022 14.00.00	Pohon Tumbang	Jl. D. I. Panjaitan, Kel. Payaman, Kec. Nganjuk kota, Kab. Nganjuk.	Cerah	0	0	0	0	- Pohon tumbang : 1 unit - Rumah rusak ringan : 1 unit	RENDAH
23	28/09/2022 11.30.00	Kebakaran Hutan	Petak 55 kelas HL RPH Salam judeg, BKPH Pace, SKPH Kediri Utara, KPH Kediri.	Cerah					Luas yang terbakar : 1 Ha.	RENDAH
24	03/10/2022 08.50.00	Pohon Tumbang	Jl. Raya Kediri-Nganjuk, Desa Candirejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk	Berawan	0	0	0	0	Pohon tumbang (Lapuk) : 1 unit	RENDAH
25	09/10/2022 19.00.00	Angin Kencang	RT.001/RW.001 Dsn. sono, Ds. Ngepeh, Kec. Loceret,	Hujan Leba	0	0	0	0	Rumah rusak sedang : 1 unit	RENDAH

No	Waktu	Tipe Kejadian	Lokasi	Cuaca	Meninggal	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan	Kerusakan	Tingkatan
			Kab Nganjuk.							
26	09/10/2022 19.40.00	Angin Kencang	Ds. Katerban, Kec. Baron	Hujan Leba	0	0	0	0	- Rumah rusak ringan : 8 unit - Fasum rusak : 1 unit (teras mushollah) - Pohon tumbang : 1 unit	RENDAH
27	20/10/2022 18.00.00	Kejadian Lain	Desa Mojoduwur, Kec. Ngetos, Kab. Nganjuk.	Hujan Leba	0	0	0	0	Jembatan bambu putus. - Putusnya Jembatan membuat masyaarakat Dsn. Kanigoro	RENDAH
28	20/10/2022 18.30.19	Banjir	1. Ds. Banaran, Kec. Pace 2. Dkh. Karanglo, Ds. Kepatihan, Kec. Loceret	Hujan Sedang	0	0	0	0	1. Ds. Banaran, Kec. Pace - Jalan Desa ketinggian genangan air ± 50 cm	RENDAH
29	26/10/2022 15.30.00	Kejadian Lain	JL. Barito, kelurahan Begadung, kec Nganjuk kota, kab Nganjuk.	Hujan Ringan	0	0	0	0	- Ranting pohon patah	RENDAH
30	26/10/2022 16.20.00	Kejadian Lain	Jalan Penghubung, Kec. Berbek - Sawahan, Dkh. Kedung Bencah, Ds. Kweden, Kec.Ngetos, Kab. Nganjuk	Hujan Ringan	0	0	0	0	Batu jatuh 1 unit ukuran Lebar ± 2 Meter dan Tinggi ± 1,5 Meter	RENDAH

No	Waktu	Tipe Kejadian	Lokasi	Cuaca	Meninggal	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan	Kerusakan	Tingkatan
31	26/10/2022 16.30.14	Tanah Longsor	RT.02/RW.03 Dsn. Pagu, Ds. Siwalan, Kec. Sawahan.	Hujan Sedang	0	0	0	0	Rumah rusak ringan : 1 unit	RENDAH
32	06/11/2022 01.15.03	Pohon Tumbang	Dsn. Patran, Ds. Patran, Kec. Berbek, Kab Nganjuk.	Cerah Berawan	0	0	0	1	- Pohon tumbang : 1 unit	RENDAH
33	11/11/2022 16.35.00	Banjir	Dsn. Ngadiboyo dan Dsn. Kedungbulu, Ds. Ngadiboyo, Kec. Rejoso.	Hujan Lebat	0	0	0	0	-	RENDAH
34	13/11/2022 17.30.00	Banjir	Kec. Pace 1. Ds. Batembat 2. Ds. Banaran Kec. Loceret 1. Dsn. Karanglo, Ds. Patihan	Hujan Lebat	0	0	0	0	KK terdampak : 140 KK/400 Jiwa	RENDAH
35	14/11/2022 13.30.00	Pohon Tumbang	Jl. Panglima Sudirman, Kab. Nganjuk	Berawan	0	0	0	0	- Pohon tumbang : 1 unit - Tiang kabel telkom	RENDAH
36	17/11/2022 13.30.00	Angin Kencang	- Ds. Patian, Kec. Loceret - Dsn Takat, Ds. Kampung, Kec.	Hujan Lebat	0	0	0	0	- Beberapa pohon tumbang - Menutup akses jalan raya	RENDAH

No	Waktu	Tipe Kejadian	Lokasi	Cuaca	Meninggal	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan	Kerusakan	Tingkatan
			Tanjunganom							
37	19/11/2022 03.23.36	Banjir	Kec. Pace. (Aliran Sungai Bodor) a. Ds. Banarand. Dsn. kedung bajul, Ds. Gemenggeng	Hujan Lebat	0	0	0	0	Total KK terdampak : ± 70KK /± 200 Jiwa	SEDANG
38	24/11/2022 15.15.00	Angin Kencang	Ds. Garu, Kec. Baron & Ds. Babadan, Kec. Patianrowo	Hujan	0	0	0	0	Pohon tumbang : 3 Unit	RENDAH
39	09/12/2022 16.00.00	Kejadian Lain	Sungai Brantas Ds. Tanjungtani, Kec. Prambon	Berawan	1	0	0	0	Korban Meninggal Dunia : 1 Jiwa	RENDAH
40	14/12/2022 15.00.00	Angin Kencang	Jalan Raya Surabaya Madiun Ds. Sukomoro, Kec Sukomoro.	Hujan	1	0	0	1	- Pohon tumbang : 2 unit - Motor rusak : 2 unit - Kabel PLN Putus	RENDAH
41	21/12/2022 15.30.00	Angin Kencang	1. Jalan Mojosari dan Ds. Ngepeh, Kec. Loceret 2. Jl. Profesor Gondo Wardoyo	Hujan Lebat	0	0	0	0	- Pohon tumbang : 5 Unit - Akses lalu lintas tergangg	RENDAH

No	Waktu	Tipe Kejadian	Lokasi	Cuaca	Meninggal	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan	Kerusakan	Tingkatan
42	23/12/2022 17.00.00	Angin Kencang	Dsn. Patian, Ds. Balongan, Kec. Berbek - Dsn. Patran, Ds. Patranrejo, Kec. Berbek	Hujan disertai angin kencang	0	0	0	0	Rumah rusak ringan : 3 unit Pohon tumbang	RENDAH
43	23/12/2022 20.00.00	Angin Kencang	Jl. Stasiun, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom	Hujan	1	0	0	0	Pohon tumbang : 1 unit	RENDAH

Sumber : BPBD Kabupaten Nganjuk, 2023

Tabel 2.59.

REKAPITULASI DESTANA AB. NGANJUK TAHUN 2016-2022

NO	DESA	KECAMATAN	TAHUN TERBENTUK
1	BARENG	SAWAHAN	2016 PUSAT
2	KEBONAGUNG	SAWAHAN	
3	SIWALAN	SAWAHAN	2018
4	SAWAHAN	SAWAHAN	
5	BENDOLO	SAWAHAN	
6	NGLIMAN	SAWAHAN	
7	MARGOPATUT	SAWAHAN	
8	NGETOS	NGETOS	
9	SALAMROJO	BERBEK	

NO	DESA	KECAMATAN	TAHUN TERBENTUK
10	BLONGKO	NGETOS	
11	KLODAN	NGETOS	
12	BAJULAN	LOCERET	
13	MOJODUWUR	NGETOS	2019
14	KEPEL	NGETOS	
15	GENJENG	LOCERET	
16	ORO-ORO OMBO	NGETOS	
17	MAGUAN	BERBEK	
18	DUREN	SAWAHAN	
19	SIDOREJO	SAWAHAN	
20	SURU	NGETOS	
21	MACANAN	LOCERET	
22	KWEDEN	NGETOS	
23	SUMBERAGUNG	GONDANG	2019 PAK
24	LOSARI	GONDANG	
25	KETAWANG	GONDANG	
26	NGEPUNG	LENGKONG	
27	SUMBERMIRI	LENGKONG	
28	PULE	JATIKALEN	
29	JATIKALEN	JATIKALEN	
30	MUNUNG	JATIKALEN	

NO	DESA	KECAMATAN	TAHUN TERBENTUK
31	NGASEM	JATIKALEN	
32	KEDUNGSOKO	SUKOMORO	
33	BANJAREJO	REJOSO	
34	REJOSO	REJOSO	
35	MUSIRLOR	REJOSO	
36	MUSIRKIDUL	REJOSO	
37	TRITIK	REJOSO	
38	BENDOASRI	REJOSO	
39	WENGKAL	REJOSO	
40	TEMPURAN	NGLUYU	
41	LENGKONGLOR	NGLUYU	
42	GAMPENG	NGLUYU	
43	SENDANGBUMEN	BERBEK	
44	SUMBERURIP	BERBEK	
45	BULU	BERBEK	
46	GROJOGAN	BERBEK	
47	TIRIPAN	BERBEK	
48	SONOPATIK	BERBEK	
49	JOHO	PACE	
50	SANAN	PACE	
51	BANARAN	PACE	

NO	DESA	KECAMATAN	TAHUN TERBENTUK
52	GEMENGGENG	PACE	
53	MOJOREMBUN	REJOSO	2021
54	SAMBIKEREP	REJOSO	
55	BAGORKULON	BAGOR	
56	NGUDIKAN	WILANGAN	
57	MANCON	WILANGAN	
58	BLITARAN	SUKOMORO	
59	SUMENGKO	SUKOMORO	
60	KAPAS	SUKOMORO	
61	GONDANG	PACE	
62	BABADAN	PACE	
63	PLOSOHARJO	PACE	
64	KEDUNGOMBO	TANJUNGANOM	
65	MOJOAGUNG	PRAMBON	2022 PROVINSI
66	SUDIMOROHARJO	WILANGAN	2022
67	NGADIPIRO	WILANGAN	
68	BATEMBAT	PACE	
69	SEKARPUTIH	BAGOR	
70	CEPOKO	BERBEK	
71	KUNCIR	NGETOS	

Sumber: BPBD Kabupaten Nganjuk

2.3.1.6. Sosial

Kondisi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang sebagian besar bermata pencaharian petani masih banyak yang tergolong sebagai masyarakat miskin. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya komitmen pemerintah untuk membantu memberdayakan secara ekonomi masyarakat miskin, penyandang cacat, fakir miskin, anak terlantar, anak jalanan dan kelompok rentan sosial lainnya dan meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi Sosial/LSM dengan memberikan bantuan sosial, bantuan permodalan dan bantuan pendidikan dan pelatihan ketrampilan agar mampu dan mandiri. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi sosial masyarakat salah satunya adalah keberadaan sarana sosial dan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Capaian kinerja urusan sosial tersaji sebagai berikut:

Tabel 2.60.

Capaian Kinerja Urusan Sosial
di Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 – 2022

Indikator	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Jumlah PMKS/PPKS	63.019	63.144	53.995	43.003
Persentase PMKS/PPKS yang tertangani (orang)	93,09%	99,87%	97,08%	100%
Persentase PSKS yang Aktif	73,75%	78,61%	68,37%	71,40%

Sumber: Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk 2023

Tabel 2.61.

Jumlah PMKS Tahun 2022

Jenis_PMKS	Jumlah PMKS Keseluruhan	Jumlah PMKS yang Tertangani	Satuan
Keluarga Fakir Miskin	41,924	41,924	Orang
Anak Jalanan	6	6	Orang
Tuna Susila	56	56	Orang
Pengemis	50	50	Orang
Gelandangan dan Gelandangan Psikotik	73	73	Orang
Anak Balita Terlantar	4	4	Orang
Anak Terlantar	9	9	Orang
Anak Berhadapan dengan Hukum	140	140	Orang
Anak dengan Kedisabilitasan :	**43**	**43**	Orang
a. Tubuh	38	38	Orang
b. Netra	3	3	Orang
c. Cacat Wicara	1	1	Orang
d. Mental	0	0	Orang
e. Cacat Ganda	1	1	Orang
Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Diperlakukan Salah	19	19	Orang
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	16	16	Orang
Lanjut Usia Terlantar	17	17	Orang
Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis	**162**	**162**	Orang
a. Tubuh	99	99	Orang
b. Netra	0	0	Orang
c. Cacat Wicara	1	1	Orang
d. Mental	5	5	Orang
e. Cacat Ganda	56	56	Orang
f. Penderita Penyakit Kronis	1	1	Orang
Pemulung	10	10	Orang
Kelompok Minoritas (Waria 108 dan Gay 980)	87	87	Orang
Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	21	21	Orang
Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)	39	39	Orang
Korban Penyalah Gunaan Napsa	1	1	Orang

Jenis_PMKS	Jumlah PMKS Keseluruhan	Jumlah PMKS yang Tertangani	Satuan
Korban Trafficking	0	0	Orang
Korban Tindakan Kekerasan atau yg Diperlakukan Salah	**0**	**0**	Orang
a. Wanita	0	0	Orang
b. Laki - laki	0	0	Orang
c. Lanjut Usia	0	0	Orang
Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	178	178	Orang
Korban Bencana Alam	100	100	Orang
Korban Bencana Sosial	0	0	Orang
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	46	46	Orang
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	2	2	Orang
Masyarakat Daerah Tertinggal dan Terpencil	0	0	Orang
Jumlah	**43,003**	**43,003**	Orang
Rata rata		**100**	**%**

Sumber : Dinas Sosial dan PPPA, 2023

Tabel 2.62.

Jumlah PSKS Aktif Tahun 2022

Jenis PSKS	Jumlah PSKS yang Aktif	Jumlah PSKS yang Ada	Satuan
Pekerja Sosial Profesional	3	3	Orang
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	361	645	Orang
Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	18	18	Orang
Organisasi Sosial	22	22	Orang
Karang Taruna	285	285	Orang
TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat)	20	20	Orang
Jumlah	**709**	**993**	**Orang**
Rata rata		**71.40**	**%**

Sumber : Dinas Sosial dan PPPA, 2023

Penanganan PPKS pada tahun 2019 mencapai 93,09 persen kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 100 persen. Tingginya capaian penanganan PPKS ini merupakan hasil kolaborasi

program dan kegiatan Dinas Sosial dengan PSKS yang aktif di Kabupaten Nganjuk.

2.3.2. Pelayanan Umum Urusan Wajib Non Dasar

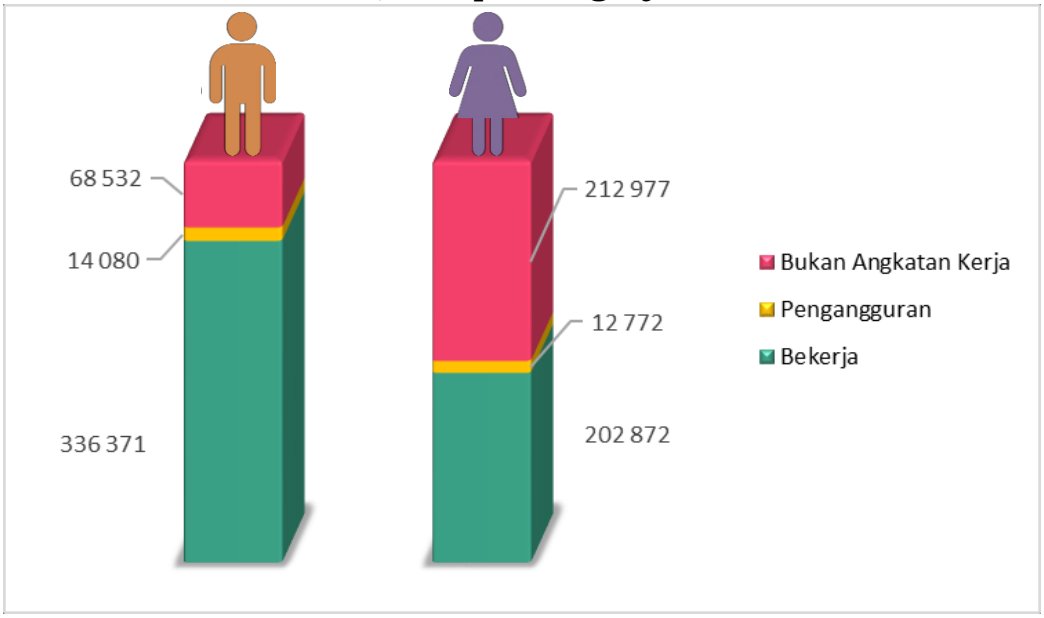
2.3.2.1. Tenaga Kerja

Pada tahun 2022 jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Nganjuk diperkirakan mencapai 847,6 ribu jiwa. Dibanding tahun 2021, jumlah penduduk ini naik sekitar 3,8 ribu jiwa dari 843,8 ribu jiwa. Penduduk usia kerja (15 tahun keatas) terbagi menjadi penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk angkatan kerja (economically active) terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Gambar 1, terdapat sebanyak 539 ribu lebih penduduk yang bekerja atau sekitar 63,62 persen dari jumlah penduduk usia kerja.

Sebanyak 26 ribu penduduk atau 3,17 persen jumlah penduduk usia kerja tergolong pengangguran. Sisanya sebanyak 28 ribu penduduk atau 33,21 persen penduduk usia kerja merupakan penduduk bukan angkatan kerja. Adapun jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Nganjuk pada Agustus 2022 menurut jenis kelamin dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.22

Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, Kabupaten Nganjuk 2022

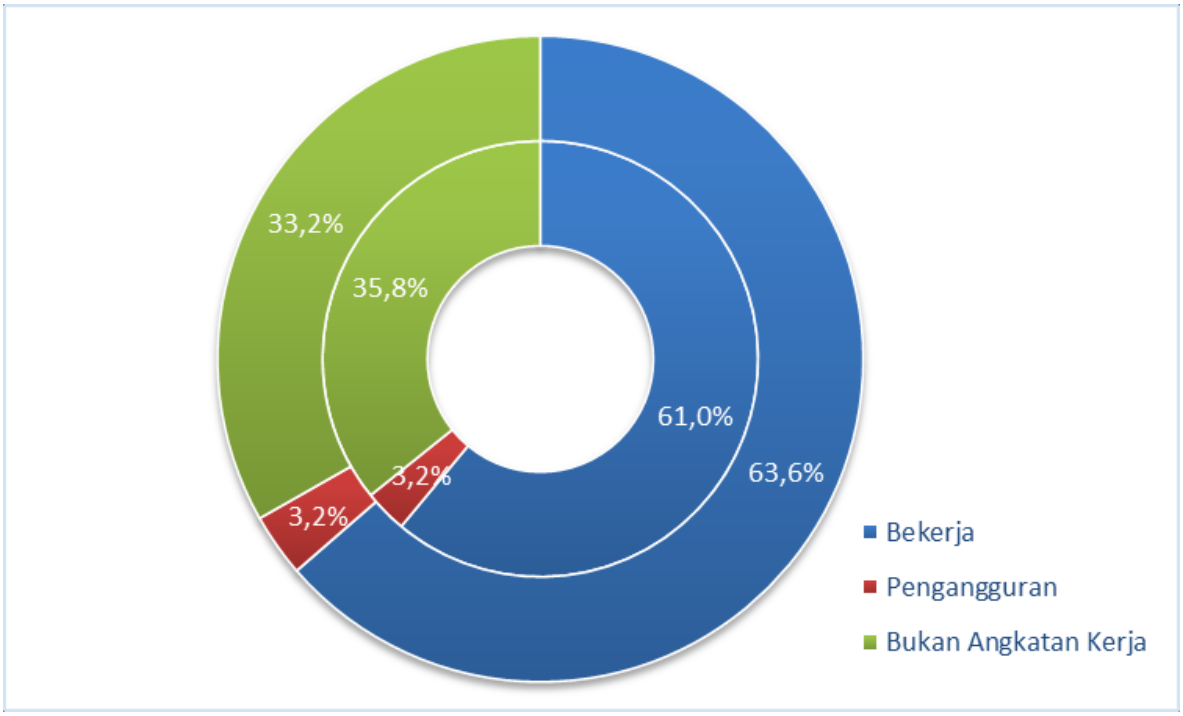


Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, Sakernas Agustus 2022

jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2022 mengalami penambahan dibandingkan pada tahun 2021. Sebaliknya untuk jumlah penduduk bukan angkatan kerja pada tahun 2022 mengalami pengurangan dibandingkan dengan jumlah penduduk bukan angkatan kerja pada tahun 2021. Sedangkan, jumlah penduduk usia kerja yang menganggur pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 hampir sama. Penduduk yang bekerja pada tahun 2022 bertambah sebesar 24.190 penduduk dari jumlah pada tahun 2021. Sedangkan penduduk pengangguran pada tahun 2022 berkurang sebesar 130 penduduk. Begitu juga jumlah penduduk bukan angkatan kerja pada tahun 2022 berkurang sebesar 20.242 penduduk.

Gambar 2.23

Perbandingan Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Utama Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 dan 2022

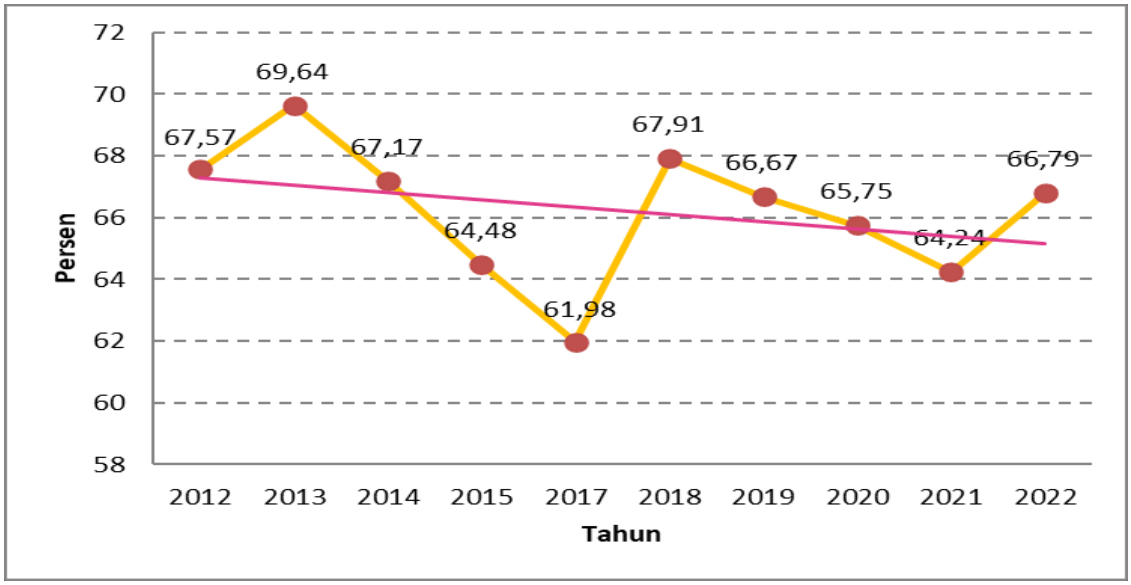


Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk, 2022

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar kerja, baik sedang bekerja maupun mencari kerja. Selain menggambarkan perubahan pasokan tenaga kerja untuk produksi barang dan jasa di suatu wilayah pada waktu tertentu, angkatan kerja juga dapat digunakan untuk melihat gambaran kehidupan kerja penduduk semasa hidupnya dan besaran akses penduduk terhadap aktifitas ekonomi (ILO, 2015). Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk melihat perubahan jumlah angkatan kerja adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).

Gambar 2.24

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Nganjuk
Tahun 2012-2022 (Persen)



Berdasarkan Gambar diatas, terlihat bahwa TPAK Kabupaten Nganjuk pada sepuluh tahun terakhir berfluktuasi. Secara umum, perkembangan TPAK Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu tersebut mempunyai tren menurun. TPAK Kabupaten Nganjuk mencapai titik tertinggi pada tahun 2013 sebesar 69,64 persen dan turun terus menerus selama empat tahun hingga mencapai titik terendah pada tahun 2017, kemudian meningkat tajam pada tahun 2018 kemudian turun pada tahun 2019 hingga pada 2021 mencapai sebesar 64,24 persen. Pada tahun 2022 naik tajam menjadi 66,79 persen. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi meningkat dan paling tinggi sejak 2013, sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja juga meningkat tajam. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2022, dimana setelah tiga tahun terakhir TPAK terus menurun, dan mencapai titik terendah pada tahun 2021, TPAK tahun 2022 meningkat secara signifikan.

Lesunya pertumbuhan ekonomi karena pandemi Covid yang terjadi mengakibatkan tingkat pasokan tenaga kerja juga

menurun, dan pulihnya perekonomian setelah pandemi Covid mereda, juga berdampak positif terhadap kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Nganjuk. Pada tahun 2022, pasokan tenaga kerja meningkat sekitar 2,5 persen, pelan tapi pasti kondisi ketenagakerjaan membaik seiring dengan perubahan positif kondisi perekonomian dan kesehatan penduduk

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Nganjuk dilakukan dengan peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Selain itu perlu fasilitasi pemberdayaan perempuan menuju keluarga sehat dan sejahtera dengan meningkatkan ketrampilan perempuan dan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial dan pemberdayaan ekonomi. Capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut:

Tabel 2.63.

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	80,27	134,72	109,26	97,59	
Persentase Penyelesaian KDRT yang difasilitasi (%)	100	100	100	100	100
Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	86,67	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk 2023

Perlindungan anak dalam pembangunan di Kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk sebagai kabupaten layak anak. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan pemenuhan hak-hak anak yaitu:

- hak sipil dan kebebasan,
- hak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,
- hak kesehatan dasar dan kesejahteraan,
- hak mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya,
- hak untuk mendapatkan perlindungan khusus.

Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Nganjuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang mempunyai kepedulian kepada perempuan dan anak diantaranya, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Bhayangkara, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Nganjuk, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dan *Women Crisis Center (WCC).*

Beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak disajikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.64.

Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2022

Jenis Tindak Kekerasan	Jumlah Kasus yang Melapor	Jumlah Kasus yang Ditangani	Satuan
Fisik	4	4	Kasus
Psikis	9	9	Kasus
Seksual	21	21	Kasus
Penelataran	2	2	Kasus
Trafficking	-	-	Kasus
Lainnya	2	2	Kasus
Jumlah	**38**	**38**	**Kasus**
Rata rata		**100**	**%**

Sumber: Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk 2023

Bentuk-bentuk kekerasan yang berbasis gender menjadi beberapa agenda Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Permasalahan berbasis gender akan merugikan perkembangan fisik maupun non fisik terhadap korban dalam mencapai generasi SDM yang unggul. Pencapaian SDM Unggul menjadi prioritas nasional. Sehingga permasalahan berbasis gender harus segera ditekan hingga tanpa kasus. Pada tahun 2022 kasus seksual/asusila menempati urutan tertinggi mencapai 21 kasus.

Tabel 2.65.

Kecamatan dengan Indikator Layak Anak

Kecamatan	Kecamatan yang Mendekati Indikator Layak Anak
Bagor	Belum
Baron	Sudah
Berbek	Sudah
Gondang	Belum
Jatikalen	Belum
Kertosono	Belum
Lengkong	Belum
Loceret	Sudah
Nganjuk	Sudah
Ngetos	Belum
Ngluyu	Belum
Ngronggot	Belum
Pace	Belum
Patianrowo	Belum
Prambon	Sudah
Rejoso	Belum
Sawahan	Sudah
Sukomoro	Belum
Tanjunganom	Sudah
Wilangan	Sudah
Jumlah	**8**
Rata rata	**40%**

Sumber: Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk 2023

Pencapaian terhadap pengukuran standar pelayanan minimal bidang sosial secara umum telah menunjukkan capaian keberhasilan

yang cukup tinggi bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Namun hal tersebut masih menyisakan beberapa hal yang memerlukan pemecahan permasalahan, antara lain berkaitan dengan realisasi atas standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana yang tertuang dalam Permensos Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Berikut kami tampilkan hasil capaian standar pelayanan Minimal pada masing-masing standar pelayanan sesuai dengan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.66.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

No	Indikator	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	99,57%	107,46%	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	100%	100%	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	90,91%	110%	85,71%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	40,24%	100%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi korban Bencana daerah Kabupaten	100%	142.86%	100%

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Nganjuk, Tahun 2023

2.3.2.3. Ketahanan Pangan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab mewujudkan ketahanan pangan, dalam kaitan ini pemerintah melakukan: pengamatan, pembinaan, pengendalian dan pengamanan terhadap ketersediaan pangan cukup, baik jumlah dan

mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Ketahanan pangan juga menyangkut lembaga/instansi, dalam menyelenggarakan operasional yang sesuai dengan potensi dan budaya setempat, mengingat cakupan yang multi sektor dan multi wilayah dalam peragaman kegiatan ketahanan pangan sangat membutuhkan adanya koordinasi lintas sektoral yang mantap dan dukungan yang penuh dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk, guna mewujudkan ketahanan pangan daerah maupun local wilayah. Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan dapat dilihat dari tingkat ketersediaan konsumsi pangan dan penyaluran raskin.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan daerah Kabupaten Nganjuk khususnya dalam meningkatkan sinergitas berbagai sektor perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Tujuan dari RAD-PG diantaranya untuk menghindari rawan pangan, stunting, dan kemiskinan.

Kinerja ketahanan pangan salah satunya diukur dari ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain yang berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. Persentase peningkatan ketersediaan pangan pada tahun 2018 capaian kinerjanya sebesar 307,25% dan tahun 2022 dengan capaian kinerja 300,94%.

Tabel 2.67.

Capaian Kinerja Ketahanan Pangan Kabupaten Nganjuk
Tahun 2018 – 2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah (%)	307,25	286,03	249,94	297,12	300,94

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Nganjuk 2023

Tabel 2.68.
Ketersediaan Energi dan Protein Berdasarkan Neraca Bahan Makanan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2022

2020		2021		2022	
Energi (kal/kap/hr)	Protein (gr/Ka/hr)	Energi (kal/kap/hr)	Protein (gr/Ka/hr)	Energi (kal/kap/hr)	Protein (gr/Ka/hr)
4.352	171,95	4.352	171,9	3.061	118,6

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Nganjuk 2023

Ketersediaan Energi dan Protein merupakan gambaran dari pencapaian kinerja ketahanan pangan daerah. Ketersediaan Energi dan Protein selain berkaitan dengan aspek produksi, juga mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat. Standar kecukupan protein berdasarkan kaidah gizi sehat adalah sebesar 63 gram perkapita/hari sedangkan standar kecukupan energi berdasarkan kaidah gizi sehat adalah sebesar 2.400 kkal perkapita/hari. dengan demikian perencanaan target kinerja 3 tahun kedepan berpedoman pada standar tersebut.

Bappenas mengamanatkan melalui Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi RAD-PG bahwa Pemerintah Daerah harus mampu mengidentifikasi kelurahan/ desa mana saja yang rawan pangan, stunting, dan kemiskinan tinggi.

2.3.2.4. Pertanahan

Dalam rangka mendukung proses pembangunan, khususnya pada bidang perumahan dan Kawasan permukiman, sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan urusan pertanahan. Penyelenggaraan Urusan pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melalui beberapa kegiatan fasilitasi dan koordinasi lintas sektor untuk penyelesaian masalah pertanahan, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.69.

Data Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan

No	Tahun	Kegiatan yang dilaksanakan
1	2022-2023	Fasilitasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) untuk mendapatkan rekomendasi tim terpadu atas persetujuan pelepasan kawasan hutan / persetujuan pemanfaatan kawasan hutan untuk kawasan permukiman; sarana, prasarana dan utilitas Permukiman serta infrastruktur lainnya pada: ● 16 desa tahap 1 ● Usulan ± 7 desa dan usulan dari perangkat daerah tahap 2
2	2022-2023	Fasilitasi penyelesaian Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) berupa penyelesaian komitmen bupati terkait ijin prinsip (untuk relokasi permukiman terdampak pembangunan Bendungan Semantok)
3	2022-2023	Fasilitasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berupa penyelesaian komitmen bupati terkait ijin penggunaan kawasan hutan untuk relokasi permukiman terdampak bencana (Dusun Selopuro, Desa Ngetos-Kecamatan Ngetos)

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan,2023

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat harus memperhatikan aspek keselarasan, keserasian dan keseimbangan dengan fungsi lingkungan, yang dapat menjamin pembangunan daerah berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan mutu lingkungan dengan pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal.

Tabel 2.70.

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
Tahun 2018 – 2022

Tahun	Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)			Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU)			Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2018		66			82.4			74.86			74.46	
2019	67	61.43	91.69%	82.9	92.42	111.48%	75.1	64.55	85.95%	75.01	71.98	95.95%
2020	68	56	82.35%	83.4	68.03	81.57%	75.26	62.08	82.49%	75.52	62.04	82.15%
2021	53.39	53.33	99.89%	80.52	78.84	97.91%	55.17	54.46	98.71%	62.24	61.44	98.71%
2022	53.49	61.61	115.18%	80.62	79.45	98.54%	55.44	54.91	99.04%	64.91	67.37	103.79%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk 2023

Indikator Kinerja urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Nganjuk adalah Indek Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) serta beberapa indicator lain seperti disebutkan di atas. IKU, IKA, dan IKTL merupakan indicator baru dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk 2018-2023. Berdasarkan data table di atas kinerja urusan lingkungan Hidup dalam peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terbilang fluktuatif. Namun secara agregat capaian IKLH Kabupaten Nganjuk lebih baik daripada capaian Provinsi dan Nasional. Nilai IKA merupakan komponen yang sulit dicapai dibandingkan dengan target, hal tersebut merupakan akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat terutama dalam membuang sampah atau kotoran kesungai.

Hal sebaliknya, di bidang pengelolaan sampah kinerjanya cenderung mengalami peningkatan, baik itu dalam cakupan penanganannya maupun persentase pengurangannya. Dari aturan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ada perubahan indikator sampah perkotaan yang terangkut ke TPA yaitu dalam penanganan sampah dan pengurangan sampah. Begitu pula dengan luasan RTH perkotaan dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir secara konsisten mengalami peningkatan.

Tabel 2.71.

Sampah Perkotaan dalam Penanganan yang terangkut ke TPA di Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 – 2021 (Ton)

No	Data	2019	2020	2021
1	Target sampah yang terangkut dalam 1 tahun	122.828,16	115.780,15	119.504,02
2	Realisasi sampah yang terangkut	93.989	113.867,16	114.881,76

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk 2022

Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan pelayanan kebersihan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan cara meningkatkan cakupan permukiman yang dilayani pengangkutan sampah dan meningkatkan sampah perkotaan yang terangkut ke TPA. Upaya-upaya ini telah meningkatkan realisasi sampah perkotaan yang terangkut ke TPA sebesar 114.881,76 Ton atau 71,28 % dari 119.504,02 Ton perkiraan produksi sampah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah meliputi :

a. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
b. menyediakan TPS, TPST dan/atau TPA di tempat yang telah ditentukan;
c. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat dari TPS ke TPA;
d. membersihkan sampah yang ada di jalan-jalan tertentu dan tempat umum tertentu serta mengumpulkannya ke TPS;
e. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dari jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu dari TPS ke TPA; dan
f. memproses sampah di TPA.

Prinsip pengolahan sampah orang pribadi atau badan wajib melakukan pengurangan dan penanganan sampah di daerah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Dan penanganan sampah di TPA secara terpadu dilakukan dengan *system control landfill* atau *sanitary landfill.*

Berdasarkan *study masterplan* persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dapat disimpulkan bahwa ada tiga skenario yang dapat dilakukan untuk pengelolaan sampah di Kabupaten nganjuk. Skenario tersebut adalah sebagai berikut :

1. Skenario pertama : pengolahan eksisting dengan kenaikan penanganan sesuai kemampuan APBN dan kenaikan reduksi di sumber
2. Skenario kedua : pengolahan eksisting dengan kenaikan penanganan sesuai kemampuan APBN serta kenaikan reduksi di sumber dan di TPS 3R
3. Skenario ketiga : pengolahan dengan kenaikan reduksi dan kenaikan penanganan sesuai dengan Jakstrada

Jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk 2022 sebesar 1.110.327 jiwa bila setiap orang menghasilkan timbulan sampah 0,4 ton/jiwa maka jumlah timbunan sampah yang dihasilkan adalah 162.107,74 ton/tahun. Penanganan sampah tahun 2022 meliputi pengurangan sampah sebesar 22,4% dan penanganan sampah sebesar 27,87%. Cakupan penanganan sampah tersebut meliputi wilayah perkotaan. Target cakupan penanganan sampah tersebut berbeda dengan jakstrada dimana pada jakstrada cakupan wilayah meliputi seluruh Kabupaten Nganjuk termasukpengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat di wilayah perdesaan.

Tempat Pemrosesan Akhir Kabupaten Nganjuk dan jangkauan pelayanan saat ini berjumlah 3 (tiga) unit, yaitu:

1. TPA Kedungdowo terletak di desa Kedungdowo Kecamatan Kota Nganjuk dengan cakupan wilayah perkotaan Kecamatan Nganjuk, Rejoso, Gondang, Bagor dan Sukomoro, dengan luas lahan 4,90

Ha dan sistem pengolahan sampah *control landfill* dengan kapasitas sebesar 12.072,38 m3.

2. TPA Pandantoyo terletak di desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono dengan cakupan wilayah perkotaan kecamatan Kertosono, Tanjunganom, Ngronggot, Patianrowo, dengan luas lahan 1,20 Ha dan sistem pengolahan sampah *control landfill* dengan kapasitas sebesar 2.956,50 m3.
3. TPA Bendil terletak di desa Berbek Kecamatan Berbek dengan cakupan wilayah perkotaan Kecamatan Sawahan, Pace, Berbek, dengan luas lahan 1,2 Ha dan sistem pengolahan sampah *control landfill* dengan kapasitas sebesar 1.463,75 m3.

Selain dari masalah persampahan, pengurangan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Nganjuk didukung dengan pelaksanaan kegiatan OPD terkait yang memberi kontribusi pada pengurangan gas rumah kaca. Kegiatan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.72.

Capaian Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2019

No	NAMA KEGIATAN	SUB-BIDANG MITIGASI	KATEGORI	PENURUNAN EMISI (ton CO2eq)
1	Pembangunan Pemb+B2:E10angunan MCK++ dan jaringan perpipaan bagi lembaga pendidikan Agama minimal 300 menetap Ds. Jambi Kec. Baron	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	41,58
2	Pembangunan Pembangunan MCK++ dan jaringan perpipaan bagi lembaga pendidikan Agama minimal 300 menetap Ds. Ngetos Kec. Ngeos	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	32,38
3	Pembangunan Tangki Septik skala individual perdesaan minimal 50 kk Desa Kudu Kec Kertosono	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	23,18
4	Pembangunan Tangki Septik skala individual perdesaan minimal 50 kk Desa Banaran Kec Kertosono	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	23,18

No	NAMA KEGIATAN	SUB-BIDANG MITIGASI	KATEGORI	PENURUNAN EMISI (ton CO2eq)
5	Pembangunan Tangki Septik skala individual perdesaan minimal 50 kk Desa Salamrojo Kec Berbek	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	23,18
6	Pembangunan Tangki Septik skala individual perdesaan minimal 50 kk Desa Jaan Kec Gondang	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	26,86
7	Pembangunan LPJU	Energi	Efisiensi Energi Penggunaan lampu hemat energi (LED/CFL)	114,24
8	pembinaan kampung iklim	Kehutanan dan Lahan Gambut	Peningkatan Cadangan Karbon	2,06
9	Penanaman pohon RTH	Kehutanan dan Lahan Gambut	Peningkatan Cadangan Karbon	1,16
10	Penanaman pohon di sempadan sungai	Kehutanan dan Lahan Gambut	Peningkatan Cadangan Karbon	2,50
11	Pembinaan Desa/ kelurahan bersih dan hijau	Persampahan	Bank Sampah	0,01
12	Pengembangan perbenihan tanaman pangan	Pertanian	Varietas Padi Rendah Emisi	11,20
13	Intensifikasi Pekarangan	Pertanian	Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)	912,30
14	SL-PTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu) padi (PIK)	Pertanian	Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)	109,48
15	Pelatihan dan Pembinaan Petani Pelaku Agribisnis Hortikultura melalui Sekolah lapang Good Agriculturar Practice (SL-GAP)	Pertanian	Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)	547,38
16	Penyelanggaraan Angkutan Sekolah Gratis	Transportasi	Reformasi Sistem Transit - BRT System	2.765,43

No	NAMA KEGIATAN	SUB-BIDANG MITIGASI	KATEGORI	PENURUNAN EMISI (ton CO2eq)
17	pelaksanaan Car Free Day	Transportasi	Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)	253,66
18	Pembangunan Area Traffic Control System (ATCS)	Transportasi	Intelligent Transportation System (ITS)/ Area Traffic Control System (ATCS)	11.551,60
TOTAL				16.441,351

Tabel 2.73.

Capaian Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2020

No	NAMA KEGIATAN	SUB-BIDANG MITIGASI	KATEGORI	PENURUNAN EMISI (ton CO2eq)
1	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa KEDONDONG Kecamatan BAGOR	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	23,18
2	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa BOGO Kecamatan NGANJUK	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	23,18
3	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa PISANG Kecamatan PATIANROWO	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	23,18
4	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa DRENGES Kecamatan KERTOSONO	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	5,08
5	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa SINGKAL ANYAR Kecamatan PRAMBON	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	5,08
6	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa WARUJAYENG Kecamatan TANJUNGANOM	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	5,08

No	NAMA KEGIATAN	SUB-BIDANG MITIGASI	KATEGORI	PENURUNAN EMISI (ton CO2eq)
7	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa JATIREJO Kecamatan LOCERET	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	4,64
8	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa NGRAWAN Kecamatan BERBEK	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	23,18
9	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa KWEDEN Kecamatan NGETOS	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	32,38
10	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa BLONGKO Kecamatan NGETOS	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	23,18
11	Pembangunan MCK di Desa Ngluyu dan Tempuran Kec. Ngluyu	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	3,68
12	Pembangunan Kombinasi IPAL Komunal Dengan MCK Kelurahan Begadung (MCK Kombinasi + IPAL Komunal)	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	18,40
13	Pembangunan Kombinasi IPAL Komunal Dengan MCK Kec. Bagor (MCK Kombinasi + IPAL Komunal)	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	18,40
14	Pekerjaan Pembangunan PLTS Rooftop 50 kWp	Energi	Pembangunan Energi Terbarukan - ON GRID	0,01
15	Pembangunan LPJU	Energi	Efisiensi Energi Penggunaan lampu hemat energi (LED/CFL)	257,28
16	pembinaan kampung iklim	Kehutanan dan Lahan Gambut	Peningkatan Cadangan Karbon	24,67
17	penanaman pohon tepi jalan	Kehutanan dan Lahan Gambut	Peningkatan Cadangan Karbon	0,26

No	NAMA KEGIATAN	SUB-BIDANG MITIGASI	KATEGORI	PENURUNAN EMISI (ton CO2eq)
18	penanaman pohon di sempadan sungai	Kehutanan dan Lahan Gambut	Peningkatan Cadangan Karbon	0,82
19	Pembinaan Desa/ kelurahan sehat, bersih dan hijau	Persampahan	Bank Sampah	0,01
20	Program Luas Tambah Tanam Padi	Pertanian	Varietas Padi Rendah Emisi	43.922,40
TOTAL				44.414,05

Tabel 2.74.

Capaian Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2021

No	NAMA KEGIATAN	SUB-BIDANG MITIGASI	KATEGORI	PENURUNAN EMISI (ton CO2eq)
1	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa GAMPENG Kecamatan NGLUYU	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	5,15
2	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa NGLUNDO Kecamatan SUKOMORO	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	6,99
3	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa MABUNG Kecamatan BARON	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	4,64
4	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa BANGSRI Kecamatan KERTOSONO	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	6,92
5	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa SONOPATIK Kecamatan BERBEK	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	34,59
6	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa SIWALAN Kecamatan SAWAHAN	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	23,18

No	NAMA KEGIATAN	SUB-BIDANG MITIGASI	KATEGORI	PENURUNAN EMISI (ton CO2eq)
7	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di Desa SIDOREJO Kecamatan SAWAHAN	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	39,00
8	penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Energi	Efisiensi Energi Penggunaan lampu hemat energi (LED/CFL)	1,56
9	penyediaan perlengkapan jalan	Energi	Efisiensi Energi Sistem PJU	178,00
10	Pengelolaan Keanekaragaman hayati kabupaten/ kota	Kehutanan dan Lahan Gambut	Peningkatan Cadangan Karbon	1,15
11	Pengelolaan Keanekaragaman hayati kabupaten/ kota	Kehutanan dan Lahan Gambut	Peningkatan Cadangan Karbon	1,52
12	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pertanian	Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)	145,97
13	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pertanian	Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)	72,98
14	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pertanian	Peningkatan Cadangan Karbon - Tanaman Pertanian	753,06
15	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pertanian	Varietas Padi Rendah Emisi	22,39
16	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Transportasi	Lain-lain	10,50

No	NAMA KEGIATAN	SUB-BIDANG MITIGASI	KATEGORI	PENURUNAN EMISI (ton CO2eq)
17	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Transportasi	Smart Driving (eco driving)	2.047,73
TOTAL				3.355,32

Tabel 2.75.

Capaian Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2022

No	NAMA KEGIATAN	SUB-BIDANG MITIGASI	KATEGORI	PENURUNAN EMISI (ton CO2eq)
1	Pembangunan IPAL	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	7,36
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Suru Kecamatan Ngetos	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	5,52
3	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Pandean Kecamatan Gondang	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	3,68
4	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Salamrojo Kecamatan Berbek	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	4,78
5	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Margopatut Kecamatan Sawahan	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	5,52
6	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Maguan Kecamatan Berbek	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	5,52
7	Pembangunan IPAL	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	9,20
8	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kepanjen Kec Pace	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	4,78

No	NAMA KEGIATAN	SUB-BIDANG MITIGASI	KATEGORI	PENURUNAN EMISI (ton CO2eq)
9	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Jaan Kec Gondang	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	4,42
10	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Musir Kidul Kec Rejoso	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	3,68
11	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Gondanglegi Kec Prambon	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	4,42
12	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Campur Kec Gondang	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	3,68
13	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Duren Kec Sawahan	Air Limbah	Instalasi Pengolahan Air Limbah	5,15
14	penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Energi	Efisiensi Energi Penggunaan lampu hemat energi (LED/CFL)	44,60
15	penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Energi	Efisiensi Energi Penggunaan lampu hemat energi (LED/CFL)	208,94
16	Penanaman Pohon Tepi Jalan	Kehutanan dan Lahan Gambut	Peningkatan Cadangan Karbon	7,07
17	Penanaman Pohon Tepi Jalan	Kehutanan dan Lahan Gambut	Peningkatan Cadangan Karbon	267,67
18	pembinaan desa/ kelurahan sehat, bersih dan hijau	Persampahan	Bank Sampah	0,99
19	Penanaman padi rendah emisi	Pertanian	Varietas Padi Rendah Emisi	41.712,20
20	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG hewan/ tanaman	Pertanian	Varietas Padi Rendah Emisi	21,37

No	NAMA KEGIATAN	SUB-BIDANG MITIGASI	KATEGORI	PENURUNAN EMISI (ton CO2eq)
21	Gerdal PHT Tembakau Sub Kegiatan Pengendalian OPT tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pertanian	Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)	125,90
22	pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Transportasi	Lain-lain	10,50
23	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA	Transportasi	Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)	1,11
24	pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Transportasi	Lain-lain	10,50
TOTAL				42.478,53

Sumber: Aplikasi Aksara

Tabel diatas merupakan hasil input kegiatan yang berkontribusi pada pengurangan GRK pada aplikasi aksara mulai tahun 2019-2022. Pada tahun 2021 terlihat nilai penurunan emisi yang rendah, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut ada kebijakan refocusing APBD sebagai dampak Covid-19 sehingga kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD juga berkurang.

Tabel 2.76.

Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2022

No	Data	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas wilayah perkotaan Kabupaten Nganjuk	28.950,71	28.950,71	28.950,71	28.950,71	28.950,71
2	Luas RTH Perkotaan yang seharusnya ada	8.685,21	8.685,21	8.685,21	8.685,21	8.685,21
3	Luas RTH perkotaan tahun sebelumnya	4.549,363	4.554,282	4.555,358	4.556,11	4.556,55
4	Penambahan RTH Tahun ini	11,4	1,076	0,75	0,44	0,28
5	Luas RTH perkotaan sampai tahun ini	4.554,282	4.555,358	4.556,11	4.556,55	4.556,83

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk 2023.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk selalu berupaya meningkatkan pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Keberadaan RTH memiliki 3 fungsi yaitu fungsi ekologis, social-ekonomi, dan evakuasi. Fungsi ekologis yaitu meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan pengatur iklim. RTH juga memiliki fungsi sosial-ekonomi yaitu RTH mampu memberikan ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai landmark kota. Sedangkan dalam fungsi evakuasi, RTH digunakan sebagai tempat pengungsian saat terjadi bencana alam. Sebagaimana disajikan dalam tabel diatas, Sampai tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menyediakan RTH sebesar 4.556,83 Ha.

2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan Catatan Sipil dan Kependudukan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum pada masyarakat dengan menertibkan akta-akta kependudukan sebagai pendataan diri dan status seseorang.

Indikator yang digunakan adalah jumlah penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil. Hal ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran. Bila dilihat selama kurun waktu tahun 2017-2022, Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, dan Akta kelahiran rata-rata mengalami peningkatan, peningkatan ini menggambarkan bahwa telah meningkat pula kesadaran masyarakat akan pentingnya indentitas diri/administrasi kependudukan. Capaian Kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil sebagai berikut:

Tabel 2.77.

Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2018–2022

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan	nilai	77.46	77.28	75.04	78,50	83.88
2.	Cakupan penerbitan KK	%	99.99	81.13	74,90	-	-
3.	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	%	88.16	88.25	86.87	88.97	97.79
4.	Cakupan kepemilikan KTP	%	99.78	16.38	66.55	96,40	82.04
5.	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	%	45.24	100,00	73.74	67	94.74

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Nganjuk 2023

Tabel 2.78.

Jumlah Capaian Kepemilikan KIA di Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 – 2022

Indikator	satuan	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1. Jumlah usia 0-17 Tahun kurang 1 hari	Jiwa	292.270	288.983	275.232	285.685
2. Cakupan kepemilikan KIA	Jiwa	26.581	8.307	25.418	61.149

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Nganjuk 2023

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di daerah yang diwujudkan melalui pembangunan perdesaan yang berkelanjutan yang menitikberatkan ada penguatan kelembagaan baik di bidang

ekonomi, politik maupun sosial budaya. Pemberdayaan masyarakat juga diwujudkan dengan memperkuat peran dan partisipasi para stakeholder di daerah melalaui kelembagaan-kelembagaan yang ada. Salah satu Indikator untuk melihat pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah jumlah pengurus yang telah pelatihan BUMDES.

Tabel 2.79.

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Indeks Desa Membangun (IDM)	0,574489	0,591574	0,6831	0,7079	0,73197

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Nganjuk 2022

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkani mplementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa.

Sumber data dalam pengambilan data dilakukan di seluruh Desa dengan harapan mendapatkan Data dan Informasi sesuai fakta yang ada di Desa. Dalam Penentuan Status IDM, klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang bata ssebagai berikut:

Desa Sangat Tertinggal : IDM ≤ 0,4907

Desa Tertinggal : 0,4907 < IDM ≤ 0,5989

Desa Berkembang : 0,5989 < IDM ≤ 0,7072 4

Desa Maju : 0,7072 < IDM ≤ 0,81555

Desa Mandiri : IDM > 0,8155

Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan status perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 .Sehingga Pendekatan dan intervensi yang diterapkan pada Status Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri akan berbeda sesuai hasil Updating data

Tabel 2.80.

IDM per kecamatan

	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	MANDIRI		MAJU		BERKEMBANG		TERTINGGAL		SANGAT TERTINGGAL	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	SAWAHAN	**9**	0	0	7	7	2	2	0	0	0	0
2	NGETOS	**9**	0	**1**	2	6	7	2	0	0	0	0
3	BERBEK	**19**	**1**	**1**	5	5	13	13	0	0	0	0
4	LOCERET	**22**	0	**3**	13	13	9	6	0	0	0	0
5	PACE	**18**	0	0	5	5	13	13	0	0	0	0
6	PRAMBON	**14**	0	**1**	6	12	8	1	0	0	0	0
7	NGRONGGOT	**13**	0	0	2	4	11	9	0	0	0	0
8	KERTOSONO	**13**	**1**	**3**	4	2	8	8	0	0	0	0
9	PATIANROWO	**11**	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0
10	BARON	**11**	0	0	1	8	10	3	0	0	0	0
11	TANJUNGANOM	**14**	0	0	4	8	10	6	0	0	0	0
12	SUKOMORO	**10**	0	0	3	3	7	7	0	0	0	0
13	NGANJUK	**2**	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0
14	BAGOR	**19**	0	**2**	4	10	15	7	0	0	0	0
15	WILANGAN	**6**	0	0	5	6	1	0	0	0	0	0
16	REJOSO	**24**	**2**	**3**	4	10	18	11	0	0	0	0
17	GONDANG	**17**	**1**	**1**	4	4	12	12	0	0	0	0
18	NGLUYU	**6**	0	0	5	6	1	0	0	0	0	0
19	LENGKONG	**16**	0	0	4	8	12	8	0	0	0	0
20	JATIKALEN	**11**	0	**1**	2	6	9	4	0	0	0	0
	JUMLAH	**264**	**5**	**16**	**92**	**136**	**167**	**112**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber : Dinas PMD, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Pada Tahun 2021 terdapat peningkatan status desa mandiri yang semula 5 desa pada Tahun 2020 menjadi 16 desa, desa maju yang semula 92 desa menjadi 136 desa, dan desa berkembang berkurang yang semula 167 desa menjadi 112 desa.

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Salah satu indikator kinerja untuk urusan keluarga berencana dan sejahtera di Kabupaten Nganjuk adalah perkembangan rasio akseptor KB. Tingkat fertilitas Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Nganjuk cukup Baik. Masyarakat Kabupaten Nganjuk saat ini sudah memandang bahwa kualitas anak lebih penting dari pada kuantitasnya.. Capaian kinerja urusan keluarga berencana tersaji sebagai berikut:

Tabel 2.81.

Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Sejahtera Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2022

Indikator	Tahun					Keterangan
	2018	2019	2020	2021	2022	
2. *Total Fertility Rate (TFR)*/Total Angka Kelahiran	106,50%	102,04%	106,38%	109.29%	115.61%	
3. *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)* Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	96,65%	98,32%	99,19%	98.05%	97.85%	s.d November 2022
4. Prosentase Usia Nikah Pertama di Bawah Usia 21 Tahun	117,19%	106,23%	146,81%	124.48%	148.29%	s.d November 2022
5. Presentase Pasangan Usia Subur yang seharusnya ikut KB tapi belum KB (*unmet need*)	125,69%	121.89%	127,22%	120.60%	116.47%	s.d November 2022

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Nganjuk 2023

Perpindahan penduduk yang lebih besar dari luar Kabupaten Nganjuk diperkirakan akan terjadi karena struktur PDRB Kabupaten Nganjuk bergeser ke arah sektor sekunder yang ditandai dengan pertumbuhan industri dan perdagangan.

2.3.2.9. Perhubungan

Penyelenggaran urusan perhubungan sangat erat kaitannya dengan sistem transportasi yang memiliki peranan penting untuk mendukung kegiatan ekonomi-sosial masyarakat serta pengembangan wilayah. Untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat, dimana mobilitas transportasi orang dan barang semakin meningkat, maka penyelenggaraan transportasi daerah yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Dalam rangka memfasilitasi masyarakat menggunakan angkutan umum yang nyaman, memberikan rasa aman kepada pengguna jalan, serta menciptakan lalu lintas yang lancar sehingga memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan perhubungan yang meliputi:

- Pelayanan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor,
- Penyediaan dan Pemeliharaan Terminal Tipe C dan Halte,
- Pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan dan
- Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi dalam rangka menjamin Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas

Kegiatan diatas bermuara pada komitmen pemerintah kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan keselamatan transportasi di kabupaten Nganjuk. Namun demikian kejadian kecelakaan di Kabupaten Nganjuk masih tergolong tinggi dan fluktuatif, hal ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan mobilitas dan volume kendaraan, kondisi kendaraan yang tidak laik jalan kesadaran berlalu lintas

masyarakat yang masih kurang, perlengkapan jalan yang masih kurang serta beberapa faktor lainnya. Berikut data jumlah kendaraan serta data kecelakaan Nganjuk Tahun 2019-2022:

Tabel 2.82.

Data Jumlah Kendaraan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2022

No	Data Kendaraan	2019	2020	2021	2022
1	Roda 4	33.374	38.761	32.145	55.419
2	Roda 2	369.254	351.330	359.729	334.292
Jumlah		402.628	390.091	391.874	389.711

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk

Tabel 2.83.

Jumlah Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Kewenangan Jalan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2022

No	Uraian	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jalan Nasional	175	85	41	244
2	Jalan Provinsi	58	115	174	83
3	Jalan Kabupaten/Kota	493	468	527	593
4	Jalan Desa	0	0	0	0
Jumlah		726	668	742	920

Sumber: Kepolisian Resort Nganjuk

Tabel 2.84.

Jumlah Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2022

NO	DATA	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Meninggal dunia	237	185	198	201
2	Luka berat	28	14	13	23
3	Luka ringan	1511	1319	1336	1713
4	Kerugian Materi (Rp)	1.317.700.000	1.191.950.000	1.343.850.000	1.886.200.000
5	Jumlah Kejadian Kecelakaan	726	668	742	920

Sumber: Kepolisian Resort Nganjuk

Pada Tahun 2024-2026 fokus urusan perhubungan adalah untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas yang diukur dengan rasio

kecelakaan. Indikator ini dapat menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan perhubungan dari sisi pemenuhan keselamatan lalu lintas disamping tentunya faktor manusia. Untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan dalam menekan angka kecelakaan di wilayah kabupaten Nganjuk, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggunakan perhitungan Rasio Kecelakaan per 10.000 kendaraan, dengan formulasi sebagai berikut:

Rasio Kecelakaan per 10.000 Kendaraan = (jumlah Kecelakaan/ Jumlah Kendaraan) x 10.000 Kendaraan

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Nilai Indeks SPBE merupakan hasil evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018.

Pada tahun 2021, Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah 2,14 (cukup) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hasil evaluasi SPBE tahun 2020 yang mendapat Nilai 2,62 (baik). Terdapat 4 (empat) domain yang dinilai tingkat kematangannya (maturity level) yaitu domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola SPBE, dan domain Layanan SPBE. Dari 4 domain yang dinilai, dijabarkan lagi menjadi 47 indikator. Adapun nilai masing-masing domain serta perbandingannya dengan nilai tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.85.

NILAI SPBE MASING-MASING DOMAIN

DOMAIN	2020	2021	2022
Kebijakan Internal SPBE	2,18	1,9	2,4
Tata Kelola SPBE	2,14	1,9	1,6
Layanan SPBE	3,00	2,75	2,87
Domain Manajemen SPBE	-	1	1

Sumber : Hasil Evaluasi Kemenpan RB Tahun 2023

Pada tahun 2022, Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah 2,18 (cukup) mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan hasil evaluasi SPBE tahun 2021 yang mendapat Nilai 2,14 (cukup). Terdapat 4 (empat) domain yang dinilai tingkat kematangannya (maturity level) yaitu Domain Kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE. Dari 4 domain yang dinilai, dijabarkan lagi menjadi 47 indikator.

2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran.

Indikator kinerja urusan koperasi dan usaha mikro antara lain persentase koperasi aktif, persentase usaha mikro kecil, persentase usaha menengah di Kabupaten Nganjuk. Capaian kinerja urusan koperasi dan usaha mikro sebagai berikut:

Tabel 2.86.

Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2018 – 2022 (Persen)

No.	DATA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Koperasi Aktif (%)	67.66	44.24	45.04	39.24	
2	Usaha Mikro yang memiliki legalitas	6,394	3,203	5,045	7,389	4080*

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Nganjuk 2023
Ket : * capaian Mei 2002

Capaian persentase koperasi aktif mengalami penurunan pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa perlunya upaya untuk memberdayakan koperasi dalam menjalankan fungsinya sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Meskipun sempat menurun dari tahun 2018 ke 2019. Dari sisi pemberdayaan usaha mikro menunjukkan kinerja yang meningkat terutama dari aspek legalitas usaha mikro sebagai salah satu indikator penguatan dan pertumbuhan usaha mikro.

2.3.2.12. Penanaman Modal

Suasana yang kondusif mutlak di perlukan bagi suatu daerah guna keutuhan dan menjaring penanaman modal. Untuk mewujudkannya dengan memberikan kontribusi dan pelayanan yang prima melalui :

- Pengembangan dan promosi potensi sumber daya di segala bidang
- Mengoptimalkan dan pemberdayaan masyarakat sekitar potensi dan produk unggulan
- Pengawasan Penanaman Modal di daerah Nganjuk
- Peningkatan profesional aparat penanaman modal
- Peningkatan kerjasama baik dengan instansi terkait maupun pihak swasta.

Dari beberapa hal tersebut di atas, indikator kinerja terkait dengan penanaman modal dapat dilihat dari perkembangan jumlah investor (PMA/PMDN) di Kabupaten Nganjuk dan perkembangan nilai investasinya. Capaian kinerja urusan penanaman modal sebagai berikut:

Tabel 2.87.

Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2022

No	Jenjang	2019	2020	2021	2022
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Realisasi Investasi Penanaman Modal	2.072.371.416.292	2.175.989.987.106	3,256,002,822,393	4,529,076,183,502

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Nganjuk 2023

Realisasi investasi penanaman modal dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan nilai investasi tersebut dicapai baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.88.

Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Nganjuk

Tahun 2020-2022

No.	Investasi	2020	2021	2022
1.	Realisasi Investasi PMDN	2,175,989,987,106	3,267,824,222,393	4,426,812,071,661
2.	Realisasi Investasi PMA	0	37,521,500,000	102,264,111,841
3.	Realisasi Investasi Total	2,175.989,987,106	3,256,002,822,393	4,529,076,183,502

2.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Nganjuk salah satunya dapat dilihat dari jumlah pemuda dan cabang olahraga yang berprestasi ditingkat provinsi maupun nasional, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.89.

Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olah Raga

Kabupaten Nganjuk tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja		Kinerja		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan prestasi pemuda	1.1	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	93%	93,75%	100,81
		1.2	Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi	18 Cb	18 Cb	100,00
		1.3	Pemuda yang berprestasi	40 org	45 org	112,50
Jumlah Rata-rata Capaian Kinerja						**104,44**

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, dan Kebudayaan Kab. Nganjuk 2023

Pada tahun 2023 indikator keberhasilan pembangunan pemuda diukur dengan indikator indeks pembangunan pemuda. Akan tetapi, indeks tersebut sulit diukur sehingga pada perubahan RPJMD 2018-2023 ukuran keberhasilan pembangunan pemuda diubah menjadi banyaknya pemuda yang berprestasi baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

2.3.2.14. Statistik

Salah satu instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data/informasi statistik (dokumen statistik) dalam kerangka Satu Data Indonesia. Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan

pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Dokumen statistik sebagaimana dimaksud adalah Kabupaten Dalam Angka, PDRB dan data sectoral kabupaten Nganjuk. Data sectoral daerah sebagai salah satu langkah awal dan output forum satu data Indonesia Kabupaten Nganjuk telah disusun pada Tahun 2022 dan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai evaluasi dan perumusan kebijakan. Capaian kinerja urusan statistik yaitu:

Tabel 2.90.

Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Nganjuk
Tahun 2018 – 2022
(Dokumen)

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1.Nganjuk Dalam Angka	1	1	1	1	1
2.Dokumen PDRB	1	1	1	1	1
3.Data sectoral					1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nganjuk 2023

2.3.2.15. Kebudayaan

Seni budaya adalah segala hal yang diciptakan oleh manusia dengan cara hidup yang berkembang pada suatu kelompok. Seni budaya mempunyai unsur keindahan dan dilestarikan secara turun temurun lintas generasi. Kegiatan budaya dan kesenian masyarakat yang saat ini masih menjadi tradisi diantaranya adalah:

- Upacara/ prosesi siraman sedudo yang dilaksanakan pada awal bulan syuro;
- Tradisi bersih desa/ nyadranan;
- Prosesi gembyangan waranggono;
- Langen Tayub wilayah Nganjuk Utara;
- Seni Jaranan, Seni Hadrah;
- Tari Salepuk, Tari Mongde, Sandur;

- Kentrung Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot;
- Jamasan pusaka di Gedung Pusaka Ngliman Kecamatan Sawahan;
- Pawai alegoris pada peringatan hari jadi Kabupaten Nganjuk;
- Wayang timplong Desa Jetis Kecamatan Pace.

Tabel 2.91.

Capaian Kinerja Kesenian dan Kebudayaan Tahun 2018 – 2022

No	Data	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah seluruh situs	16	16	16	16	16
2	Jumlah situs yang dilestarikan	16	16	16	16	16
3	Jumlah seluruh cagar budaya	3	3	3	3	3
4	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	3	3	3	3	3
5	Target peningkatan kegiatan seni budaya daerah	8	8	8	8	8
6	Realisasi peningkatan kegiatan seni budaya daerah	8	8	8	8	8

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, dan Kebudayaan Kab. Nganjuk 2023

Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki komitmen yang tinggi dalam melestarikan seni budaya yang tumbuh berkembang dan menjadi kekayaan budaya kabupaten Nganjuk. Hal ini dapat dilihat dari kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan yang selalu mencapaian 100 persen.

2.3.2.1. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan wadah dimana di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Banyaknya jumlah perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan, juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang

kelangsungan pelayanan pendidikan. Selama kurun waktu tahun 2018-2020, Kabupaten Nganjuk hanya memiliki 1 buah perpustakaan milik pemerintah Daerah. Capaian kinerja urusan perpustakaan sebagai berikut:

Tabel 2.92.

Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk

NO.	JENIS PERPUSTAKAAN	JUMLAH PENGUNJUNG		KENAIKAN
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	(%)
1	Perpustakaan Umum	4,736.00	49,598	947.26
2	Perpustakaan Digital (e-book)	1,464.00	1,002	-31.56
3	Perpustakaan TBM	-	6,456	0.00
4	Perpustakaan SD	4,747.00	8,700	83.27
5	Perpustakaan SMP	3,033.00	3,028	-0.16
6	Perpustakaan SMA	4,450.00	3,281	-26.27
7	Perpustakaan Perguruan Tinggi	6,660.00	3,648	-45.23
8	Perpustakaan Desa/Kelurahan	24,630.00	10,512	-57.32
	JUMLAH	49,720	86,225	73.42

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Nganjuk 2023

Persentase jumlah pengunjung perpustakaan dari Tahun 2016-2019 mengalami kenaikan yang signifikan dan terjadi penurunan jumlah pengunjung ditahun 2020 dikarenakan adanya pandemi covid-19. Pada Tahun 2022, kunjungan ke perpustakaan meningkat. Hal ini menunjukkan kenaikan minat baca dan kunjungan perpustakaan.

Tabel 2.93.

Indeks gemar membaca

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks gemar membaca	-	61,40	-	-	62,41

Selain dari jumlah kunjungan wisatawan, kinerja terkait urusan perpustakaan juga tercermin dari indeks kegemaran membaca. Capaian indeks gemar membaca Tahun 2022 yang masih di kisaran 62,4 menunjukkan perlunya upaya peningkatan minat baca.

2.3.2.2. Kearsipan

Dalam urusan kearsipan ditunjukkan pada peningkatan pengelolaan kearsipan dengan melakukan pembinaan kearsipan dan melaksanakan akuisisi arsip dari instansi-instansi lingkup pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dengan melakukan manajemen kearsipan yang baik akan lebih memudahkan dalam menyimpan maupun pengambilan data sehingga lebih efisien dan aman.

Capaian kinerja urusan kearsipan diukur dengan nilai audit kearsipan daerah. Dengan dua indikator tersebut capaian kinerja urusan kearsipan masih belum memuaskan yaitu dengan capaian 81% ditahun 2022, meskipun angka tersebut telah meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 61,74% pada tahun 2021. Hal ini menjadi tantangan berat bagi perangkat daerah yang menangani kearsipan untuk peningkatan capaian kinerja khususnya dalam mendukung reformasi birokrasi. Data capaian kinerja urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.94.

Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2022 (Persen)

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai audit Kearsipan	61	64,04	77,44	61,74	81

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Nganjuk 2021

2.3.3. Pelayanan Umum Urusan Pilihan

2.3.3.1. Perikanan

Budidaya perikanan yang ada di Kabupaten Nganjuk merupakan perikanan air tawar.

Tabel 2.95.

Produksi Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

Jenis Ikan *Kind of Fish*	Obyek Perikanan *Fishery Object*					
	Kolam *Fresh Water Pond*	Mina Padi *Paddy Field*	Penangkapan di Perairan Umum *Catching in Public Water*	Karamba	Karamba Jaring Apung	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tawes	-	-	158 400	-	-	158 400
Keting	-	-	59 900	-	-	59 900
Mujair	51 020	-	59 050	-	-	110 070
Nila	64 150	-	131 050	-	-	195 200
Gurami	1 404 500	-	-	-	-	1 404 500
Lele	9 654 960	-	-	-	-	9 654 960
Nilam	-	-	72 800	-	-	72 800
Patin	69 000	-	8 850	-	-	77 850
Mas	4 460	-	65 000	-	-	69 460
Gabus	6 750	-	32 650	-	-	39 400
Udang Tawar	-	-	20 000	-	-	20 000
Katak	-	-	7 000	-	-	7 000
Paray	-	-	36 600	-	-	36 600
Jumlah/*Total*	**11 254 840**	**-**	**651 300**	**-**	**-**	**11 906 140**

Secara umum, produksi perikanan budidaya meningkat dari 10.011 ton pada Tahun 2021 menjadi 11.050 ton pada Tahun 2022. Produksi perikanan non budidaya pada Tahun 2021 sebesar 628 ton meningkat menjadi 651,85 ton pada Tahun 2022.

2.3.3.2. Pariwisata

Pariwisata merupakan suatu alat strategi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Dengan pariwisata suatu daerah akan mudah dikenal sekaligus potensi-potensi unggulannya sehingga secara tidak langsung pariwisata merupakan alat promosi bagi daerah untuk menarik minat investasi. Pada tabel berikut dapat dilihat gambaran capaian kinerja urusan pariwisata yaitu:

Tabel 2.96.

Capaian Kinerja Urusan Kepariwisataan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2022 (Persen)

No.	DATA	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (%)	258.00	149.20	18.60	86.60	188.20
2.	Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata (%)	71.50	14.80	-111.97	-14.58	42.50

Sumber: Dinas Pariwisata

2.3.3.3. Pertanian

Urusan Pertanian (dalam arti mencakup pertanian, perkebunan dan perikanan) di Kabupaten Nganjuk dihadapkan pada tantangan dan persaingan yang semakin kuat, sehingga usaha tani diarahkan agar dapat menghasilkan produk bermutu, berdaya saing dan memenuhi kebutuhan pasar baik domestik maupun luar negeri. Salah satu indikator kinerja untuk melihat gambaran kondisi Kabupaten Nganjuk di Sektor Pertanian adalah Produktivitas komoditi pertanian yang akan disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.97.

Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Ternak dan Perikanan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	Tahun 2018	2019	2020	2021	2022
1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan.						
a. Tanaman Pangan						
1. Produksi						
a. Padi	Ton	592.142,13	538.499,45	544.899,67	4 91.9 61,21	515,230.76
b. Jagung	Ton	229.888,79	253.391,70	222.904,69	193.990,82	211,782.61
c. Kedelai	Ton	14.454,50	10.053,91	9.196,71	9.196,71	7,065.73
2. Produktivitas						
a. Padi	Kw/ha	67,73	67,80	68,20	62,3	63.05
b. Jagung	Kw/ha	68,60	68,60	72,11	69,60	71.20
c. Kedelai	Kw/ha	20,31	20,31	20,66	20,40	19.45
b. Tanaman Hortikultura						
1. Produksi						
a. Bawang merah	Kw	1.524.084	162.449,90	177.232,20	1. 936 .524	193,988.10
b. Cabai Rawit	Kw	137.822	13.148,00	9.113,30	74.486	5,027.95
c. Cabe Merah	Kw	8.286	3.201,90	1.173,60	2.904	1,351.00
d. Melon	Kw	43.778	4.757,40	6.008,40	25.344	2,424.10
e. Garbis	Kw	12.31	5.456,70	6.287,20	-	-
f. Durian	Ton	32.33	7.081,10	5.775,70	2.827,70	7,502.34
g. Alpukat	Ton	23.012	6.231,50	4.959,10	7 987,40	7,284.00
h. Jeruk	Ton	47.684	12.375,50	13.177,40	7 074,90	4,031.17
i. Mangga	Ton	271.814	55.977,20	37.374,00	22 293,70	27,477.58
j. Rambutan	Ton	41.028	5.375,30	6.061,80	3 319,60	3,840.34
2. Produktivitas						
a. Bawang merah	Kw/ha	112,55	117,20	122,19	1 761,79	111.84
b. Cabai Rawit	Kw/ha	108,01	154,14	69,25	618,53	52.37

Indikator	Tahun					
	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
c. Cabe Merah	Kw/ha	22,76	220,82	76,21	208,57	55.13
d. Melon	Kw/ha	180,90	291,87	270,65	2 403,94	169.52
e. Garbis	Kw	246,20	184,97	147,59	-	-
f. Durian	Ton/pohon	118	2,20	1,77	0,02	0.6
g. Alpukat	Ton/pohon	108	2,16	0,56	1,51	0.7
h. Jeruk	Ton/pohon	63	2,08	0,41	1,34	0.5
i. Mangga	Ton/pohon	92	1,45	1,00	1,31	0.3
j. Rambutan	Ton/pohon	141	1,20	1,12	0,66	0.44
c. Tanaman Perkebunan						
1. Produksi						
a. Kakao	Ton	521,60	453,55	379,45	376,86	374.75
b. Cengkeh	Ton	553,00	553,83	566,84	569,96	570.76
c. Kopi	Ton	118,90	104,82	108,87	103,73	104.14
d. Kelapa	Ton	384,00	352,00	303,03	251,17	207.41
e. Tebu	Ton	16,394,01	16.618,37	16.789,68	14.548,98	200,630.01
f. Tembakau	Ton	1.964,70	1.357,00	1.717,97	1.078,00	967.47
g. Nilam	Ton	514,62	264,20	178,52	170,49	76.65
h. Wijen	Ton	87,50	101,00	151,19	125,99	150.72
2. Produktivitas						
a. Kakao	Kg/Ha	597,15	522	454	453,85	455
b. Cengkeh	Kg/Ha	600,00	600	600	600	601
c. Kopi	Kg/Ha	786,55	726	726	726	726
d. Kelapa	Kg/Ha	1.225,00	1.160	1.161	1.159,9	1.161
e. Tebu	Kg/Ha	5.637,80	57,00	57,08	5.600	84.200
f. Tembakau	Kg/Ha	2.567,25	1.628	1.625	1.500	1.620
g. Nilam	Kg/Ha	7.623,90	231,75	264,20	25.220,4	22.550
h. Wijen	Kg/Ha	1.400	1.411	1.429	5.042,77	1.352
2. Peningkatan Persentase Produksi Hasil Peternakan						
a. Peningkatan produksi hasil peternakan						
a. Daging	Ton	3.641,64	3.715,17	3.618,45	3.650,43	9.898.560
b. Telur	Ton	7.098,07	7.619,45	7.724,56	1.983,4	8.597.855
c. Susu	Ton	30,69	43,09	61,80	22,511	64.362
b. Peningkatan produksi hasil peternakan						
a. Ternak besar	Ekor	560.307	141.883	142.56	144.497	127.777
b. Ternak Kecil	Ekor	757.466	195.144	196.498	199.839	192.847

Indikator	Tahun					
	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
c. Ternak ungags	Ekor	10.803.973	6.310.135	3.347.497	7.011.990	6.753.574
D. Aneka Ternak	Ekor	38.499	53.011	54.023	59.392	50.829
c. Produktivitas peternakan program IB						
a. Service per conception	Kali	1,4	-	-	-	-
b. Calving interval	Bulan	14	-	-	-	-
c. conception rate	%	84,5	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Nganjuk 2023

Pada Tahun 2024-2026, kinerja sektor pertanian diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP). Secara teoritis, NTP merupakan rasio antara Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib). Penghitungan NTP dilandasi pemikiran bahwa sebagai agen ekonomi, baik sebagai produsen dan konsumen, petani memproduksi hasil pertanian yang kemudian hasilnya dijual dan petani juga merupakan konsumen yang membeli barang dan jasa untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga mengeluarkan biaya produksi dalam usahanya untuk memproduksi komoditas/produk pertanian.

Tabel 2.98.

Nilai Tukar Petani Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2022

Capaian	2020	2021	2022
Nilai Tukar Petani	106,86	103,48	106,83

- NTP>100 : Indeks Harga yang Diterima oleh Petani lebih besar daripada Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani. Petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata

tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan.

- NTP=100 : Ketika hubungan secara umum antara tingkat harga komoditas yang dijual petani dan harga barang yang dibeli petani sama. Harga pertanian secara umum dianggap setara antara tingkat harga komoditas yang dijual petani dan harga barang yang dibeli petani.
- NTP<100 : Indeks Harga yang Diterima oleh Petani lebih kecil daripada Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani. Petani mengalami penurunan dalam hal perdagangan ketika harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima

2.3.3.4. Perdagangan

Pemerintah dituntut mengambil langkah strategis/kebijakan pembangunan yang utamanya adalah pembangunan ekonomi yang diarahkan pada pemulihan ekonomi kerakyatan melalui pembangunan Usaha Ekonomi Produktif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dirasakan bisa mempertahankan kondisi ekonomi nasional.

Sektor Perdagangan di Kabupaten Nganjuk saat ini memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk itu perlu difasilitasi dengan mewujudkan kebijakan publik yang menyederhanakan regulasi untuk menarik investor dan untuk pengembangan dan perluasan perdagangan guna akselerasi perdagangan serta memperkuat dan memperbaiki struktur perdagangan baik dalam hal konsentrasi penguasaan pasar maupun dalam hal kedalaman jaringan pemasok bahan baku dan bahan pendukung. Tabel berikut merupakan gambaran capaian kinerja urusan perdagangan.

Tabel 2.99.

Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Nganjuk
Tahun 2020 – 2022

Indikator	Tahun		
	2020	2021	2022
1. Jumlah Nilai Ekspor Daerah (miliar Rp)	8 068,24	8 658,84	9 435,99

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2023

2.3.3.5. Perindustrian

Sektor Perindustrian merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian daerah mengingat pentingnya kontribusi sektor ini terhadap pembentukan PDRB dan penciptaan lapangan kerja. Industry di Kabupaten Nganjuk didominasi industry kecil dan menengah dan industry kerajinan rumah tangga. Industry kecil dan industry kerajinan rumah tangga mayoritas adalah industry mebel, makanan (tahu tempe) dan kerajinan anyaman.

Tabel 2.100.

Tabel Jenis Industri Kabupaten Nganjuk
Tahun 2019 – 2022

Type of Industries	2019	2020	2021	2022
Kecil	1 294	1 331	1 327	1 369
Kerajinan Rumah tangga	15 406	15 428	15 451	15 493
Jumlah/ *Total*	**16 700**	**16 759**	**16 778**	**16 862**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Nganjuk 2023

2.3.4. Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan

2.3.4.1. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kondisi daerah Kabupaten Nganjuk terkait dengan urusan perencanaan pembangunan salah satu indikatornya adalah ketersediaan dokumen perencanaan. Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Dokumen perencanaan daerah diantarannya terdiri dari:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Strategis SKPD
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
5. Rencana Kerja SKPD

Dalam urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Nganjuk diukur dengan persentase rekomendasi penelitian yang ditindak lanjuti yang merupakan indikator lama serta Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang merupakan indikator baru. Lebih jelasnya capaian kinerja penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.101.

Capaian Kinerja Perencanaan di Kabupaten Nganjuk
Tahun 2017-2021 (Persen)

Indikator	Tahun			
	2019*	2020*	2021	2022
1. Persentase kesesuaian muatan RPJMD dengan RKPD	92,97	100	100	100
2. Persentase capaian sasaran pembangunan daerah ≥ 80%	94,44	77,78	94,44	100
3. Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	100	100	100

Indikator		Tahun		
	2019*	2020*	2021	2022
4. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	94,44	67	90,91	80

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Nganjuk, 2021

2.3.4.2. Keuangan

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator pengukuran kemandirian daerah. Indikator ini menunjukkan sejauh mana kemampuan daerah membiayai penyelenggaraan urusan daerah. Dalam lima tahun terakhir kontribusi PAD terhadap belanja daerah terus meningkat. Akan tetapi pada tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan PAD meskipun apabila dibandingkan dengan target pada PAPBD T.A. 2022 realisasinya 111 %. Penurunan PAD ini disebabkan pendapatan restribusi yang turun akibat adanya perubahan kebijakan terkait retribusi kesehatan, dll. Capaian kinerja sektor pendapatan daerah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.102.

Capaian Kinerja Pendapatan Kabupaten Nganjuk
Tahun 2015 – 2020 (Persen)

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Kontribusi PAD terhadap belanja daerah (%)	15,63	14,49	17,3	17,21	15,63
2. Prosentase realisasi PAD dibanding target	104,77	103,05	124,5	132,99	111,02

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Nganjuk, 2023

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah selama periode 2018-2021, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah mencapai kinerja yang baik berdasarkan indikator ketepatan penyusunan LKPD dan perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit LKPD. Sedangkan untuk kinerja pengelolaan aset daerah selama 5 tahun terakhir cukup baik namun masih perlu ditingkatkan pengelolaannya. Gambaran kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.103.

Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2017 – 2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Penerbitan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	Maret	Maret	Maret	Maret	Maret
2. Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi BMD (Barang Milik Daerah/inventaris daerah) dengan baik (%)	100	100	100	100	100
3. Opini laporan keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Nganjuk, 2022

2.3.4.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan fungsi dan tugas suatu instansi, Fungsi penting dari manajemen sumber daya manusia dalam mencapai tujuan-tujuan strategisnya adalah kecukupan jumlah personel dan kualitas yang baik. Pengelolaan aspek manajemen sumber daya manusia dalam

sebuah instansi memenuhi kebutuhan tersebut, maka harus di dukung oleh sistem informasi kepegawaian yang baik. Informasi manajemen yang berfungsi untuk mengelola data, manajemen dan administrasi kepegawaian sebuah instansi.

Tabel 2.104.

Statistik Pegawai Pemkab Nganjuk Menurut Jabatan
Tahun 2022

Jabatan	2022		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional Tertentu	1786	3367	5153
Fungsional Umum	1333	1277	2610
Struktural	255	117	372
Eselon V	0	0	0
Eselon IV	117	67	184
Eselon III	110	46	156
Eselon II	28	4	32
Jumlah	**3374**	**4761**	**8135**

Sumber: BKPSDM Nganjuk, 2022

Tabel 2.105.

ASN berdasarkan Basic Pendidikan Tahun 2022

Pendidikan Terakhir	2022		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Sampai dengan SD	52	5	57
SMP/Sederajat	95	6	101

Pendidikan Terakhir	2022		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SMA/Sederajat	647	246	893
Diploma I,II	47	51	98
Diploma III	273	840	1113
Tingkat sarjana/doktor	2258	3613	5873
Jumlah	**3372**	**4761**	**8135**

Sumber : BKPSDM, 2023

Tabel 2.106.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Nganjuk

Golongan Kepangkatan	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
I/A (Juru Muda)			
I/B (Juru Muda Tingkat I)			
I/C (Juru)	1	2	3
I/D (Juru Tingkat I)	82	5	87
Golongan I/*Range I*	**83**	**7**	**90**
II/A (Pengatur Muda)	33	4	37
II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	130	18	148
II/C (Pengatur)	142	192	334
II/D (Pengatur Tingkat I)	457	401	858
Golongan II/*Range II*	**762**	**615**	**1377**
III/A (Penata Muda)	482	996	1478

Golongan Kepangkatan	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
III/B (Penata Muda Tingkat I)	429	975	1404
III/C (Penata)	216	271	487
III/D (Penata Tingkat I)	520	848	1368
Golongan III/*Range III*	**1647**	**3090**	**4737**
IV/A (Pembina Muda)	217	200	416
IV/B (Pembina Muda Tingkat I)	579	780	1352
IV/C (Pembina)	72	67	135
IV/D (Pembina Tingkat I)	12	0	12
IV/E (Pembina Utama)	2	2	4
Golongan IV/*Range IV*	**882**	**1049**	**1919**
Jumlah	**3374**	**4761**	**8135**

Sumber : BKPSDM, 2023

Pada tahun 2022 komposisi pegawai di Kabupaten Nganjuk sebagian besar adalah fungsional pendidikan (guru tenaga pendidik) diikuti tenaga kesehatan. Jumlah ASN fungsional pendidikan dan fungsional umum semakin menurun, disebabkan pensiun sementara penerimaan ASN belum memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Kondisi ini memengaruhi kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai di Kabupaten Nganjuk sebagian besar adalah Pendidikan Tinggi (S1, S2, S3). Memperhitungkan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada masa mendatang yang semakin kompleks dengan tuntutan pelayanan yang tinggi, maka kebutuhan ASN berpendidikan sarjana, spesialis dan profesi perlu ditingkatkan.

2.3.4.4. Fungsi Pendukung

Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, selain Dinas Daerah terdapat perangkat daerah lainnya yakni Sekretariat

Daerah, Sekretariat DPRD, Badan dan Inspektorat yang menyelenggarakan fungsi penunjang. Adapun capaian kinerja dari perangkat daerah tersebut selama periode 2018-2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.107.

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2018 – 2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1.Persentase Raperda yang ditetapkan menjadi Perda (%)	180	150	114	64	67
2.Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD			Baik	Baik	Baik
3.Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diterapkan	6	6	6	6	6
4.Jumlah unit kerja yang mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kategori baik dan sangat baik	48	50	52	47	50

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 2023

Untuk perencanaan mendatang, perlu diperhitungkan faktor-faktor yang memengaruhi antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia lembaga pembentuk peraturan daerah, ketepatan perencanaan program pembentukan peraturan daerah, peningkatan koordinasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Untuk jumlah unit kerja yang mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kategori baik/sangat baik dari tahun 2019-2022 fluktuatif kembali naik di tahun 2022 sebesar 50. Perlu peningkatan pelayanan public dengan memberikan akses kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan yang dibutuhkan.

Capaian Kinerja Pengawasan Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2022 (Persen)

Uraian	Capaian	
	2021	2022
Indikator Tujuan :		
Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	2	3

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk 2021-2023

Tabel 2.108.

Capaian Kinerja Pengawasan Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2022 (Persen)

Uraian	TAHUN	
	2021	2022
Indikator Sasaran		
Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart		**28%**
Persentase rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti.	92,46	-
Persentase tindak lanjut temuan yang selesai (Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk).	94,17	
Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai A.	16	
Persentase penyelesaian pengaduan publik.	96,66	
Persentase temuan kerugian daerah dan kerugian Negara yang selesai.	78,52	
Level Kapabilitas APIP	2	

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk 2021-2022

Indikator kinerja tujuan Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah telah mencapai target skor level 3 pada tahun 2022. Indikator sasaran temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti untuk mengukur

sejauh mana temuan hasil pemeriksaan atau Rekomendasi yang diberikan dengan pelaksanaan tindak lanjut. Tahun 2021 terdapat 92,46% Persentase rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti. Persentase tindak lanjut temuan yang selesai (Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk sebesar 94,17%. Indikator Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai A pada tahun 2021 sebesar 16%. Indikator persentase kasus pengaduan yang ditangani dilaksanakan dimaksudkan untuk mengukur tingkat capaian pelaksanaan kegiatan kasus yang telah ditangani Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk dalam 1 (satu) tahun anggaran. Persentase pengaduan publik yang ditindaklanjuti Tahun 2021 sebesar 96,66 %, Persentase temuan kerugian daerah dan kerugian Negara yang selesai sebesar 78,52%. Dan indikator level Level Kapabilitas APIP dengan skor 2 pada tahun 2021. Adapun pada tahun 2022 indikator sasaran inspektorat adalah Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart sebesar 28% dari jumlah Perangkat Daerah.

2.4. Aspek Daya Saing

Aspek daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia. Kondisi daerah Kabupaten Nganjuk terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari Kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia.

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah.

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness)* bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan

masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* peningkatan daya saing daerah.

Kondisi daerah Kabupaten Nganjuk terkait dengan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB Kabupaten Nganjuk sebagaimana digambarkan pada tabel-tabel di bawah ini.

Indikator lain yang menunjukkan kinerja daya saing daerah adalah pengeluaran perkapita. Berikut tabel yang menunjukkan gambaran pengeluaran rata-rata perkapita di Kabupaten Nganjuk:

Tabel 2.109.

Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Kabupaten Nganjuk
Tahun 2017 – 2021

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Rata-rata Perkapita Menurut Kelompok Makanan (Rupiah)	416.171	440.250	470.127	519.275	525.825
Pengeluaran Rata-rata Perkapita Menurut Kelompok Bukan Makanan (Rupiah)	318.305	503.363	410.690	425.701	440.497

Sumber: Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2023 (BPS)

Pengeluaran rata-rata perkapita menurut kelompok makanan dengan posisi terakhir tahun 2022 sebesar Rp.525.825,-. Sedangkan pengeluaran rata-rata perkapita kelompok non makanan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 440.497,-. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan ekonomi yang diindikasikan dari konsumsi rumah tangga Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan. Kondisi ini dapat menjadi daya tarik investasi di Kabupaten Nganjuk.

2.4.3. Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja

baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Masuknya investor asing ke suatu wilayah, sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik dalam negeri suatu wilayah. Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investasi asing di Indonesia pada umumnya, khususnya di Kabupaten Nganjuk. Indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan iklim berinvestasi yang baik adalah meningkatnya nilai investasi daerah yang didukung oleh masih relatif murahnya upah tenaga kerja (UMR) dengan urutan 27 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

2.4.4. Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan evaluasi Kemenpan RB, lndeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun 2022 adalah **60,18** dengan kategori "**B**". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A.	**Komponen Pengungkit**			
	I. Pemenuhan	20,00	9,15	9,56
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,55	5,75
	III. Reform	30,00	14,87	16,26
Total Komponen Pengungkit		**60,00**	**28,57**	**31,57**

No.	Komponen penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
B.	**Komponen Hasil**			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,53	7,66
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,61	6,68
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,26	8,32
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,07	5,95
Total Komponen Hasil		**40,00**	**30,47**	**28,61**
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		**100,00**	**59,04**	**60,18**

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berupaya untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform.

Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Kab. Nganjuk sebanyak 9 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi leading sector dengan rincian sebagai berikut :

No.	Hasil Antara	Skala	2021	2022	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	-	190,0	KASN
2.	Kualitas Kebijakan	0-100	36,17	-	LAN
3.	ASN yang Profesional	0-100	68,3	46,43	BKN
4.	Implementasi SPBE	0-5	2,14	2,18	Kementerian PANRB
5.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	32,84	55,80	LKPP
6.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	2,71	3,32	Kementerian PANRB
7.	Maturitas SPIP	0-5	2	3	BPKP
8.	Kapabilitas APIP	0-5	2	2	BPKP
9.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	45,1	65,67	Ombudsman RI
10.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	61,74	80,54	ANRI

Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada Tahun 2022 Pemkab Nganjuk memperoleh nilai baik dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen Hasil	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1.	Opini BPK	WTP	WTP	BPK
2.	Nilai SAKIP	64,75	66,59	Kementerian PANRB
3.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	86,11	66,80	Kementerian PANRB
4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	82,56	83,23	SPI Eksternal KPK
5.	Survei Internal Organisasi	75,36	79,98	SPI Internal KPK

Rekomendasi :

1. Melakukan **pemantauan dan evaluasi atas rencana kerja RB** secara berkala untuk melihat progress dari setiap orogram RB yang sudah direncanakan;
2. **Menetapkan serta mendorong agen perubahan** untuk menyusun rencana aksi perubahan yang berkelanjutan serta sesuai isu strategis yang dihadapi. Atas rencana aksi yang disusun juga perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, sehingga dapat diketahui keberhasilan dari setiap agen perubahan dalam mendorong pelaksanaan RB utamanya di level PD;
3. **Melakukan penyusunan peta keterkaitan antar kebijakan**, dengan mencantumkan seluruh kebijakan yang dikeluarkan Pemkab Nganjuk yang masih berlaku, kemudian dilakukan analisis keterkaitan dengan kebijakan lain yang terkait, baik internal maupun eksternal;
4. **Meningkatkan penerapan manajemen SPBE** di Pemkab Nganjuk dengan melakukan reviu dan penyesuaian Arsitektur SPBE yang ada dengan Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional;
5. Melaksanakan ***assessment*** kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi serta menyusun *talent pool* di lingkungan Pemkab Nganjuk serta memanfaatkan hasil *assessment* pada setiap pegawai sebagai bagian dalam penyusunan rencana suksesi dan rencana pengembangan kompetensi ke depan. Selanjutnya, menerapkan seluruh ketentuan dalam Permen PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Selain itu, Pemkab Nganjuk juga dapat memaksimalkan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMAS) yang dimiliki untuk manajemen ASN di lingkungan Pemkab Nganjuk;
6. Melaksanakan **evaluasi jabatan** sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang ada;

7. Pemkab Nganjuk agar menyusun **Penjenjangan Kinerja** sesuai Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021 sehingga penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah dapat selaras dan mampu mendukung dalam pencapaian dan peningkatan kinerja organisasi;
8. Meningkatkan **kualitas dan peran APIP** sebagai *quality assurance* dan *consulting* dalam mendorong penilaian risiko serta perencanaan mitigasi risiko yang baik di setiap PD untuk mendukung tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan;
9. Meningkatkan **penyebarluasan informasi terkait kebijakan pengawasan internal** utamanya terkait penanganan benturan kepentingan yang berlaku kepada seluruh PD;
10. Menetapkan **kebijakan kompensasi terkait layanan yang tidak sesuai dengan standar** dan menerapkan system pemberian *reward and punishment* bagi petugas pemberi layanan, serta melakukan peningkatan kompetensi terkait penerapan budaya pelayanan prima kepada seluruh petugas pelayanan.

2.4.5. Akuntanbilitas Kinerja

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Pemerintah Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwa nilai sebesar 66,59 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,01

2.	Pengukuran Kinerja	30	18,75
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,38
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,45
	Nilai Hasil Evaluasi	100	**66,59**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**

Hasil evaluasi tahun 2022 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada tingkat pemerintah daerah maupun tingkat PD.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun 2022 sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja

Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menyusun dokumen perencanaan kinerja tingkat pemerintah daerah yang menjawab kebutuhan atas kinerja sebenarnya/isu strategis daerah. Perencanaan Kinerja juga telah dijabarkan mulai dari tingkat pemerintah daerah sampai ke tingkat jabatan terkecil, hal ini ditunjukkan dengan adanya perjanjian kinerja sampai ke tingkat jabatan terendah pada PD. Na mun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- lndikator kinerja yang ada pada tingkat kabupaten belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur/measurable, relevan dan cukup. Sebagai contoh pada indikator "Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan" yang digunakan untuk mengukur kondisi atau sasaran "Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan prestasi pemuda" dan indikator "Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan" yang digunakan untuk mengukur kondisi atau sasaran "Meningkatnya tata Kelola pemerintahan daerah yang baik";
- lndikator kinerja pada PD belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur/measurab/e, relevan, dan cukup. Sebagai contoh sasaran yang tidak cukup ditunjang indikator kinerja pada Dinas Tenaga Kerja yaitu sasaranstrategis "Terwujudnya perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan kompetensi serta penempatan Angkatan kerja dalam wadah hubungan industrial yang harmonis" ditunjang dengan indikator kinerja "Persentase Pengangguran Terbuka (TPT)";
- Masih terdapat ketidakselarasan antara rumusan tujuan/sasaran strategis serta indikator yang termuat pada Renstra dan Perjanjian Kinerja PD, sebagai contoh pada Dinas Tenaga Kerja dan Sadan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Penjabaran kinerja di tingkat Kabupaten dan PD belum sepenuhnya menggambarkan kerangka logis dalam mencapai kinerja. Hal tersebut terlihat pada pohon kinerja yang sudah dibuat belum sepenuhnya sesuadengan Permen PANRB No. 89 tahun 2021 dimana pohon kinerja yang dibuat masih langsung dari visi, tujuan, dan sasaran strategis RPJMD sampai sasaran strategis PD.

2) Pengukuran Kinerja

Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja telah mengacu pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang digunakan di tingkat pemerintah daerah maupun pada PD. Sebagai bentuk komitmen dalam pengukuran kinerja pada tingkat PD telah menyusun rencana aksi yang menjabarkan detail langkah-langkah pencapaian kinerja serta *mem-breakdown* target kinerja per triwulanan. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pengukurankinerja diantaranya sebagai berikut:

- Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang dilakukan belum menggunakan elektronik dan belum terlihat adanya *feedback* dari pimpinan terkait dengan pencapaian kinerja;
- Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk dijadikan landasan melakukan penyesuaian aktivitas dan anggaran yang lebih berfokus menunjang peningkatan pencapaian kinerja. Selain itu, dimanfaatkan juga sebagai dasar pemberian *reward and punishment* ke setiap individu pegawai.

3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2022 baik tingkat pemerintah daerah maupun tingkat perangkat daerah. Laporan kinerja tersebut telah direviu oleh inspektorat, telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan serta telah membandingkan dengan capaian realisasitahun-tahunsebelumnya.Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pelaporan kinerja diantaranya sebagaiberikut:

- Analisis Laporan Kinerja Pemerintah Daerah belum secara detail menyajikan perbandingan kinerja dengan *benchmark* dengan Pemerintah Daerah lain, rata-rata provinsi,dan rata-rata nasional• Laporan Kinerja Pemerintah Daerah belum menyajikan secara lebih rinci kualitas atas capaian kinerja serta upaya nyata dan/atau hambatannya atas capaian kinerja yang telah dilakukan dan belum menyajikan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) pada tiap indikator sasaran;
- Laporan kinerja pada tingkat PD belum cukup menyampaikan informasi yang memadai diantaranya tentang analisis penyebab keberhasilan/kegagalan ataupeningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan di tiap indikator dan belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan hal tersebut terlihat pada laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup;
- lnformasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya. Contohnya pada indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yaitu "Laju Pertumbuhan Penduduk" dan "Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas".

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

lnspektorat Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh PD. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu

diperhatikan untuk meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- Laporan hasil evaluasi belum memberikan rekomendasi yang cukup dalam memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap PD. Sebagai contoh masih ditemukan ketidakselarasan antara rumusan tujuan/sasaran strategis baik di tingkat PD yang termuat pada Rencana Strategis (Renstra) dan PK dan juga masih ditemukan indikator yang belum SMART;
- Belum ada kebijakan *reward* dan *punishment* atas hasil evaluasi AKIP internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

Rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP Kab. Nganjuk Tahun 2022 dalam rangka meng-efektifkan penerapan akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

1. Memastikan indikator kinerja baik pada tingkat kabupaten dan tingkat PD telah memenuhi kriteria spesifik, terukur/*measurable*, relevan dan cukup, sehingga kondisi kinerja yang diwujudkan dapat diukur dengan tepat pencapaian kinerjanya;
2. Melakukan reviu dan perbaikan antar dokumen perencanaan tingkat PD, agar tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya selaras, sehingga pengumpulan data kinerja dapat selaras dan handal;
3. Menyempurnakan pohon kinerja sesuai Permen PANRB 89 Tahun 2021 sehingga tercipta hubungan kausalitas antar kinerja berjenjang;
4. Membangun pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara elektronik guna mempermudah pimpinan darah maupun PD untuk memantau pencapaian kinerja, sekaligus dapat secara cepat memberikan *feedback* agar pencapaian kinerja sesuai dengan yang direncanakan;

5. Mendorong pemanfaatan hasil pengukuran kinerja dijadikan landasan dalam melakukan penyesuaian aktivitas dan anggaran agar lebih berfokus menunjang peningkatan pencapaian kinerja dan juga dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward and punishment ke setiap individu pegawai;
6. Memperbaiki penyajian pelaporan kinerja sesuai Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 terutama mengenai kedalaman analisis kinerja dan penyajian akuntabilitas anggaran sehingga laporan kinerja dapat menjadi bahan masukan (feedback) untuk perbaikan pencapaian kinerja ke depan;
7. Menyajikan data benchmark kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional provinsi Jawa Timur maupun secara nasional sebagai bahan perbandingan untuk melihat posisi capaian kinerja yang telah dicapai sudah berada pada kondisi yang mana (berada diatasnya atau dibawahnya);
8. Mendorong pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Khususnya terkait informasi realisasi kinerja sebagai salah satu dasar dalam penetapan target kinerja ke depan agar lebih baik dari realisasi kinerja tahun sebelumnya;
9. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan lebih rinci memberikan catatan/temuan, sehingga hasil evaluasi yang dilakukan dapat menggambarkan penerapan SAKIP yang efektif. Disamping itu perlu monitor tindak lanjut saran atau rekomendasi ditindaklanjuti oleh PD;
10. Mengoptimalkan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dapat mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja output dan outcome pada tingkat pemerintah daerah dan PD;
11. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan reward and punishment dengan menjadikan nilai evaluasi akuntabilitas

kinerja internal sebagai bagian dalam pemberian reward and punishment kepada seluruh perangkat daerah.

2.4.6. Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil survei kepuasan masyarakat menyatakan bahwa Perangkat Daerah yang nilai IKM terbaik adalah Dinas Kesehatan dengan nilai 96.09 pada kategori sangat Sangat Baik.

Sedangkan Perangkat daerah yang mendapatkan Nilai IKM paling rendah adalah Kecamatan Ngronggot dengan nilai IKM 80,17 kategori Baik.

Adapun unsur penilaian adalah sebagai berikut :

A. Persyaratan Pelayanan

   Persyaratan Pelayanan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 83,03.

   Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan di Kabupaten Nganjuk ruang lingkup persyaratan Pelayanan berada pada kategori Baik.

B. Prosedur Pelayanan

   Prosedur Pelayanan adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 83,32.

   Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan di Kabupaten Nganjuk, ruang lingkup prosedur pelayanan berada pada kategori Baik

C. Ketepatan dan Kecepatan

   Ketepatan dan Kecepatan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata- rata skor sebesar 80,70.

Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan di Kabupaten Nganjuk, ruang lingkup Ketepatan dan Kecepatan berada pada kategori Baik.

D. Kewajaran Biaya

Kewajaran biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 95,17.

Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan di Kabupaten Nganjuk, ruang lingkup Kewajaran biaya berada pada kategori Sangat Baik.

E. Kesesuaian Produk layanan

Kesesuaian Produk Layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 82,88.

Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan di Kabupaten Nganjuk, ruang lingkup Kesesuaian Produk Layanan berada pada kategori Baik.

F. Kemampuan Petugas Layanan

Kemampuan Petugas Layanan adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 83,75.

Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan di Kabupaten Nganjuk, ruang lingkup Kemampuan Petugas Layanan berada pada kategori Baik

G. Perilaku Petugas

Perilaku Petugas adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 84,93. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan di Kabupaten Nganjuk, ruang lingkup perilaku Petugas berada pada kategori Baik.

H. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 93,10.

Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan di Kabupaten Nganjuk, ruang lingkup sarana dan prasarana berada pada kategori Sangat Baik.

I. Penanganan Pengaduan

Penanganan Pengaduan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 84,33.

Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan di Kabupaten Nganjuk, ruang lingkup penanganan pengaduan berada pada kategori Baik.

Tabel 2.110.

Ranking Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

NO	OPD	RESPONDEN	NILAI UNSUR PELAYANAN									IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1041	94,67	95,37	94,69	98,68	95,15	95,44	96,04	93,78	97,93	94,79	A	Sangat Baik
2	Dinas Kesehatan	288	96,61	96,35	96,00	99,04	96,26	96,52	96,52	96,52	99,65	96,09	A	Sangat Baik
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	106	88,68	92,22	90,33	99,53	94,10	91,51	88,21	90,33	97,64	91,58	A	Sangat Baik

NO	OPD	RESPONDEN	NILAI UNSUR PELAYANAN									IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	68	92,65	91,54	88,24	98,53	92,28	91,54	91,18	88,60	97,79	91,56	A	Sangat Baik
5	Dinas Tenaga Kerja	660	89,62	87,92	86,96	98,67	87,53	88,56	91,06	88,37	97,69	89,80	A	Sangat Baik
6	Kecamatan Rejoso	87	86,78	87,64	84,48	97,99	88,51	90,23	89,37	87,93	99,43	89,36	A	Sangat Baik
7	Kecamatan Patianrowo	244	85,35	85,86	84,32	99,69	87,30	86,17	93,85	88,83	97,95	89,03	A	Sangat Baik
8	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	248	88,51	89,21	86,19	96,77	89,11	89,01	89,62	85,79	94,25	88,93	A	Sangat Baik
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	285	87,19	87,72	85,35	98,16	87,28	87,81	88,25	86,84	95,00	88,40	A	Sangat Baik
10	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	300	86,50	85,92	84,67	97,92	83,92	86,67	91,17	86,83	98,17	88,19	B	Baik
11	Kecamatan Kertosono	103	86,65	86,41	82,77	96,12	84,22	85,68	88,11	83,74	96,84	86,96	B	Baik
12	Dinas Pemadam Kebakaran	186	86,42	85,48	85,22	97,58	83,74	88,31	88,44	78,36	95,83	86,83	B	Baik
13	Kecamatan Sukomoro	265	84,53	84,81	84,06	94,62	84,91	83,87	84,06	84,81	98,68	86,28	B	Baik
14	Kecamatan Loceret	171	83,92	82,46	82,02	99,42	83,92	83,92	87,28	84,65	96,64	86,26	B	Baik
15	Kecamatan Nganjuk	220	78,52	81,48	76,93	99,32	88,52	86,70	90,80	86,25	94,09	86,09	B	Baik
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	188	84,57	85,51	85,90	98,27	85,90	87,90	87,23	83,11	83,24	85,98	B	Baik
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	87	85,34	84,48	81,32	97,41	83,30	84,77	87,07	79,31	95,40	85,63	B	Baik
18	Badan Pendapatan Daerah	57	86,75	85,50	81,50	92,50	84,00	85,00	85,50	84,00	90,25	85,30	B	Baik
19	Kecamatan Baron	86	81,69	84,59	80,23	99,13	85,17	83,14	85,47	79,65	93,31	84,96	B	Baik
20	Satuan Polisi Pamong Praja	150	83,50	84,50	81,33	96,17	82,17	84,83	86,17	76,83	95,50	84,81	B	Baik
21	Kecamatan Berbek	63	83,73	83,33	80,55	95,63	82,53	84,52	84,12	80,55	90,87	84,25	B	Baik
22	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	99	81,82	81,82	81,31	90,66	83,33	83,84	86,36	82,07	93,94	84,17	B	Baik
23	Kecamatan Prambon	64	81,25	83,98	80,08	96,48	81,64	82,81	85,94	79,30	92,97	84,09	B	Baik
24	Sekretariat Dewan	78	83,01	82,69	81,41	94,87	81,09	81,73	85,26	79,49	93,59	83,95	B	Baik
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	131	83,78	84,73	81,11	99,43	84,78	83,78	82,25	72,33	90,46	83,89	B	Baik
26	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	161	83,22	81,98	79,81	95,81	81,67	82,76	84,78	79,96	92,23	83,78	B	Baik
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	85	81,76	81,76	79,41	96,76	81,76	83,53	84,11	77,65	93,82	83,66	B	Baik
28	Kecamatan Gondang	190	79,61	79,34	79,34	99,61	81,58	81,58	81,45	77,76	99,61	83,59	B	Baik
29	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	51	81,86	80,88	81,37	94,12	80,39	84,31	83,82	78,92	94,12	83,58	B	Baik
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	92	82,61	82,88	80,16	98,37	81,25	83,15	83,97	72,83	94,29	83,55	B	Baik
31	Kecamatan Bagor	654	82,80	82,65	82,19	97,71	83,22	83,07	84,40	72,90	90,56	83,54	B	Baik
32	Inspektorat Daerah	56	82,14	83,04	77,68	99,55	79,02	82,14	80,80	76,79	95,98	83,29	B	Baik
33	Kecamatan Pace	544	80,97	80,70	79,73	92,92	81,25	81,43	83,04	79,14	96,32	83,11	B	Baik

NO	OPD	RESPONDEN	NILAI UNSUR PELAYANAN									IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
34	Dinas Perhubungan	259	82,82	83,49	81,95	81,27	82,63	83,40	83,49	79,83	93,92	82,81	B	Baik
35	Kecamatan Ngluyu	81	81,79	80,86	79,63	93,52	81,48	82,72	83,95	74,07	91,05	82,40	B	Baik
36	Sekretariat daerah	85	81,18	82,94	77,35	95,88	79,71	82,65	81,18	76,47	91,47	82,37	B	Baik
37	Dinas Lingkungan Hidup	100	76,75	78,25	78,50	99,75	80,50	77,75	78,50	78,25	99,50	82,25	B	Baik
38	Dinas Pertanian	148	79,39	80,24	77,20	97,13	79,39	80,91	83,45	75,34	92,40	82,00	B	Baik
39	Kecamatan Ngetos	1121	82,05	82,16	78,99	99,67	79,55	80,11	82,34	70,23	89,09	81,86	B	Baik
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	78	81,41	79,17	76,92	93,91	79,17	81,41	81,41	75,64	94,87	81,83	B	Baik
41	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	108	81,02	79,17	77,08	91,43	79,40	81,02	80,79	77,78	92,59	81,43	B	Baik
42	RSD Kertosono	131	80,92	79,77	78,82	83,59	82,44	83,02	81,87	81,49	86,26	81,20	B	Baik
43	Kecamatan Lengkong	25	80,00	82,00	79,00	90,00	78,00	81,00	83,00	73,00	88,00	80,74	B	Baik
44	Dinas Komunikasi dan Informatika	124	77,42	79,64	76,41	93,35	78,83	79,64	81,45	73,39	91,13	80,44	B	Baik
45	Kecamatan Tanjunganom	355	79,15	80,56	74,65	90,00	78,10	78,8	81,90	75,56	91,55	80,33	B	Baik
46	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	439	77,05	77,62	77,16	89,01	77,22	77,62	81,95	75,28	96,87	80,28	B	Baik
47	Kecamatan Ngronggot	247	78,44	77,63	75,40	89,97	77,32	78,13	79,04	73,98	91,59	80,17	B	Baik
48	Kecamatan Jatikalen	66	80,68	79,92	73,86	95,08	78,79	77,65	80,30	70,83	87,12	79,67	B	Baik
49	Dinas Pendidikan	1.43	78,04	77,29	73,20	90,52	77,15	78,15	78,78	74,56	91,43	79,10	B	Baik
50	Kecamatan Wilangan	51	78,92	80,88	73,53	87,75	77,45	79,41	79,41	67,65	86,76	78,29	B	Baik
51	Kecamatan Sawahan	157	77,07	79,94	66,56	97,29	75,32	77,55	79,14	71,50	71,97	76,60	C	Kurang Baik
52	RSD Nganjuk	354	76,63	76,35	73,44	82,44	76,56	77,69	78,75	70,18	79,39	76,06	C	Kurang Baik
TOTAL		12467	83,03	83,32	80,70	95,17	82,88	83,75	84,93	79,60	93,10	84,33	B	Baik

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab.Nganjuk, 2022

Berdasarkan hasil analisa data terhadap survei kepuasan masyarakat disimpulkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebesar 84,33 dan berada pada kategori Baik Adapun kesimpulan masing-masing unsur pelayanan sebagai berikut :

1. Persyaratan Pelayanan berada pada kategori Baik
2. Prosedur Pelayanan berada pada kategori Baik
3. Ketepatan dan Kecepatan berada pada kategori Baik
4. Kewajaran Biaya berada pada kategori Sangat Baik
5. Kesesuaian Produk Pelayanan berada pada kategori Baik
6. Kemampuan Petugas Layanan berada pada kategori Baik

7. Perilaku Petugas berada pada kategori Baik
8. Sarana dan Prasarana berada pada kategori Sangat Baik.
9. Penanganan Pengaduan berada pada kategori Baik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk berdasarkan peringkat unsur pelayanannya, diperoleh kepuasan responden paling tinggi pada unsur Kewajaran Biaya dan kepuasan responden paling rendah pada unsur Ketepatan dan Kecepatan.

2.4.7. Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 18 bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara merata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang merupakan hak konstitusional rakyat untuk memperolehnya.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan. Oleh karena itu, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Penerapan SPM menjadi suatu hal yang sangat penting dan

mendasar karena dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud.

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah terdiri dari 6 jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 7 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yaitu :

Tabel 2.111.

Kinerja SPM Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

No.	Perangkat Daerah	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Dinas Pendidikan	Urusan Pendidikan	1. Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	30.028	100%	99,22%	99,22%
			2. Pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	137.651	100%	89,61%	89,61%
			3. Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	323	100%	100%	100%
2	Dinas Kesehatan	Urusan Kesehatan	1. Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	11.838	100%	76,28%	76,28%
			2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	12.567	100%	84,84%	84,84%
			3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	12.271	100%	86,97%	86,97%

No.	Perangkat Daerah	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian
			4. Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	46.619	100%	80,40%	80,40%
			5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	99.500	100%	77,33%	77,33%
			6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	373.342	100%	56,44%	56,44%
			7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	101.599	100%	55,02%	55,02%
			8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	90.038	100%	23,62%	23,62%
			9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	22.018	100%	100%	100%
			10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	2.018	100%	100%	100%
			11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	4.501	100%	31,74%	31,74%
			12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)yang mendapatkan layanan kesehatan	16.697	100%	100%	100%

No.	Perangkat Daerah	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk	Urusan Pekerjaan Umum	1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	348.021	100%	100%	100%
			2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	348.021	100%	100%	100%
		Urusan Perumahan Rakyat	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	86	100%	100%	100%
			2. Fasilitasi penyediaan rumahyang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak hun bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten	271	100%	100%	100%
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Nganjuk	Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran Daerah)	1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	269	100%	100%	100%
			2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	192	100%	100%	100%
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk	Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Bencana Daerah)	1. Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.134.617	100%	100%	100%
			2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	386.574	100%	100%	100%
			3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	14	100%	100%	100%

No.	Perangkat Daerah	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk	Urusan Sosial	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang diasbilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	2.609	100%	100%	100%
			2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	310	100%	100%	100%
			3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	3.473	100%	85,71%	85,71%
			4. Gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	250	100%	100%	100%
			5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	179	100%	100%	100%
No.	**Perangkat Daerah**	**Bidang SPM**	**Jenis Pelayanan Dasar**	**Indikator**	**Formulasi**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1	Dinas Pendidikan	Urusan Pendidikan	1. Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	29.786	100%	97,73%	97,73%
			2. Pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	128.971	100%	83,73%	83,73%

No.	Perangkat Daerah	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian
			3. Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	283	100%	0,14%	0,14%
2	Dinas Kesehatan	Urusan Kesehatan	1. Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	12.451	100%	79,57%	79,57%
			2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	12.264	100%	82,11%	82,11%
			3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	12.882	100%	90,56%	90,56%
			4. Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	43.626	100%	74,64%	74,64%
			5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	64.007	100%	49,26%	49,26%
			6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	156.075	100%	23,52%	23,52%
			7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	88.996	100%	49,65%	49,65%
			8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	55.123	100%	14,53%	14,53%
			9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	21.276	100%	97,08%	97,08%

No.	Perangkat Daerah	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian
			10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	2.501	100%	76,11%	76,11%
			11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	682	100%	100%	100%
			12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)yang mendapatkan layanan kesehatan	18.439	100%	105,5%	105,5%
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk	Urusan Pekerjaan Umum	1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	283.053	100%	99,85%	99,85%
			2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	308.436	100%	94,82%	94,82%
		Urusan Perumahan Rakyat	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	284	100%	100%	100%
			2. Fasilitasi penyediaan rumahyang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak hun bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten	205	100%	100%	100%

No.	Perangkat Daerah	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Nganjuk	Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Trantibum dan Sub Urusan Kebakaran Daerah)	1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	100%	100%	100%
			2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	47	100%	100%	100%
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk	Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Bencana Daerah)	1. Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	-	100%	70,98%	70,98%
			2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.103.902	100%	100%	100%
			3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	948	100%	100%	100%
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk	Urusan Sosial	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang diasbilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	53	100%	100%	100%
			2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	727	100%	100%	100%

No.	Perangkat Daerah	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian
			3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	12	100%	85,71%	85,71%
			4. Gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	47	100%	100%	100%
			5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	1.373	100%	100%	100%

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (1) didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah diartikan juga sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan fungsi pemerintahan termasuk kegiatan pembangunan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (money follow program).

Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Dan upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian APBD dijadikan salah satu bentuk instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada dasarnya, konsep penganggaran adalah membandingkan antara target anggaran dan realisasinya dan menyandingkan antara penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Begitu juga, pada APBN/APBD, pada intinya adalah membandingkan dan menandingkan antara anggaran dan realisasi penerimaan

dengan anggaran dan realisasi pengeluaran. Dalam konteks APBD, penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Pendapatan Transfer;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah,

Berikut merupakan data target dan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 secara rinci dapat disajikan dalam bentuk Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Rata-Rata Pertumbuhan (2018-2022)
1	***PENDAPATAN***						
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**						
3	Pendapatan Pajak Daerah	88,593,693,064.70	103,347,186,431.26	110,299,917,866.92	122,126,175,036.00	135,071,942,647.00	11.18
4	Pendapatan Retribusi Daerah	25,290,727,377.70	28,918,690,855.97	26,520,448,228.21	25,138,334,329.55	26,494,763,548.82	1.56
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,438,163,361.40	3,591,715,820.94	3,741,455,562.80	4,040,422,262.90	4,099,258,627.94	4.52
6	Lain-lain PAD yang sah	244,264,154,650.32	232,414,643,370.11	261,785,322,703.50	327,157,367,517.79	279,643,471,167.17	4.56
7	***Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 5)***	***361,586,738,454.12***	***368,272,236,478.28***	***402,347,144,361.43***	***478,462,299,146.24***	***445,309,435,990.93***	***5.77***
8	**PENDAPATAN TRANSFER**						
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN						
10	Dana Bagi Hasil Pajak	40,686,890,495.00	31,309,203,299.00	46,523,572,049.00	124,278,775,421.00	119,268,970,042.00	47.16
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	67,837,368,461.00	59,039,774,176.00	45,271,353,632.00			(18.14)
12	Dana Alokasi Umum	1,059,436,592,960.00	1,105,447,597,000.00	998,778,363,000.00	982,963,245,000.00	978,993,349,898.00	(1.82)
13	Dana Alokasi Khusus	361,601,592,261.00	361,030,760,506.00	350,474,099,120.00	379,752,008,479.00	337,138,297,354.00	(1.49)

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Rata-Rata Pertumbuhan (2018-2022)
14	***Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)***	**1,529,562,444,177.00**	**1,556,827,334,981.00**	**1,441,047,387,801.00**	**1,486,994,028,900.00**	**1,435,400,617,294.00**	**(1.48)**
15	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA - LAINNYA**						
16	Dana Insentif Daerah (DID)				47,069,631,000.00		
17	Dana Penyesuaian	235,353,700,000.00	308,812,605,400.00	351,110,500,000.00	286,114,908,000.00	288,473,460,800.00	6.81
18	***Jumlah Pendapatan Transfer Dana Lainnya (18 s/d 19)***	**235,353,700,000.00**	**308,812,605,400.00**	**351,110,500,000.00**	**333,184,539,000.00**	**288,473,460,800.00**	**6.60**
19	**TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI**						
20	Pendapatan Bagi hasil Pajak	136,623,397,466.00	165,027,072,496.00	126,179,042,567.00	174,278,517,797.00	165,996,447,332.00	7.65
21	Pendapatan Bagi hasil Lainnya						
22	***Jumlah Pendapatan Transfer pemerintah Propinsi (23 s/d 24)***	136,623,397,466.00	165,027,072,496.00	126,179,042,567.00	174,278,517,797.00	165,996,447,332.00	7.65
23	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI LAINNYA						
24	Bantuan Keuangan dari Propinsi	6,501,295,300.00	6,709,909,000.00	6,429,703,350.00	26,474,523,600.00	16,799,163,000.00	68.56

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Rata-Rata Pertumbuhan (2018-2022)
25	*Jumlah Pendapatan Transfer pemerintah Propinsi Lainnya*	6,501,295,300.00	6,709,909,000.00	6,429,703,350.00	26,474,523,600.00	16,799,163,000.00	68.56
26	***Jumlah Pendapatan Transfer (15+20+25+28)***	***1,908,040,836,943.00***	***2,037,376,921,877.00***	***1,924,766,633,718.00***	***2,020,931,609,297.00***	***1,906,669,688,426.00***	***0.15***
27	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**						
28	Pendapatan Hibah	99,922,385,400.00	107,328,360,000.00	108,283,180,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	(21.54)
29	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				103,043,853,000.00	143,506,602,026.00	
30	***Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (32 s/d 34)***	***99,922,385,400.00***	***107,328,360,000.00***	***108,283,180,000.00***	***109,043,853,000.00***	***149,506,602,026.00***	11.53
31	***JUMLAH PENDAPATAN (7 + 29 +34)***	***2,369,549,960,797.12***	***2,512,977,518,355.28***	***2,435,396,958,079.43***	***2,608,437,761,443.24***	***2,501,485,726,442.93***	1.49
32	***BELANJA***						
33	**BELANJA OPERASI**						
34	Belanja Pegawai	924,488,041,956.00	941,226,632,350.64	903,955,322,509.00	979,165,676,231.00	977,690,921,110.00	1.51
35	Belanja Barang dan Jasa	607,475,369,029.68	691,838,478,982.50	659,014,418,130.89	560,978,980,586.36	722,359,819,806.89	5.76
36	Bunga				0		
37	Subsidi				0		
38	Hibah	57,301,624,785.00	39,668,448,504.00	49,675,136,845.00	54,627,830,199.00	73,351,910,336.27	9.67
39	Bantuan Sosial	11,407,200,000.00	16,032,101,100.00	11,733,200,000.00	10,518,100,000.00	12,579,950,000.00	5.74
40	Bantuan Keuangan						

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Rata-Rata Pertumbuhan (2018-2022)
41	***Jumlah Belanja Operasi (40 s/d 46)***	***1,600,672,235,770.68***	***1,688,765,660,937.14***	***1,624,378,077,484.89***	***1,605,290,587,016.36***	***1,785,982,601,253.16***	2.94
42	**BELANJA MODAL**						
43	Belanja Tanah	13,044,955,400.00	2,148,530,675.00	879,865,000.00	12,052,696,800.00	5,305,199,700.00	267.82
44	Belanja Peralatan dan Mesin	73,550,529,842.77	85,387,132,914.00	67,814,494,089.55	108,801,121,457.20	123,899,653,221.82	17.46
45	Belanja Gedung dan Bangunan	85,533,107,634.00	119,950,288,910.06	48,030,087,135.24	104,334,733,933.67	161,670,035,681.14	38.12
46	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	153,097,303,653.00	214,077,549,772.09	121,882,701,382.12	121,926,629,933.39	149,834,805,029.36	4.92
47	Belanja Aset Tetap lainnya	14,558,050,325.00	13,683,881,651.00	11,023,392,817.58	4,561,427,544.00	4,571,122,152.00	(20.96)
48	Belanja Aset lainnya			-	-		
49	***Jumlah Belanja Modal (50 s/d 55)***	**339,783,946,854.77**	**435,247,383,922.15**	**249,630,540,424.49**	**351,676,609,668.26**	**445,280,815,784.32**	**13.24**
50	**BELANJA TAK TERDUGA**						
51	Belanja Tak Terduga	1,245,876,255.00	47,813,975.00	103,309,911,807.10	25,420,769,197.00	6,235,275,135.00	53,929.83
52	*Jumlah Belanja Tak Terduga (59)*	1,245,876,255.00	47,813,975.00	103,309,911,807.10	25,420,769,197.00	6,235,275,135.00	53,929.83
53	***JUMLAH BELANJA (47+ 56 + 60)***	***1,941,702,058,880.45***	***2,124,060,858,834.29***	***1,977,318,529,716.48***	***1,982,387,965,881.62***	***2,237,498,692,172.48***	***3.90***
54	***TRASFER***						
55	**TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA**						
56	Bagi Hasil Pajak	8,269,900,000.00	8,827,460,000.00	8,807,480,000.00	11,071,471,787.00	15,560,731,220.00	18.19
57	Bagi Hasil Retribusi	2,438,726,000.00	2,750,430,000.00	2,503,467,410.00	3,036,987,113.00	2,463,637,600.00	1.56

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Rata-Rata Pertumbuhan (2018-2022)
58	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya						
59	***JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (65 s/d 67)***	***10,708,626,000.00***	***11,577,890,000.00***	***11,310,947,410.00***	***14,108,458,900.00***	***18,024,368,820.00***	***14.58***
60	**TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN**						
61	Bantuan Keuangan ke Desa	359,336,235,300.00	405,318,614,181.00	394,647,581,200.00	392,646,929,469.00	398,458,892,358.00	2.78
62	Bantuan Keuangan Lainnya	1,050,198,500.00	1,039,256,500.00	-	6,200,000,000.00	11,246,000,000.00	
63	***JUMLAH BANTUAN KEUANGAN***	***360,386,433,800.00***	***406,357,870,681.00***	***394,647,581,200.00***	***398,846,929,469.00***	***409,704,892,358.00***	***3.42***
64	***JUMLAH TRANSFER***	***371,095,059,800.00***	***417,935,760,681.00***	***405,958,528,610.00***	***412,955,388,369.00***	***427,729,261,178.00***	***3.76***
65	***JUMLAH BELANJA + TRANSFER (61 + 68)***	***2,312,797,118,680.45***	***2,541,996,619,515.29***	***2,383,277,058,326.48***	***2,395,343,354,250.62***	***2,665,227,953,350.48***	***3.86***
66	***SURPLUS/DEFISIT (36 - 69)***	***56,752,842,116.67***	***(29,019,101,160.01)***	***52,119,899,752.95***	***213,094,407,192.61***	***(163,742,226,907.55)***	***(74.68)***
67	***PEMBIAYAAN***	-	-	-	-	-	
68	**PEMBIAYAAN PENERIMAAN**						
69	Penggunaan SiLPA	308,822,990,038.43	358,304,762,938.32	319,354,816,778.31	365,746,466,503.75	551,064,757,631.11	17.59
70	Pencairan Dana Cadangan						

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Rata-Rata Pertumbuhan (2018-2022)
71	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
72	Penerimaan Pinjaman Derah		5,594,832,700.00	-			
73	Penerimaan kembali Pinjaman						
74	Penerimaan Piutang	228,930,783.22	69,155,000.00	271,749,972.50	223,883,934.75	296,988,131.36	59.55
75	***Jumlah Pembiayaan Penerimaan (75 s/d 80)***	***309,051,920,821.65***	***363,968,750,638.32***	***319,626,566,750.81***	***365,970,350,438.50***	***551,361,745,762.47***	***17.69***
76	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**						
77	Pembentukan Dana Cadangan						
78	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7,500,000,000.00	10,000,000,000.00	6,000,000,000.00	28,000,000,000.00	15,450,000,000.00	78.79
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		5,594,832,700.00	-			
80	***Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (84 s/d 87)***	***7,500,000,000.00***	***15,594,832,700.00***	***6,000,000,000.00***	***28,000,000,000.00***	***15,450,000,000.00***	***92.06***
81	***PEMBIAYAAN NETO (81- 87)***	***301,551,920,821.65***	***348,373,917,938.32***	***313,626,566,750.81***	***337,970,350,438.50***	***535,911,745,762.47***	***17.97***
82	***SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (71+88)***	***358,304,762,938.32***	***319,354,816,778.31***	***365,746,466,503.76***	***551,064,757,631.11***	***372,169,518,854.92***	***5.47***

Sumber : BPKAD Kab. Nganjuk (Tahun 2022 unaudited)

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui gambaran kinerja pelaksanaan APBD 2018 – 2022 Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

3.1.1.1 Kinerja Pendapatan

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebesar 1,49%. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD selama 5 tahun tumbuh rata-rata 5,77%. Pajak Daerah sebagai salah satu jenis PAD mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 11,18% paling tinggi dibanding yang sumber pendapatan asli daerah yang lain. Realisasi pendapatan pajak daerah mempunyai tren naik dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dengan diterapkannya Perda No 2 tahun 2008 tentang Pajak dan Retribusi maka pendapatan pajak khususnya dari PBBP2, BPHTB dan Pajak Penerangan terus meningkat significant, selain Perda No. 2 tahun 2008, selain itu implementasi Undang -Undang 1 Tahun 2022 yeng mengatur restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5(lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yang bertujuan untuk menyelaraskan obyek pajak antara pajak pusat dan daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak. Selain integrase pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, juga mengatur adanya perluasan obyek pajak dan tambahan pajak baru seperti opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Penambahan obyek pajak tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian keuangan. Selain perubahan ketentuan terkait pajak daerah, juga adanya penyederhanaan rasionalisasi retribusi agar retribusi yang akan dipungut Pemerintah daerah merupakan retribusi yang dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya

kepatuhan yang rendah juga dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar public yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Realisasi pendapatan retribusi daerah fluktuatif dengan rata–rata kenaikan hanya 1,56%, dengan kenaikan tertinggi pada tahun 2019. Jenis pendapatan retribusi daerah yang berkontribusi significant adalah retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Sementara itu, jenis Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami pertumbuhan yang sebesar 4,52% dengan kontribusi terbesar pada pendapatan Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan). Rata-rata pertumbuhan terbesar juga terdapat pada realisasi Lain-lain PAD yang sah sebesar 4,56% terutama pada sektor pendapatan BLUD Rumah Sakit Nganjuk dan Kertosono.

Bagian terbesar pendapatan daerah berasal dari pendapatan Transfer, pendapatan transfer tumbuh secara agregat sebesar 0,15%. Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pusat dan daerah. Transfer pemerintah pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil Pusat, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa dan Dana Insentif Daerah/ Fiskal. Realisasi Pendapatan Bagi hasil dari pusat cenderung mengalami kenaikan setiap tahun sebesar 47,16%, pendapatan DAK juga mengalami penurunan sebesar 1,49%, pendapatan transfer ke desa/dana desa naik 6,6% yang besarannya tergantung dari penerimaan APBN dan penggunaannya menyesuaikan kebijakan pada saat tahun berkenaan. Kabupaten Nganjuk masih belum mandiri dalam hal pendapatan karena sangat tergantung pada perhitungan DAU dari pemerintah pusat, realisasi pendapatan DAU ini menurun 1,82% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tahun berkenaan. Sesuai PMK 212 tahun 2022 mulai tahun 2023 Dana alokasi umum dibedakan menjadi dua yaitu Dau yang diatur penggunaannya dan Dau yang tidak diatur penggunaannya. Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) hanya ada pada tahun 2021 saja sebagai reward dari

pemerintah pusat atas dicapainya prestasi pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Pendapatan transfer antar daerah adalah pendapatan yang berasal dari bantuan keuangan provinsi.

Kelompok pendapatan daerah yang ketiga adalah Lain-Lain Pendapatan yang Sah mengalami rata-rata kenaikan sebesar 11,53%, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Lain Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengalami rata-rata kenaikan sebesar 39,27% yang terdiri atas Hibah Bos dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Faskes Tingkat Pertama, pada tahun 2018-2021 pendapatan ini masuk di jenis pendapatan hibah. Sedangkan Pendapatan Hibah adalah Hibah kepada PDAM. Jika dilihat dari kontribusi tiap-tiap sumber pendapatan daerah, maka diperoleh gambaran proporsi sumber pendapatan daerah periode 2018 – 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2022

Uraian	Realisasi		Realisasi		Realisasi		Realisasi		Realisasi	
	2018 (Rp)	%	2019 (Rp)	%	2020 (Rp)	%	2021	%	2022 (Rp)	%
PENDAPATAN	2.369.549.960.797,12		2.512.977.518.355,28		2.435.396.958.079,43		2.608.437.761.443,24		2,501,485,726,442.93	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	361.586.738.454,12	15,26	368.272.236.478,28	14,65	402.347.144.361,43	16,52	478.462.299.146,24	18,34	445,309,435,990.93	17.80
Jumlah Pendapatan Transfer (14+18+22+25)	1.908.040.836.943,00	80,52	2.037.376.921.877,00	81,07	1.924.766.633.718,00	79,03	2.020.931.609.297,00	77,48	1,906,669,688,426.00	76.22
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (28 s/d 29)	99.922.385.400,00	4,22	107.328.360.000,00	4,27	108.283.180.000,00	4,45	109.043.853.000,00	4,18	149,506,602,026.00	5.98

Sumber: BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 (Tahun 2022 unaudited)

Sedangkan untuk memperoleh gambaran kinerja PAD, maka dapat diketahui dari perbandingan target PAD dan realisasi PAD selama 2018 – 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Target	345.138.632.616	357.367.538.593	323.260.574.754	359.762.424.055	384,183,486,327.00
B	Realisasi	361.586.738.454	368.272.236.478	402.347.144.361	478.462.299.146	445,309,435,990.93
C	Persentase realisasi	104,77	103,05	124,47	132,99	115.91

Sumber: BPKAD Kabupaten Nganjuk (Tahun 2022 unaudited)

3.1.1.2 Kinerja Belanja

Rata-rata pertumbuhan belanja daerah sebesar 3,90%. Realisasi belanja fluktuatif dari tahun 2018 sampai dengan 2019 tren naik dan kembali fluktuatif ditahun 2020 sampai dengan 2022. Belanja daerah terdiri atas Operasi, Modal, Tidak Terduga dan Transfer. Proporsi tertinggi dalam belanja daerah selama 5 (lima) tahun terakhir adalah belanja operasi. Rata proporsi belanja operasi terhadap total belanja sebesar 67 persen. Proporsi tertinggi kedua ditempati oleh belanja transfer dengan rata-rata proporsi sebesar 16,41 persen disusul kemudian oleh belanja Modal sebesar 14,74 persen dan terakhir belanja tidak terduga sebesar 1,06 persen. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan. Proporsi belanja Operasi yang paling besar adalah belanja pegawai. Belanja pegawai digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Tren belanja pegawai cenderung

naik dengan rata rata pertumbuhan 1,51%. Proporsi belanja pagawai dibandingkan total APBD pada tahun 2022 adalah 36,68%. Komponen belanja operasi yang lain adalah belanja barang dan jasa, pada tahun 2022 mempunyai proporsi sebesar 27,10% dibandingkan total APBD. Komponen Belanja bantuan social dan hibah juga merupakan bagian dari belanja operasi yang memiliki proporsi kecil terhadap total APBD. Belanja modal mempunyai proporsi 16,70% terhadap total APBD 2022. Selain belanja operasi dan belanja modal jenis belanja transfer digunakan untuk mencatat pengeluaran uang kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa juga menyumbang proporsi yang besar 16,05% pada total APBD 2022.

Belanja tidak terduga digunakan untuk mencatat belanja tidak terduga berupa pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Tabel 3.4 Proporsi Belanja Operasional, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga Terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.	
2	**Belanja**	**2.312.797.118.680**	**100%**	**2.541.996.619.515**	**100%**	**2,383,277,058,326**	**100%**	**2,395,343,354,250.62**	**100%**	**2,665,227,953,350.48**	**100%**
2.01	**Belanja Operasi**	1.600.672.235.771	69%	1.688.765.660.937	66%	1,624,378,077,485	68%	1,605,290,587,016.36	67%	1,785,982,601,253.16	67.01%
2.02	**Belanja Modal**	339.783.946.855	15%	435.247.383.922	17%	249.630.540.424	10%	351,676,609,668.26	15%	445,280,815,784.32	16.71%
2.03	**Belanja Tidak Terduga**	1.245.876.255	0,05%	47.813.975	0,002%	103.309.911.807	4%	25,420,769,197.00	1%	6,235,275,135.00	0.23%
2.04	**Belanja Transfer**	371.095.059.800	16%	417.935.760.681	16%	405.958.528.610	17%	412,955,388,369.00	17%	427,729,261,178.00	16.05%

Sumber: BPKAD Kabupaten Nganjuk (Tahun 2022 unaudited)

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu Aset, Utang, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset nonlancar. Aset lancar terdiri dari kas atau aset lainnya yang dapat diuangkan atau dapat dipakai habis dalam waktu 12 bulan mendatang. Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan. Rata-rata pertumbuhan Neraca daerah Kabupaten Nganjuk periode 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 – Tahun 2011 (*Accrual Basis)*

Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	270.090.729.471,75	311.116.994.766,19	281.014.443.122,97	307.591.800.610,67	412.084.159.155,90	17,91
Kas di Bendahara Penerimaan	145.976.076,50	85.416.667,00	31.964.466,00	-		(45,17)
Kas di Bendahara Pengeluaran	100.000,00	28.997,22	401.197.264,72	34.960,70		276.637,34
Kas di Badan Layanan Umum	17.791.321.340,59	25.447.417.723,44	9.200.092.451,30	39.276.679.950,73	127.854.835.379,85	100,11
Kas BPJS di Bendahara FKTP	16.675.282.183,04	18.190.709.600,04	23.555.805.738,04	18.562.813.527,36	11.055.075.048,36	(4,43)
Kas BOS	4.617.954.194,85	3.464.971.904,65	5.225.954.390,00	315.172.415,00	198.496.582,00	(26,28)
Kas Lainnya	308.568.223,53	2.808.724.468,16	1.487.501.443,65	1.085.545.143,76	476.562.802,44	118,12
Piutang Pajak	3.801.461.602,13	7.216.651.689,25	8.075.808.586,16	8.849.550.626,00	7.789.170.711,00	29,35
Penyisihan Piutang Pajak	(895.687.566,86)	(1.245.995.461,31)	(1.831.546.292,56)	(2.313.704.657,25)	(2.466.953.750,50)	34,58
Piutang Pajak Netto	*2.905.774.035,27*	*5.970.656.227,94*	*6.244.262.293,60*	*6.535.845.968,75*	*5.322.216.960,50*	28,33
Piutang Retribusi	1.816.440.252,00	2.903.583.982,58	3.446.550.946,58	2.262.006.435,58	2.840.728.172,35	17,79
Penyisihan Piutang Retribusi	(413.343.152,95)	(681.363.083,68)	(1.231.719.369,58)	(1.177.531.303,13)	(1.308.418.797,42)	103,35
Piutang Retribusi Netto	*1.403.097.099,05*	*2.222.220.898,90*	*2.214.831.577,00*	*1.084.475.132,45*	*1.532.309.374,93*	9,21
Piutang Lain-lain PAD yang sah	12.500.000,00	16.912.665,00	16.251.850,00	14.500.000,00	492.660,00	(15,20)
Penyishan Piutang	(625.000,00)	(14.639.633,25)	(14.587.592,50)	(14.500.000,00)	(24.633,00)	428,31
Piutang Lain-lain PAD yang sah netto	*11.875.000,00*	*2.273.031,75*	*1.664.257,50*	-	*468.027,00*	(51,91)

Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	-					(100,00)
Piutang BLUD	11.049.502.395,00	17.272.284.006,00	47.243.541.736,26	4.347.639.008,00	12.041.341.687,00	57,16
Penyisihan Piutang BLUD	(930.452.310,40)	(1.318.282.470,35)	(2.826.580.469,51)	(684.185.458,73)	(1.075.059.651,70)	24,33
Piutang BLUD Netto	*10.119.050.084,60*	*15.954.001.535,65*	*44.416.961.266,75*	*3.663.453.549,27*	*10.966.282.035,30*	62,47
Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	24.489.887.774,00	8.960.010.706,00	5.494.377.615,00	9.919.470.445,00	9.547.519.632,00	(7,41)
Piutang Dana Transfer			30.386.817.575,00	11.920.347.057,00	235.682.000,00	(79,40)
Piutang Lain-lain	1.890.249.409,00	2.371.900.888,30	2.131.917.946,10	1.823.829.273,00	1.797.123.070,00	(0,56)
Penyisihan Piutang Lainnya	(1.890.249.409,00)	(1.872.475.409,00)	(1.866.186.829,00)	(1.823.829.273,00)	(1.797.123.070,00)	(1,45)
Piutang Lain-lain Netto	-	499.425.479,30	265.731.117,10	-	-	(73,40)
Persediaan	32.122.074.385,35	28.618.425.985,35	31.255.723.188,00	45.274.604.133,47	34.942.747.080,17	8,95
Jumlah Aset Lancar	***380.681.689.868,53***	***423.341.277.991,59***	***441.197.327.766,63***	***445.230.242.894,16***	***614.216.354.078,46***	15,48
Investasi Non Permanen						
Investasi Non Permanen Lainnya	3.360.483.451,46	3.149.326.668,24	3.095.320.668,24	2.857.067.831,74	2.659.890.099,99	(6,68)
Penyisihan Investasi Non Permanen	(3.315.221.517,33)	(3.123.876.668,24)	(3.095.320.668,24)	(2.857.067.831,74)	(2.659.890.099,99)	(5,80)
Investasi Non Permanen Netto	45.261.934,13	25.450.000,00	-	-	-	(72,68)
Jumlah Investasi Non Permanen Lainnya	45.261.934,13	25.450.000,00	-	-	-	(72,68)
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	47.053.596.634,10	52.382.950.393,53	57.443.399.889,52	75.032.203.777,48	107.354.026.770,65	22,72
Jumlah Investasi Permanen	47.053.596.634,10	52.382.950.393,53	57.443.399.889,52	75.032.203.777,48	107.354.026.770,65	22,72

Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Jumlah investasi	***47.098.858.568,23***	***52.408.400.393,53***	***57.443.399.889,52***	***75.032.203.777,48***	***107.354.026.770,65***	22,62
ASET TETAP						
Tanah	605.017.058.964,77	669.032.351.722,27	738.417.250.388,77	755.957.115.301,77	819.547.280.913,77	24,43
Peralatan dan Mesin	543.856.959.590,34	632.865.483.901,93	747.893.864.114,28	843.072.213.372,23	952.076.130.894,51	13,60
Gedung dan Bangunan	1.053.883.371.491,80	1.068.292.483.207,83	1.169.101.215.840,98	1.214.873.913.241,44	1.296.160.177.586,05	4,26
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.158.235.149.048,00	2.328.630.252.381,67	2.540.956.053.155,76	2.657.702.290.591,58	2.814.651.058.671,62	6,95
Aset Tetap Lainnya	78.308.329.407,00	88.264.005.849,00	99.708.196.034,00	108.211.442.856,01	111.571.474.330,11	7,13
Kontruksi dalam Pengerjaan	7.631.339.600,00	611.145.600,00	25.335.457.200,00	24.908.280.824,30	67.374.608.041,40	2.300,90
Akumulasi Penyusutan	(1.841.085.489.858,81)	(2.081.294.263.391,39)	(2.501.617.997.404,20)	(2.773.063.314.435,88)	(2.985.224.814.649,18)	11,88
Jumlah Aset Tetap	***2.605.846.718.243,10***	***2.706.401.459.271,31***	***2.819.794.039.329,59***	***2.831.661.941.751,45***	***3.076.155.915.788,28***	6,50
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan						
Jumlah Dana Cadangan						
ASET LAINNYA						
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-					
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.455.736.000,00	2.455.736.000,00	2.455.736.000,00	827.736.000,00		(33,26)
Aset Tak Berwujud	1.974.842.761,00	2.544.342.761,00	3.071.113.461,00	3.248.991.161,00	3.323.351.161,00	19,21
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.421.518.135,90)	(1.781.602.511,00)	(2.254.267.061,00)	(2.709.822.536,00)	(3.046.949.636,00)	22,10
Aset Lain-lain	28.805.987.338,21	22.548.205.686,98	29.185.613.042,21	28.229.046.742,21	36.052.228.680,21	78,70
Akumulasi Penyusutan			(6.740.968.185,23)	(6.188.565.156,89)	(12.490.799.498,89)	46,82

Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Aset Lain-lain						
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00		12,50
Jumlah Aset Lainnya	***35.015.047.963,31***	***28.966.681.936,98***	***32.917.227.256,98***	***30.607.386.210,32***	***23.837.830.706,32***	51,27
JUMLAH ASET	**3.068.642.314.643,17**	**3.211.117.819.593,41**	**3.351.351.994.242,72**	**3.382.531.774.633,41**	**3.821.564.127.343,71**	8,04
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	477.404.107,33	747.905,00	800,00	-	-	18,15
Utang Bunga	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	-	-	-	-	-	-
Utang kepada Pegawai	-	-	-	-	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
Utang Transfer	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	3.508.162.511,58	3.787.505.833,33	5.539.127.750,00	4.280.051.600,00	10,49
Utang Beban	23.393.924.942,59	23.647.880.070,48	30.356.889.325,49	46.339.250.026,00	66.143.388.483,59	22,91
Utang Jangka pendek Lainnya	24.532.344.750,00	3.481.685.449,30	1.809.750.035,65	1.085.545.143,76	604.371.337,44	(54,54)
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	***48.403.673.799,92***	***30.638.475.936,36***	***35.954.145.994,47***	***52.963.922.919,76***	***71.027.811.421,03***	29,39

Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri – Obligasi	-	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	33.930.000,00	41.850.000,00	33.930.000,00	33.930.000,00	2,21
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	***33.930.000,00***	***41.850.000,00***	***33.930.000,00***	***33.930.000,00***	2,21
JUMLAH KEWAJIBAN	**48.403.673.799,92**	**30.672.405.936,36**	**35.995.995.994,47**	**52.997.852.919,76**	**71.061.741.421,03**	29,38
EKUITAS DANA						
EKUITAS DANA LANCAR						
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	-	-	-	-	-	-
Pendapatan yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	-
Cadangan Piutang	-	-	-	-	-	-
Cadangan Persediaan	-	-	-	-	-	-
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
Pendapatan yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	-

Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	-	-	-	-	-	-
EKUITAS DANA INVESTASI						
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang						
Diinvestasikan dalam aset tetap	-	-	-	-	-	-
Diinvestasikan dalam aset lainnya	-	-	-	-	-	-
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	-	-	-	-	-	-
EKUITAS DANA CANDANGAN						
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
JUMLAH EKUITAS DANA						
JUMLAH EKUITAS	**3.020.238.640.843,25**	**3.180.445.413.657,05**	**3.315.355.998.248,25**	**3.329.533.921.713,65**	**3.750.502.385.922,68**	7,84
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**3.068.642.314.643,17**	**3.211.117.819.593,41**	**3.351.351.994.242,72**	**3.382.531.774.633,41**	**3.821.564.127.343,71**	8,04

Sumber: BPKAD-LKPD Kabupaten Nganjuk Audited

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Analisis data neraca daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:

1) Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain :

(a) Rasio lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek

(b) Rasio *quick* = (aktiva lancar – persediaan) : kewajiban jangka pendek

Berdasarkan pedoman di atas, maka Rasio Likuiditas Neraca Daerah tahun 2017 – 2021 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Rasio Likuiditas Neraca Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 – 2021 (*Accrual Basis)*

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
ASET LANCAR	380.681.689.868,53	423.341.277.991,59	441.197.327.766,63	445.230.242.894,16	614.216.354.078,46
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	48.403.673.799,92	30.638.475.936,36	35.954.145.994,47	52.963.922.919,76	71.027.811.421,03
Rasio Lancar = aset lancar : kewajiban jangka pendek	**7,86**	**13,82**	**12,27**	**8,41**	**8,65**
ASET LANCAR	380.681.689.868,53	423.341.277.991,59	441.197.327.766,63	445.230.242.894,16	614.216.354.078,46
Persediaan	32.122.074.385,35	28.618.425.985,35	31.255.723.188,00	45.274.604.133,47	34.942.747.080,17
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	48.403.673.799,92	30.638.475.936,36	35.954.145.994,47	52.963.922.919,76	71.027.811.421,03
Rasio *Quick* = aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban jangka pendek	**7,2**	**12,88**	**11,4**	**7,55**	**8,16**

Sumber : BPKAD-LKPD Kabupaten Nganjuk Audited

2) Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban

jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain:

(a) Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset

(b) Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas

Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2016 – 2021 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 – 2021 (*Accrual Basis*)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
JUMLAH ASET DAERAH	3.068.642.314.643,17	3.211.117.819.593,41	3.351.351.994.242,72	3.382.531.774.633,41	3.821.564.127.343,71
KEWAJIBAN	48.403.673.799,92	30.672.405.936,36	35.995.995.994,47	52.997.852.919,76	71.061.741.421,03
Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset	**0,02**	**0,01**	**0,01**	**0,02**	**0,02**
KEWAJIBAN	48.403.673.799,92	30.672.405.936,36	35.995.995.994,47	52.997.852.919,76	71.061.741.421,03
EKUITAS	3.020.238.640.843,25	3.180.445.413.657,05	3.315.355.998.248,25	3.329.533.921.713,65	3.750.502.385.922,68
Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas	**0,02**	**0,01**	**0,01**	**0,02**	**0,02**

Sumber: BPKAD-LKPD Kabupaten Nganjuk Audited

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa kebijakan masa lalu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Nganjuk merupakan analisis lebih lanjut atas hasil kinerja pelaksanaan APBD selama 5 tahun terakhir dan perkembangan Neraca Daerah. Kebijakan anggaran dan keuangan yang telah dilaksanakan selama 5 tahun

terakhir kemudian dapat menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Berikut analisis kedua kebijkaan tersebut akan dijelaskan.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran yang dimaksud adalah terkait dengan realisasi dan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan anggaran untuk operasional aparatur dan kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan efisiensi dan efektifitas kerja aparatur. Berikut adalah data realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun terakhir. Tabel berikut akan menyajikan proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Daerah untuk menentukan seberapa efisien alokasi anggaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama ini dan bagaimana kebijakan di masa mendatang terkait dengan belanja aparatur ini. Tabel 3.8 menunjukkan proporsi belanja kebutuhan aparatur di Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu 2018 – 2022:

Tabel 3.8
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Prosentase (%)
		A	b	(a) / (b) x 100%
1	Tahun 2018	1.463.344.474.249,68	2.614.349.039.502,10	55,97
2	Tahun 2019	1.583.787.683.418,14	2.890.370.537.453,61	54,80
3	Tahun 2020	1.562.969.740.639,89	2.389.277.058.326,45	65,42
4	Tahun 2021	1,143,502,338,923.06	2,423,343,354,250.62	47.19
5	Tahun 2022	1,141,121,838,585.94	2,680,677,953,350.48	42.57

Sumber : BPKAD Kab. Nganjuk (Tahun 2022 unaudited)

Proporsi belanja aparatur terhadap total belanja, menunjukkan rata-rata tren negatif yang berarti Belanja Aparatur semakin menurun. Hal tersebut mengindikasikan kemajuan yang semakin baik dalam hal peningkatan pelayanan publik maupun peningkatan pembangunan daerah

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan Daerah Kabupaten Nganjuk berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan daerah Kabupaten Nganjuk adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang. Penyertaan Modal Daerah kepada

BUMD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Bdan Usaha Milik Daerah.

Tabel berikut menunjukkan analisis pembiayaan yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, pengeluaran pembiayaan daerah, dan surplus/ defisit di Kabupaten Nganjuk:

Tabel 3.9 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Nganjuk

Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.369.549.960.797	2.512.977.518.355	2.435.396.958.079	2.608.437.761.443	2,501,485,726,442.93
	Dikurangi Realisasi:					
2	Belanja Daerah	2.312.797.118.680	2.541.996.619.515	2.383.277.058.326	2.395.343.354.251	2,665,227,953,350.48
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.500.000.000	15.594.832.700	6.000.000.000	28.000.000.000	15.450.000.000
	Defisit (Riil)	**49.252.842.117**	**-44.613.933.860**	**46.119.899.753**	**185.094.407.193**	**-179.192.226.907,55**

Sumber : BPKAD Kab. Nganjuk (Tahun 2022 unaudited)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten Nganjuk Pada tahun 2020 dan tahun 2021 terjadi surplus anggaran sebesar Rp. 46.119.899.753 dan Rp185.094.407.193 Selanjutnya pada tahun 2022 kembali terjadi deficit anggaran sebesar Rp. 179.192.226.907,55.

Tabel 3.10 komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2022

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	99,93%	98,44%	99,91%	99,94%	99.95%
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-		
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-		
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	2%	-		
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,07%	0,02%	0,09%	0,06%	0.05%

Sumber : BPKAD Kab Nganjuk (Tahun 2022 unaudited)

Defisit riil dapat ditutupi dengan Penerimaan Pembiayaan Daerah yang meliputi SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Piutang Daerah. Berdasarkan tabel di atas komposisi penutup defisit riil terbesar ditempati oleh Silpa dengan rata-rata persentase sebesar 99 persen.

3.3 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

3.3.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Nganjuk terkait erat dengan kapasitas daerah untuk membangun dan memberikan pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Nganjuk bergantung pada anggaran selama tiga tahun ke depan yakni periode 2024 – 2026. Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan histori pendapatan selama lima tahun ke belakang yakni 2018 – 2022. Proyeksi keuangan juga didasarkan pada rencana dan target pemerintah daerah, seperti target peningkatan

PAD. Perkiraan pendapatan daerah disajikan secara indikatif dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Tabel proyeksi indikatif RPD Kabupaten Nganjuk ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Proyeksi Pagu Indikatif RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

NO	URAIAN	APBD 2023	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026	KET
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2,302,594,818,356**	**2,782,876,688,980**	**2,804,657,255,355**	**2,922,583,699,347**	
4.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**358,015,575,169**	**525,689,193,986**	**542,623,864,988**	**562,486,016,922**	
4.1.01	Pajak Daerah	118,381,200,000	209,002,700,000	219,243,000,000	230,876,750,000	
4.1.02	Retribusi Daerah	28,110,826,169	22,482,705,000	22,876,705,000	23,298,230,000	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3,741,455,500	4,181,030,072	4,323,328,619	4,471,804,664	
4.1.04	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	207,782,093,500	290,022,758,914	296,180,831,369	303,839,232,258	
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1,892,837,830,312**	**2,205,446,082,119**	**2,210,291,977,492**	**2,308,356,269,550**	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,785,674,354,000	2,069,834,016,930	2,095,790,538,183	2,215,662,746,973	DAU,Dana Bagi Hasil Pusat,DAK dan Dana Insentif Fiskal diproyeksikan kinerja Optimis
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	**107.163.476.312**	**135,612,065,189**	**114,501,439,309**	**92,693,522,577**	diproyeksikan menggunakan kinerja optimis

NO	URAIAN	APBD 2023	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026	KET
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**51.741.412.875**	**51,741,412,875**	**51,741,412,875**	**51,741,412,875**	
4.3.1	Pendapatan Hibah	6.000.000.000	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	
4.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	45.741.412.875	45,741,412,875	45,741,412,875	45,741,412,875	
5	**BELANJA**	**2.573.094.818.356**	**3,019,876,688,980**	**3,021,022,216,355**	**3,108,948,660,347**	
5.1	**Belanja Operasi**	**1.849.545.396.138**	**2,065,141,389,847**	**1,990,426,111,158**	**2,020,444,818,960**	
5.1.01	Belanja Pegawai	1.176.627.649.865	1,177,393,969,000	1,184,277,064,613	1,186,630,319,912	
5.1.02	Belanja Barang Jasa	611.390.839.273	725,983,459,847	740,149,806,325	759,555,274,025	
5.1.03	Belanja Hibah	49.674.207.000	147,674,207,000	50,667,691,140	51,681,044,962	
5.1.04	Belanja Bansos	11.852.700.000	14,089,754,000	15,331,549,080	22,578,180,061	
5.2	**Belanja Modal**	**230.542.632.396**	**429,997,040,133**	**495,363,080,197**	**542,566,004,387**	
5.3	**Belanja Tidak terduga**	**39.435.280.762**	**63,028,693,000**	**64,289,267,000**	**65,575,205,000**	
5.4	**Belanja Transfer**	**453.571.509.060**	**461,709,566,000**	**470,943,758,000**	**480,362,632,000**	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.647.034.160	15,290,973,000	15,596,793,000	15,908,728,000	
5.4.02	Belanja Bantuan keuangan	438.924.474.900	446,418,593,000	455,346,965,000	464,453,904,000	

NO	URAIAN	APBD 2023	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026	KET
6	**PEMBIAYAAN NETTO**	**270.500.000.000**	**237,000,000,000**	**216,364,961,000**	**186,364,961,000**	
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**277.000.000.000**	**250,000,000,000**	**230,000,000,000**	**200,000,000,000**	
	Silpa	277.000.000.000	250,000,000,000	230,000,000,000	200,000,000,000	
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**6.500.000.000**	**13,000,000,000**	**13,635,039,000**	**13,635,039,000**	
	Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD					
-	PT. Bank Jatim	-	500,000,000	500,000,000	500,000,000	
-	PT. BPR Jatim (Perseroda)	500.000.000	500,000,000	135,039,000	135,039,000	
-	BPR Anjuk Ladang	-	1,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	
-	PDAM	6.000.000.000	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	
-	PDAU	-	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	
	Defisit/surplus	**-**	**-**	**-**	**-**	

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Berkaitan dengan proyeksi RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebagaimana tabel di atas, terhadap proyeksi pendapatan yang bersumber dari dana transfer khususnya Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Fiskal, DAU yang ditetapkan penggunaannya maupun yang bebas bersifat indikatif dengan penetapan pengalokasian besarannya ditentukan berdasarkan PMK yang berlaku. Sedangkan untuk pendapatan transfer antar daerah diantaranya Bantuan keuangan dan Dana bagi hasil provinsi atau pemerintah daerah lain bersifat indikatif dengan pengalokasian penganggarannya mengikuti aturan yang berlaku. Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan merupakan pagu indikatif acuan penyusunan RKPD, KUA PPAS dan APBD Tahun 2024-2026.

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dalam kerangka pendanaan ini bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan yang berakhir tahun 2026, serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Tabel berikut menyajikan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2024 – 2026:

Tabel 3.12 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026

No	Uraian	Proyeksi		
		2024	2025	2026
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	**2,782,876,688,980.00**	**2,804,657,255,355.00**	**2,922,583,699,347.00**
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	0	0	0
3	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	250,000,000,000.00	230,000,000,000.00	200,000,000,000.00
	Total penerimaan	**3,032,876,688,980.00**	**3,034,657,255,355.00**	**3,122,583,699,347.00**
	Dikurangi:			
1	Belanja Mandatory	2,032,885,584,983.00	1,964,238,763,613.00	1,984,326,053,526.00
2	Pengeluaran Pembiayaan	13,000,000,000.00	13,635,039,000.00	13,635,039,000.00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	**986,991,103,997.00**	**1,056,783,452,742.00**	**1,124,622,606,821.00**

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel diatas menginformasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk terus membaik secara perlahan dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk cukup baik.

Arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2024 - 2026 dalam upaya meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah antara lain:

Kebijakan Pendapatan

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dengan melaksanakan penggalian potensi, pendataan obyek

pajak/subyek pajak serta melakukan penyesuaian tarif yang diatur dengan Peraturan Daerah.

2. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak, pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh, melaksanakan pemasangan alat perekam transaksi, pemberian reward/hadiah kepada wajib pajak/wajib pungut dan meningkatkan pengawasan pajak.
3. Meningkatkan pengelolaan pajak dengan menggunakan sistem aplikasi pengelolaan pajak dan retribusi, pelayanan pajak secara online, pembayaran nontunai, melaksanakan pelayanan pajak keliling, berkoordinasi dengan instansi terkait, optimalisasi penagihan piutang pajak dan melaksanakan rekonsiliasi pajak daerah dengan tempat pembayaran.
4. Pendataan, optimalisasi dan pemanfaatan aset-aset idle pemerintah daerah sehingga dapat menambah pendapatan asli daerah
5. Melaksanakan pendataan kendaraan di Wilayah kabupaten Nganjuk serta berkoordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi sesuai amanat Undang-Undang 1 Tahun 2022 terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan masing-masing tarif 66% dari besaran pajak terutang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Optimalisasi pungutan retribusi daerah.
7. Optimalisasi kinerja Badan Layanan Umum Daerah sehingga dapat mendukung kemandirian keuangan daerah.
8. melaksanakan koordinasi, pembinaan, rekonsiliasi perangkat daerah penghasil.
9. Optimalisasi pemanfaatan dana salur, kinerja pemerintah daerah, ketepatan pelaporan sebagai syarat penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.

10. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk investasi pada BUMD (PDAU dan PDAM) serta BPR Anjuk Ladang diharapkan dapat memberikan pendapatan laba atas penyertaan modal.

Kebijakan Belanja

1. Belanja untuk pemenuhan SPM.
2. Optimalisasi Belanja sesuai Prioritas Pembangunan RPD Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Tahunan.
3. Dukungan belanja mandatory dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Dukungan penyelenggaraan dan pengamanan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Legislatif, dan Pemilukada Tahun 2024.
5. Optimalisasi Forum *Coorporate Sosial Responsibility*.
6. Belanja lain dan belanja tidak terduga.

Kebijakan Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan yang berasal dari Silpa tahun berkenaan diupayakan menurun dan mengurangi cash idle dengan cara peningkatan penyerapan anggaran.
2. Pengeluaran pembiayaan dipergunakan untuk mendukung penyertaan modal pada badan usaha milik daerah yaitu PDAM, PDAU serta BPR Anjuk Ladang dan dukungan kepada PT. BPR Jatim (Perseroda) dan PT. Bank Jatim.

Hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan pada tabel 3.11 akan menjadi dasar dalam menentukan kerangka pendanaan program-program yang akan direncanakan dalam 3 tahun mendatang yang akan dirumuskan dalam RPD ini. Sedangkan untuk memandu alokasi pendanaan, dibagi menjadi 3 prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

a. Prioritas I adalah dialokasikan untuk belanja urusan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
b. Prioritas II adalah dialokasikan untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan; dan terakhir
c. Prioritas III adalah untuk program-program unsur pendukung, penunjang serta unsur penunjang lainnya tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan dan isu-isu strategis di daerah adalah persoalan-persoalan yang ada di daerah yang akan diselesaikan melalui pembangunan pembangunan yang akan dilaksanakan. Agar pembangunan bisa efektif dan efisian dalam menangani permasalahan maupun isi-isu strategis maka diperlukan perencanaan yang baik dengan memperhatikan sumberdaya, potensi dan kewenangan yang dimiliki daerah. Agar permasalahan bisa diselesaikan secara komprehensif maka pemasalahan perlu analisis dan diurai akar permasalahannya.

Isu strategis Pembangunan Kabupaten Nganjuk merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data *existing condition*, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPD karena menjadi dasar utama dalam perumusan program prioritas berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan dapat dirumuskan dari kesenjangan antara capaian kinerja dengan target kinerja pembangunan yang direncanakan dalam periode 2018 – 2022 yang telah diuraikan pada BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah. Dalam konteks masa datang, permasalahan pembangunan daerah dapat dirumuskan dari kesenjangan antara kondisi ideal pada masa datang yang ingin dicapai atau telah ditetapkan dibandingkan dengan kondisi daerah saat ini. Kondisi ideal dapat diselaraskan dengan kebijakan provinsi (target RPJMD provinsi), nasional (target RPJMN, standar pelayanan minimal), maupun isu-isu internasional, misalnya SDG's.

Berdasarkan pedoman perumusan permasalahan pembangunan di atas dan hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk periode 2018 – 2022 sebagaimana diuraikan pada BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah, maka permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk yang meliputi sebagai berikut:

Permasalahan Aspek Kesejahteraan Rakyat

1. Belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan yang ditunjukkan dengan angka kemiskinan ekstrem yang naik.

   Tingkat kemiskinan merupakan kondisi yang mencerminkan belum terwujudnya kesejahteraan rakyat pada aspek ekonomi. angka kemiskinan menunjukkan penurunan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022, angka kemiskinan Kabupaten Nganjuk tahun 2021 sebesar 11,85 %dan 10,70 % pada tahun 2022. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah meskipun angka kemiskinan menurun akan tetapi angka kemiskinan ekstrem menunjukkan angka yang meningkat. Angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Nganjuk tahun 2021 sebesar 1,11 % meningkat pada tahun 2022 menjadi 1,36 %. Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). Pada Maret 2021, Garis Kemiskinan Ekstrem diperkirakan sebesar Rp11.941,12/orang/hari atau Rp358.233,6/orang/bulan (BPS, 2021)
2. Belum optimalnya intensifikasi serta diversifikasi produksi pertanian.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk yang diukur dari pertumbuhan/perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang menunjukkan tren pemulihan setelah pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi – 1,71 % dan pada Tahun 2021 yang tumbuh 3,61 % serta pada tahun 2022 ekonomi tumbuh 4,84 % , dengan sektor unggulan pertanian yang meskipun produksinya meningkat dan masih menjadi sektor dominan namun kontribusinya mengalami trend penurunan (tahun 2017 sebesar 30,78 %, tahun 2022 menjadi 27,33%) seiring dengan peningkatan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta sektor industri pengolahan. Sebagai daerah yang mayoritas penduduk bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian, maka sektor pertanian membutuhkan prioritas penyelesaian masalah melalui upaya intensifikasi pertanian serta diversifikasi produk pertanian. selain itu, tantangan utama pada sektor pertanian adalah perubahan iklim yang berpengaruh pada masa tanam ataupun masa panen serta kualitas hasil pertanian sehingga peran teknologi pertanian dan pengendalian mutu menjadi penting. Disamping itu, adanya wabah Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yang terjadi pada Tahun 2022 harus menjadi perhatian dengan kebijakan surveilanse, pengendalian serta pengawasan terhadap komoditas hewan ternak selama Pandemi Covid-19 terbukti sektor primer menjadi sektor penopang utama dan cenderung resistan terhadap situasi global. Secara rinci permasalahan strategis di sektor pertanian antara lain : Kurangnya penerapan pupuk berimbang, kualitas bibit, benih dan teknologi pertanian yang masih rendah (belum bersertifikat) serta penerapan teknologi yang masih terbatas, Terbatasnya ketersediaan infrastruktur prasarana pertanian, Kurang optimalnya pemanfaatan alat mesin pertanian, perlunya kebijakan terkait peningkatan kesejahteraan petani dan

meningkatkan produksi pertanian salah satunya dengan penetapan Perda LP2B, Berkembangnya penyakit hewan menular strategis baik yang bersifat zoonosis maupun tidak, Belum Optimalisasi pelaksanaan Gerakan pengendalian OPT, Adanya ancaman bencana pertanian akibat perubahan iklim dan serangan OPT, Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani, terjadinya alih fungsi lahan pertanian.

3. Belum optimalnya pemberdayaan usaha mikro, kecil dan koperasi serta pengembangan ekonomi kreatif.

   belum optimalnya pemberdayaan koperasi ditunjukkan dengan baru 372 koperasi aktif dari 972 koperasi yang terdaftar hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dan pembinaan secara intensif. Pelaku usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal menunjukkan peningkatan dilihat dari bertambahnya pelaku usaha yang memiliki legalitas, data diambil dari tahun 2021 pertumbuhan Jumlah pelaku Usaha mikro sebanyak 7.389, dan untuk tahun berjalan 2022 data sementara saat ini sampai dengan bulan Agustus 2022 sebanyak 4.080 Jumlah Pelaku usaha mikro yang mayoritas sekitar 70 % merupakan sektor usaha informal. Penyebab utama permasalahan ini adalah kurangnya sinergi dalam pemberdayaan usaha mikro dan koperasi yang dapat diatasi dengan cara meningkatkan keterpaduan program pemerintah daerah dengan seluruh stakeholder. Permasalahan strategis terkait dengan sektor koperasi, usaha mikro antara lain :

   - Prosentase koperasi yang sehat masih rendah sebesar 26,5%
   - Pertumbuhan koperasi yang sehat masih rendah sebesar 0,8%
   - Pertumbuhan pelaku usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal masih rendah sebesar 2%
   - Pemahaman pengurus koperasi terhadap regulasi perkoperasian masih rendah.

- Pengembangan ekonomi kreatif masih belum optimal

4. Belum optimalnya penanganan ketahanan pangan.

   Ketahanan pangan masih menjadi tantangan di Kabupaten Nganjuk. Ketahanan pangan suatu daerah diindikasikan antara lain dalam bentuk ketersediaan pangan dan akses pangan. Dalam hal ketersediaan pangan, meskipun secara target kinerja periode 2016 – 2018 telah terpenuhi target peningkatan ketersediaan pangan pada tahun 2016 sebesar 3,73% Tahun 2017 sebesar 3,50% dan pada tahun 2018 sebesar 3,07%. Dari data tersebut meskipun ketersediaan makanan tercukupi, tetapi ada kecenderungan penurunan. pada tahun 2022 ketersediaan pangan baru tercapai 94,25 % dibandingkan target yang diharapkan. Salah satu penyebab penurunan adalah makin berkurangnya lahan produktif yang beralih fungsi.

   Selain itu permasalhan strategis terkait ketahanan pangan dan perikanan antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

   - Konsumsi masyarakat terhadap gizi seimbang masih kurang
   - Tingginya fluktuasi harga pangan
   - Masih banyaknya pangan yang mengandung Bahan Tambahan Pangan yang kurang untuk dikonsumsi
   - Produksi Ikan konsumsi menurun
   - Harga pakan ikan masih tinggi
   - Ketersediaan bibit ikan unggul masih kurang
   - Teknologi budidaya perikanan masih rendah
   - Tingkat konsumsi ikan masih rendah
   - Terbatasnya Sarana dan Prasarana hasil Perikanan

5. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan seni budaya dan kepariwisataan daerah dan desa berbasis potensi budaya, kearifan lokal serta pemberdayaan produk unggulan daerah.

   Kabupaten Nganjuk memiliki kekayaan seni, budaya, dan potensi pariwisata, namun pengembangannya belum optimal. Even kesenian dan kebudayaan yang diselenggarakan dalam periode

2018-2022 hanya berjumlah 8 kegiatan setiap tahun atau pada Tahun 2022, warisan seni budaya sekitar 30 % yang dilestarikan dari total 37 warisan seni budaya yang menjadi potensi Kabupaten Nganjuk. Sementara itu, pelestarian situs dan benda cagar budaya sudah cukup optimal dengan capaian kinerja 100 % pada tahun 2022. Pada Tahun 2022, peresmian Bendungan Semantok menjadi momentum pengembangan destinasi wisata baru Kawasan bendungan Semantok. Penyebab utama permasalahan pengembangan seni, budaya, dan pariwisata adalah Pengembangan pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata belum optimal terkait peran masyarakat, pelaku usaha pariwisata, promosi dan manajemen pariwisata; serta Pengembangan dan pengelolaan kekayaan kebudayaan daerah yang beragam belum optimal.

6. Pemerataan aksesibilitas pendidikan belum optimal.

   Salah satu upaya yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pemerataan dan kualitas pendidikan masih menjadi permasalahan di Kabupaten Nganjuk. Dilihat dari segi pemerataan Angka Partisipasi Murni tingkat SD/MI pada tahun 2022 masih 89,37%, tingkat SMP/MTs masih di kisaran 94,79%, dan SMA/MA/SMK 63,35% dan PAUD kurang dari 100%. Selain itu masih ada anak putus sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK karena berbagai hal meskiput tidak banyak. Angka partisipasi sekolah pada jenjang PAUD dan Dasar belum mencapai 100%. Hal ini mengandung maksud bahwa tingkat partisipasi penduduk usia sekolah di rentang usia 5-6 Tahun dan 7-15 Tahun belum menempuh pendidikan sesuai dengan usianya. Dari sisi kualitas pendidikan, Angka literasi di Kabupaten Nganjuk telah mencapai kompetensi minimum yaitu tercapai dengan nilai rata-rata sebesar 1,85 (dengan rentang nilai 1-3), bahwa peserta didik memiliki kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan

mengevaluasi beragam jenis teks.

Kemudian capaian numerik peserta didik masih berada pada area merah yaitu dengan rata-rata pencapaian sebesar 1,68 (dengan rentang nilai 1-3). Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Nganjuk, peserta didik belum memiliki kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Kemudian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang berakreditasi B masih tercapai sebesar 35,52%. Hal ini menunjukkan bahwa 35,52% belum memenuhi standar nasional pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan strategi dan arah kebijakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan pendidikan. Penyebab utama permasalahan pendidikan adalah belum optimalnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah, mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang masih kurang, serta manajemen pelayanan pendidikan yang belum optimal.

7. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan.

   Derajat kesehatan masyarakat merupakan bagian dari aspek kesejahteraan rakyat dalam lingkup fokus kesejahteraan sosial. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nganjuk yang didalamnya memuat indikator indeks kesehatan, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. IPM Pada tahun 2017 sebesar 70,69 dan tahun 2022 meningkat menjadi 72,93 yang mengindikasikan kesejahteraan masyarakat meningkat. Sedangkan usia harapan hidup masyarakat Nganjuk pada tahun 2017 sebesar 71,44 di tahun 2022 meningkat menjadi 71,95 tahun. Hal ini mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat semakin membaik. Meskipun demikian, untuk mewujudkan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Nganjuk yang berkualitas, masih terdapat permasalahan kesehatan yang harus diselesaikan antara lain: angka kematian bayi 5,81 per 1000

kelahiran, angka kematian ibu 245,5 per 100 ribu kelahiran , balita gizi buruk, balita stunting 11 %, serta penyakit HIV dan TBC, Bangunan Fisik Puskesmas dan pustu belum semua memenuhi standar, Jumlah,Sebaran,dan Kualitas Tenaga kesehatan masih belum merata, Kualitas pelayanan kesehatan belum maksimal, Cakupan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin baru mencapai 74,58 % dari target 100%

Disamping itu pertumbuhan penduduk harus dikendalikan sehingga anak-anak yang baru lahir akan meningkatkan *human capital* di masa depan. Berdasarkan data BPS jumlah penduduk kabupaten Nganjuk tahun 2022 adalah sebesar 1.120.637 atau meningkat 0,98 % yang tentunya membutuhkan strategi adan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Permasalahan strategis di bidang Pengendalaian Penduduk dan KB antara lain Adanya mitos/kultur yang negatif terhadap jenis KB MOP , Pasangan Usia Subur (PUS) tidak ber-KB yang Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) dan Ingin Anak Tunda (IAT) perlu pembinaan menjadi Peserta KB, Masih terdapat keluarga beresiko stunting yang perlu mendapat pendampingan, Adanya keterbatasan daya dukung (Kapasitas SDM dan Kestabilan sistem Informasi Pusat) dalam validasi data KB, Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) belum maksimal, Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) masih belum maksimal, Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) masih belum maksimal.

8. Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan hak anak.

   Kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak anak merupakan bagian dari kesejahteraan rakyat yang ingin dicapai pada aspek kesejahteraan sosial. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Nganjuk mulai tahun 2018 sebesar 93,26 dan di tahun 2021 masih di kisaran 93,26. Sehingga ini stagnan dan perlu di tingkatkan. Namun demikian, permasalahan utama yang

terjadi adalah perbedaan pendapatan rata-rata antara perempuan jauh lebih kecil dari laki-laki serta partisipasi perempuan dalam jabatan publik (DPRD, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa) masih kurang. Ini menjadi masalah, sebab dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki serta meningkatnya kesadaran mengenai peran perempuan dalam kehidupan sosial, akan menimbulkan permasalahan perempuan yang perlu mendapatkan penyelesaian. Di sisi lain terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak, menimbulkan tuntutan kebutuhan antara lain pendidikan, kesehatan, perlindungan dari ancaman kekerasan, dan hak-hak anak lainnya. Secara umum permasalahan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan anak antara lain :

- Perlu ditingkatkannya kapasitas SDM terkait psikolog klinis dan konselor
- Penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak secara Terpadu masih kurang maksimal.
- Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
- Belum adanya dukungan layanan PPA berupa UPT PPA sesuai Amanat UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bagi Kabupaten/Kota wajib memiliki UPT PPA
- Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
- Belum tersedianya aplikasi pengelolaan Data Gender dan Anak

Permasalahan Daya Saing Daerah

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta keselamatan trasportasi.

   Ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas serta penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan berkontribusi dalam peningkatan produktivitas, konsumsi, kualitas hidup masyarakat, pergerakan arus orang, barang dan jasa, menciptakan daya tarik investasi dan bermuara pada pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah. Kabupaten nganjuk sudah berupaya untuk menyediakan infrastruktur yang berlkualitas serta penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan pemenuhannya. Pada infrastruktur pekerjaan umum terdapat beberapa permasalahan diantaranya:

   - Masih terdapat masyarakat yang belum mengakses sanitasi layak (kloset leher angsa dilengkapi dengan tangki septik), serta sulitnya mewujudkan akses sanitasi aman sesuai dengan target RPJMN Tahun 2024 sebesar 15 % karena Kabupaten Nganjuk belum memiliki IPLT.
   - Capaian akses air minum jaringan perpipaanKabupaten Nganjuk masih 15,2 % belum mencapai 30% sesuai dengan target yang ditetapkan RPJMN pada tahun 2024. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan, perluasan dan pembangunan SPAM jaringan Perpipaan baik melalui PDAM, Penyelenggaraan SPAM oleh Dinas PUPR maupun kegiatan berbasis masyarakat.
   - Kurangnya ketersediaan air irigasi dibandingkan dengan kebutuhan
   - Tingkat kerusakan jalan dan jembatan kabupaten lebih cepat dibanding laju pembangunan jalan. Disamping itu

Pasal 9 Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, mengamanatkan setiap ruas jalan harus ditetapkan statusnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan pengelompokannya yaitu: Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa, sehingga perlu adanya penetapan status seluruh ruas jalan di Kabupaten Nganjuk sesuai dengan pengelompokan dan kewenangan penetapannya.

- Terdapat ruas jalan yang berada dalam kawasan hutan.
- Masih terdapat bangunan gedung daerah yang tidak berfungsi dengan baik
- Kurang optimalnya penyediaan infrastruktur persampahan untuk menunjang layananan penengelolaan persampahan
- Belum optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai

Adapun permasalahan pada pemenuhan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman diantaranya:

- Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- Perlunya penyediaan rumah bagi warga terdampak bencana maupun program pemerintah (SPM Bidang Perumahan)
- Penanganan Kawasan kumuh di kabupaten Nganjuk sampai dengan 2022 baru mencapai 62,74% dari luasan kawasan kumuh 131,2 Ha yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor 188/208/K/411.012/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Nganjuk
- Menurunnya kualitas lingkungan permukiman yang berpotensi menimbulkan kawasan kumuh baru.

- Masih terbatasnya penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman
- Rendahnya pemahaman teknis masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
- Masih adanya masalah pertanahan (pemanfaatan tanah kosong untuk kepentingan umum yang belum terinventarisasi, proses legalisasi pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang tertunda, proses administrasi tukar menukar lahan/ kawasan hutan untuk kepentingan umum dan permukiman).

Dari sisi pemenuhan keselamatan transportasi terdapat permasalahan masih tingginya rasio kecelakaan lalu lintas (per 10.000 kendaraan) yang dipengaruhi oleh:

- Rendahnya kesadaran pengguna lalu lintas,
- Terdapat kendaraan yang tidak memenuhi syarat laik teknis jalan
- Adanya perlintasan sebidang kereta api yang tidak berpalang pintu
- Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan.
- Peningkatan volume kendaraan pribadi
- Kondisi sarana dan prasarana transportasi darat urang memadai.
- Belum optimalnya pelayanan angkutan sekolah

2. Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup

   Permasalahan strategis terkait peningkatan kualitas lingkungan hidup antara lain :

   - Menurunnya kualitas air sungai sebagai sumber air baku
   - Belum optimalnya penanganan sampah perkotaan
   - Belum optimalnya pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan

- Belum optimalnya management pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
- Masih kurangnya ruang terbuka hijau (RTH)
- Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

3. Belum optimalnya strategi peningkatan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja terdidik pada sektor pertanian, perdagangan dan industry.

   Iklim investasi merupakan bagian dari aspek daya saing daerah yang mempengaruhi tingkat investasi. Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat diharapkan mampu mengurangi beban pengangguran dan menanggulangi masalah kemiskinan.

   Kinerja investasi di Kabupaten Nganjuk berdasarkan nilai investasi antara tahun 2017 – 2021 menunjukkan terjadi fluktuasi nilai investasi dari tahun ke tahun. faktor eksternal yang paling berpengaruh adalah pada Tahun 2020-2021 situasi pandemic covid-19 yang berpengaruh pada perekonomian. pada Tahun 2022 dan seterusnya yang menunjukkan tren pemulihan harus dijadikan momentum untuk Kabupaten Nganjuk agar dapat memaksimalkan potensi dan keunggulan komparatif untuk menarik investasi.

   Faktor pendukung bagi tumbuhnya iklim investasi daerah, seperti kondusifitas daerah yang ditunjukkan dengan angka kriminalitas dan gangguan trantibum ataupun potensi konflik daerah, infrastruktur pendukung, dan faktor letak geografis yang strategis. Permasalahan strategis terkait penanaman modal adalah menurunnya realisasi investasi penanaman modal yang antara lain dikarenakan belum optimalnya kebijakan yang mendorong iklim penanaman modal yang kondusif dan Proses

pelayanan perizinan belum berjalan secara optimal. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013, jenis pajak daerah terdapat 10 jenis meliputi: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Untuk mendukung peningkatan investasi, telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal.

Salah satu faktor dan strategi pendorong investasi adalah kebijakan penataan ruang yang belum optimal, permasalahan di bidang penataan ruang antara lain Belum dikembangkannya Kawasan Strategis dan dan Cepat Tumbuh, hal ini disebabkan oleh belum berkembangnya sinergitas serta kerjasama antar pelaku-pelaku pengembangan kawasan (pemerintah, swasta, masyarakat), Belum efektifnya penerapan regulasi maupun dokumen perencanaan tata ruang dalam pengendalian pemanfaatan ruang, karena Rencana Detail Tata Ruang yang tersusun masih belum ditetapkan sebagai peraturan daerah, Perkembangan kawasan perkotaan yang tidak seimbang, dan belum sesuai dengan pemanfaatannya.

Pada sektor ketenagakerjaan, permasalahan strategis antara lain : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tinggi sebesar 4,74% pada tahun 2022, Belum tersedianya Balai/Workshop Latihan Kerja, Masih adanya sengketa antara pengusaha dan pekerja, Terbatasnya kuota penempatan transmigran tidak sebanding dengan animo masyarakat yang ingin mengikuti program transmigrasi.

Permasalahan strategis sektor perdagangan dan perindustrian antara lain : Daya saing industri masih rendah ditunjukkan

dengan rendahnya kualitas produk dan standarisasi produk, Jumlah Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang dilayani belum maksimal, Penataan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan belum optimal, Belum dicapai stabiliasi harga, masih ditentukan Pedagang/pasar, Belum siapnya Produk yang siap diekspor dan Belum Optimalnya Penataan toko modern.

4. Kurangnya akselerasi penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), reformasi birokrasi dan elektronik *government* menuju pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).

   Masih terdapat permasalahan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Nganjuk yang bisa dilihat dari adanya kesenjangan kinerja urusan penunjang pemerintahan daerah antara lain pelayanan publik, perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya aparatur sipil negara, yang perlu didukung teknologi pengawasan, dan fungsi penyusunan kebijakan daerah. Hal ini dapat dilihat pada nilai Sakip tahun 2022 yang masih predikat B dan predikat IRB B serta nilai indeks SPBE 2,18 atau kategori Cukup membuktikan perlunya akselerasi untuk peningkatan kualitas reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

   Pada aspek pengelolaan keuangan, masih terdapat permasalahan terutama ketergantungan pendapatan daerah pada dana transfer meskipun kontribusi pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun padahal pajak daerah berpotensi naik seiring dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nganjuk. Penyebab utama permasalahan adalah Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah kurang optimal,Tuntutan pelayanan semakin tinggi di tengah perkembangan jumlah wajib pajak dan aparatur pelaksana pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang kurang proporsional

dan Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. selain itu, terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang secara substansi menekankan kemandirian fiskal daerah perlu menjadi focus perhatian dalam perbaikan tata Kelola APBD kedepannya.

Selain itu, belum optimalnya tata kelola asset daerah, Belum optimalnya komitmen OPD dalam penyusunan dokumen pengganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan menjadi permasalahan utama pada pengelolaan keuangan daerah

Penyebab utama permasalahan kepegawaian adalah Belum optimalnya peningkatan kapasitas, kompetensi yang mengarah pada peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur; Belum Optimalnya Pengembangan karier aparatur; Belum optimalnya Standar Kompetensi Jabatan untuk seluruh level jabatan; Belum terintregasi Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten Nganjuk ;Belum optimalnya analisa kebutuhan pengembangan kompetensi; dan Objektivitas Sistem Penilaian kinerja yang belum terukur

Pada aspek pengawasan, masih terdapat permasalahan menyangkut efektivitas tindak lanjut temuan pengawasan. Penyebab utama permasalahan adalah kurangnya sumber daya manusia aparatur pengawas khususnya jumlah auditor yang masih kurang.

Permasalahan lainnya dalam fungsi koordinasi ini adalah realisasi nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang pada tahun 2021 mendapat predikat B (65,51) dan indeks reformasi birokrasi pada tahun 2021 mendapat predikat CC (59,04) . Penyebab utama permasalahan antara lain kurangnya kapasitas sumber daya manusia , kurang maksimalnya pelayanan publik, belum optimalnya manajemen

pemerintahan berbasis kinerja. penerapan e-gov untuk meningkatkan kualitas pelayanan public dan tata Kelola pemerintahan juga belum menunjukkan hasil yang optimal.

5. Belum optimalnya koordinasi upaya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana serta penciptaan stabilisasi ketentraman, ketertiban, kerukunan yang menjunjung tinggi budaya gotong royong masyarakat.

   Penanganan kebencanaan serta penciptaan keamanan dan ketertiban merupakan bagian dari pelayanan urusan dasar wajib yang diselenggarakan pemerintahan daerah. Kabupaten Nganjuk tergolong daerah kategori tinggi rawan bencana dengan skor Indeks Resiko Bencana sebesar 152,8. Penyebab utama permasalahan Belum adanya Peraturan Daerah tentang Penyelengaran Penanggulangan Bencana di Kabupaten Nganjuk, Aparatur yang ada belum memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai, Perlu adanya pemutakhiran kajian atas risiko bencana dan pemetaannya, Belum optimalnya tim reaksi cepat penanggulangan bencana di skala / tingkat kabupaten

   Disamping itu masih adanya konflik yang terkait pemilihan kepala desa maupun perangkat desa, tindak pidana, perkelahian antar perguruan silat serta Adanya gangguan trantibum Akibat Proses Perizinan dan aktifitas Perusahaan, Rendahnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda dan Perkada, Peran Linmas Tingkat Desa/Kelurahan yang belum Optimal.

   Selain itu, situasi kondusif menjelang dan pasca pelaksanaan Pemilu, pemilukada dan pilpres atau situasi politik Tahun 2024-2025 harus menjadi focus perhatian Pemerintah. Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk melakukan deteksi dini terjadinya konflik sosial, Rendahnya jiwa nasionalisme dan patriotisme untuk memelihara nilai-nilai kebangsaan menjadi indikasi permasalahan social.

Permasalahan terkait Pelayanan Publik

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah, optimalisasi pelayanan publik diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2022 secara umum berada di kategori Baik, akan tetapi pada beberapa aspek pengukuran perlu peningkatan terutama pada aspek ketepatan kecepatan penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang masih kurang.
   Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan akses pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah, maka pelayanan yang diberikan bukan hanya pelayanan yang diorietasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar yang harus diterima oleh masyarakat. Pencapaian standar pelayanan minimal Tahun 2022 masih ada beberapa bidang yang harus menjadi prioritas terutama Bidang kesehatan. Penilaian pencapaian SPM menjadi salah satu parameter/formulasi utama dalam pengalokasian dana transfer daerah.

4.2. ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai

sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

4.2.1. Lingkungan Eksternal

a. Telaah Isu Strategis Internasional SDG's

Salah satu isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan antara lain: pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDG's)*. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan berkewajiban untuk mendukung pencapaian target SDG's. SDG's (*Sustainable Development Goals*) merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. SDG's adalah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. SDG's ini diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 menggantikan program sebelumnya yaitu MDG's (*Millennium Development Goals*) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh banyak negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jadi kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang sebelumnya menggunakan konsep MGD's sekarang diganti dengan SDG's.

Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, SDG's (*Sustainable Development Goals*) mempunyai 17 tujuan dengan 169 target, dimana tujuan dan target-target dari SDGs ini bersifat global serta dapat diaplikasikan secara universal yang dipertimbangkan dengan berbagai realitas nasional, kapasitas serta tingkat pembangunan yang berbeda dan menghormati kebijakan serta prioritas nasional. Tujuan dan target SDG's tidaklah berdiri sendiri, perlu adanya implementasi yang dilakukan secara terpadu. Tujuan dari SDG's (*Sustainable Development Goals*) yang dikutip dari Badan Penelitian

dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan.
3. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
4. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
5. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
6. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
9. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
10. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
11. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
12. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
13. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.
14. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

15. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
16. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (*means of implementation*) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
17. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

Mempertimbangkan kesepakatan global *Sustainable Development Goals* **(SDGs)** dan perubahan iklim, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyusun perencanaan daerah tahun 2018-2023 dengan memprioritaskan: (1) meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan; (2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia; (3) meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat; (4) mengatur tata kelola pemerintahan daerah yang baik; (5) menciptakan kondisi masyarakat stabil, harmonis, dan kolaboratif.

b. Telaah Isu Strategis Revolusi Industri 4.0

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh (distance learning), pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui financial technology (fin-tech),

dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Diperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia, diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang.

c. RPJMN Tahun 2020 – 2024

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: ***Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.*** Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan .
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi sebagai berikut :

1. Pembangunan SDM

   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Senada dengan arahan presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPMJN) 2020-2024, maka RPJMD Kabupaten Nganjuk mengambil peran secara aktif yang disebut tri cita bakti : (1) Infrastruktur publik yang berkualitas (senada dengan Arahan kedua yaitu Pembangunan Infrastuktur) ; (2) Sumber Daya Manusia yang Unggul (Senada dengan arahan pertama yaitu Pembangunan SDM) (3) Kemendirian Ekonomi (Senada dengan Arahan kelima Transformasi ekonomi) adalah

meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing produk lokal di pasaran yang lebih luas untuk kesejahteraan masyarakat.

d. Telaah isu strategis RPJMD Jawa Timur Tahun 2019 – 2024

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyebutkan bahwa RPJMD Kabupaten/Kota harus mengacu pada RPJMD Provinsi. Amanah ini agar terjadi sinkronisasi sehingga perencanaan pembangunan di tingkat bawah dan yang lebih tinggi saling melengkapi satu sama lain agar ketercapaian visi dan misi yang diemban dua dokumen perencanaan tersebut dapat menunjang satu sama lain. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Nganjuk. Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah: **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG"** Visi Pembangunan Provinsi Jawa Timur tersebut ditindaklanjuti dengan misi sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antarKelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.**

   Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur dengan kemitraan baik masyarakat sipil maupun sektor privat bertujuan agar tidak tercipta konsentrasi kemakmuran pada kalangan kelompok sosial yang kaya, daerah urban, maupun wilayah tertentu saja tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan yang merata seluruh warga jawa timur . Tujuan dari semua itu proses pembangunan di Jawa Timur akan memastikan hak rakyat atas pekerjaan yang layak untuk kemanusiaan adalah pelaksanaan dari daulat rakyat.

2. **Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan**.

   Pembangunan di Jawa Timur memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial yang terdiri dari keadilan distributif, keadilan rekognitif, dan keadilan partisipatoris. Selain itu dimensi keadilan juga memperhatikan aspek

   rekognitif (pengakuan) terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimiliki oleh perempuan dan anak dan lansia, kelompok difabel, maupun kelompok masyarakat berbasis budaya yang membutuhkan perhatian khusus. Keadilan dalaam proses pembangunan juga memiliki dimensi politik, dimana ruang partisipasi yang luas menjadi perhatian dalam praktik tata kelola pemerintahan yang terbangun. Pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, antara lain: peningkatan kualitas kehidupan, akses pendidikan dan jaminan kesehatan di Jawa Timur.

3. **Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.**

   Tata kelola pemerintahan di Jawa Timur telah menciptakan standar penilaian dan tolok ukur untuk menilai kinerja dirinya melalui slogan CETTAR (Cepat, Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif). Prinsip itu bertujuan agar proses pembangunan sebagai pengejawantahan proses kolaborasi, partnership dan inklusi antara pemerintah Jawa Timur dengan masyarakat sipil dan sektor privat sebagai arena untuk memacu birokrasi pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang bersih dan anti-korupsi, prima dan berkeadilan bagi warga Jawa Timur.

4. **Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.**

   Pemerintah Jawa Timur mendorong pembangunan yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang didalamnya memuat harmonisasi antara aktivitas sosial, ekonomi dan budaya serta ekologi. Pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kapasitas daya dukung dan daya tamping lingkunngan hidup sebagai penopang sehingga dapat terwujud keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan budaya dengan kondisi lingkungan hidup.

e. Telaah isu strategis RTRW.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan salah satu prinsip dalam penyusunan RPJMD adalah bahwa RPJMD harus merupakan Integrasi dari rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Hal ini akan mendukung terciptanya koordinasi antar pelaku pembangunan agar terjadi integrasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintahan sehingga

mampu menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta optimalisasi partisipasi masyarakat dan akan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rencana Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor : 02 tahun 2021, menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Visi Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk adalah **memajukan Kabupaten Nganjuk sebagai pusat pertanian di wilayah tengah Provinsi Jawa Timur yang didukung pengembangan sektor pariwisata, perdagangan, jasa dan industri.** Misi penataan ruang kabupaten Nganjuk adalah :

1. Memajukan ekonomi masyarakat melalui pembangunan pertanian, pariwisata, perdagangan, jasa dan industri yang berwawasan lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai;
2. Mengembangkan struktur ekonomi berdaya saing;
3. Pemerataan pembangunan di segala bidang di setiap wilayah kecamatan, desa/kelurahan;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan dengan berwawasan kelestarian lingkungan;dan
5. Mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup.

Tujuan penataan ruang Daerah adalah adalah untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk sebagai kabupaten yang maju dan berdaya saing berbasis pertanian, perdagangan, jasa dan industri secara berkelanjutan

4.2.2. Isu Strategis Daerah

Dari rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah (aspek kesejahteraan dan aspek daya saing) serta permasalahan urusan, serta disinergikan dengan hasil penelaahan isu strategis

internasional (*SDG's*), nasional maupun regional dapat dirumuskan isu-isu strategis utama Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, sebagai berikut:

1. Penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Penurunan prevalensi balita gizi buruk, prevalensi balita stunting, serta Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.
3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
4. Pengendalian angka kelahiran penduduk;
5. Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak;
6. Peningkatan kualitas infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta keselamatan transportasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kawasan permukiman layak huni.;
7. Pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah yang inklusif melalui pengembangan sektor industri dan perdagangan yang didukung iklim investasi yang kondusif yang didukung kesiapan tenaga kerja terlatih dan terampil sesuai kebutuhan pasar kerja
8. Kesiapan menghadapi situasi global perekonomian;
9. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian melalui intensifikasi dan diversifikasi komoditas pertanian untuk medukung ketahanan pangan daerah;
10. Pembangunan pariwisata daerah yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan nilai tambah sektor kesenian, kebudayaan, UKM dan koperasi.
11. Peningkatan sarana prasarana, kualitas pendidikan dasar dan peningkatan literasi;
12. Melaksanakan tata kelola Pemerintahan yang baik;
13. Menciptakan stabilisasi keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan;

14. Peningkatan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi tata kelola pemerintahan desa yang baik;
15. Peningkatan dan optimalisasi potensi pendapatan asli daerah
16. Menjaga kualitas lingkungan hidup dan ketaatan terhadap tata ruang dalam rangka mendukung ketahanan iklim dan mitigasi bencana.

Berdasarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis di atas, selanjutnya dirumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025

5.1.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran atau cita-cita masa depan yang ingin diwujudkan. Berdasarkan kondisi Kabupaten Nganjuk saat ini, tantangan yang dihadapi dalam masa 20 tahun mendatang dan dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki Kabupaten Nganjuk, selaras pula dengan tujuan pembangunan nasional, maka visi Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 adalah:

"NGANJUK YANG MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA"

Visi pembangunan daerah tahun 2005–2025 tersebut mengarah pada pencapaian tujuan nasional. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemajuan, keadilan dan kesejahteraan yang ingin dicapai.

5.1.2 Misi

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Nganjuk yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika dan berbudaya, adalah memperkuat jati diri dan karakter daerah melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya daerah, dan memiliki kebanggaan sebagai daerah Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan daerah.
2. Mewujudkan Nganjuk yang berdaya saing, adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan

pemanfaatan Iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta menyempurnakan produk-produk hukum daerah dan reformasi birokrasi dan memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan publik.

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, adalah menyelenggarakan pembangunan daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyararakat, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok, kecamatan, desa dan kelurahan yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara efektif; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk gender. Di samping itu pemenuhan hak-hak dasar masyarakat semakin ditingkatkan, seperti layanan kesehatan, akses pendidikan, pembangunan perumahan, memperkuat sistem jaminan sosial, peningkatan upah tenaga kerja.
4. Mewujudkan masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur, adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam menkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil, memantapkan reformasi birokrasi menuju profesionalisme aparatur dalam

memberikan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik.

5. Mewujudkan Nganjuk yang aman, tentram, tertib, dan damai, Adalah membangun dan menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat; meningkatkan kerja sama dengan TNI dan Polri dalam ikut serta bela negara dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam upaya menciptakan rasa aman dan damai dalam masyarakat.
6. Mewujudkan Nganjuk yang asri, nyaman dan lestari, adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

5.1.3 Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025

Sebagai ukuran tercapainya NGANJUK YANG MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut.

A. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Ngajuk yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Beretika dan Berbudaya ditandai oleh hal-hal berikut **:**

1. Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, tulus ikhlas, berkembang, dinamis, dan berorientasi Iptek.
2. Semakin mantapnya budaya masyarakat yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat manusia, dan memperkuat jati diri dan kepribadian.
3. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan seni dan nilai-nilai luhur budaya daerah, khususnya seni budaya tradisi dan bahasa serta sastra daerah.

B. Terwujudnya Nganjuk yang Berdaya Saing ditandai oleh hal-hal berikut **:**

1. Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga terdapat peningkatan pendapatan perkapita, daya beli masyarakat dan penurunan jumlah pengangguran pada setiap tahapan pembangunan.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM, termasuk meningkatkan kualitas tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar kerja baik regional, nasional maupun internasional serta peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas SDM ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang.
3. Terbangunnya struktur perekonomian daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis potensi daerah. Sektor pertanian dalam arti luas, dan industri pengolahan hasil pertanian menjadi basis aktivitas ekonomi

yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.

4. Meningkatnya kualitas SDM pengelola, kualitas produk, penguasaan terhadap akses modal dan pemasaran, serta kualitas dan kuantitas produk UMKM dan koperasi; yang didukung dengan kelancaran dan volume usaha perdagangan serta peningkatan investasi .
5. Meningkatnya infrastruktur dan layanan wisata yang profesional, berkembangnya obyek wisata potensial, meningkatnya jumlah dan lama kunjungan wisatawan, serta terselenggaranya kegiatan-kegiatan kesenian dan budaya secara berkesinambungan yang berbasis pada budaya lokal.
6. Terwujudnya jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi berbasis pada efisiensi dan berkeadilan.
7. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk tingkat elektrifikasi rumah tangga dan dunia usaha.
8. Tersedianya sarana dan prasarana publik yang mantap di sektor transportasi, telekomunikasi, air bersih, fasilitas umum, perumahan, pendidikan, kesehatan dan energi.
9. Meningkatnya aksesibilitas sarana dan prasarana publik yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh segenap lapisan masyarakat.

C. Terwujudnya Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan ditandai oleh hal-hal berikut **:**

1 Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh kecamatan, desa dan kelurahan diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antar kecamatan, desa dan kelurahan;

2. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.
3. Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
4. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran.

D. Terwujudnya masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur, ditandai oleh hal-hal berikut **:**

1. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif.
2. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik lokal yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral.
3. Meningkatnya profesionalisme aparatur untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan daerah.

E. Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Aman, Tentram, Tertib, dan Damai ditandai oleh hal-hal berikut :

1. Rendahnya tingkat kriminalitas dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.
2. Rendahnya intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial ekonomi.

3. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban, keamanan, bela bangsa dan negara.
4. Terbinanya semangat/jiwa nasionalisme, patriotisme, serta persatuan dan kesatuan pada pribadi dan semua aspek kehidupan bermasyarakat.
5. Terwujudnya rasa aman masyarakat dalam melaksanakan semua aktifitasnya.

F. Terwujudnya Nganjuk yang asri, nyaman dan lestari

1. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
2. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing daerah, serta modal pembangunan daerah.
3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
4. Tersedianya ruang publik yang cukup nyaman dan indah sebagai tempat bermain dan rekreasi keluarga.

5.2 Arah Kebijakan Tahap ke-IV RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, RPJMD ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Nganjuk yang maju, adil, dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terpeliharanya rasa aman masyarakat. Kondisi itu didukung oleh mantapnya kesadaran masyarakat serta dukungan dari TNI dan Polri yang profesional sehingga terwujud keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; terwujudnya sistem hukum l yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendorong supremasi hukum; terwujudnya kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian daerah dalam konstelasi global.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Sejalan dengan tingkat kemajuan masyarakat, sumber daya manusia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Nganjuk yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi Iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap

dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka peningkatan perekonomian daerah. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2024 mencapai peningkatan, dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh Kabupaten Nganjuk; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing bangsa serta meningkatkan modal pembangunan daerah pada masa yang akan datang.

Selain itu berdasarkan rumusan permasalahan strategis daerah, isu actual yang harus menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan antara lain dari sisi perekonomian makro adalah proyeksi dan antisipasi

ancaman resesi perekonomian global pada Tahun 2023 meskipun kondisi fundamental perekonomian nasional dan daerah juga masih baik dapat dilihat dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk tahun 2022 yang mencapai 4,48 %

Dari aspek social politik pada Tahun 2024 merupakan Tahun politik penyelenggaraan pemilihan umum legislative, presiden, dan Pemilukada sehingga penciptaan stabilitas yang didukung keamanan dan ketertiban umum pra, saat dan pasca Pemilu harus menjadi prioritas kebijakan Pemerintah daerah.

Penerapan Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus didukung dengan kebijakan dan strategi fiscal daerah dengan penerapan *performance based budgeting* dari sisi belanja dan optimalisasi sumber-sumber PAD dan inovasi pelibatan *private sector* atau sumber pendanaan pembangunan non APBD yang semuanya bertujuan pada kemandirian fiscal daerah.

Aspek sumber daya manusia, penghapusan kemiskinan ekstrim sesuai arahan Presiden menjadi focus utama. Selain itu, kualitas layanan kesehatan dan Pendidikan terus diupayakan untuk ditingkatkan disamping kesiapan rangkaian kebijakan dalam menghadapi pandemic penyakit. Infrastruktur public terus diupayakan untuk ditingkatkan terutama infrastruktur strategis sebagai salah satu *trigger* perekonomian disamping optimalisasi sektor-sektor potensial perekonomian daerah seperti pariwisata, koperasi dan UMKM, serta sektor lainnya.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan tahap ke IV RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025, kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 3 tahun.

Tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. **"*Nganjuk Tumbuh*".**

Tujuan	:	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup
Indikator Tujuan	:	1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah 2. Indeks Gini 3. Tingkat Kemiskinan Daerah 4. Tingkat Pengangguran Terbuka 5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Sasaran 1	:	Meningkatkan produktivitas ekonomi lokal
Indikator Sasaran	:	1. Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan 2. Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3. Nilai Investasi Daerah
Sasaran 2	:	Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan
Indikator Sasaran	:	1. Nilai Tukar Petani 2. Skor Pola Pangan Harapan
Sasaran 3	:	Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah
Indikator Sasaran	:	1. Rata-rata lama tinggal wisatawan 2. Pertumbuhan koperasi sehat 3. Rata rata peningkatan Volume usaha mikro
Sasaran 4	:	Mengurangi penduduk miskin melalui pemberdayaan masyarakat dan Desa

Indikator Sasaran	:	1. Angka Kemiskinan Ekstrim 2. Indeks Desa Membangun
Sasaran 5	:	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja
Indikator Sasaran	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Sasaran 6	:	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Indikator Sasaran	:	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Sasaran 7	:	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan akses hunian layak, serta keselamatan transportasi
Indikator Sasaran	:	1. Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum 2. Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan 3. Persentase Rumah layak huni

2. **"*Nganjuk Sehat dan Cerdas*".**

Tujuan	:	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.
Indikator Tujuan	:	Indeks Pembangunan Manusia
Sasaran 1	:	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Indikator Sasaran	:	Indeks Kesehatan
Sasaran 2	:	Meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi kepemudaan
Indikator Sasaran	:	1. Indeks Pendidikan 2. Jumlah pemuda berprestasi
Sasaran 3	:	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender
Indikator Sasaran	:	Indeks Pembangunan Gender (IPG)

3. ***"Nganjuk Akuntabel".***

Tujuan	:	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
Indikator Tujuan	:	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran 1	:	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima
Indikator Sasaran	:	1. Nilai SAKIP 2. Opini BPK terhadap LKPD 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Indeks Pelayanan Publik
Sasaran 2	:	Meningkatkan transformasi digital pemerintahan daerah
Indikator Sasaran	:	Indeks SPBE
Sasaran 3	:	Meningkatkan profesionalitas ASN
Indikator Sasaran	:	Indeks Profesionalitas ASN

4. ***"Nganjuk Harmonis".***

Tujuan	:	Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya.
Indikator Tujuan	:	Indeks Kesalehan Sosial
Sasaran 1	:	Meningkatkan penanganan konflik sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum
Indikator Sasaran	:	1. Persentase penanganan konflik sosial 2. Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat
Sasaran 2	:	Meningkatkan pelestarian warisan kebudayaan lokal
Indikator Sasaran	:	Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan
Sasaran 3	:	Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
Indikator Sasaran	:	Indeks Risiko Bencana

Tabel 5.1

Matrik Tujuan, sasaran dan Program RPD Tahun 2024-2026

No.	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Periode RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun			Kondisi akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
1.	**Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup**		**Pertumbuhan Ekonomi Daerah**	**%**	**4,48**	**4,92**	**4,98**	**5,02**	**5,02**
			Indeks Gini	**Indeks**	**0,30**	**≤ 0,30**	**≤ 0,30**	**≤ 0,30**	**≤ 0,30**
			Tingkat Kemiskinan Daerah	**%**	**10,70**	**10,50**	**10,37**	**10,15**	**10,15**
			Tingkat Pengangguran Terbuka	**%**	**4,98**	**4,6**	**4,55**	**4,5**	**4,5**
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	**Indeks**	**67,37**	**67,38**	**67,40**	**67,44**	**67,44**
		Meningkatkan produktifitas ekonomi lokal	Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan	%	11,7	11,8	11,9	12	12

No.	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Periode RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun			Kondisi akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
			Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	5,3	5,4	5,5	5,6	5,6
			Nilai Investasi	Rp	4,529,076,183,502	1,050,000,000,000	1,365,000,000,000	1,774,500,000,000	1,774,500,000,000
		Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan	NTP	Nilai	102	102,5	103	103,5	103,5
			Skor Pola Pangan Harapan	Skor	95,30	88	89	90	90
		Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah	Rata-rata lama tinggal wisatawan	hari	0,2	0,25	0,29	0,33	0,33
			Pertumbuhan koperasi sehat	%	0,8	0,95	1,1	1,25	1,25
			Rata rata peningkatan Volume usaha mikro	%	10	15	20	25	25

No.	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Periode RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun			Kondisi akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
		Mengurangi penduduk miskin melalui pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Angka Kemiskinan Ekstrim	%	1,36	0,5	0,3	0,1	0,1
			Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7421	0,7795	0,7869	0,7969	0,7969
		Meningkatkan penyerapan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67	67,5	68	68,5	68,5
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	61,61	59,51	59,56	59,58	59,58
			Indeks Kualitas Udara	Indeks	79,45	80,85	80,85	80,87	80,87
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	54,91	55,99	56	56,10	56,10
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan akses hunian layak, serta keselamatan transportasi	Indeks Infrastruktur Pekerjaan umum	Indeks	82	85	86	87	87
			Persentase Rumah layak huni	%	96,44	96,94	97,44	97,94	97,94
			Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Nilai	23,61	22,5	22	21,5	21,5

No.	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Periode RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun			Kondisi akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
2.	**Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.**		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,93	73,49	73,87	74,25	74,25
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
		Meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi kepemudaan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,63	0,64	0,65	0,66	0,66
			Jumlah pemuda berprestasi	Orang	68	70	72	74	74
		Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,76	93,97	94,04	94,11	94,11
3.	**Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik**		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**60,18**	**63,79**	**67,40**	**71,01**	**71,01**
		Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima	Nilai SAKIP	Nilai	66,59	69,25	72,02	74,90	74,90

No.	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Periode RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun			Kondisi akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
			Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,111	3,150	3,200	3,250	3,250
			Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,32	3,50	3,60	3,70	3,70
		Meningkatkan transformasi digital pemerintahan daerah	Indeks SPBE	Indeks	2,18	2,50	2,75	3,00	3,00
		Meningkatkan profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	46,43	55	63	71	71
4.	**Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya.**		Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	89,649	89.803	89.854	89.871	89.871

No.	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Periode RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun			Kondisi akhir Periode RPD
						2024	2025	2026	
		Meningkatkan penanganan konflik sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan konflik sosial	%	80	82	82	84	84
			Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat	%	100	85	95	100	100
		Meningkatkan pelestarian warisan kebudayaan local	Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan	%	27,03	29,73	32,43	35,14	35,14
		Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	110,96	109,04	107,13	99,50	99,50

5.4 *Cascading* Kinerja RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

Pada sistem akuntanbilitas kinerja instansi Pemerintah, cascading kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan atau target IKU secara vertikal dari level unit yang lebih tinggi ke level unit yang lebih rendah. Selain itu, cascading kinerja juga menggambarkan penjenjangan kinerja urusan pemerintahan dan pembagian pencapaian target indikator di setiap level untuk pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Tabel 5.2

PENJENJANGAN KINERJA
RPD KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

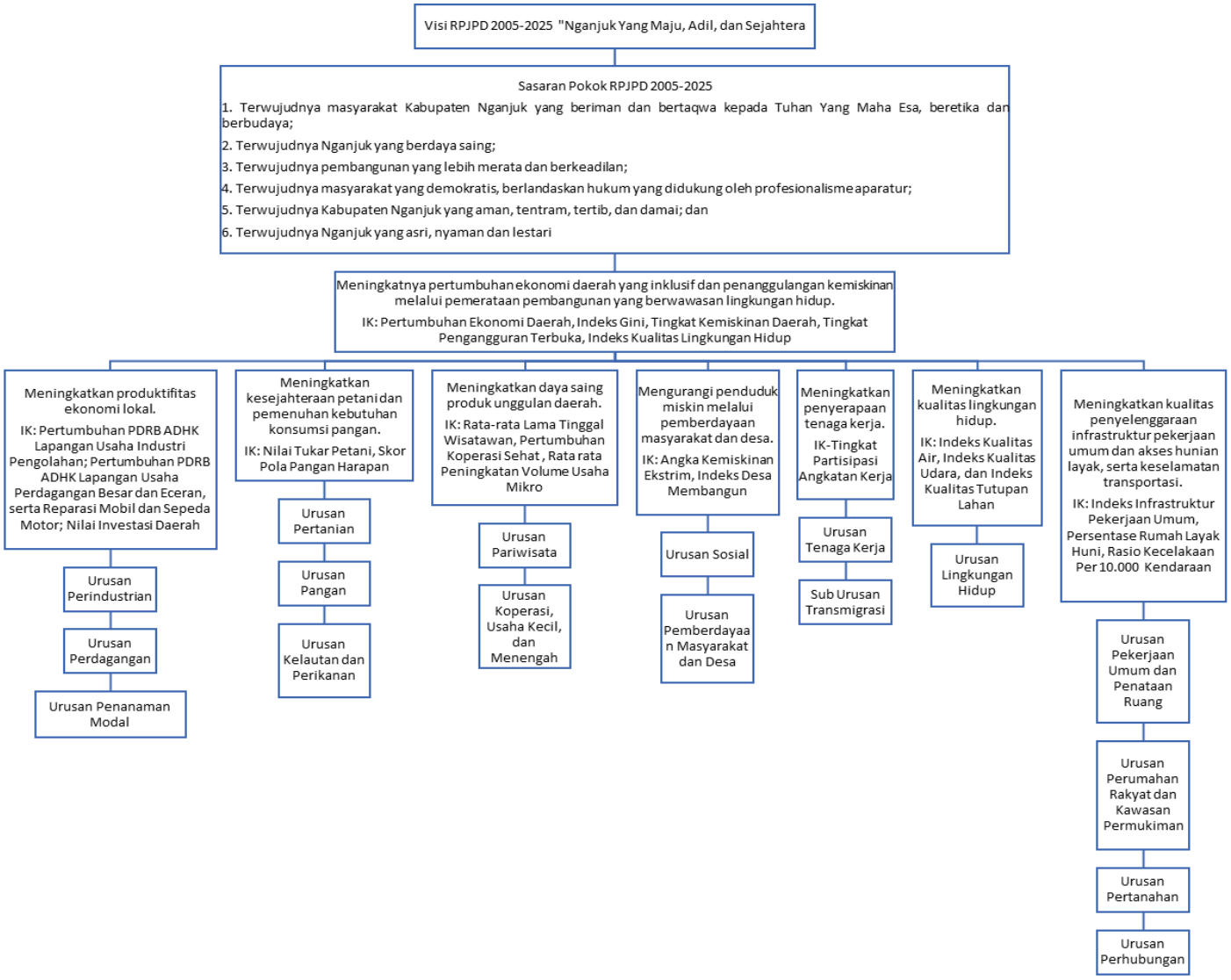
No.	Tujuan/Indikator Kinerja (IK)	Sasaran/ Indikator Kinerja (IK)	Urusan Pemerintahan
1.	**Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.**		
	IK-Pertumbuhan Ekonomi Daerah	**Meningkatkan produktifitas ekonomi lokal.**	
	IK-Indeks Gini	IK-Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Urusan Perindustrian
	IK-Tingkat Kemiskinan Daerah	IK-Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Urusan Perdagangan
	IK-Tingkat Pengangguran Terbuka	IK-Nilai Investasi Daerah	Urusan Penanaman Modal
	IK-Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**Meningkatkan kesejahteraan petani dan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan.**	
		IK-Nilai Tukar Petani	Urusan Pertanian
		IK-Skor Pola Pangan Harapan	Urusan Pangan
			Urusan Kelautan dan Perikanan

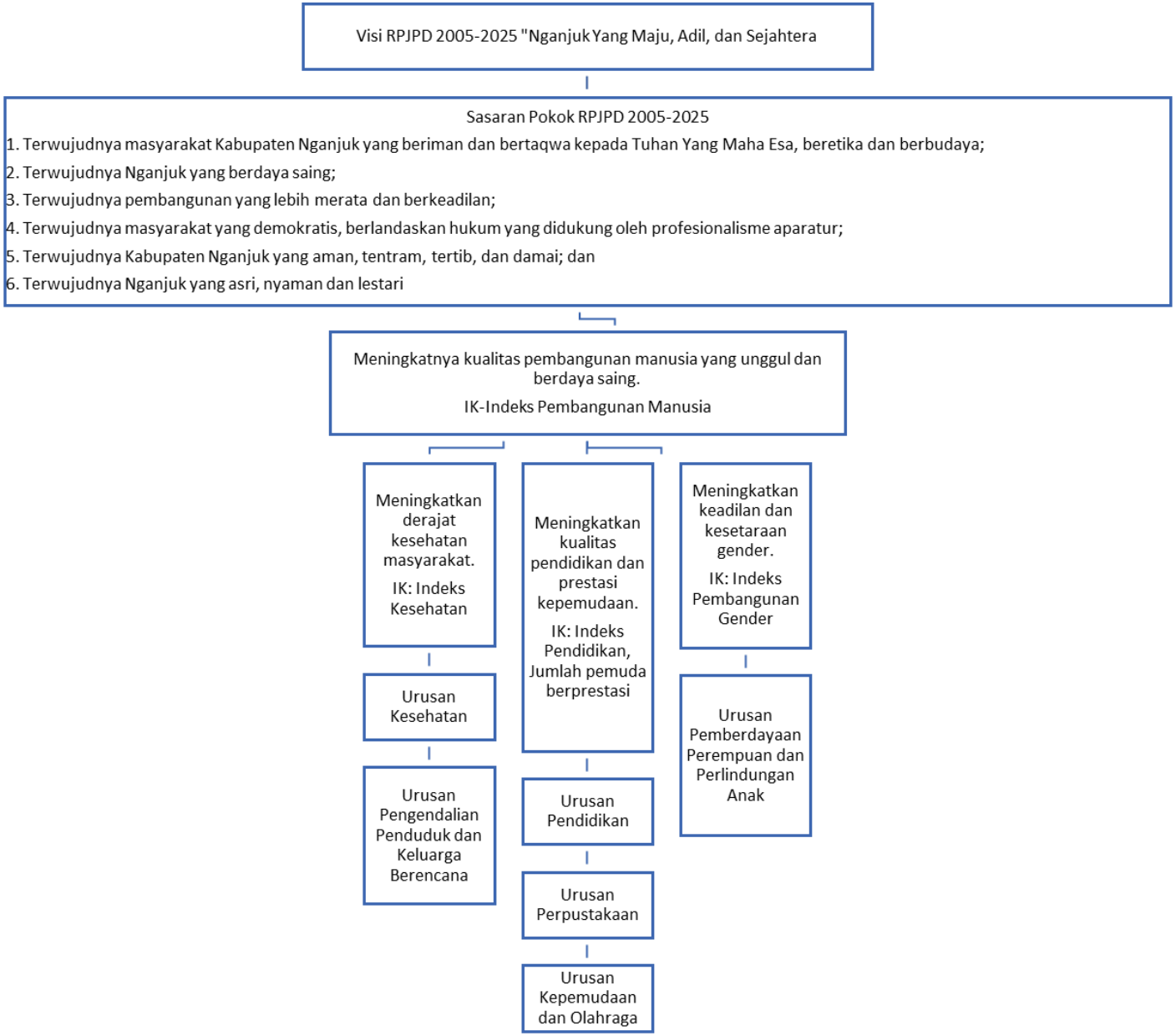
No.	Tujuan/Indikator Kinerja (IK)	Sasaran/ Indikator Kinerja (IK)	Urusan Pemerintahan
		Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah.	
		IK-Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Urusan Pariwisata
		IK-Pertumbuhan Koperasi Sehat	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		IK-Rata rata Peningkatan Volume Usaha Mikro	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		Mengurangi penduduk miskin melalui pemberdayaan masyarakat dan desa.	
		IK-Angka Kemiskinan Ekstrim	Urusan Sosial
		IK-Indeks Desa Membangun	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Meningkatkan penyerapaan tenaga kerja.	
		IK-Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Urusan Tenaga Kerja
			Sub Urusan Transmigrasi
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	
		IK-Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Urusan Lingkungan Hidup
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan akses hunian layak, serta keselamatan transportasi.	
		IK-Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		IK-Persentase Rumah Layak Huni	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Urusan Pertanahan

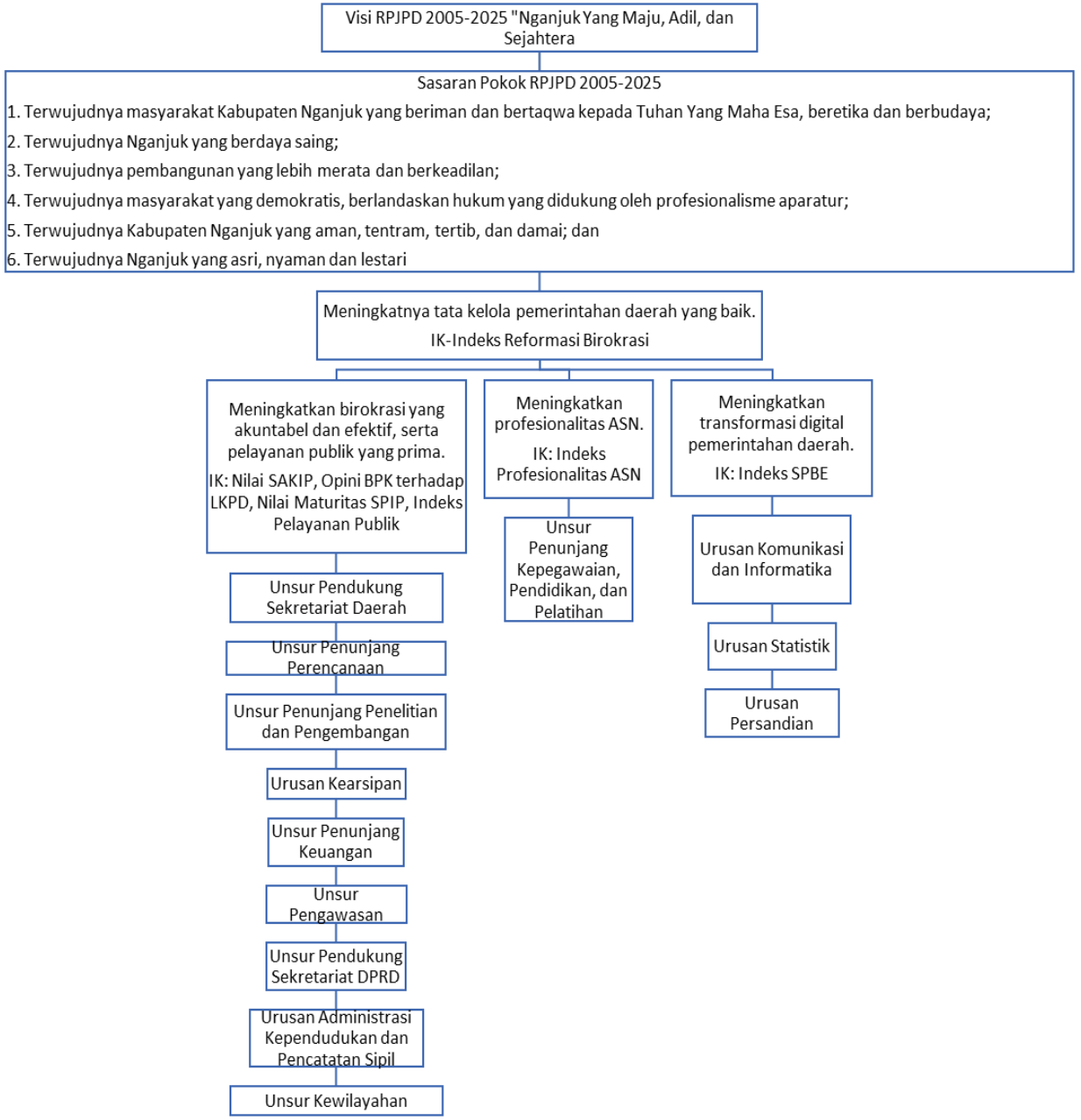
No.	Tujuan/Indikator Kinerja (IK)	Sasaran/ Indikator Kinerja (IK)	Urusan Pemerintahan
		IK-Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Urusan Perhubungan
2.	**Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.**		
	IK-Indeks Pembangunan Manusia	**Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.**	
		IK-Indeks Kesehatan	Urusan Kesehatan
			Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi kepemudaan.	
		IK-Indeks Pendidikan	Urusan Pendidikan
			Urusan Perpustakaan
		IK-Jumlah pemuda berprestasi	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
		Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender.	
		IK-Indeks Pembangunan Gender	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	**Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.**		
	IK-Indeks Reformasi Birokrasi	**Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima.**	
		IK-Nilai SAKIP	Unsur Pendukung Sekretariat Daerah
			Unsur Penunjang Perencanaan
			Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan
			Urusan Kearsipan
		IK-Opini BPK terhadap LKPD	Unsur Penunjang Keuangan
		IK-Nilai Maturitas SPIP	Unsur Pengawasan

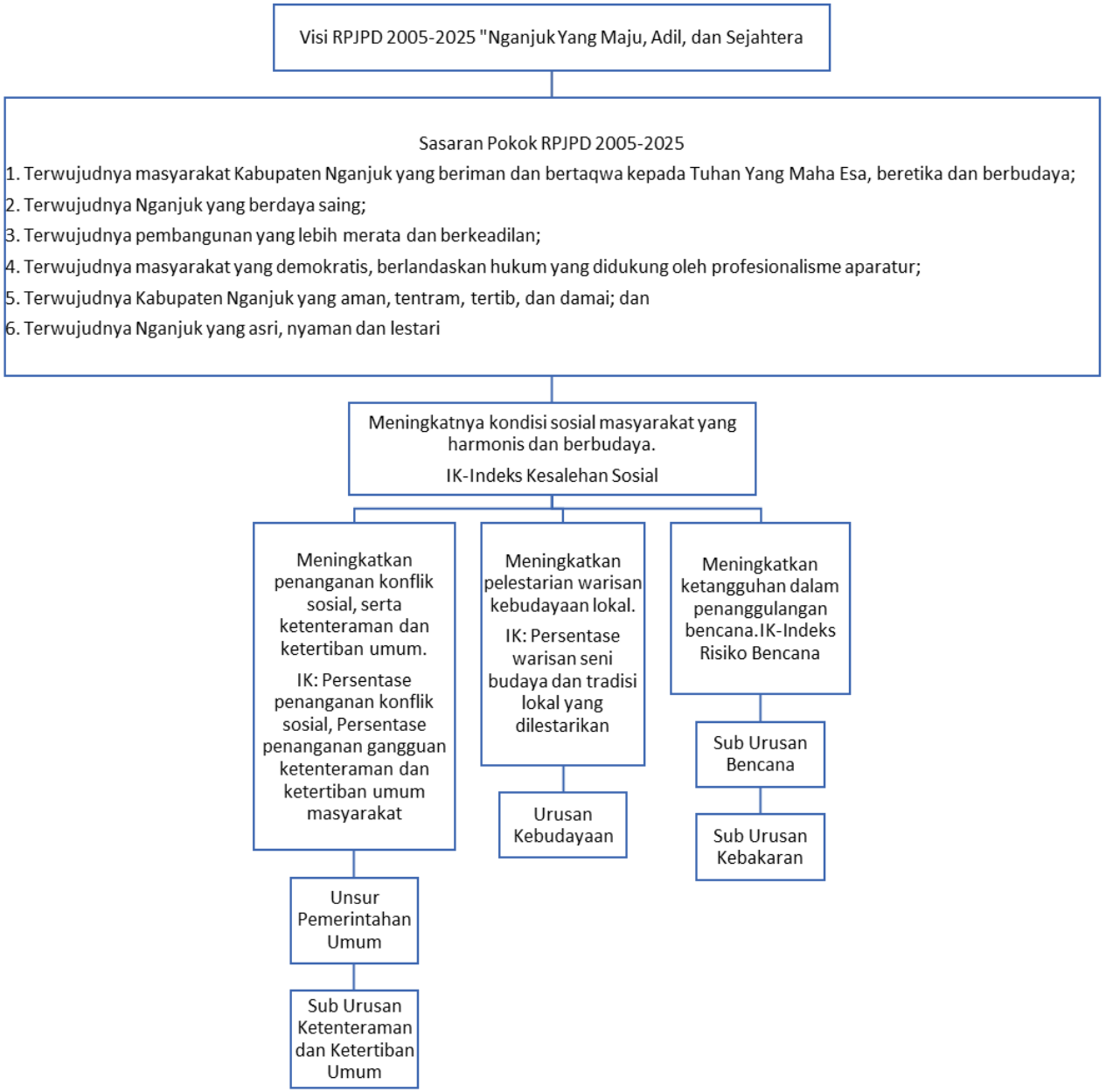
No.	Tujuan/Indikator Kinerja (IK)	Sasaran/ Indikator Kinerja (IK)	Urusan Pemerintahan
		IK-Indeks Pelayanan Publik	Unsur Pendukung Sekretariat Daerah
			Unsur Pendukung Sekretariat DPRD
			Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Unsur Kewilayahan
		Meningkatkan profesionalitas ASN.	
		Indeks Profesionalitas ASN	Unsur Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
		Meningkatkan transformasi digital pemerintahan daerah.	
		Indeks SPBE	Urusan Komunikasi dan Informatika
			Urusan Statistik
			Urusan Persandian
4.	**Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya.**		
	IK-Indeks Kesalehan Sosial	**Meningkatkan penanganan konflik sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum.**	
		IK-Persentase penanganan konflik sosial	Unsur Pemerintahan Umum
		IK-Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat	Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Meningkatkan pelestarian warisan kebudayaan lokal.	
		IK-Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan.	Urusan Kebudayaan
		Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana.	
		IK-Indeks Risiko Bencana	Sub Urusan Bencana
			Sub Urusan Kebakaran

DIAGRAM 5.1
PENJENJANGAN KINERJA
RPD KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026




Visi RPJPD 2005-2025 "Nganjuk Yang Maju, Adil, dan Sejahtera
Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025
1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Nganjuk yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika dan berbudaya;
2. Terwujudnya Nganjuk yang berdaya saing;
3. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan;
4. Terwujudnya masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur;
5. Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang aman, tentram, tertib, dan damai; dan
6. Terwujudnya Nganjuk yang asri, nyaman dan lestari
Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.
IK-Indeks Pembangunan Manusia
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
IK: Indeks Kesehatan
Urusan Kesehatan
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi kepemudaan.
IK: Indeks Pendidikan, Jumlah pemuda berprestasi
Urusan Pendidikan
Urusan Perpustakaan
Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender.
IK: Indeks Pembangunan Gender
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Visi RPJPD 2005-2025 "Nganjuk Yang Maju, Adil, dan Sejahtera
Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025
1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Nganjuk yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika dan berbudaya;
2. Terwujudnya Nganjuk yang berdaya saing;
3. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan;
4. Terwujudnya masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur;
5. Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang aman, tentram, tertib, dan damai; dan
6. Terwujudnya Nganjuk yang asri, nyaman dan lestari
Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
IK-Indeks Reformasi Birokrasi
Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima.
IK: Nilai SAKIP, Opini BPK terhadap LKPD, Nilai Maturitas SPIP, Indeks Pelayanan Publik
Meningkatkan profesionalitas ASN.
IK: Indeks Profesionalitas ASN
Meningkatkan transformasi digital pemerintahan daerah.
IK: Indeks SPBE
Unsur Pendukung Sekretariat Daerah
Unsur Penunjang Perencanaan
Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan
Urusan Kearsipan
Unsur Penunjang Keuangan
Unsur Pengawasan
Unsur Pendukung Sekretariat DPRD
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unsur Kewilayahan
Unsur Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
Urusan Komunikasi dan Informatika
Urusan Statistik
Urusan Persandian


Visi RPJPD 2005-2025 "Nganjuk Yang Maju, Adil, dan Sejahtera
Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025
1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Nganjuk yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika dan berbudaya;
2. Terwujudnya Nganjuk yang berdaya saing;
3. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan;
4. Terwujudnya masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur;
5. Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang aman, tentram, tertib, dan damai; dan
6. Terwujudnya Nganjuk yang asri, nyaman dan lestari
Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya.
IK-Indeks Kesalehan Sosial
Meningkatkan penanganan konflik sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum.
IK: Persentase penanganan konflik sosial, Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat
Meningkatkan pelestarian warisan kebudayaan lokal.
IK: Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan
Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana.IK-Indeks Risiko Bencana
Urusan Kebudayaan
Sub Urusan Bencana
Sub Urusan Kebakaran
Unsur Pemerintahan Umum
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026. Rumusan strategi dan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

No.	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Strategi
1.	**NGANJUK TUMBUH**		
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup	Meningkatkan produktifitas ekonomi lokal	Mengembangkan sektor industri dengan upaya promotif, kemitraan dan kerjasama pengembangan industri berbasis potensi lokal
			Meningkatkan perdagangan daerah untuk pemerataan ekonomi kewilayahan
			Peningkatan iklim investasi sektor usaha berbasis potensi local

No.	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Strategi
		Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan	Meningkatkan produksi dan produktifitas sektor pertanian
			pemenuhan konsumsi dan keamanan pangan
		Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah	Pembangunan dan pengembangan pariwisata daerah, peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan nilai tambah kesenian tradisional dan kebudayaan
			Meningkatkan daya saing Usaha Mikro dan Koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan
		Mengurangi penduduk miskin melalui pemberdayaan masyarakat dan desa	Mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata kepada masyarakat yang didukung dengan data kesejahteraan sosial yang terpadu
			Memberdayakan potensi ekonomi perdesaan dan kawasan perdesaan
		Meningkatkan penyerapan tenaga kerja	Meningkatkan partisipasi angkatan kerja
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan pengelolaan persampahan, pemenuhan ruang terbuka hijau dan mengurangi pencemaran lingkungan serta optimalisasi pemanfaatan ruang

No.	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Strategi
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan akses hunian layak, serta keselamatan transportasi	Meningkatkan kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum
			Meningkatkan penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni
			Menurunkan rasio kecelakaan
2.	**NGANJUK SEHAT DAN CERDAS**		
	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
			Memperkuat Kepesertaan KB Aktif
		Meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi kepemudaan	Mewujudkan pencapaian SPM Bidang Pendidikan
			Meningkatkan kompetensi peserta didik
			Meningkatkan kualitas literasi masyarakat
			Mengembangkan inovasi dan kreatifitas pemuda serta meningkatkan prestasi olahraga
		Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender	Meningkatkan peran serta, keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak
3.	**NGANJUK AKUNTABEL**		
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima	meningkatkan akuntanbilitas penyelenggaraan Pemerintahan
			Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

No.	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Strategi
			Peningkatan Perencanaan Pengendalian dan Pembangunan Daerah
			Peningkatan penelitian dan pengenmbangan untuk mendorong inovasi daerah
			memaksimalkan pembinaan dan pengawasan akuntabilitas keuangan dan kinerja
			Meningkatkan kualitas APIP sesuai standart, dengan arah kebijakan mengikutsertakan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas dalam kegiatan peningkatan profesionalisme
			Mengoptimalkan sumberdaya kelembagaan untuk menunjang tercapainya kinerja Perangkat Daerah
			meningkatkan kualitas pelayanan publik
			Meningkatkan tata kelola arsip daerah
			Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan, dan Desa/Kelurahan
			meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang lebih efisien dan efektif

No.	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Strategi
			Peningkatan Pendapatan Asli daerah dengan optimalisasi potensi dan sumber-sumber PAD
		Meningkatkan transformasi digital pemerintahan daerah.	Memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang merata pada seluruh perangkat daerah
		Meningkatkan profesionalitas ASN	meningkatkan kualitas dan profesionalisme ASN
4.	**NGANJUK HARMONIS**		
	Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya.	Meningkatkan penanganan konflik sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatkan koordinasi penangangan konflik sosial dan koordinasi kewaspadaan dini daerah
			Penguatan Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada dan peningkatan pemberdayaan linmas
		Meningkatkan pelestarian warisan kebudayaan local	Meningkatkan apresiasi dan perlindungan terhadap seni dan budaya lokal serta Barang Bercorak Budaya (BCB) dengan terus memasyarakatkan seni dan budaya lokal daerah
		Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
			Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan terhadap kejadian kebakaran

strategi dan arah kebijakan merupakan strategi dan arah kebijakan yang menggambarkan urusan pemerintahan daerah. Secara rinci Arah Kebijakan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 6.2
Arah Kebijakan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

No.	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Strategi	Arah kebijakan	Tahun		
				2024	2025	2026
1	**NGANJUK TUMBUH**					
	Meningkatkan produktifitas ekonomi lokal	Mengembangkan sektor industri dengan upaya promotif, kemitraan dan kerjasama pengembangan industri berbasis potensi local	Pengembangan kerjasama dan kemitraan industri untuk memperluas akses pasar industri kecil dan menengah	√	√	√
		Meningkatkan perdagangan daerah untuk pemerataan ekonomi kewilayahan	Pengembangan pusat perdagangan dan Pasar daerah	√	√	√
		Peningkatan iklim investasi sektor usaha berbasis potensi local	Promosi, Fasilitasi dan peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal	√	√	√
	Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan	Meningkatkan produksi dan produktifitas sektor pertanian	Peningkatan produksi pertanian dalam arti luas	√	√	√
			peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitasi teknologi pertanian	√	√	√
			Meningkatkan kapasitas kelembagaan petani	√	√	√

No.	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Strategi	Arah kebijakan	Tahun		
				2024	2025	2026
		Pemenuhan konsumsi dan keamanan pangan	Peningkatan ketersediaan dan penganekaragaman konsumsi serta keamanan pangan daerah	√	√	√
	Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah	Pembangunan dan pengembangan pariwisata daerah, peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan nilai tambah kesenian tradisional dan kebudayaan	Pembangunan dan pengembangan wisata unggulan daerah serta pengelolaan pariwisata secara profesional melalui kerjasama dan kemitraan yang efektif	√	√	√
			Penguatan ekosistem dan pengembangan pasar subsektor ekonomi kreatif unggulan	√	√	√
			Pelestarian dan peningkatan nilai tambah seni tradisional dan kebudayaan untuk mendukung sektor pariwisata	√	√	√
		Meningkatkan daya saing Usaha Mikro dan Koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan	Peningkatan kapasitas dan akses pasar usaha mikro serta peningkatan kinerja koperasi	√	√	√

No.	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Strategi	Arah kebijakan	Tahun		
				2024	2025	2026
	Mengurangi penduduk miskin melalui pemberdayaan Masyarakat dan desa	Mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kualitas layanan sosial yang berkelanjutan, berkeadilan dan merata kepada masyarakat yang didukung dengan data kesejahteraan sosial yang terpadu	Penyelenggaraan perlindungan sosial dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan social yang didukung dengan data kesejahteraan sosial yang akurat dan terpadu	√	√	√
		Memberdayakan potensi ekonomi perdesaan dan kawasan perdesaan	Pengembangan kelembagaan ekonomi Perdesaan dan Kawasan Perdesaan	√	√	√
	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja	Meningkatkan partisipasi angkatan kerja	Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja selaras dengan kebutuhan pasar tenaga kerja	√	√	√
			Memperluas kesempatan kerja dengan meningkatkan Penempatan Angkatan Kerja dan padat karya melalui hubungan industrial yang produktif	√	√	√

No.	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Strategi	Arah kebijakan	Tahun		
				2024	2025	2026
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan pengelolaan persampahan, pemenuhan ruang terbuka hijau dan mengurangi pencemaran lingkungan serta optimalisasi pemanfaatan ruang	Peningkatan fasilitas dan tata kelola persampahan dan ruang terbuka hijau serta pengendalian pencemaran lingkungan dan pemanfaatan ruang	√	√	√
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan akses hunian layak, serta keselamatan transportasi	Meningkatkan kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Perencanaan, Pembangunan, Rehabilitasi, rekonstruksi serta Pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas sesuai dengan kewenangan	√	√	√
			Pembinaan jasa konstruksi	√	√	√
			Perencanaan, pembangunan dan pembinaan kelembagaan sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan	√	√	√
			Perencanaan dan pembangunan dan pengelolaan sistem pengelolaan Air Limbah Domestik	√	√	√
			Penyediaan infrastruktur persampahan	√	√	√

No.	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Strategi	Arah kebijakan	Tahun		
				2024	2025	2026
			Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase yang terhubung dengan sungai	√	√	√
			Perencanaan, Pembangunan dan Pemeliharaan gedung Daerah	√	√	√
			Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan Sumber Daya Air yang menjadi kewenangan	√	√	√
		Meningkatkan penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	Peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni	√	√	√
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	√	√	√
			Pencegahan terhadap timbulnya kawasan permukiman kumuh perkotaan Baru	√	√	√
			Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan	√	√	√
			Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan sesuai dengan kewenangan	√	√	√

No.	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Strategi	Arah kebijakan	Tahun		
				2024	2025	2026
		Menurunkan rasio kecelakaan	Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas	√	√	√
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan kabupaten	√	√	√
			Penyediaan dan Pemeliharaan Terminal Tipe C dan Halte	√	√	√
			Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	√	√	√
			Pengawasan, pengendalian dan rekayasa lalu lintas	√	√	√
			Fasilitasi penyediaan angkutan sekolah	√	√	√
2	**NGANJUK SEHAT DAN CERDAS**					
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan yang didukung sarana dan prasarana, tenaga kesehatan, sistem manajemen dan peran serta masyarakat	√	√	√
			Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	√	√	√

No.	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Strategi	Arah kebijakan	Tahun		
				2024	2025	2026
			Peningkatan tata kelola manajemen pelayanan kesehatan BLUD	√	√	√
		Memperkuat Kepesertaan KB Aktif	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ber KB	√	√	√
	Meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi kepemudaan	Mewujudkan pencapaian SPM Bidang Pendidikan	Meningkatkan kinerja pelayanan a pendidikan dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas, kompetensi dan distribusi tenaga pendidikan dan kependidikan, implementasi kurikulum merdeka serta mewujudkan digitalisasi Pendidikan	√	√	√
		Meningkatkan kompetensi peserta didik		√	√	√
		Meningkatkan kualitas literasi masyarakat	Peningkatan minat baca masyarakat dan pengembangan perpustakaan Daerah dan Desa	√	√	√
		Mengembangkan inovasi dan kreatifitas pemuda serta meningkatkan prestasi olahraga	Pengembangan inovasi dan kreatifitas pemuda melalui organisasi kepemudaan serta peningkatan prestasi olahraga di segala cabang olahraga.	√	√	√

No.	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Strategi	Arah kebijakan	Tahun		
				2024	2025	2026
	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender	Meningkatkan peran serta, keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak	Peningkatan pemberdayaan peran Perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak Anak	√	√	√
3	**NGANJUK AKUNTABEL**					
	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima	meningkatkan akuntanbilitas penyelenggaraan Pemerintahan	Penciptaan Pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Government)* serta tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance)* berbasis elektronik *(e-government);*	√	√	√
			Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah	√	√	√
		Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang baik	implementasi aspek pemenuhan 8 area perubahan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi	√	√	√

No.	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Strategi	Arah kebijakan	Tahun		
				2024	2025	2026
		Peningkatan perencanaan, pengendalian dan pembangunan daerah	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dengan pendekatan *money follow program*, berbasis data dan informasi, serta berdasarkan pengendalian dan evaluasi kinerja	√	√	√
		memaksimalkan pembinaan dan pengawasan akuntabilitas keuangan dan kinerja	Asistensi, koordinasi dan pendampingan Perangkat daerah maupun Pemerintah Desa serta penngkatan sinergitas APIP dan APH	√	√	√
		Meningkatkan kualitas APIP sesuai standart, dengan arah kebijakan mengikutsertakan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas dalam kegiatan peningkatan profesionalisme	mengikutserakan aparatur pengawas dalam kegiatan peningkatan profesionalisme	√	√	√
		Mengoptimalkan sumberdaya kelembagaan untuk menunjang tercapainya kinerja Perangkat Daerah	memberikan pelayanan terkait kinerja dan penyelenggaraan fungsi pengawasan yang optimal	√	√	√
		meningkatkan kualitas pelayanan publik	Penyelenggaraan pelayanan publik yang nyaman, mudah dan cepat	√	√	√

No.	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Strategi	Arah kebijakan	Tahun		
				2024	2025	2026
		Meningkatkan tata kelola arsip daerah	Peningkatan kualitas dan tata kelola arsip dan dokumen	√	√	√
		Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan, dan Desa/Kelurahan	Peningkatan keterpaduan perencanaan dan penganggaran pembangunan Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan	√	√	√
		meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang lebih efisien dan efektif	Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui penyempurnaan sistem dan prosedur manajemen keuangan dan pengembangan sistem informasi manajemen barang daerah	√	√	√
		Peningkatan Pendapatan Asli daerah dengan optimalisasi potensi dan sumber-sumber PAD	Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang didukung dengan data potensi PAD	√	√	√
	Meningkatkan transformasi digital pemerintahan daerah.	Memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang merata pada seluruh perangkat daerah	Peningkatan layanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	√	√	√

No.	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Strategi	Arah kebijakan	Tahun		
				2024	2025	2026
	Meningkatkan profesionalitas ASN	meningkatkan kualitas dan profesionalisme ASN	melaksanakan pengembangan dan peningkatan kompetensi ASN	√	√	√
			Penerapan merit system pengembangan karir ASN	√	√	√
4	**NGANJUK HARMONIS**					
	Meningkatkan penanganan konflik sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatkan koordinasi penangangan konflik sosial dan koordinasi kewaspadaan dini daerah	Meningkatkan peran serta elemen masyarakat menuju terciptanya kondisi daerah yang nyaman dan kondusif.	√	√	√
		Penguatan Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada dan peningkatan pemberdayaan linmas	Peningkatan peran linmas dan penindakan pelanggaran Perda dan Perkada	√	√	√
	Meningkatkan pelestarian warisan kebudayaan local	Meningkatkan apresiasi dan perlindungan terhadap seni dan budaya lokal serta Barang Bercorak Budaya (BCB) dengan terus memasyarakatkan seni dan budaya lokal daerah	Pelestarian dan pengembangan keragaman dan kekayaan budaya dengan meningkatkan apresiasi dan perlindungan terhadap seni budaya lokal dan barang bercorak budaya (BCB) serta peran serta komunitas budaya local	√	√	√

No.	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Strategi	Arah kebijakan	Tahun		
				2024	2025	2026
	Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	Peningkatan mitigasi, response time serta ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	√	√	√
		Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan terhadap kejadian kebakaran	Peningkatan peran masyarakat untuk pencegahan kebakaran dan peningkatan respon time kejadian kebakaran	√	√	√

Selanjutnya perlu disusun strategi umum dan arah kebijakan umum yang menggambarkan perencanaan pembangunan pada tingkat daerah. Rumusan strategi umum dan arah kebijakan umum pembangunan daerah tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 6.3

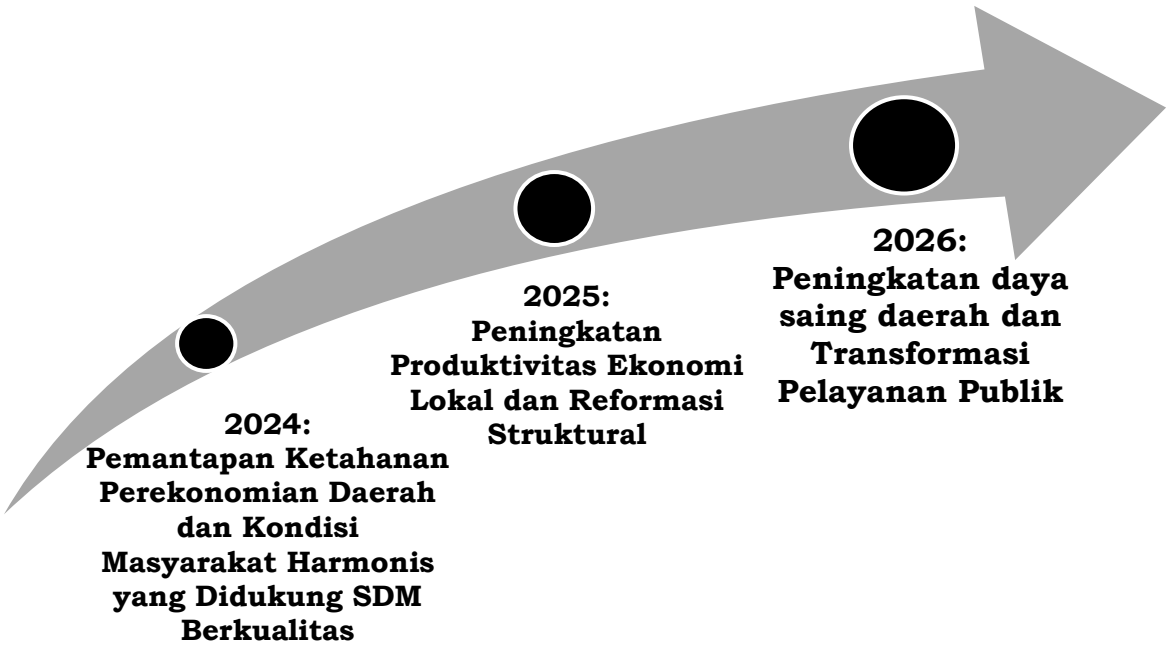
Strategi dan Arah kebijakan Umum Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Strategi Umum	Arah Kebijakan Umum		
	2024	2025	2026
NGANJUK TUMBUH:	Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif			
2. Pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup			
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan			
NGANJUK SEHAT DAN CERDAS :			
4. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing			

Strategi Umum	Arah Kebijakan Umum		
	2024	2025	2026
NGANJUK AKUNTABEL :	Berkualitas		
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik			
NGANJUK HARMONIS :			
6. Meningkatkan kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya			

Berdasarkan strategi umum dan arah kebijakan umum tersebut, selanjutnya dirumuskan tema/fokus pembangunan tahunan yang menggambarkan tahapan dan program prioritas setiap tahun. Meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu tahun ke tahun lainnya dalam rangka mencapai sasaran RPD. Tema/fokus pembangunan tahunan periode 2024-2026 sebagai berikut :

Diagram 6.1



Untuk menjalankan Strategi dan Arah Kebijakan guna mencapai Sasaran RPD, maka disusun Program Pembangunan Daerah. Program Pembangunan Daerah mencakup Program Unggulan berdasarkan prioritas dan identifikasi isu strategis daerah dan telah

disepakati bersama dalam Forum Konsultansi Publik, serta merupakan Program Perangkat Daerah yang bersifat strategis yang outcome-nya mendukung langsung dengan Sasaran RPD maupun sesuai dengan visi misi RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 selaras dengan arahan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur dalam RPJMN 2020-2024 serta RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Dengan demikian, program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah

Adapun program prioritas adalah sebagai berikut :

1. ***Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah***

   Salah satu prioritas utama dengan tujuan mewujudkan infrastruktur dasar jalan dan jembatan yang mantap dan merata di wilayah Kabupaten Nganjuk. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa infrastruktur dasar yang berkualitas merupakan faktor daya saing daerah yang utama yang dapat mendukung aktivitas sosial dan ekonomi suatu daerah.

   Komitmen membangun infrastruktur ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: komitmen PIKK untuk infrastruktur; operasional Unit Reaksi Cepat Penambal Jalan (URCPJ); meningkatkan kualitas (mutu) jalan; normalisasi saluran irigasi dan melanjutkan pembangunan waduk dan embung; penataan kawasan industri, implementasi dari Perpres 80 Tahun 2019 terutama fokus pada pengembangan dan pembangunan Kawasan Selingkar Wilis.

2. ***Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan kesejahteraan sosial***

   sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menjadi salah satu fokus utama yang harus ditindaklanjuti oleh

Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, fokus pada prioritas ini adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan-kegiatan lintas sektor; penguatan sistem jaminan sosial, pelayanan PMKS dan lansia miskin, Peningkataan Akses Pendidikan Bagi Siswa Kurang Mampu diantaranya melalui beasiswa bagi siswa miskin, rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni, Peningkatan Universal Health Coverage (UHC) Bagi Masyarakat Miskin, Peningkatan Akses Sanitasi dan Air Minum Layak Bagi Masyarakat Miskin, melaksanakan program-program KB serta perbaikan database sasaran penerima manfaat pengent serta dukungan program lintas sektor untuk memastikan bahwa seluruh program penanggulangan kemiskinan dapat tepat sasaran.

3. ***Peningkatan kesempatan kerja***

Salah satu variabel yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat adalah pengurangan tingkat pengangguran. Pengurangan angka pengangguran menjadi prioritas pada rencana Pembangunan daerah tahun 2024-2026. Komitmen ini direalisasikan dengan peningkatan kesempatan dan perluasan lapangan pekerjaan salah satunya dengan pelaksanaan job fair, pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan, peningkatan kerjasama dengan swasta untuk penempatan tenaga kerja terdidik dan terlatih.

4. ***Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat***

Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: akses pelayanan kesehatan terjangkau; peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang meliputi peningkatan sarana-prasarana kesehatan, tenaga kesehatan dan peningkatan kualitas tata kelola manajemen kesehatan dengan penyiapan standarisasi BLUD untuk 20 PKM selain itu prioritas utama bidang kesehatan antara lain penanganan masalah stunting.

5. ***Peningkatan kualitas Pendidikan***

kualitas pendidikan merupakan salah satu layanan dasar dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Nganjuk.

Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: bantuan khusus siswa miskin; meningkatkan kesejahteraan pendidik; pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi kuliah S1.

6. ***Pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup***

Pertumbuhan industri dan jasa di Kabupaten Nganjuk serta pembangunan infrastruktur harus seimbang dan selaras dengan pelestarian dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Komitmen ini dilaksanakan dengan : pemenuhan Ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran lingkungan dan pelibatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

7. ***Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah***

Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: mengembangkan obyek wisata & sarana olah raga yang sudah ada; membuka obyek wisata baru salah satunya dengan pengembangan Kawasan wisata Bendungan Semantok; meningkatkan promosi pariwisata; meningkatkan Sumber Daya Manusia pelaku wisata; serta pembentukan kawasan wisata desa/desa wisata.

8. ***Peningkatan dan Penguatan Perekonomian Daerah***

Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan antara lain: revitalisasi pasar sebagai sarana perdagangan; bangga, bela & beli produk lokal; pemberdayaan Koperasi dan UMKM; Optimalisasi sektor perindustrian dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah serta peningkatan investasi;

9. ***Pengembangan Agropolitan dan food estate***

Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: intensifikasi pertanian; inovasi

pengolahan produk pertanian sehingga memiliki branding yang dikenal & disukai masyarakat; promosi produk unggulan pertanian. Selain itu, revitalisasi Bidang pertanian dan Peternakan dilaksanakan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Pengembangan Kemandirian Pangan Daerah serta pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan yang memmbutuhkan intervensi lintas sektoral.

10. ***Pelestarian Seni Budaya Lokal***

    Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: menciptakan identitas khas Nganjuk dalam hal busana, seni & budaya; merevitalisasi sarana dan prasarana kesenian yang ada dan memberdayakan kelompok-kelompok seni budaya agar tercipta seni budaya Nganjuk yang dikenal sampai ke tingkat Nasional;

11. ***Pemberdayaan Ekonomi Kreatif***

    Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: mengembangkan industri mikro dengan memanfaatkan teknologi informasi; meningkatkan kreatifitas pemuda untuk menemukan & mengembangkan produk-produk unggulan baru; mendirikan Lembaga dan Pusat ekonomi kreatif di Kabupaten Nganjuk; menumbuhkembangkan BUM Desa.

12. ***Peningkatan Profesionalisme Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik.***

    Menyadari bahwa birokrasi merupakan unsur utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan profesionalisme birokrasi yang inovatif, bersih, tanpa korupsi, sehingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang prima yang didukung dengan impelementasi e-government adalah tujuan utama penyelenggaraan birokrasi. Selain itu, sinergitas

antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik akan terus ditingkatkan.

Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan antara lain: *mobile one stop service* pelayanan administrasi kependudukan setiap Kecamatan dan mal pelayanan publik; mutasi, promosi, rekrutmen, ijin belajar yang bebas dari pungutan (tanpa upeti);penerapan *merit system*; mewujudkan pusat pengaduan pelayanan publik: pemberian *reward and punishment* untuk pegawai; biaya pendidikan bagi peningkatan pendidikan formal untuk ASN; memotivasi ASN, pembangunan dan pelayanan publik.

13. ***menjaga stabilitas sosial politik dan kesiapsiagaan terhadap bencana***

    komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan penciptaan situsai keamnan dan ketertiban yang kondusif serta kondisi sosial politik yang harmonis menjelang, saat dan pasca pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pemilukada. Selain itu, pelibatan seluruh elemen masyarakat baik itu forkopimda, NGO dan lain-lain dalam menciptakan stabilitas dan kerukunan hidup masyarakat. dari aspek kesipasiagaan terhadap bencana prioritas pada mitigasi, kesiapsiagaan dan quick response terhadap kejadian bencana.

14. ***Percepatan Transformasi Digital***

    Meningkatkan daya guna dan hasil guna manajemen pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi digital, melalui pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penguatan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah yang lengkap, valid, mutakhir.

Selain itu, untuk menjamin sinergitas antara prioritas pembangunan nasional sesuai RPJMN 2020-2024, Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Prioritas pembangunan Kabupaten Nganjuk tahun 2024-2026 dapat disajikan pada table berikut :

Tabel 6.4

Sinergitas Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Daerah

No.	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Prioritas Provinsi/ Program Prioritas	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah
1	PN	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	**Nawa Bhakti 2 Jatim Kerja** (Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi)			
			Nawa Bhakti 6 Jatim Agro (memajukan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan)			
			Nawa Bhakti 7 Jatim Berdaya (Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, koperasi, BUM Desa, dan mendorong pemberdayaan Pemerintahan Desa)			
1.3.	PP	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan		Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
						Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
						Program Penanganan Kerawanan Pangan
						Program Pengawasan Keamanan Pangan
1.5.	PP	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (umkm), dan Koperasi		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
						Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi

No.	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Prioritas Provinsi/ Program Prioritas	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
					Program Pengembangan Umkm	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro
						Program Pengembangan Umkm
1.6.	PP	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi		Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
						Program Pengendalian Izin Usaha Industri
						Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
						Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
				Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja
					Program Hubungan Industrial	Program Penempatan Tenaga Kerja
						Program Hubungan Industrial
				Investasi	Program Promosi Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal
						Program Pelayanan Penanaman Modal
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
						Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
1.8.	PP	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi		Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

No.	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Prioritas Provinsi/ Program Prioritas	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah
						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
						Program Pengembangan Ekspor
						Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
						Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
				Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
					Program Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
						Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
				Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
						Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
						Program Perizinan Usaha Pertanian
						Program Penyuluhan Pertanian

No.	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Prioritas Provinsi/ Program Prioritas	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah
				Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
						Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
						Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
2	PN	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	**Nawa Bhakti 1 Jatim Sejahtera** (Mengentaskan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan Sosial)			
				Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
						Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
						Program Penanganan Bencana
				Pekerjaan Umum Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
						Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
						Program Penataan Bangunan Gedung

No.	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Prioritas Provinsi/ Program Prioritas	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah
						Program Penyelenggaraan Jalan
						Program Pengembangan Jasa Konstruksi
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
				Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Program Pengembangan Perumahan
						Program Kawasan Permukiman
						Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
						Program Penatagunaan Tanah
				Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
3	PN	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	**Nawa Bhakti 3** Jatim Cerdas dan Sehat (Jawa Timur Cerdas dan Sehat, pelayanan dasar berkualitas)			
3.1.	PP	Perlindungan sosial dan tata kelola Kependudukan		Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
						Program Rehabilitasi Sosial
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
						Program Penanganan Bencana
						Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
				Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk
					Program Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil

No.	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Prioritas Provinsi/ Program Prioritas	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
						Program Pengelolaan Profil Kependudukan
3.3.	PP	Peningkatan akses dan mutu Pelayanan kesehatan		Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3.4.	PP	Peningkatan pemerataan Layanan pendidikan berkualitas		Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
						Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
						Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
3.5.	PP	Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
					Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Program Perlindungan Perempuan
						Program Peningkatan Kualitas Keluarga
						Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
						Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)

No.	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Prioritas Provinsi/ Program Prioritas	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah
						Program Perlindungan Khusus Anak
				Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
						Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
3.6.	PP	Pengentasan kemiskinan		Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
						Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
						Program Penanganan Bencana
						Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Penataan Desa
						Program Peningkatan Kerjasama Desa
						Program Administrasi Pemerintahan Desa
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
3.7.	PP	Peningkatan produktivitas dan daya saing		Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja
						Program Penempatan Tenaga Kerja
					Program Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial

No.	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Prioritas Provinsi/ Program Prioritas	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah
4	PN	Membangun karakter bangsa	**Nawa Bhakti 5 Jatim Berkah** (Membangun karakter masyarakat yang berbasis Nilai-Nilai Kesalehan Sosial, Budi pekerti Luhur dan Berintegritas			
4.1.	PP	Revolusi mental dan pembinaan Ideologi pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter		Unsur Pemerintahan Umum	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
					Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
						Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
4.2.	PP	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk Memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan		Kebudayaan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan
						Program Pengembangan Kesenian Tradisional

No.	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Prioritas Provinsi/ Program Prioritas	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah
		kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia				Program Pembinaan Sejarah
						Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
						Program Pengelolaan Permuseuman
4.4.	PP	Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi mewujudkan masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter		Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
				Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan
						Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
5	PN	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayananDasar	**Nawa Bhakti 4 Jatim Akses** (membangun infrastruktur pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan)			
5.1.	PP	Infrastruktur pelayanan dasar		Pekerjaan Umum Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
						Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
						Program Penataan Bangunan Gedung
						Program Penyelenggaraan Jalan
						Program Pengembangan Jasa Konstruksi
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

No.	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Prioritas Provinsi/ Program Prioritas	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah
				Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Program Pengembangan Perumahan
						Program Kawasan Permukiman
						Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
						Program Penatagunaan Tanah
				Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
5.5.	PP	Transformasi digital		Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
						Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
						Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
						Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
6	PN	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	**Nawa Bhakti 9 Jatim Harmoni** (Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan melstarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup)			
6.1.	PP	Peningkatan kualitas lingkungan Hidup		Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup

No.	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Prioritas Provinsi/ Program Prioritas	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah
					Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
						Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/kota
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
						Program Pengelolaan Persampahan
6.2.	PP	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim		Bencana (Sub Urusan)	Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana

No.	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Prioritas Provinsi/ Program Prioritas	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah
				Kebakaram (Sub Urusan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
7	PN	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public	**Nawa Bhakti 8 Jatim Amanah** (Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi)			
7.1.	PP	Reformasi birokrasi dan tata kelola		Unsur Pendukung Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
						Program Perekonomian Dan Pembangunan
				Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan
						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
				Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah
				Pendidikan dan pelatihan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
				Perencanaan Pembangunan	Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
						Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Prioritas Provinsi/ Program Prioritas	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah
7.2.	PP	Menjaga stabilitas keamanan Nasional		Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Sub Urusan)	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Selanjutnya, keterhubungan tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan daerah beserta pagu indikatif tahun 2024-2026 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.5
Analisis Keterhubungan Tujuan dan Sasaran dengan Program Prioritass
RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

No.	Tujuan (IKU)			Kondisi Awal	Target			Sasaran			Kondisi Awal	Target			Program Prioritas
					2024	2025	2026					2024	2025	2026	
	Uraian	Indikator	satuan	2022	Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik	Uraian	Indikator	satuan	2022	Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik	
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	%	4,48	4,92	4,98	5,02	Meningkatkan produktifitas ekonomi lokal	Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan	%	11,7	11,8	11,9	12	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
		Indeks Gini	indeks	0,30	≤ 0,30	≤ 0,30	≤ 0,30								PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
		Tingkat Kemiskinan Daerah	%	10,70	10,50	10,37	10,15								PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
		Tingkat Pengangguran	%	4,98	4,6	4,55	4,5								PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	67,37	67,38	67,4	67,44								PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
															PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
									Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	5,3	5,4	5,5	5,6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
															PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
															PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
									Nilai Investasi	Rp	4.529.076.183.502	1.050.000.000.000	1.365.000.000.000	1.774.500.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
															PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
															PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
															PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
															PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
								Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan	NTP	Nilai	102	102,5	103	103,5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
															PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
															PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
															PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
															PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
															PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
									Skor Pola Pangan Harapan	Skor	95,30	88	89	90	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
															PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
															PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
															PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

No.	Tujuan (IKU)			Kondisi Awal	Target			Sasaran			Kondisi Awal	Target			Program Prioritas
					2024	2025	2026					2024	2025	2026	
	Uraian	Indikator	satuan	2022	Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik	Uraian	Indikator	satuan	2022	Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik	
															PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
															PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
															PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
															PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
								Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah	Rata-rata lama tinggal wisatawan	hari	0,2	0,25	0,29	0,33	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
															PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
															PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
															PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
									Pertumbuhan koperasi sehat	%	0,8	0,95	1,1	1,25	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
									Rata rata peningkatan Volume usaha mikro	%	10	15	20	25	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
															PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
															PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
															PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
															PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
								Mengurangi penduduk miskin melalui pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Angka Kemiskinan Ekstrim	%	1,36	0,5	0,3	0,1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
															PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
															PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
															PROGRAM PENANGANAN BENCANA
															PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
									Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7421	0,7795	0,7869	0,7969	PROGRAM PENATAAN DESA
															PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
															PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
															PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
								Meningkatkan penyerapan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67	67,5	68	68,5	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
															PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
															PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
															PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
															PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

No.	Tujuan (IKU)			Kondisi Awal	Target			Sasaran			Kondisi Awal	Target			Program Prioritas
					2024	2025	2026					2024	2025	2026	
	Uraian	Indikator	satuan	2022	Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik	Uraian	Indikator	satuan	2022	Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik	
								Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	61,61	59,51	59,56	59,58	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
									Indeks Kualitas Udara	Indeks	79,45	80,85	80,85	80,87	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
									Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	54,91	55,99	56	56,1	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
															PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
															PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
															PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
															PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
															PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
															PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
								Meningkatkan kualitas penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan akses hunian layak, serta keselamatan transportasi	Indeks Infrastruktur Pekerjaan umum	Indeks	82	85	86	87	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
															PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
															PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
															PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
															PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
															PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
															PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
															PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
															PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
									Persentase Rumah layak huni	%	96,44	96,94	97,44	97,94	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
															PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
															PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
															PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
															PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

No.	Tujuan (IKU)			Kondisi Awal	Target			Sasaran			Kondisi Awal	Target			Program Prioritas
					2024	2025	2026					2024	2025	2026	
	Uraian	Indikator	satuan	2022	Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik	Uraian	Indikator	satuan	2022	Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik	
									Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Nilai	23,61	22,5	22	21,5	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,93	73,49	73,87	74,25	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0,8	0,8	0,8	0,8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
															PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
															PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
															PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
															PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
															PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
															PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
								Meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi kepemudaan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,63	0,64	0,65	0,66	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
															PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
															PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
															PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
															PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
									Jumlah pemuda berprestasi	Orang	68	70	72	74	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
															PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
															PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
								Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,76	93,97	94,04	94,11	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
															PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
															PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
															PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
															PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
															PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,18	63,79	67,4	71,01	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima	Nilai SAKIP	Nilai	66,59	69,25	72,02	74,9	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
															PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
															PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Tujuan (IKU)			Kondisi Awal	Target			Sasaran			Kondisi Awal	Target			Program Prioritas
					2024	2025	2026					2024	2025	2026	
	Uraian	Indikator	satuan	2022	Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik	Uraian	Indikator	satuan	2022	Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik	
															PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
															PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
															PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
															PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
															PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
									Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
															PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
															PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
									Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,111	3,150	3,200	3,250	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
															PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
									Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,32	3,5	3,6	3,7	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
															PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
															PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
															PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
															PROGRAM PENCATATAN SIPIL
															PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
															PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
															PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
															PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
															PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
															PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
															PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
								Meningkatkan transformasi digital pemerintahan daerah	Indeks SPBE	Indeks	2,18	2,50	2,75	3,00	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
															PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
															PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
															PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

No.	Tujuan (IKU)			Kondisi Awal	Target			Sasaran			Kondisi Awal	Target			Program Prioritas
					2024	2025	2026					2024	2025	2026	
	Uraian	Indikator	satuan	2022	Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik	Uraian	Indikator	satuan	2022	Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik	
								Meningkatkan profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	46,43	55	63	71	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4	Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya.	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	89,649	89,803	89,854	89,871	Meningkatkan penanganan konflik sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan konflik sosial	%	80	82	82	84	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
									Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat	%	100	85	95	100	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
								Meningkatkan pelestarian warisan kebudayaan local	Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan	%	27,03	29,73	32,43	35,14	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
								Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	110,96	109,04	107,13	99,5	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Tabel 6.6
Analisis Keterhubungan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dengan Program Perangkat Daerah
RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

No	IKD	satuan	Kondisi Awal	Target			Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik						
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**											
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,48	4,92	4,98	5,02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase pemenuhan infrastruktur yang berfungsi dalam mendukung kemandirian pangan	97,16 %	98,11 %	99,05 %	100 %
							PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Diversifikasi Pangan Lokal	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rawan Pangan	N/a %	9,09 %	8,33 %	7,57 %
							PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Sampel Pangan Aman yang dikonsumsi	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Produksi Perikanan Non Budidaya	96,10 %	96,38 %	96, 38 %	96,69 %
							PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	92,80 %	93,10 %	93,52 %	94,40 %
							PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pelanggaran yang ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah konsumsi ikan	31,33 Kg/Kapita/Tahun	31,50 Kg /Kapita/Tahun	33 Kg/Kapita/Tahun	35 Kg/Kapita/Tahun
							PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Diawasi	20 %	20 %	20 %	20 %
							PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Dinilai	21 %	21 %	21 %	21 %
							PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PersentaseKoperasi yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	15 %	15 %	15 %	15 %
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentasi Persentase koperasi yang Difasilitasi	21 %	21 %	21 %	21 %
							PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	14 %	14 %	14 %	14 %
							PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan	18 %	18 %	18 %	18 %
							PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota yang dibuat	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Penanaman Modal yang diikuti	100 %	100 %	100 %	100 %

No	IKD	satuan	Kondisi Awal	Target			Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik						
							PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kegiatan pengendalian penanaman modal yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kegiatan Usaha yang mendapat pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal	90 %	95 %	95 %	100 %
							PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi perizinan yang dimanfaatkan	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase peningkatan jumlah wisatawan	5 %	5 %	5 %	5 %
							PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase peningkatan jumlah wisatawan	5 %	5 %	5 %	5 %
							PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Presentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	1 %	1,5 %	1,75 %	2 %
							PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase jenis usaha pariwisata yang berdaya saing	35,7 %	41,5 %	46,75 %	50 %
							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana pertanian yang digunakan	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	85,12 %	10 %	10 %	10 %
							PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanganan bencana pertanian	99,98 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perijinan usaha pertanian yang direkomendasikan	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelembagaan petani yang meningkat Kapasitasnya	0,78 %	0,94 %	1,10 %	1,25 %
							PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase pelaku usaha yang memeperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	90 %	90 %	90 %	90 %
							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Omzet perdagangan	0 milyar	1026 milyar	1089 milyar	1158 milyar

No	IKD	satuan	Kondisi Awal	Target			Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik						
							PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase Kinerja Realisasi Pupuk	0 %	95,84 %	96 %	97 %
							PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Presentase fasilitasi pelaku usaha ekspor	0 %	60 %	60 %	60 %
							PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat Ukur takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku	62,33 %	85 %	85,55 %	86,11 %
							PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitasi Promosi Dagang dan Pemasaran Produk	N/A %	51,94 %	58,44 %	61,04 %
							PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase jumlah dokumen perencanaan dan pembangunan industri yang disusun	33,3 %	50 %	57 %	62,5 %
							PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pemantauan dan pengawasan izin usaha industri di SIINas	75 %	77 %	79 %	80 %
							PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pengelolaan data dalam SIINas	20 %	25 %	25 %	25 %
2	Indeks Gini	Indeks	0,30	≤ 0,30	≤ 0,30	≤ 0,30	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang Pengelolaan SDA	81,33 %	81,58 %	82,08 %	82,83 %
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi	0,27 %	0,6 %	0,66 %	0,74 %
							PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pemenuhan infastruktur pengelolaan sampah	68,57 %	70 %	71,43 %	72,86 %
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapatkan akses ALD	0,41 %	0,39 %	0,42 %	0,45 %
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	65,88 %	70 %	73 %	75 %
							PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Gedung Bangunan Daerah yang Handal	86,73 %	87 %	88,12 %	91,18 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	52,24 %	71,84 %	73,17 %	74,17 %
							PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga Konstruksi yang bersertifikat	59,7 %	63,77 %	68,06 %	72,58 %

No	IKD	satuan	Kondisi Awal	Target			Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik						
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase KKPR yang diterbitkan	77,46 %	82,45 %	82,96 %	83,48 %
								Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
							PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase backlog rumah	8,36 %	8 %	7,5 %	7 %
							PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10Ha yang ditingatkan	0 %	14,11 %	14,11 %	14,11 %
							PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha	3,56 %	6,73 %	9,70 %	12,49 %
							PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU	4 %	5 %	5 %	5 %
							PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi	100 %	10O %	100 %	100 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	V/C Rasio jalan perkotaan	0,3 nilai	0,3 nilai	0,3 nilai	0,3 nilai
								Load Factor Angkutan Sekolah Gratis	100 %	100 %	100 %	100 %
								Persentase Jumlah Kendaraan Angkutan Yang Lulus Uji Kir	98,36 %	99 %	99 %	99 %
								Persentase pemasangan perlengkapan jalan	86,50 %	86,50 %	89,10 %	91,80 %
3	Tingkat Kemiskinan Daerah	%	10,70	10,50	10,37	10,15	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mendapat pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	85 %	85 %	85 %	85 %
							PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial bagi PPKS/ PMKS	85 %	85 %	85 %	85 %
							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS/ PMKS Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	85 %	85 %	85 %	85 %
							PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase PPKS/ PMKS Korban Bencana yang Ditangani	85 %	85 %	85 %	85 %
							PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan TMP	85 %	85 %	85 %	85 %
							PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase desa dengan Penataan sesuai standar Ketentuan	24 %	24 %	24 %	24 %

No	IKD	satuan	Kondisi Awal	Target			Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik						
							PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa dengan Pelaksanaan Kerja Sama secara Aktif	43 %	87 %	87 %	87 %
							PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang telah menyelenggarakan administrasi Tata kelola Pemerintahan desa sesuai Standar	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa yang Kapasitas Kelembagaannya diberdayakan	32 %	32 %	32 %	32 %
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,93	73,49	73,87	74,25	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Literasi Cakap pada SD	59,86 %	59,87 %	59,90 %	60,00 %
								Angka Partisipasi Murni Kesetaraan (Anak 7-18 Tahun)	93,90 %	94,08 %	94,50 %	95,00 %
								Angka Partisipasi Murni PAUD (Anak Usia 5-6 Tahun)	84 %	87 %	88 %	89 %
								Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (Anak Usia 7-15 Tahun)	89,37 %	87,58 %	88,00 %	88,50 %
								Nilai Karakter Peserta Didik dengan Kemampuan Karakter Berkembang pada SD	2,13 Nilai	2,14 Nilai	2,15 Nilai	2,16 Nilai
								Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Karakter Berkembang pada SMP	2,13 Nilai	2,15 Nilai	2,16 Nilai	2,17 Nilai
								Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Literasi Cakap pada SMP	52.85 %	52,75 %	53,00 %	53,25 %
								Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Numerasi Cakap pada SD	34.23 %	34,47 %	34,75 %	35,00 %
								Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Numerasi Cakap pada SMP	36.30 %	36,53 %	36,75 %	37,00 %
								Prosentase Satuan Pendidikan PAUD Minimal Akreditasi "e B	34.20 %	34 50 %	35,00 %	37,40 %

No	IKD	satuan	Kondisi Awal	Target			Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik						
							PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	1:10 Guru/Siswa	1 Guru : 10 Siswa Guru/Siswa	1 Guru : 10 Siswa Guru/Siswa	1 Guru : 10 Siswa Guru/Siswa
								Rasio Ideal Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1: 14 Guru/Siswa	1 Guru : 14 Siswa Guru/Siswa	1 Guru : 14 Siswa Guru/Siswa	1 Guru : 14 Siswa Guru/Siswa
								Rasio Ideal Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Peserta Didik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama	1:14 Guru/Siswa	1 Guru : 14 Siswa Guru/Siswa	1 Guru : 14 Siswa Guru/Siswa	1 Guru : 14 Siswa Guru/Siswa
								Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Peserta Didik pada Jenjang Sekolah Dasar	1:14 Guru/Siswa	1 Guru : 14 Siswa Guru/Siswa	1 Guru : 14 Siswa Guru/Siswa	1 Guru : 14 Siswa Guru/Siswa
								Rasio Pengawas / Penilik	0 Pengawas/ Lembaga	1 Pengawas : 34 Lembaga Pengawas/Lembaga	1 Pengawas : 27 Lembaga Pengawas/Lembaga	1 Pengawas : 27 Lembaga Pengawas/Lembaga
							PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase Izin Operasional Satuan Pendidikan yang Masih Aktif	80 %	80 %	80 %	80 %
							PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Fasyankes terakreditasi	44 persen	60 persen	70 persen	80 persen
								Prosentase penduduk terdaftar jaminan kesehatan nasional	77,24 persen	78 persen	80 persen	80.5 persen
								Prosentase SPM yang memenuhi target	25 persen	25 persen	40 persen	50 persen
							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase tenakes yang memenuhi standar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
							PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Prosentase sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman yang dinyatakan laik konsumsi	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Keluarga Sehat	0,18 indeks	0,4 indeks	0,5 indeks	0,6 indeks

No	IKD	satuan	Kondisi Awal	Target			Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik						
							PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal	3 Sekolah Siaga Kependudukan	3 Sekolah Siaga Kependudukan	3 Sekolah Siaga Kependudukan	3 Sekolah Siaga Kependudukan
								Persentase Rumah Data Kependudukan yang Terbentuk di Kampung Keluarga Berkualitas yang diregistrasi	70,00 %	84,29 %	92,00 %	98,75 %
							PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Aktif	78,17 %	80,05 %	80,06 %	80,07 %
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK-R)	81,29 %%	89,01 %%	89,02 %%	89,03 %%
								Persentase Usia Nikah Pertama dibawah Usia 21 Tahun	7,51 %	10,20 %	10,10 %	10,00 %
							PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Program Responsif Gender pada Lembaga Pemerintah	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Layanan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Diskriminasi terhadap Perempuan	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga/ Keluarga yang Mendapat Layanan Responsif Gender	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang Mempunyai Data Gender dan Anak	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kecamatan yang Mendapatkan Predikat Kecamatan Layak Anak	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Layanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	75 %	83,5 %	89,5 %	94,5 %
							PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota Pramuka Terlatih	75 %	76,25 %	77,85 %	80,25 %

No	IKD	satuan	Kondisi Awal	Target			Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik						
							PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	20 Cabor	21 Cabor	22 Cabor	23 Cabor
							PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase kunjungan perpustakaan	73,42 %	10 %	10 %	10 %
							PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi kuno milik daerah yang dilestarikan	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,98	4,6	4,55	4,5	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen yang terselesaikan tepat waktu	0 persen	100 persen	0 persen	0 persen
							PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Presentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi klaster	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	72% %	83 %	84 %	85 %
							PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan	20 %	40 %	50 %	60 %
							PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan	90% %	90% %	90% %	90% %
II	**ASPEK DAYA SAING DAERAH:**											
1	Nilai Investasi Daerah	Rp	4.529.076.183.502	1.050.000.000.000	1.365.000.000.000	1.774.500.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota yang dibuat	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Penanaman Modal yang diikuti	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kegiatan pengendalian penanaman modal yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kegiatan Usaha yang mendapat pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal	90 %	95 %	95 %	100 %
							PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi perizinan yang dimanfaatkan	100 %	100 %	100 %	100 %
III	**ASPEK PELAYANAN UMUM:**											
1	Indeks Pendidikan	Indeks	0,63	0,64	0,65	0,66	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Literasi Cakap pada SD	59,86 %	59,87 %	59,90 %	60,00 %
								Angka Partisipasi Murni Kesetaraan (Anak 7-18 Tahun)	93,90 %	94,08 %	94,50 %	95,00 %
								Angka Partisipasi Murni PAUD (Anak Usia 5-6 Tahun)	84 %	87 %	88 %	89 %

No	IKD	satuan	Kondisi Awal	Target			Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik						
								Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (Anak Usia 7-15 Tahun)	89,37 %	87,58 %	88,00 %	88,50 %
								Nilai Karakter Peserta Didik dengan Kemampuan Karakter Berkembang pada SD	2,13 Nilai	2,14 Nilai	2,15 Nilai	2,16 Nilai
								Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Karakter Berkembang pada SMP	2,13 Nilai	2,15 Nilai	2,16 Nilai	2,17 Nilai
								Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Literasi Cakap pada SMP	52.85 %	52,75 %	53,00 %	53,25 %
								Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Numerasi Cakap pada SD	34.23 %	34,47 %	34,75 %	35,00 %
								Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Numerasi Cakap pada SMP	36.30 %	36,53 %	36,75 %	37,00 %
								Prosentase Satuan Pendidikan PAUD Minimal Akreditasi "e B	34.20 %	34 50 %	35,00 %	37,40 %
							PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	1:10 Guru/Siswa	1 Guru : 10 Siswa Guru/Siswa	1 Guru : 10 Siswa Guru/Siswa	1 Guru : 10 Siswa Guru/Siswa
								Rasio Ideal Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1: 14 Guru/Siswa	1 Guru : 14 Siswa Guru/Siswa	1 Guru : 14 Siswa Guru/Siswa	1 Guru : 14 Siswa Guru/Siswa
								Rasio Ideal Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Peserta Didik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama	1:14 Guru/Siswa	1 Guru : 14 Siswa Guru/Siswa	1 Guru : 14 Siswa Guru/Siswa	1 Guru : 14 Siswa Guru/Siswa
								Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Peserta Didik pada Jenjang Sekolah Dasar	1:14 Guru/Siswa	1 Guru : 14 Siswa Guru/Siswa	1 Guru : 14 Siswa Guru/Siswa	1 Guru : 14 Siswa Guru/Siswa

No	IKD	satuan	Kondisi Awal	Target			Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik						
								Rasio Pengawas / Penilik	0 Pengawas/ Lembaga	1 Pengawas : 34 Lembaga Pengawas/Lembaga	1 Pengawas : 27 Lembaga Pengawas/Lembaga	1 Pengawas : 27 Lembaga Pengawas/Lembaga
							PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase Izin Operasional Satuan Pendidikan yang Masih Aktif	80 %	80 %	80 %	80 %
							PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase kunjungan perpustakaan	73,42 %	10 %	10 %	10 %
							PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi kuno milik daerah yang dilestarikan	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Indeks Kesehatan	Indeks	0,8	0,8	0,8	0,8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Fasyankes terakreditasi	44 persen	60 persen	70 persen	80 persen
								Prosentase penduduk terdaftar jaminan kesehatan nasional	77,24 persen	78 persen	80 persen	80.5 persen
								Prosentase SPM yang memenuhi target	25 persen	25 persen	40 persen	50 persen
							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase tenakes yang memenuhi standar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
							PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Prosentase sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman yang dinyatakan laik konsumsi	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Keluarga Sehat	0,18 indeks	0,4 indeks	0,5 indeks	0,6 indeks
							PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal	3 Sekolah Siaga Kependudukan	3 Sekolah Siaga Kependudukan	3 Sekolah Siaga Kependudukan	3 Sekolah Siaga Kependudukan
								Persentase Rumah Data Kependudukan yang Terbentuk di Kampung Keluarga Berkualitas yang diregistrasi	70,00 %	84,29 %	92,00 %	98,75 %
							PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Aktif	78,17 %	80,05 %	80,06 %	80,07 %
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK-R)	81,29 %%	89,01 %%	89,02 %%	89,03 %%
								Persentase Usia Nikah Pertama dibawah Usia 21 Tahun	7,51 %	10,20 %	10,10 %	10,00 %

No	IKD	satuan	Kondisi Awal	Target			Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik						
3	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	82	85	86	87	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang Pengelolaan SDA	81,33 %	81,58 %	82,08 %	82,83 %
								Panjang Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Yang Dipelihara / direhabilitasi	3.0968 Km	1.9 Km	1.9 Km	1.9 Km
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi	0,27 %	0,6 %	0,66 %	0,74 %
							PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pemenuhan infastruktur pengelolaan sampah	68,57 %	70 %	71,43 %	72,86 %
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase peningkatan rumah tangga yang	0,41 %	0,39 %	0,42 %	0,45 %
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	65,88 %	70 %	73 %	75 %
							PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Gedung Bangunan Daerah yang Handal	86,73 %	87 %	88,12 %	91,18 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	52,24 %	71,84 %	73,17 %	74,17 %
							PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga Konstruksi yang bersertifikat	59,7 %	63,77 %	68,06 %	72,58 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase KKPR yang diterbitkan	77,46 %	82,45 %	82,96 %	83,48 %
								Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
4	Persentase Rumah Layak Huni	%	96,44	96,94	97,44	97,94	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase backlog rumah	8,36 %	8 %	7,5 %	7 %
							PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10Ha yang ditingatkan	0 %	14,11 %	14,11 %	14,11 %
							PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha	3,56 %	6,73 %	9,70 %	12,49 %
							PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU	4 %	5 %	5 %	5 %

No	IKD	satuan	Kondisi Awal	Target			Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik						
							PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat	%	100	85	95	100	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	60 %	85 %	95 %	100 %
6	Indeks Risiko Bencana	Indeks	110,96	109,04	107,13	99,5	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana (mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat serta penanganan pasca bencana)	79,5 %	83 %	83,33 %	83,33 %
							PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pembekalan Penangganan Kebakaran dan Non Kebakaran berbasis masyarakat	65,5 %	70 %	72 %	74 %
7	Angka Kemiskinan Ekstrem	%	1,36	0,5	0,3	0,1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mendapat pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	85 %	85 %	85 %	85 %
							PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial bagi PPKS/ PMKS	85 %	85 %	85 %	85 %
							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS/ PMKS Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	85 %	85 %	85 %	85 %
							PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase PPKS/ PMKS Korban Bencana yang Ditangani	85 %	85 %	85 %	85 %
							PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan TMP	85 %	85 %	85 %	85 %
							PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Program Responsif Gender pada Lembaga Pemerintah	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Layanan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Diskriminasi terhadap Perempuan	100 %	100 %	100 %	100 %

No	IKD	satuan	Kondisi Awal	Target			Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik						
8	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,76	93,97	94,04	94,11	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga/ Keluarga yang Mendapat Layanan Responsif Gender	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang Mempunyai Data Gender dan Anak	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kecamatan yang Mendapatkan Predikat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Layanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100 %	100 %	100 %	100 %
9	Tingkat Parrtisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67	67,5	68	68,5	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen yang terselesaikan tepat waktu	0 persen	100 persen	0 persen	0 persen
							PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Presentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi klaster	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	72% %	83 %	84 %	85 %
							PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan	90% %	90% %	90% %	90% %
							PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan	20 %	40 %	50 %	60 %
10	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	95,30	88	89	90	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase pemenuhan infrastruktur yang berfungsi dalam mendukung kemandirian pangan	97,16 %	98,11 %	99,05 %	100 %
							PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Diversifikasi Pangan Lokal	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rawan Pangan	N/a %	9,09 %	8,33 %	7,57 %
							PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Sampel Pangan Aman yang dikonsumsi	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Produksi Perikanan Non Budidaya	96,10 %	96,38 %	96, 38 %	96,69 %
							PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	92,80 %	93,10 %	93,52 %	94,40 %
							PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pelanggaran yang ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah konsumsi ikan	31,33 Kg/Kapita/Tahun	31,50 Kg /Kapita/Tahun	33 Kg/Kapita/Tahun	35 Kg/Kapita/Tahun

No	IKD	satuan	Kondisi Awal	Target			Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik						
11	Indeks Kualitas Air	Indeks	61,61	59,51	59,56	59,58	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase rincian teknis yang diverifikasi	75 %	75 %	75 %	75 %
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	79,45	80,85	80,85	80,87	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang menjalankan pelestarian LH	100 %	100 %	100 %	100 %
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	54,91	55,99	56	56,1	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga yang mendapat penghargaan	70 %	70 %	70 %	70 %
							PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang terkelola	70 %	70 %	70 %	70 %
							PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	80 %	80 %	80 %	80 %
							PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase sample pengujian berkualitas baik	60 %	60 %	60 %	60 %
							PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemenuhan target RTH	1,06 %	1,08 %	1,11 %	1,13 %
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap pelaksanaan rekomendasi dalam dokumen persetujuan lingkungan	58 %	63 %	63 %	63 %
							PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %
12	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7421	0,7795	0,7869	0,7969	PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase desa dengan Penataan sesuai standar Ketentuan	24 %	24 %	24 %	24 %
							PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa dengan Pelaksanaan Kerja Sama secara Aktif	43 %	87 %	87 %	87 %
							PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang telah menyelenggarakan administrasi Tata kelola Pemerintahan desa sesuai Standar	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa yang Kapasitas Kelembagaannya diberdayakan	32 %	32 %	32 %	32 %
								V/C Rasio jalan perkotaan	0,3 nilai	0,3 nilai	0,3 nilai	0,3 nilai

No	IKD	satuan	Kondisi Awal	Target			Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik						
13	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Nilai	23,61	22,5	22	21,5	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Load Factor Angkutan Sekolah Gratis	100 %	100 %	100 %	100 %
								Persentase Jumlah Kendaraan Angkutan Yang Lulus Uji Kir	98,36 %	99 %	99 %	99 %
								Persentase pemasangan perlengkapan jalan	86,50 %	86,50 %	89,10 %	91,80 %
14	Pertumbuhan koperasi sehat	%	0,8	0,95	1,11	1,25	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Diawasi	20 %	20 %	20 %	20 %
							PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Dinilai	21 %	21 %	21 %	21 %
							PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PersentaseKoperasi yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	15 %	15 %	15 %	15 %
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentasi Persentase koperasi yang Difasilitasi	21 %	21 %	21 %	21 %
15	Rata rata peningkatan Volume usaha mikro	%	10	15	20	25	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	14 %	14 %	14 %	14 %
							PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan	18 %	18 %	18 %	18 %
16	Jumlah pemuda berprestasi	Orang	68	70	72	74	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	75 %	83,5 %	89,5 %	94,5 %
							PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota Pramuka Terlatih	75 %	76,25 %	77,85 %	80,25 %
							PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	20 Cabor	21 Cabor	22 Cabor	23 Cabor
17	Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan	%	27,03	29,73	32,43	35,14	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase SDM pemaju kebudayaan yang terbina	35,14 %	36,25 %	36,75 %	37,14 %
							PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase seni budaya yang dikembangkan	72,97 %	78,00 %	78,25 %	78,55 %
							PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presentase komunitas pegiat sejarah yang aktif	90 %	92,25 %	93,10 %	95,45 %
							PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	31,50 %	32,50 %	33,50 %	34,50 %
							PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan pengunjung museum	2 %	2 %	2 %	2 %
							PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase peningkatan jumlah wisatawan	5 %	5 %	5 %	5 %
							PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase peningkatan jumlah wisatawan	5 %	5 %	5 %	5 %

No	IKD	satuan	Kondisi Awal	Target			Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik						
18	Rata-rata lama tinggal wisatawan	hari	0,2	0,25	0,29	0,33	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Presentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	1 %	1,5 %	1,75 %	2 %
							PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase jenis usaha pariwisata yang berdaya saing	35,7 %	41,5 %	46,75 %	50 %
19	Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	11,7	11,8	11,9	12	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase pelaku usaha yang memeperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	90 %	90 %	90 %	90 %
							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Omzet perdagangan	0 milyar	1026 milyar	1089 milyar	1158 milyar
							PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase Kinerja Realisasi Pupuk	0 %	95,84 %	96 %	97 %
							PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Presentase fasilitasi pelaku usaha ekspor	0 %	60 %	60 %	60 %
							PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat Ukur takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku	62,33 %	85 %	85,55 %	86,11 %
							PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitasi Promosi Dagang dan Pemasaran Produk	N/A %	51,94 %	58,44 %	61,04 %
20	Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan	%	5,3	5,4	5,5	5,6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase jumlah dokumen perencanaan dan pembangunan industri yang disusun	33,3 %	50 %	57 %	62,5 %
							PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pemantauan dan pengawasan izin usaha industri di SIINas	75 %	77 %	79 %	80 %
							PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pengelolaan data dalam SIINas	20 %	25 %	25 %	25 %
21	Persentase penanganan konflik sosial	%	80	82	82	84	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang berperan aktif dalam penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	80 %	80 %	80 %	80 %
							PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan	80 %	80 %	80 %	80 %
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang aktif dalam pembangunan	80 %	80 %	81 %	82 %

No	IKD	satuan	Kondisi Awal	Target			Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik						
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase peningkatan dan pemahaman masyarakat terhadap ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	80 %	80 %	81 %	82 %
							PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional	80 %	80 %	81 %	82 %
22	Nilai SAKIP	Nilai	66,59	69,25	72,02	74,9	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase outcome program pembangunan daerah dengan predikat capaian kinerja minimal tinggi	72,23 %	76 %	78,5 %	81 %
							PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase sasaran kinerja urusan pemerintahan pada Renstra Perangkat Daerah dengan predikat capaian kinerja minimal tinggi	80,76 %	81 %	82 %	83 %
							PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	80 %	100 %	100 %	100 %
								Persentase Hasil inovasi dan teknologi daerah yang dikembangkan.	56 %	57 %	57 %	58 %
							PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap kebijakan kearsipan	33 OPD	38 OPD	48 OPD	52 OPD
							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase penggunaan arsip yang bersifat tertutup	100 %	100 %	100 %	100 %
								Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	77,60 Indeks	77,62 Indeks	77,63 Indeks	77,65 Indeks

No	IKD	satuan	Kondisi Awal	Target			Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik						
23	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan dokumen keuangan daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat waktu	917004 WP	667000 WP	992700 WP	997600 WP
								Jumlah Wajib Pajak Baru	2869 WP	2000 WP	386000 WP	386500 WP
								Persentase realisasi pajak daerah	100 %	100 %	100 %	100 %
								Persentase realisasi retribusi daerah yang dikelola	100 %	100 %	100 %	100 %
								Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Pelayanan pajak derah	85 %	85 %	85,25 %	85,5 %
24	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,111	3,15	3,2	3,25	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan unsur SPIP	60 %	60 %	70 %	80 %
							PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan FCP (Fraud Control Planning)	NA %	10 %	15 %	20 %
25	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,32	3,5	3,6	3,7	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Persidangan dan Per undang-undangan	0 Nilai	83 Nilai	84 Nilai	85 Nilai
								Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	0 Nilai	83 Nilai	84 Nilai	85 Nilai
								Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %	100 %	100 %
								Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum	0 Nilai	83 Nilai	84 Nilai	85 Nilai

No	IKD	satuan	Kondisi Awal	Target			Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik						
								Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Program dan Keuangan	0 Nilai	83 Nilai	84 Nilai	85 Nilai
							PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prosentase Cakupan Kepemilikan KTP	99,40 %	99,50 %	99,60 %	99,70 %
								Prosentase Cakupan Kepemilikan KIA	50,00 %	50,00 %	60,00 %	70,00 %
							PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	93,00 %	93,50 %	94,00 %	94,50 %
							PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Instansi yang melakukan Pemanfaatan data kependudukan	0,27 %	0,27 %	0,33 %	0,40 %
							PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Perkembangan data kependudukan tiap tahun	1.191.828 data	1.191.828 data	1.248.581 data	1.305.334 data
								Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	80,25 nilai	80,30 nilai	80,35 nilai	80,40 nilai
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG DILAKSANAKAN DENGAN TERTIB	95 %	95 %	95 %	95 %
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BAGOR	95 %	95 %	95 %	95 %
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG	95 %	95 %	95 %	95 %
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PERMASALAHAN TRANTIBUM YANG DIKOORDINASIKAN PENANGANANNYA DENGAN FORKOPIMCAM SERTA TOGA/TOMAS	95 %	95 %	95 %	95 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE LEM BAGA/ORGANISASI MASYARAKAT YANG AKTIF DALAM PENYELEN GGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	95 %	95 %	95 %	95 %

No	IKD	satuan	Kondisi Awal	Target			Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik						
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa / Kelurahan cepat berkembang	92,55% %	93 %	95 %	97 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	12/bl %	97 %	98 %	99 %
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase permasalahan Trantibum yang ditangani	88,64 %	89 %	90 %	91 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	100% %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	11 lembaga	11 lembaga	11 lembaga	11 lembaga
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	19 desa	19 desa	19 desa	19 desa
								Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	65 Nilai	70 Nilai	75 Nilai	75 Nilai
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	95 %	95 %	95 %	95 %

No	IKD	satuan	Kondisi Awal	Target			Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik						
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	85 %	85 %	85 %	85 %
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa/ kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di wilayah Kecamatan Gondang	85 %	85 %	85 %	85 %
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase permasalahan trantibum yang ditangani	85 %	85 %	85 %	85 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase lembaga/organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan di kecamatan	85 %	85 %	85 %	85 %
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	80 %	90 %	90 %	90 %
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	90 %	90 %	90 %	90 %
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	90 %	90 %	90 %	90 %
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	99,64 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	67,06 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

No	IKD	satuan	Kondisi Awal	Target			Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik						
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	98,55 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	98,41 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	72,73 %	81,82 %	90,91 %	100 %

No	IKD	satuan	Kondisi Awal	Target			Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik						
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	86,09 %	86,09 %	86,09 %	86,09 %
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	30 %	30 %	30 %	30 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Dengan Tertib	75 %	76 %	78 %	80 %
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan Di Wilayah Kecamatan Ngetos	56 %	60 %	65 %	70 %

No	IKD	satuan	Kondisi Awal	Target			Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik						
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Permasalahan Trantibum Yang Dikoordinasikan Penanganannya Dengan Forkopimcam serta Toga/Tomas	0 %	80 %	80 %	80 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	78 %	80 %	82 %	85 %
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Cepat Berkembang	76 %	80 %	83 %	85 %
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/kelurahan Cepat Berkembang	95 %	95 %	95 %	95 %
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	85 %	85 %	85 %	85 %
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	85 %	85 %	85 %	85 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Lembaga/Organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	95 %	95 %	95 %	95 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	90 %	90 %	90 %	90 %
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	90 %	90 %	90 %	90 %
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	90 %	90 %	90 %	90 %
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	90 %	90 %	90 %	90 %

No	IKD	satuan	Kondisi Awal	Target			Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik						
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	90 %	90 %	90 %	90 %
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan cepat berkembang	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan tertib	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif dalam Proses Pembangunan di Kecamatan	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Permasalahan Trantibum yang ditangani	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	79,02 %	80 %	82 %	84 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	80,19 %	83 %	84 %	85 %
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	83,40 %	85 %	86 %	87 %
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase permasalahan trantibum yang ditangani	64,63 %	66 %	67 %	68 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persestase lembaga/organisasi masyarakat yang aktif penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	79,42 %	81 %	83 %	85 %
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa/kelurahan cepat Berkembang	86 persen	86 persen	87 persen	88 persen

No	IKD	satuan	Kondisi Awal	Target			Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik						
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan tertib	86 persen	87 persen	88 persen	89 persen
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam proses Pembangunan diwilayah Kecamatan Prambon	86 persen	86 persen	87 persen	88 persen
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Permasalahan Trantibum yang di tangani	86 persen	86 persen	87 persen	88 persen
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase lembaga /organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	86 persen	86 persen	87 persen	88 persen
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	80 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	70 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	90 %	90 %	90 %	90 %
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	75 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase lembaga /organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	97,06 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Dengan Tertib	98,6 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %

No	IKD	satuan	Kondisi Awal	Target			Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik						
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	100 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Permasalahan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Yang Ditangani	- %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	131 %	100 %	100 %	100 %
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase permasalahan trantibum yang di tangani	12 %	9 %	9 %	9 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase lembaga/organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	12 %	9 %	9 %	9 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan tertib	86,28 Nilai	87 Nilai	88 Nilai	89 Nilai
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	86,28 Nilai	87 Nilai	88 Nilai	89 Nilai
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	86,28 Nilai	87 Nilai	88 Nilai	89 Nilai
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	96 %	96 %	96 %	96 %
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	96 %	96 %	96 %	96 %
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	96 %	96 %	96 %	96 %
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	96 %	96 %	96 %	96 %

No	IKD	satuan	Kondisi Awal	Target			Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik						
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	96 %	96 %	96 %	96 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan tertib	95.83 %	95.83 %	97.16 %	97.83 %
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan di wilayah Kecamatan Wilangan	86.59 %	86.59 %	87.00 %	88.00 %
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	78.23 %	78.23 %	78.50 %	80.00 %
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	99.37 %	99.37 %	99.50 %	100.00 %
26	Indeks SPBE	Indeks	2,18	2,5	2,75	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Aspek TIK	1,75 Nilai	2,00 Nilai	2,50 Nilai	3,50 Nilai
							PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Skor keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Nganjuk	51,18 Nilai	60 Nilai	80 Nilai	90 Nilai
								Nilai AKIP Perangkat Daerah	78,15 Nilai	81 Nilai	86 Nilai	91 Nilai
								Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80,44 Nilai	81 Nilai	82 Nilai	83 Nilai
							PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Nilai tingkat kematangan layanan data terbuka	1 Nilai	2 Nilai	3 Nilai	3 Nilai
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang ada pada pemerintah daerah	86 %	87 %	88 %	89 %
27	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	46,43	55	63	71	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN dengan predikat kinerja pegawai minimal baik	98 %	99 %	100 %	100 %
								Persentase ASN yang update SIMAS	58 %	70 %	80 %	90 %

No	IKD	satuan	Kondisi Awal	Target			Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural	Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik						
								Persentase Nilai Ujian Kompetensi Minimal Cukup Optimal	70 %	75 %	77 %	80 %
								Persentase pemenuhan formasi Jabatan struktural	72 %	75 %	80 %	85 %
							PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti	60 %	70 %	75 %	80 %

Tabel 6.7 Program Prioritas Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											
		Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Literasi Cakap pada SD	59,86 %	59,87 %	157.942.024.488	59,90 %	158.440.024.488	60,00 %	158.530.024.488	60,00 %	474.912.073.464	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni Kesetaraan (Anak 7-18 Tahun)	93,90 %	94,08 %	-	94,50 %	-	95,00 %	-	95,00 %	-	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni PAUD (Anak Usia 5-6 Tahun)	84 %	87 %	-	88 %	-	89 %	-	89 %	-	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (Anak Usia 7-15 Tahun)	89,37 %	87,58 %	-	88,00 %	-	88,50 %	-	88,50 %	-	Dinas Pendidikan
		Nilai Karakter Peserta Didik dengan Kemampuan Karakter Berkembang pada SD	2,13 Nilai	2,14 Nilai	-	2,15 Nilai	-	2,16 Nilai	-	2,16 Nilai	-	Dinas Pendidikan
		Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Karakter Berkembang pada SMP	2,13 Nilai	2,15 Nilai	-	2,16 Nilai	-	2,17 Nilai	-	2,17 Nilai	-	Dinas Pendidikan
		Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Literasi Cakap pada SMP	52.85 %	52,75 %	-	53,00 %	-	53,25 %	-	53,25 %	-	Dinas Pendidikan
		Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Numerasi Cakap pada SD	34.23 %	34,47 %	-	34,75 %	-	35,00 %	-	35,00 %	-	Dinas Pendidikan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Numerasi Cakap pada SMP	36.30 %	36,53 %	-	36,75 %	-	37,00 %	-	37,00 %	-	Dinas Pendidikan
		Prosentase Satuan Pendidikan PAUD Minimal Akreditasi ≥ B	34.20 %	37,80 %	-	34,50 %	-	35,00 %	-	35,00 %	-	Dinas Pendidikan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN											
		Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	1:10 Guru/Siswa	1 Guru : 10 Siswa	28.200.108.950	1 Guru : 10 Siswa	38.504.909.600	1 Guru : 10 Siswa	44.280.646.040	1 Guru : 10 Siswa	110.985.664.590	Dinas Pendidikan
		Rasio Ideal Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1: 14 Guru/Siswa	1 Guru : 14 Siswa	-	1 Guru : 14 Siswa	-	1 Guru : 14 Siswa	-	1 Guru : 14 Siswa	-	Dinas Pendidikan
		Rasio Ideal Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Peserta Didik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama	1:14 Guru/Siswa	1 Guru : 14 Siswa	-	1 Guru : 14 Siswa	-	1 Guru : 14 Siswa	-	1 Guru : 14 Siswa	-	Dinas Pendidikan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Peserta Didik pada Jenjang Sekolah Dasar	1:14 Guru/Siswa	1 Guru : 14 Siswa	-	1 Guru : 14 Siswa	-	1 Guru : 14 Siswa	-	1 Guru : 14 Siswa	-	Dinas Pendidikan
		Rasio Pengawas/Penilik	0 Pengawas/ Lembaga	1 Pengawas : 34 Lembaga	-	1 Pengawas : 27 Lembaga	-	1 Pengawas : 27 Lembaga	-	1 Pengawas : 27 Lembaga	-	Dinas Pendidikan
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN											
		Prosentase Izin Operasional Satuan Pendidikan yang Masih Aktif	80 %	80 %	180.000.000	80 %	180.000.000	80 %	180.000.000	80 %	540.000.000	Dinas Pendidikan
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
		Prosentase Fasyankes terakreditasi	44 persen	60 persen	55.342.000.000	70 persen	63.003.000.000	80 persen	69.600.000.000	80 persen	187.945.000.000	Dinas Kesehatan, Puskesmas
		Prosentase penduduk terdaftar jaminan kesehatan nasional	77,24 persen	78 persen	42.950.000.000	80 persen	47.250.000.000	80.5 persen	52.000.000.000	80.5 persen	142.200.000.000	Dinas Kesehatan, Puskesmas
		Prosentase SPM yang memenuhi target	25 persen	25 persen	35.499.846.185	40 persen	43.356.971.264	50 persen	51.779.308.850	50 persen	130.636.126.299	Dinas Kesehatan, Puskesmas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											
		Prosentase tenakes yang memenuhi standar	100 persen	100 persen	305.000.000	100 persen	324.500.000	100 persen	350.000.000	100 persen	979.500.000	Dinas Kesehatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN											
		Prosentase sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman yang dinyatakan laik konsumsi	100 %	100 %	407.000.000	100 %	440.000.000	100 %	468.000.000	100 %	1.315.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											
		Indeks Keluarga Sehat	0,18 indeks	0,4 indeks	1.260.000.000	0,5 indeks	1.350.000.000	0,6 indeks	1.470.000.000	0,6 indeks	4.080.000.000	Dinas Kesehatan
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)											
		Persentase Panjang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	81,33 %	81,58 %	22.522.500.000	82,08 %	22.522.500.000	82,83 %	22.522.500.000	82,83 %	67.567.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM											
		Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi	0,27 %	0,6 %	2.000.000.000	0,66 %	2.000.000.000	0,74 %	2.000.000.000	0,74 %	6.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL											
		Persentase pemenuhan infastruktur pengelolaan sampah	68,57 %	70 %	1.500.000.000	71,43 %	1.500.000.000	72,86 %	1.500.000.000	72,86 %	4.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH											
		Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapatkan akses ALD	0,41 %	0,39 %	700.000.000	0,42 %	700.000.000	0,45 %	900.000.000	0,45 %	2.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE											
		Persentase drainase kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	65,88 %	70 %	15.200.000.000	73 %	15.200.000.000	75 %	15.200.000.000	75 %	45.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG											
		Persentase Gedung Bangunan Daerah yang Handal	86,73 %	87 %	29.842.302.519	88,12 %	29.842.302.519	91,18 %	29.842.302.519	91,18 %	89.526.907.557	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN											
		Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	52,24 %	71,84 %	157.007.280.723	73,17 %	161.776.424.308	74,17 %	166.950.950.764	74,17 %	485.734.655.795	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI											
		Persentase tenaga Konstruksi yang bersertifikat	59,7 %	63,77 %	100.000.000	68,06 %	100.000.000	72,58 %	100.000.000	72,58 %	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG											
		Persentase KKPR yang diterbitkan	77,46 %	82,45 %	2.500.000.000	82,96 %	3.000.000.000	83,48 %	3.000.000.000	83,48 %	8.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN											
		Persentase backlog rumah	8,36 %	8 %	2.580.000.000	7,5 %	2.980.000.000	7 %	3.680.000.000	7 %	9.240.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN											
		Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10Ha yang ditingatkan	0 %	14,11 %	5.847.000.000	14,11 %	5.542.000.000	14,11 %	5.517.000.000	42,33 %	16.906.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH											
		Persentase unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10Ha	3,56 %	6,73 %	9.450.000.000	9,70 %	9.450.000.000	12,49 %	9.450.000.000	12,49 %	28.350.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)											
		Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU	4 %	5 %	4.956.000.000	5 %	4.956.000.000	5 %	4.524.000.000	15 %	14.436.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH											
		Persentase Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi	100 %	10O %	775.000.000	100 %	960.000.000	100 %	985.000.000	100 %	2.720.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	60 %	85 %	3.794.794.000	95 %	3.733.752.800	100 %	4.480.503.360	100 %	12.009.050.160	Satuan Polisi Pamong Praja
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA											
		Persentase Penanggulangan Bencana (mitigasi dan kesiapsiagaan,penanganan darurat serta penanganan pasca bencana)	79,5 %	83 %	2.177.702.000	83,33 %	2.357.750.000	83,33 %	2.543.750.000	83,33 %	7.079.202.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN											
		Persentase Pembekalan Penangganan Kebakaran dan Non Kebakaran berbasis masyarakat	65,5 %	70 %	2.884.054.000	72 %	3.230.436.500	74 %	3.302.640.500	74 %	9.417.131.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL											
		Persentase PSKS yang mendapat pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	85 %	85 %	427.720.437	85 %	449.106.459	85 %	471.561.782	85 %	1.348.388.678	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											
		Persentase Rehabilitasi Sosial bagi PPKS/ PMKS	85 %	85 %	3.663.546.965	85 %	4.029.901.662	85 %	4.432.891.828	85 %	12.126.340.455	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL											
		Persentase PPKS/PMKS Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	85 %	85 %	8.489.738.084	85 %	9.338.711.892	85 %	10.272.583.082	85 %	28.101.033.058	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA											
		Persentase PPKS/ PMKS Korban Bencana yang Ditangani	85 %	85 %	285.703.936	85 %	314.274.330	85 %	345.701.763	85 %	945.680.029	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN											
		Persentase Pengelolaan TMP	85 %	85 %	59.405.842	85 %	62.376.134	85 %	65.494.940	85 %	187.276.916	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN											
		Persentase Program Responsif Gender pada Lembaga Pemerintah	100 %	100 %	318.405.500	100 %	353.875.775	100 %	389.844.563	100 %	1.062.125.838	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN											
		Persentase Layanan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Diskriminasi terhadap Perempuan	100 %	100 %	486.900.000	100 %	511.245.000	100 %	536.807.249	100 %	1.534.952.249	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA											
		Persentase Lembaga/ Keluarga yang Mendapat Layanan Responsif Gender	100 %	100 %	210.000.000	100 %	218.000.000	100 %	225.000.000	100 %	653.000.000	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK											
		Persentase Perangkat Daerah yang Mempunyai Data Gender dan Anak	100 %	100 %	27.530.000	100 %	28.656.500	100 %	29.200.000	100 %	85.386.500	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)											
		Persentase Kecamatan yang Mendapatkan Predikat Kecamatan Layak Anak	100 %	100 %	707.073.352	100 %	739.177.019	100 %	772.885.870	100 %	2.219.136.241	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK											
		Persentase Layanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100 %	100 %	915.600.000	100 %	961.380.000	100 %	1.009.449.000	100 %	2.886.429.000	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA											
		Persentase dokumen yang terselesaikan tepat waktu	0 persen	100 persen	150.000.000	0 persen	-	0 persen	-	100 persen	150.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA											
		Presentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi klaster	100 %	100 %	2.050.000.000	100 %	2.060.000.000	100 %	1.897.400.000	100 %	6.007.400.000	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA											
		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	72% %	83 %	1.358.250.000	84 %	1.497.500.000	85 %	1.735.000.000	85 %	4.590.750.000	Dinas Tenaga Kerja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL											
		Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan	90% %	90% %	1.128.550.000	90% %	1.669.750.000	90% %	1.875.060.000	90% %	4.673.360.000	Dinas Tenaga Kerja
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI											
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI											
		Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan	20 %	40 %	808.000.000	50 %	808.000.000	60 %	808.000.000	60 %	2.424.000.000	Dinas Tenaga Kerja
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN											
		Persentase pemenuhan infrastruktur yang berfungsi dalam mendukung kemandirian pangan	97,16 %	98,11 %	1.310.000.000	99,05 %	1.310.000.000	100 %	1.310.000.000	100 %	3.930.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT											
		Persentase Diversifikasi Pangan Lokal	100 %	100 %	1.040.000.000	100 %	1.040.000.000	100 %	1.040.000.000	100 %	3.120.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN											
		Persentase Desa Rawan Pangan	N/a %	9,09 %	70.000.000	8,33 %	70.000.000	7,57 %	70.000.000	7,57 %	210.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN											
		Persentase Sampel Pangan Aman yang dikonsumsi	100 %	100 %	80.000.000	100 %	80.000.000	100 %	80.000.000	100 %	240.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP											
		Persentase Produksi Perikanan Non Budidaya	96,10 %	96,38 %	190.000.000	96, 38 %	190.000.000	96,69 %	190.000.000	96,69 %	570.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA											
		Persentase Produksi Perikanan Budidaya	92,80 %	93,10 %	1.230.000.000	93,52 %	1.230.000.000	94,40 %	1.230.000.000	94,40 %	3.690.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN											
		Persentase Pelanggaran yang ditangani	100 %	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	90.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN											
		Jumlah konsumsi ikan	31,33 Kg/Kapita/Tahun	31,50 Kg /Kapita/Tahun	1.050.000.000	33 Kg/Kapita/Tahun	1.050.000.000	35 Kg/Kapita/Tahun	1.050.000.000	35 Kg/Kapita/Tahun	3.150.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)											
		Persentase rincian teknis yang diverifikasi	75 %	75 %	600.000.000	75 %	600.000.000	75 %	600.000.000	75 %	1.800.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											
		Persentase lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang menjalankan pelestarian LH	100 %	100 %	600.000.000	100 %	600.000.000	100 %	600.000.000	100 %	1.800.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											
		Persentase lembaga yang mendapat penghargaan	70 %	70 %	200.000.000	70 %	200.000.000	70 %	200.000.000	70 %	600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN											
		Persentase volume sampah yang terkelola	70 %	70 %	7.050.000.000	70 %	7.050.000.000	70 %	7.050.000.000	70 %	21.150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP											
		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	80 %	80 %	600.000.000	80 %	600.000.000	80 %	600.000.000	80 %	1.800.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											
		Persentase sample pengujian berkualitas baik	60 %	60 %	1.050.000.000	60 %	1.050.000.000	60 %	1.050.000.000	60 %	3.150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)											
		Persentase pemenuhan target RTH	1,06 %	1,08 %	8.100.000.000	1,11 %	8.100.000.000	1,13 %	8.100.000.000	1,13 %	24.300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)											
		Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap pelaksanaan rekomendasi dalam dokumen persetujuan lingkungan	58 %	63 %	200.000.000	63 %	200.000.000	63 %	200.000.000	63 %	600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP											
		Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK											
		Prosentase Cakupan Kepemilikan KTP	99,40 %	99,50 %	470.000.000	99,60 %	670.000.000	99,70 %	759.000.000	100 %	1.899.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Prosentase Cakupan Kepemilikan KIA	50,00 %	50,00 %	-	60,00 %	-	70,00 %	-	100 %	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL											
		Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	93,00 %	93,50 %	301.500.000	94,00 %	346.500.000	94,50 %	575.000.000	100 %	1.223.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN											
		Jumlah Instansi yang melakukan Pemanfaatan data kependudukan	0,27 %	0,27 %	445.500.000	0,33 %	475.500.000	0,40 %	515.500.000	0,47 %	1.436.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN											
		Jumlah Perkembangan data kependudukan tiap tahun	1.191.828 data	1.191.828 data	40.000.000	1.248.581 data	40.000.000	1.305.334 data	40.000.000	1.362.087 data	120.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA											
		Presentase desa dengan Penataan sesuai standar Ketentuan	24 %	24 %	266.000.000	24 %	332.000.000	24 %	398.000.000	24 %	996.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA											
		Persentase Desa dengan Pelaksanaan Kerja Sama secara Aktif	43 %	87 %	200.000.000	87 %	209.000.000	87 %	218.000.000	87 %	627.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase Desa yang telah menyelenggarakan administrasi Tata kelola Pemerintahan desa sesuai Standar	100 %	100 %	4.426.000.000	100 %	4.505.000.000	100 %	4.590.000.000	100 %	13.521.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT											
		Persentase Desa yang Kapasitas Kelembagaannya diberdayakan	32 %	32 %	662.000.000	32 %	740.000.000	32 %	770.000.000	32 %	2.172.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK											
		Cakupan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal	3 Sekolah Siaga Kependudukan	3 Sekolah Siaga Kependudukan	127.285.000	3 Sekolah Siaga Kependudukan	129.150.000	3 Sekolah Siaga Kependudukan	134.765.000	9 Sekolah Siaga Kependudukan	391.200.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Rumah Data Kependudukan yang Terbentuk di Kampung Keluarga Berkualitas yang diregistrasi	70,00 %	84,29 %	593.000.000	92,00 %	620.500.000	98,75 %	650.500.000	98,75 %	1.864.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)											
		Persentase Peserta KB Aktif	78,17 %	80,05 %	9.632.960.000	80,06 %	10.091.150.000	80,07 %	10.297.300.000	80,07 %	30.021.410.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)											
		Persentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK-R)	81,29 %%	89,01 %%	700.000.000	89,02 %%	770.000.000	89,03 %%	847.000.000	89,03 %%	2.317.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Usia Nikah Pertama dibawah Usia 21 Tahun	7,51 %	10,20 %	410.000.000	10,10 %	415.500.000	10,00 %	420.500.000	10,00 %	1.246.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)											
		V/C Rasio jalan perkotaan	0,3 nilai	0,3 nilai	9.837.659.200	0,3 nilai	10.326.312.300	0,3 nilai	10.743.312.300	0,3 nilai	30.907.283.800	Dinas Perhubungan
		Load Factor Angkutan Sekolah Gratis	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	Dinas Perhubungan
		Persentase Jumlah Kendaraan Angkutan Yang Lulus Uji Kir	98,36 %	99 %	-	99 %	-	99 %	-	99 %	-	Dinas Perhubungan
		Persentase pemasangan perlengkapan jalan	81,68 %	86,50 %	-	89,10 %	-	91,80 %	-	91,80 %	-	Dinas Perhubungan
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA											
		Nilai Aspek TIK	1,75 Nilai	2,00 Nilai	16.300.000.000	2,50 Nilai	17.900.000.000	3,50 Nilai	21.600.000.000	3,50 Nilai	55.800.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK											
		Skor keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Nganjuk	51,18 Nilai	60 Nilai	2.180.000.000	80 Nilai	2.297.000.000	90 Nilai	2.503.000.000	90 Nilai	6.980.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL											
		Nilai tingkat kematangan layanan data terbuka	1 Nilai	2 Nilai	500.000.000	3 Nilai	600.000.000	3 Nilai	700.000.000	3 Nilai	1.800.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI											
		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang ada pada pemerintah daerah	86 %	87 %	700.000.000	88 %	350.000.000	89 %	400.000.000	89 %	1.450.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI											
		Persentase Koperasi yang Diawasi	20 %	20 %	132.000.000	20 %	132.400.000	20 %	132.800.000	20 %	397.200.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI											
		Persentase Koperasi yang Dinilai	21 %	21 %	117.200.000	21 %	117.600.000	21 %	118.000.000	21 %	352.800.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN											
		PersentaseKoperasi yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	15 %	15 %	111.500.000	15 %	111.700.000	15 %	111.900.000	15 %	335.100.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI											
		Persentasi Persentase koperasi yang Difasilitasi	21 %	21 %	27.500.000	21 %	27.700.000	21 %	27.900.000	21 %	83.100.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)											
		Prosentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	14 %	14 %	191.000.000	14 %	191.800.000	14 %	192.600.000	14 %	575.400.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM											
		Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan	18 %	18 %	225.100.000	18 %	225.300.000	18 %	225.500.000	18 %	675.900.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL											
		Persentase Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota yang dibuat	100 %	100 %	180.000.000	100 %	180.000.000	100 %	180.000.000	100 %	540.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL											
		Persentase Promosi Penanaman Modal yang diikuti	100 %	100 %	200.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	700.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL											
		Persentase kegiatan pengendalian penanaman modal yang dilaksanakan	100 %	100 %	75.000.000	100 %	75.000.000	100 %	75.000.000	100 %	225.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL											
		Persentase Kegiatan Usaha yang mendapat pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal	90 %	95 %	217.927.500	95 %	217.927.500	100 %	217.927.500	100 %	653.782.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL											
		Persentase data dan informasi perizinan yang dimanfaatkan	100 %	100 %	50.000.000	100 %	75.000.000	100 %	75.000.000	100 %	200.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN											
		Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	75 %	83,5 %	1.970.000.000	89,5 %	2.740.000.000	94,5 %	3.425.000.000	94,5 %	8.135.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN											
		Persentase anggota Pramuka Terlatih	75 %	76,25 %	350.000.000	77,85 %	450.000.000	80,25 %	562.500.000	80,25 %	1.362.500.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN											
		Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	20 Cabor	21 Cabor	5.000.000.000	22 Cabor	6.120.000.000	23 Cabor	7.650.000.000	23 Cabor	18.770.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN											
		Persentase SDM pemaju kebudayaan yang terbina	35,14 %	36,25 %	1.710.000.000	36,75 %	2.155.000.000	37,14 %	2.668.750.000	37,14 %	6.533.750.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL											
		Persentase seni budaya yang dikembangkan	72,97 %	78,00 %	140.000.000	78,25 %	190.000.000	78,55 %	237.500.000	78,55 %	567.500.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH											
		Presentase komunitas pegiat sejarah yang aktif	90 %	92,25 %	90.000.000	93,10 %	170.000.000	95,45 %	212.500.000	95,50 %	472.500.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA											
		Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	31,50 %	32,50 %	2.300.000.000	33,50 %	2.600.000.000	34,50 %	3.250.000.000	34,50 %	8.150.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN											
		Persentase peningkatan pengunjung museum	2 %	2 %	800.000.000	2 %	950.000.000	2 %	1.187.500.000	2 %	2.937.500.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA											
		Prosentase peningkatan jumlah wisatawan	5 %	5 %	5.009.744.750	5 %	5.895.000.000	5 %	7.368.750.000	5 %	18.273.494.750	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA											
		Prosentase peningkatan jumlah wisatawan	5 %	5 %	6.470.000.000	5 %	7.300.000.000	5 %	9.125.000.000	5 %	22.895.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL											
		Presentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	1 %	1,5 %	1.200.000.000	1,75 %	1.300.000.000	2 %	1.487.500.000	2 %	3.987.500.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF											
		Persentase jenis usaha pariwisata yang berdaya saing	35,7 %	41,5 %	4.500.000.000	46,75 %	5.340.000.000	50 %	6.675.000.000	50 %	16.515.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN											
		Persentase kunjungan perpustakaan	73,42 %	10 %	1.357.520.000	10 %	1.434.020.000	10 %	1.525.520.000	10 %	4.317.060.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO											
		Persentase koleksi kuno milik daerah yang dilestarikan	100 %	100 %	46.000.000	100 %	40.000.000	100 %	45.000.000	100 %	131.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP											
		Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap kebijakan kearsipan	33 OPD	38 OPD	421.000.000	48 OPD	440.000.000	52 OPD	466.038.152	52 OPD	1.327.038.152	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP											
		Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan	100 %	100 %	104.000.000	100 %	104.000.000	100 %	104.000.000	100 %	312.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP											
		Persentase penggunaan arsip yang bersifat tertutup	100 %	100 %	25.000.000	100 %	26.000.000	100 %	27.000.000	100 %	78.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN											
		Persentase Sarana pertanian yang digunakan	100 %	100 %	4.210.000.000	100 %	4.790.000.000	100 %	5.510.000.000	100 %	14.510.000.000	Dinas Pertanian
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN											
		Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	100 %	100 %	5.510.000.000	100 %	5.580.000.000	100 %	5.680.000.000	100 %	16.770.000.000	Dinas Pertanian
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER											
		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	85,12 %	10 %	1.150.000.000	10 %	1.195.000.000	10 %	1.230.000.000	10 %	3.575.000.000	Dinas Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN											
		Persentase pengendalian dan penanganan bencana pertanian	99,98 %	100 %	1.305.000.000	100 %	1.325.000.000	100 %	1.345.000.000	100 %	3.975.000.000	Dinas Pertanian
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN											
		Persentase perijinan usaha pertanian yang direkomendasikan	100 %	100 %	150.000.000	100 %	200.000.000	100 %	245.000.000	100 %	595.000.000	Dinas Pertanian
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN											
		Persentase kelembagaan petani yang meningkat Kapasitasnya	0,78 %	0,94 %	1.200.000.000	1,10 %	1.200.000.000	1,25 %	1.200.000.000	1,25 %	3.600.000.000	Dinas Pertanian
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN											
		Prosentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	90 %	90 %	94.900.000	90 %	103.890.000	90 %	113.779.000	90 %	312.569.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN											
		Omzet perdagangan	0 milyar	1026 milyar	5.909.499.200	1089 milyar	6.770.000.000	1158 milyar	7.540.000.000	1158 milyar	20.219.499.200	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING											
		Prosentase Kinerja Realisasi Pupuk	0 %	95,84 %	260.936.600	96 %	445.270.000	97 %	600.000.000	97 %	1.306.206.600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR											
		Presentase fasilitasi pelaku usaha ekspor	0 %	60 %	550.000.000	60 %	550.000.000	60 %	550.000.000	60 %	1.650.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN											
		Persentase Alat Ukur takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku	62,33 %	85 %	250.000.000	85,55 %	185.000.000	86,11 %	160.000.000	86,11 %	595.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI											
		Persentase Fasilitasi Promosi Dagang dan Pemasaran Produk	N/A %	51,94 %	1.098.000.000	58,44 %	1.375.000.000	61,04 %	1.650.000.000	61,04 %	4.123.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI											
		Persentase jumlah dokumen perencanaan dan pembangunan industri yang disusun	33,3 %	50 %	505.000.000	57 %	745.000.000	62,5 %	945.000.000	62,5 %	2.195.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI											
		Persentase pemantauan dan pengawasan izin usaha industri di SIINas	75 %	77 %	120.000.000	79 %	130.000.000	80 %	130.000.000	80 %	380.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL											
		Persentase pengelolaan data dalam SIINas	20 %	25 %	225.000.000	25 %	100.000.000	25 %	240.000.000	25 %	565.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT											
		Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terimplementasi	100 %	100 %	14.676.142.050	100 %	14.676.142.050	100 %	14.676.142.050	100 %	44.028.426.150	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN											
		Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan yang terimplementasi	100 %	100 %	2.924.004.000	100 %	2.924.004.000	100 %	2.924.004.000	100 %	8.772.012.000	Sekretariat Daerah
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
	SEKRETARIAT DPRD											
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD											
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	0 Nilai	83 Nilai	35.850.000.000	84 Nilai	35.850.000.000	85 Nilai	35.850.000.000	85 Nilai	107.550.000.000	Sekretariat DPRD
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	0 Nilai	83 Nilai	-	84 Nilai	-	85 Nilai	-	85 Nilai	-	Sekretariat DPRD
		Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	Sekretariat DPRD
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum	0 Nilai	83 Nilai	49.072.000.000	84 Nilai	49.072.000.000	85 Nilai	49.072.000.000	85 Nilai	147.216.000.000	Sekretariat DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Program dan Keuangan	0 Nilai	83 Nilai	-	84 Nilai	-	85 Nilai	-	85 Nilai	-	Sekretariat DPRD
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN											
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH											
		Presentase outcome program pembangunan daerah dengan predikat capaian kinerja minimal tinggi	72,23 %	76 %	1.515.000.000	78,5 %	1.520.000.000	81 %	1.138.000.000	81 %	4.173.000.000	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											
		Presentase sasaran kinerja urusan pemerintahan pada Renstra Perangkat Daerah dengan predikat capaian kinerja minimal tinggi	80,76 %	81 %	1.600.000.000	82 %	1.600.000.000	83 %	1.605.000.000	83 %	4.805.000.000	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENELITIAN											
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH											
		Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	80 %	100 %	5.175.000.000	100 %	6.900.000.000	100 %	2.500.000.000	100 %	14.575.000.000	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase Hasil inovasi dan teknologi daerah yang dikembangkan.	56 %	57 %	500.000.000	57 %	575.000.000	58 %	575.000.000	58 %	1.650.000.000	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN											
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH											
		Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan dokumen keuangan daerah sesuai standar	100 %	100 %	528.345.837.000	100 %	538.912.753.000	100 %	549.691.007.000	300 %	1.616.949.597.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH											
		Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD sesuai standar	100 %	100 %	2.225.000.000	100 %	2.250.000.000	100 %	2.275.000.000	300 %	6.750.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH											
		Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat waktu	917004 WP	667000 WP	5.311.000.000	992700 WP	5.520.000.000	997600 WP	4.558.800.000	997600 WP	15.389.800.000	Badan Pendapatan Daerah
		Jumlah Wajib Pajak Baru	2869 WP	2000 WP	-	386000 WP	-	386500 WP	-	386500 WP	-	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase realisasi pajak daerah	110 %	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase realisasi retribusi daerah yang dikelola	192,74 %	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN											
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH											
		Persentase ASN dengan predikat kinerja pegawai minimal baik	98%	99 %	964.000.000	99%	1.174.800.000	99%	1.327.160.000	99%	3.465.960.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan	52%	55%	2.450.000.000	56%	3.165.000.000	57%	3.560.000.000	57%	9.175.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Nilai Ujian Kompetensi Minimal Cukup Optimal	70 %	75 %	2.155.000.000	77 %	2.495.000.000	80 %	2.810.000.000	80 %	7.460.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase pemenuhan formasi Jabatan struktural	72%	75 %	1.500.000.000	80 %	1.750.000.000	85 %	1.950.000.000	85 %	5.200.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											
		Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi minimal 20 JP/tahun	60 %	70 %	4.965.000.000	75 %	5.362.000.000	80 %	5.950.400.000	80 %	16.277.400.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN											
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN											
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan unsur SPIP	60 %	60 %	1.055.000.000	70 %	1.285.000.000	80 %	1.415.000.000	80 %	3.755.000.000	Inspektorat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI											
		Persentase Perangkat Daerah yang melakukan FCP (Fraud Control Planning)	NA %	10 %	875.000.000	15 %	1.090.000.000	20 %	1.130.000.000	20 %	3.095.000.000	Inspektorat
	UNSUR KEWILAYAHAN											
	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN											
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG DILAKSANAKAN DENGAN TERTIB	95 %	95 %	161.178.000	95 %	180.373.800	95 %	187.471.700	95 %	529.023.500	Kecamatan Bagor

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BAGOR	95 %	95 %	781.005.000	95 %	781.005.000	95 %	781.005.000	95 %	2.343.015.000	Kecamatan Bagor
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		PERSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG	95 %	95 %	280.465.100	95 %	283.230.100	95 %	283.230.100	95 %	846.925.300	Kecamatan Bagor
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		PERSENTASE PERMASALAHAN TRANTIBUM YANG DIKOORDINASIKAN PENANGANANNYA DENGAN FORKOPIMCAM SERTA TOGA/TOMAS	95 %	95 %	62.675.000	95 %	62.675.006	95 %	62.675.000	95 %	188.025.006	Kecamatan Bagor

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		PERSENTASE LEMBAGA/ORGANISASI MASYARAKAT YANG AKTIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	95 %	95 %	145.137.800	95 %	145.137.800	95 %	145.137.800	95 %	435.413.400	Kecamatan Bagor
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Prosentase Desa /Kelurahan cepat berkembang	92,55% %	93 %	27.000.000	95 %	27.270.000	97 %	27.542.700	97 %	81.812.700	Kecamatan Baron
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	12/bl %	97 %	91.565.000	98 %	92.480.700	99 %	93.405.600	99 %	277.451.300	Kecamatan Baron
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	100 %	100 %	43.875.000	100 %	44.313.750	100 %	447.568.875	100 %	535.757.625	Kecamatan Baron

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Prosentase permasalahan Trantibum yang ditangani	88,64 %	89 %	35.000.000	90 %	35.350.000	91 %	35.703.500	91 %	106.053.500	Kecamatan Baron
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Prosentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	100% %	100 %	160.000.000	100 %	161.600.000	100 %	163.216.000	100 %	484.816.000	Kecamatan Baron
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	16 Laporan	16 Laporan	125.000.000	16 Laporan	125.000.000	16 Laporan	125.000.000	48 Laporan	375.000.000	Kecamatan Berbek

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	11 lembaga	11 lembaga	148.650.000	11 lembaga	148.650.000	11 lembaga	148.650.000	33 lembaga	445.950.000	Kecamatan Berbek
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	200 Orang	200 Orang	75.585.000	200 Orang	75.585.000	200 Orang	75.585.000	600 Orang	226.755.000	Kecamatan Berbek
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	26 Laporan	26 Laporan	74.339.500	26 Laporan	74.339.500	26 Laporan	74.339.500	78 Laporan	223.018.500	Kecamatan Berbek
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	19 desa	19 desa	62.000.000	19 desa	62.000.000	19 desa	62.000.000	57 desa	186.000.000	Kecamatan Berbek

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	95 %	95 %	255.088.000	95 %	258.088.000	95 %	264.088.000	95 %	777.264.000	Kecamatan Gondang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	85 %	85 %	146.986.400	85 %	153.986.400	85 %	153.986.400	85 %	454.959.200	Kecamatan Gondang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa/ kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di wilayah Kecamatan Gondang	85 %	85 %	53.878.350	85 %	56.878.350	85 %	60.878.350	85 %	171.635.050	Kecamatan Gondang
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase permasalahan trantibum yang ditangani	85 %	85 %	22.170.000	85 %	23.170.000	85 %	24.170.000	85 %	69.510.000	Kecamatan Gondang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persentase lembaga/organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan di kecamatan	85 %	85 %	20.625.000	85 %	22.625.000	85 %	23.625.000	85 %	66.875.000	Kecamatan Gondang
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	100 %	100 %	29.372.000	100 %	29.959.000	100 %	30.559.000	100 %	89.890.000	Kecamatan Jatikalen
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	80 %	90 %	30.221.700	90 %	30.826.134	90 %	31.442.657	90 %	92.490.491	Kecamatan Jatikalen
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	90 %	90 %	30.238.100	90 %	30.842.862	90 %	31.459.719	90 %	92.540.681	Kecamatan Jatikalen

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	100 %	100 %	10.770.750	100 %	10.986.165	100 %	11.205.888	100 %	32.962.803	Kecamatan Jatikalen
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	90 %	90 %	105.965.350	90 %	108.084.657	90 %	110.246.350	90 %	324.296.357	Kecamatan Jatikalen
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Prosentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	99,64 Persen	100 Persen	390.000.000	100 Persen	408.500.000	100 Persen	412.250.000	100 Persen	1.210.750.000	Kecamatan Kertosono
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Prosentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	67,06 Persen	100 Persen	129.500.000	100 Persen	130.750.000	100 Persen	131.750.000	100 Persen	392.000.000	Kecamatan Kertosono

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	98,55 Persen	100 Persen	538.500.000	100 Persen	555.000.000	100 Persen	565.000.000	100 Persen	1.658.500.000	Kecamatan Kertosono
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Prosentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	98,41 Persen	100 Persen	77.500.000	100 Persen	88.750.000	100 Persen	97.500.000	100 Persen	263.750.000	Kecamatan Kertosono
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Prosentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	47.500.000	100 Persen	55.500.000	100 Persen	62.500.000	100 Persen	165.500.000	Kecamatan Kertosono
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	100 %	100 %	52.000.000	100 %	62.900.000	100 %	66.900.000	100 %	181.800.000	Kecamatan Lengkong

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	100 %	100 %	53.756.000	100 %	58.456.000	100 %	58.456.000	100 %	170.668.000	Kecamatan Lengkong
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	100 %	100 %	133.592.000	100 %	131.792.000	100 %	131.792.000	100 %	397.176.000	Kecamatan Lengkong
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	100 %	100 %	41.728.300	100 %	45.728.300	100 %	45.728.300	100 %	133.184.900	Kecamatan Lengkong
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	100 %	100 %	59.742.000	100 %	60.742.000	100 %	60.742.000	100 %	181.226.000	Kecamatan Lengkong

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	100 %	100 %	139.961.000	100 %	145.000.000	100 %	159.961.000	100 %	444.922.000	Kecamatan Loceret
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	72,73 %	81,82 %	120.000.000	90,91 %	130.000.000	100 %	140.000.000	100 %	390.000.000	Kecamatan Loceret
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	100 %	100 %	80.000.000	100 %	92.000.000	100 %	100.000.000	100 %	272.000.000	Kecamatan Loceret
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	100 %	100 %	217.460.500	100 %	200.460.500	100 %	210.460.500	100 %	628.381.500	Kecamatan Loceret

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	100 %	100 %	135.000.000	100 %	189.000.000	100 %	220.000.000	100 %	544.000.000	Kecamatan Loceret
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	100 %	100 %	2.271.220.585	100 %	2.372.526.681	100 %	2.449.251.442	100 %	7.092.998.708	Kecamatan Nganjuk
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	86,09 %	86,09 %	72.341.450	86,09 %	75.341.450	86,09 %	78.341.450	90,00 %	226.024.350	Kecamatan Nganjuk
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di kecamatan	100 %	100 %	4.866.925.199	100 %	4.919.642.050	100 %	5.006.707.743	100 %	14.793.274.992	Kecamatan Nganjuk
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	30 %	30 %	17.609.850	30 %	19.109.850	30 %	20.609.850	35 %	57.329.550	Kecamatan Nganjuk

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	100 %	100 %	15.612.500	100 %	17.112.500	100 %	18.612.500	100 %	51.337.500	Kecamatan Nganjuk
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Persentase Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Dengan Tertib	75 %	76 %	54.425.500	78 %	54.425.500	80 %	54.425.500	82 %	163.276.500	Kecamatan Ngetos
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan Di Wilayah Kecamatan Ngetos	56 %	60 %	65.261.500	65 %	65.261.500	70 %	65.261.500	70 %	195.784.500	Kecamatan Ngetos
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase Permasalahan Trantibum Yang Dikoordinasikan Penanganannya Dengan Forkopimcam serta Toga/Tomas	0 %	80 %	12.000.000	80 %	12.000.000	80 %	12.000.000	80 %	36.000.000	Kecamatan Ngetos

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	78 %	80 %	74.050.000	82 %	74.050.000	85 %	74.050.000	88 %	222.150.000	Kecamatan Ngetos
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase Desa Cepat Berkembang	76 %	80 %	54.775.000	83 %	54.775.000	85 %	54.775.000	85 %	164.325.000	Kecamatan Ngetos
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase Desa/kelurahan Cepat Berkembang	95 %	95 %	79.360.000	95 %	79.360.000	95 %	79.360.000	95 %	238.080.000	Kecamatan Ngluyu
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	85 %	85 %	43.000.000	85 %	43.000.000	85 %	43.000.000	85 %	129.000.000	Kecamatan Ngluyu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	85 %	85 %	25.000.000	85 %	25.000.000	85 %	25.000.000	85 %	75.000.000	Kecamatan Ngluyu
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persentase Lembaga/Organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	95 %	95 %	25.000.000	95 %	25.000.000	95 %	25.000.000	95 %	75.000.000	Kecamatan Ngluyu
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	40.85%	85%	41.582.000	85%	41.582.000	85%	41.582.000	85%	124.746.000	Kecamatan Ngluyu
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	90 %	90 %	160.163.781	90 %	163.367.056	90 %	166.634.397	90 %	490.165.234	Kecamatan Ngronggot

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	90 %	90 %	181.350.085	90 %	184.977.087	90 %	188.676.629	90 %	555.003.801	Kecamatan Ngronggot
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	90 %	90 %	35.210.103	90 %	35.914.305	90 %	36.632.591	90 %	107.756.999	Kecamatan Ngronggot
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	90 %	90 %	25.169.614	90 %	25.673.007	90 %	26.186.467	90 %	77.029.088	Kecamatan Ngronggot
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	90 %	90 %	36.659.106	90 %	37.392.289	90 %	38.140.134	90 %	112.191.529	Kecamatan Ngronggot

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase Desa/Kelurahan cepat berkembang	92 Persen	92 Persen	70.000.000	92 Persen	70.000.000	92 Persen	70.000.000	92 Persen	210.000.000	Kecamatan Pace
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan tertib	92 Persen	92 Persen	110.000.000	92 Persen	110.000.000	92 Persen	110.000.000	92 Persen	330.000.000	Kecamatan Pace
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif dalam Proses Pembangunan di Kecamatan	92 Persen	92 Persen	145.000.000	92 Persen	145.000.000	92 Persen	145.000.000	92 Persen	435.000.000	Kecamatan Pace
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase Permasalahan Trantibum yang ditangani	92 Persen	92 Persen	60.000.000	92 Persen	60.000.000	92 Persen	60.000.000	92 Persen	180.000.000	Kecamatan Pace

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	92 Persen	92 Persen	65.000.000	92 Persen	65.000.000	92 Persen	65.000.000	92 Persen	195.000.000	Kecamatan Pace
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	79,02 %	80 %	41.000.000	82 %	41.000.000	84 %	41.000.000	84 %	123.000.000	Kecamatan Patianrowo
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	80,19 %	83 %	99.000.000	84 %	104.250.000	85 %	109.250.000	85 %	312.500.000	Kecamatan Patianrowo
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	83,40 %	85 %	50.000.000	86 %	60.000.000	87 %	60.000.000	87 %	170.000.000	Kecamatan Patianrowo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase permasalahan trantibum yang ditangani	64,63 %	66 %	25.500.000	67 %	25.500.000	68 %	25.500.000	68 %	76.500.000	Kecamatan Patianrowo
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persestase lembaga/organisasi masyarakat yang aktif penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	79,42 %	81 %	250.000.000	83 %	275.000.000	85 %	305.000.000	85 %	830.000.000	Kecamatan Patianrowo
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Prosentase Desa/kelurahan cepat Berkembang	86 persen	86 persen	21.929.057	87 persen	21.929.057	88 persen	21.929.057	88 persen	65.787.171	Kecamatan Prambon
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Prosentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan tertib	86 persen	87 persen	68.000.000	88 persen	68.000.000	89 persen	68.000.000	89 persen	204.000.000	Kecamatan Prambon

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam proses Pembangunan diwilayah Kecamatan Prambon	86 persen	86 persen	20.750.000	87 persen	20.750.000	88 persen	20.750.000	88 persen	62.250.000	Kecamatan Prambon
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Prosentase Permasalahan Trantibum yang di tangani	86 persen	86 persen	29.992.970	87 persen	29.992.970	88 persen	29.992.970	88 persen	89.978.910	Kecamatan Prambon
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Prosentase lembaga /organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	86 persen	86 persen	33.964.500	87 persen	33.964.500	88 persen	33.964.500	88 persen	101.893.500	Kecamatan Prambon
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	80 %	100 %	38.607.500	100 %	63.600.000	100 %	80.000.000	100 %	182.207.500	Kecamatan Rejoso

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	70 %	100 %	81.000.000	100 %	74.724.000	100 %	74.724.000	100 %	230.448.000	Kecamatan Rejoso
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	90 %	90 %	171.227.300	90 %	171.227.300	90 %	171.227.300	90 %	513.681.900	Kecamatan Rejoso
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	75 %	100 %	31.000.000	100 %	33.000.000	100 %	33.000.000	100 %	97.000.000	Kecamatan Rejoso
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persentase lembaga /organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	97,06 %	100 %	108.872.200	100 %	108.872.200	100 %	108.872.200	100 %	326.616.600	Kecamatan Rejoso

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Persentase Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Dengan Tertib	98,6 %	100 %	116.735.000	100 %	116.735.000	100 %	116.735.000	100 %	350.205.000	Kecamatan Sawahan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan	100 %	100 %	51.670.000	100 %	51.670.000	100 %	51.670.000	100 %	155.010.000	Kecamatan Sawahan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	100 %	100 %	59.567.500	100 %	59.567.500	100 %	59.567.500	100 %	178.702.500	Kecamatan Sawahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase Permasalahan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Yang Ditangani	- %	100 %	21.000.000	100 %	21.000.000	100 %	21.000.000	100 %	63.000.000	Kecamatan Sawahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	131 %	100 %	120.067.800	100 %	120.067.800	100 %	120.067.800	100 %	360.203.400	Kecamatan Sawahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase permasalahan trantibum yang di tangani	12 %	9 %	35.000.000	9 %	35.000.000	9 %	35.000.000	9 %	105.000.000	Kecamatan Sukomoro
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persentase lembaga/organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	12 %	9 %	55.000.000	9 %	55.000.000	9 %	55.000.000	9 %	165.000.000	Kecamatan Sukomoro
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Presentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan tertib	86,28 Nilai	87 Nilai	70.000.000	88 Nilai	70.000.000	89 Nilai	70.000.000	89 Nilai	210.000.000	Kecamatan Sukomoro
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	86,28 Nilai	87 Nilai	975.000.000	88 Nilai	975.000.000	89 Nilai	975.000.000	89 Nilai	2.925.000.000	Kecamatan Sukomoro

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Presentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	86,28 Nilai	87 Nilai	200.000.000	88 Nilai	200.000.000	89 Nilai	200.000.000	89 Nilai	600.000.000	Kecamatan Sukomoro
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	96 %	96 %	116.836.735	96 %	127.836.735	96 %	127.836.735	96 %	372.510.205	Kecamatan Tanjunganom
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	96 %	96 %	600.075.000	96 %	659.075.000	96 %	719.075.000	96 %	1.978.225.000	Kecamatan Tanjunganom
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	96 %	96 %	489.465.000	96 %	488.465.000	96 %	489.465.000	96 %	1.467.395.000	Kecamatan Tanjunganom

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	96 %	96 %	8.565.000	96 %	8.565.000	96 %	8.565.000	96 %	25.695.000	Kecamatan Tanjunganom
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	96 %	96 %	44.390.000	96 %	44.390.000	96 %	44.390.000	96 %	133.170.000	Kecamatan Tanjunganom
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Presentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan tertib	95.83 %	95.83 %	71.547.800	97.16 %	72.974.800	97.83 %	74.434.600	97.83 %	218.957.200	Kecamatan Wilangan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan di wilayah Kecamatan Wilangan	86.59 %	86.59 %	54.456.400	87.00 %	55.544.600	88.00 %	56.656.400	88.00 %	166.657.400	Kecamatan Wilangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	78.23 %	78.23 %	201.774.500	78.50 %	205.808.500	80.00 %	209.923.500	80.00 %	617.506.500	Kecamatan Wilangan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	94.95 %	94.95 %	65.314.800	95.00 %	66.621.800	96.00 %	67.953.800	96.00 %	199.890.400	Kecamatan Wilangan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	99.37 %	99.37 %	85.890.000	99.50 %	87.607.000	100.00 %	89.359.000	100.00 %	262.856.000	Kecamatan Wilangan
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN											
		Persentase masyarakat yang berperan aktif dalam penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	80 %	80 %	988.760.000	80 %	1.056.110.000	80 %	1.029.500.000	80 %	3.074.370.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas		Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural		Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK											
		Persentase partai politik yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan	80 %	80 %	91.661.206.900	80 %	3.286.263.400	80 %	3.286.339.144	80 %	98.233.809.444	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN											
		Persentase ormas yang aktif dalam pembangunan	80 %	80 %	850.960.000	81 %	1.093.500.000	82 %	1.274.500.000	82 %	3.218.960.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA											
		Persentase peningkatan dan pemahaman masyarakat terhadap ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	80 %	80 %	332.000.000	81 %	343.250.000	82 %	356.450.000	82 %	1.031.700.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL											
		Persentase peningkatan kewaspadaan nasional	80 %	80 %	1.169.600.000	81 %	1.282.350.000	82 %	1.274.062.500	82 %	3.726.012.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah			**1.508.435.225.366**		**1.485.703.203.561**		**1.544.423.101.748**			

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini menyajikan tentang kerangka pendanaan pembangunan dalam rumusan program prioritas yang akan dijabarkan pada renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, dan Perangkat Daerah penanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Target Indikasi Program merupakan target kinerja program-program dalam rangka pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026, sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan di tiap perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rumusan target kinerja program di masing masing urusan wajib/pilihan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber-sumber pendanaan lain.

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan pembangunan akan dicerminkan oleh Kapasitas Riil Keuangan Daerah. Kapasitas riil keuangan daerah berdasarkan pada tabel 7.1 di bawah ini sebesar Rp. 986.991.103.997,- pada tahun 2024, selanjutnya mengalami kenaikan pada tahun 2025 sebesar Rp. 1.056.783.452.742,- dan Rp. 1.124.622.606.821,- pada tahun 2026. Besaran kapasitas riil fiskal ditentukan oleh besarnya total pendapatan dikurangi oleh belanja rutin, wajib dan mengikat di tahun yang sama. Alokasi belanja bidang pendidikan pada tahun 2024-2026 berturut turut adalah

27,73%; 28,06%; 27,46%; alokasi belanja bidang kesehatan sebesar 18,76%; 19,97%; 20,68%; alokasi belanja Bidang pembinaan dan pengawasan sebesar 0,52%; 0,52%; 0,51%. Dengan demikian kebijakan alokasi belanja terkait dengan berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan riil fiskal menjadi isu penting untuk diperhatikan terkait dengan penguatan Kapasitas riil fiskal.

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

NO	Uraian	Proyeksi		
		2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	**986,991,103,997**	**1,056,783,452,742**	**1,124,622,606,821**
I	Prioritas I			
	1. urusan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Palayanan Minimal	598,073,728,129	635,934,941,956	669,759,859,916
II	Prioritas II			
	1. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar	127,301,384,351	134,248,367,893	144,209,452,595
	2. Urusan Pilihan	43,026,080,550	47,837,160,000	55,103,029,000
III	Prioritas III			
	1. urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi PD	218,589,910,967	238,762,982,893	255,550,265,310

7.2 Program Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menetapkan rangkaian program perangkat daerah sesuai dengan Urusan Konkuren (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) serta fungsi penunjang urusan di lingkungan Pemerintah Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Adapun penyusunan program perangkat daerah dalam bab ini merujuk pada (1) Visi dan Misi RPJPD Tahun 2005-2025 Kabupaten Nganjuk, RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur, (2) Evaluasi kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 baik mencakup permasalahan maupun isu strategis, serta (3) Nomenklatur program yang mengacu kepada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta memperhatikan kapasitas riil fiskal Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya, pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing penyelenggaraan urusan pemerintahan telah disertai pagu pendanaan yang sifatnya indikatif sesuai dengan target kinerja dan sasaran yang ingin dicapai. Program Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk beserta target dan pagu indikatifnya untuk tahun perencanaan 2024 – 2026 selengkapnya disajikan pada tabel 7.2 sebagai berikut.

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Nganjuk

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											
		Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Literasi Cakap pada SD	59,86 %	59,87 %	157.942.024.488	59,90 %	158.440.024.488	60,00 %	158.530.024.488	60,00 %	474.912.073.464	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni Kesetaraan (Anak 7-18 Tahun)	93,90 %	94,08 %	-	94,50 %	-	95,00 %	-	95,00 %	-	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni PAUD (Anak Usia 5-6 Tahun)	84 %	87 %	-	88 %	-	89 %	-	89 %	-	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (Anak Usia 7-15 Tahun)	89,37 %	87,58 %	-	88,00 %	-	88,50 %	-	88,50 %	-	Dinas Pendidikan
		Nilai Karakter Peserta Didik dengan Kemampuan Karakter Berkembang pada SD	2,13 Nilai	2,14 Nilai	-	2,15 Nilai	-	2,16 Nilai	-	2,16 Nilai	-	Dinas Pendidikan
		Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Karakter Berkembang pada SMP	2,13 Nilai	2,15 Nilai	-	2,16 Nilai	-	2,17 Nilai	-	2,17 Nilai	-	Dinas Pendidikan
		Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Literasi Cakap pada SMP	52.85 %	52,75 %	-	53,00 %	-	53,25 %	-	53,25 %	-	Dinas Pendidikan
		Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Numerasi Cakap pada SD	34.23 %	34,47 %	-	34,75 %	-	35,00 %	-	35,00 %	-	Dinas Pendidikan
		Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Numerasi Cakap pada SMP	36.30 %	36,53 %	-	36,75 %	-	37,00 %	-	37,00 %	-	Dinas Pendidikan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Prosentase Satuan Pendidikan PAUD Minimal Akreditasi ≥ B	34.20 %	37,80 %	-	34,50 %	-	35,00 %	-	35,00 %	-	Dinas Pendidikan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN											
		Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	1:10 Guru/Siswa	1 Guru : 10 Siswa	28.200.108.950	1 Guru : 10 Siswa	38.504.909.600	1 Guru : 10 Siswa	44.280.646.040	1 Guru : 10 Siswa	110.985.664.590	Dinas Pendidikan
		Rasio Ideal Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1: 14 Guru/Siswa	1 Guru : 14 Siswa	-	1 Guru : 14 Siswa	-	1 Guru : 14 Siswa	-	1 Guru : 14 Siswa	-	Dinas Pendidikan
		Rasio Ideal Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Peserta Didik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama	1:14 Guru/Siswa	1 Guru : 14 Siswa	-	1 Guru : 14 Siswa	-	1 Guru : 14 Siswa	-	1 Guru : 14 Siswa	-	Dinas Pendidikan
		Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Peserta Didik pada Jenjang Sekolah Dasar	1:14 Guru/Siswa	1 Guru : 14 Siswa	-	1 Guru : 14 Siswa	-	1 Guru : 14 Siswa	-	1 Guru : 14 Siswa	-	Dinas Pendidikan
		Rasio Pengawas/Penilik	0 Pengawas/ Lembaga	1 Pengawas : 34 Lembaga	-	1 Pengawas : 27 Lembaga	-	1 Pengawas : 27 Lembaga	-	1 Pengawas : 27 Lembaga	-	Dinas Pendidikan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN											
		Prosentase Izin Operasional Satuan Pendidikan yang Masih Aktif	80 %	80 %	180.000.000	80 %	180.000.000	80 %	180.000.000	80 %	540.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	82,84 Nilai	83,85 Nilai	650.951.969.150	84,00 Nilai	650.520.969.150	84,50 Nilai	650.575.969.150	85,00 Nilai	1.952.048.907.450	Dinas Pendidikan
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
		Prosentase Fasyankes terakreditasi	44 persen	60 persen	55.342.000.000	70 persen	63.003.000.000	80 persen	69.600.000.000	80 persen	187.945.000.000	Dinas Kesehatan, Puskesmas
		Prosentase penduduk terdaftar jaminan kesehatan nasional	77,24 persen	78 persen	42.950.000.000	80 persen	47.250.000.000	80.5 persen	52.000.000.000	80.5 persen	142.200.000.000	Dinas Kesehatan, Puskesmas
		Prosentase SPM yang memenuhi target	25 persen	25 persen	35.499.846.185	40 persen	43.356.971.264	50 persen	51.779.308.850	50 persen	130.636.126.299	Dinas Kesehatan, Puskesmas
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											
		Prosentase tenakes yang memenuhi standar	100 persen	100 persen	305.000.000	100 persen	324.500.000	100 persen	350.000.000	100 persen	979.500.000	Dinas Kesehatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN											
		Prosentase sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman yang dinyatakan laik konsumsi	100 %	100 %	407.000.000	100 %	440.000.000	100 %	468.000.000	100 %	1.315.000.000	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											
		Indeks Keluarga Sehat	0,18 indeks	0,4 indeks	1.260.000.000	0,5 indeks	1.350.000.000	0,6 indeks	1.470.000.000	0,6 indeks	4.080.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	78,35 nilai	80,5 nilai	430.740.954.528	81 nilai	447.714.731.217	81,5 nilai	467.228.737.265	81,5 nilai	1.345.684.423.010	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSD Nganjuk, RSD Kertosono
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)											
		Persentase Panjang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	81,33 %	81,58 %	22.522.500.000	82,08 %	22.522.500.000	82,83 %	22.522.500.000	82,83 %	67.567.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM											
		Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi	0,27 %	0,6 %	2.000.000.000	0,66 %	2.000.000.000	0,74 %	2.000.000.000	0,74 %	6.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL											
		Persentase pemenuhan infastruktur pengelolaan sampah	68,57 %	70 %	1.500.000.000	71,43 %	1.500.000.000	72,86 %	1.500.000.000	72,86 %	4.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH											
		Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapatkan akses ALD	0,41 %	0,39 %	700.000.000	0,42 %	700.000.000	0,45 %	900.000.000	0,45 %	2.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE											
		Persentase drainase kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	65,88 %	70 %	15.200.000.000	73 %	15.200.000.000	75 %	15.200.000.000	75 %	45.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG											
		Persentase Gedung Bangunan Daerah yang Handal	86,73 %	87 %	29.842.302.519	88,12 %	29.842.302.519	91,18 %	29.842.302.519	91,18 %	89.526.907.557	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN											
		Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	52,24 %	71,84 %	157.007.280.723	73,17 %	161.776.424.308	74,17 %	166.950.950.764	74,17 %	485.734.655.795	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI											
		Persentase tenaga Konstruksi yang bersertifikat	59,7 %	63,77 %	100.000.000	68,06 %	100.000.000	72,58 %	100.000.000	72,58 %	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG											
		Persentase KKPR yang diterbitkan	77,46 %	82,45 %	2.500.000.000	82,96 %	3.000.000.000	83,48 %	3.000.000.000	83,48 %	8.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	74,75 Nilai	75 Nilai	32.085.096.000	76 Nilai	32.085.096.000	77 Nilai	32.085.096.000	77 Nilai	96.255.288.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN											
		Persentase backlog rumah	8,36 %	8 %	2.580.000.000	7,5 %	2.980.000.000	7 %	3.680.000.000	7 %	9.240.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN											
		Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10Ha yang ditingatkan	0 %	14,11 %	5.847.000.000	14,11 %	5.542.000.000	14,11 %	5.517.000.000	42,33 %	16.906.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH											
		Persentase unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10Ha	3,56 %	6,73 %	9.450.000.000	9,70 %	9.450.000.000	12,49 %	9.450.000.000	12,49 %	28.350.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)											
		Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU	4 %	5 %	4.956.000.000	5 %	4.956.000.000	5 %	4.524.000.000	15 %	14.436.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	83,3 Nilai	84 Nilai	8.039.035.643	85 Nilai	8.272.576.356	86 Nilai	8.650.787.883	86 Nilai	24.962.399.882	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH											
		Persentase Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi	100 %	10O %	775.000.000	100 %	960.000.000	100 %	985.000.000	100 %	2.720.000.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	60 %	85 %	3.794.794.000	95 %	3.733.752.800	100 %	4.480.503.360	100 %	12.009.050.160	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	78,85 Nilai	85 Nilai	11.145.280.000	90 Nilai	11.738.998.500	93,15 Nilai	14.335.918.200	93,15 Nilai	37.220.196.700	Satuan Polisi Pamong Praja
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA											
		Persentase Penanggulangan Bencana (mitigasi dan kesiapsiagaan,penanganan darurat serta penanganan pasca bencana)	79,5 %	83 %	2.177.702.000	83,33 %	2.357.750.000	83,33 %	2.543.750.000	83,33 %	7.079.202.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	83,30 Nilai	83,50 Nilai	6.146.756.000	83,75 Nilai	5.452.292.000	84,00 Nilai	5.589.494.000	84,00 Nilai	17.188.542.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN											
		Persentase Pembekalan Penangganan Kebakaran dan Non Kebakaran berbasis masyarakat	65,5 %	70 %	2.884.054.000	72 %	3.230.436.500	74 %	3.302.640.500	74 %	9.417.131.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	60,90 Nilai	62 Nilai	8.199.270.500	65 Nilai	8.539.865.000	70 Nilai	8.571.530.000	70 Nilai	25.310.665.500	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL											
		Persentase PSKS yang mendapat pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	85 %	85 %	427.720.437	85 %	449.106.459	85 %	471.561.782	85 %	1.348.388.678	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											
		Persentase Rehabilitasi Sosial bagi PPKS/ PMKS	85 %	85 %	3.663.546.965	85 %	4.029.901.662	85 %	4.432.891.828	85 %	12.126.340.455	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL											
		Persentase PPKS/PMKS Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	85 %	85 %	8.489.738.084	85 %	9.338.711.892	85 %	10.272.583.082	85 %	28.101.033.058	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA											
		Persentase PPKS/ PMKS Korban Bencana yang Ditangani	85 %	85 %	285.703.936	85 %	314.274.330	85 %	345.701.763	85 %	945.680.029	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN											
		Persentase Pengelolaan TMP	85 %	85 %	59.405.842	85 %	62.376.134	85 %	65.494.940	85 %	187.276.916	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	71,55 Nilai	77 Nilai	9.815.975.733	78 Nilai	10.601.253.791	79 Nilai	11.449.354.094	79 Nilai	31.866.583.618	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN											
		Persentase Program Responsif Gender pada Lembaga Pemerintah	100 %	100 %	318.405.500	100 %	353.875.775	100 %	389.844.563	100 %	1.062.125.838	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN											
		Persentase Layanan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Diskriminasi terhadap Perempuan	100 %	100 %	486.900.000	100 %	511.245.000	100 %	536.807.249	100 %	1.534.952.249	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA											
		Persentase Lembaga/ Keluarga yang Mendapat Layanan Responsif Gender	100 %	100 %	210.000.000	100 %	218.000.000	100 %	225.000.000	100 %	653.000.000	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK											
		Persentase Perangkat Daerah yang Mempunyai Data Gender dan Anak	100 %	100 %	27.530.000	100 %	28.656.500	100 %	29.200.000	100 %	85.386.500	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)											
		Persentase Kecamatan yang Mendapatkan Predikat Kecamatan Layak Anak	100 %	100 %	707.073.352	100 %	739.177.019	100 %	772.885.870	100 %	2.219.136.241	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK											
		Persentase Layanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100 %	100 %	915.600.000	100 %	961.380.000	100 %	1.009.449.000	100 %	2.886.429.000	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA											
		Persentase dokumen yang terselesaikan tepat waktu	0 persen	100 persen	150.000.000	0 persen	-	0 persen	-	100 persen	150.000.000	Dinas Tenaga Kerja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA											
		Presentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi klaster	100 %	100 %	2.050.000.000	100 %	2.060.000.000	100 %	1.897.400.000	100 %	6.007.400.000	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA											
		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	72% %	83 %	1.358.250.000	84 %	1.497.500.000	85 %	1.735.000.000	85 %	4.590.750.000	Dinas Tenaga Kerja
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL											
		Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan	90% %	90% %	1.128.550.000	90% %	1.669.750.000	90% %	1.875.060.000	90% %	4.673.360.000	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	70,2 Nilai	80,5 Nilai	6.846.428.000	81 Nilai	6.492.728.000	81,5 Nilai	6.403.171.000	81,5 Nilai	19.742.327.000	Dinas Tenaga Kerja
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI											
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI											
		Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan	20 %	40 %	808.000.000	50 %	808.000.000	60 %	808.000.000	60 %	2.424.000.000	Dinas Tenaga Kerja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN											
		Persentase pemenuhan infrastruktur yang berfungsi dalam mendukung kemandirian pangan	97,16 %	98,11 %	1.310.000.000	99,05 %	1.310.000.000	100 %	1.310.000.000	100 %	3.930.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT											
		Persentase Diversifikasi Pangan Lokal	100 %	100 %	1.040.000.000	100 %	1.040.000.000	100 %	1.040.000.000	100 %	3.120.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN											
		Persentase Desa Rawan Pangan	N/a %	9,09 %	70.000.000	8,33 %	70.000.000	7,57 %	70.000.000	7,57 %	210.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN											
		Persentase Sampel Pangan Aman yang dikonsumsi	100 %	100 %	80.000.000	100 %	80.000.000	100 %	80.000.000	100 %	240.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	74 Nilai	80,05 Nilai	7.000.000.000	80,10 Nilai	7.000.000.000	80,15 Nilai	7.000.000.000	80,15 Nilai	21.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP											
		Persentase Produksi Perikanan Non Budidaya	96,10 %	96,38 %	190.000.000	96, 38 %	190.000.000	96,69 %	190.000.000	96,69 %	570.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA											
		Persentase Produksi Perikanan Budidaya	92,80 %	93,10 %	1.230.000.000	93,52 %	1.230.000.000	94,40 %	1.230.000.000	94,40 %	3.690.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN											
		Persentase Pelanggaran yang ditangani	100 %	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	90.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN											
		Jumlah konsumsi ikan	31,33 Kg/Kapita/Tahun	31,50 Kg /Kapita/Tahun	1.050.000.000	33 Kg/Kapita/Tahun	1.050.000.000	35 Kg/Kapita/Tahun	1.050.000.000	35 Kg/Kapita/Tahun	3.150.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)											
		Persentase rincian teknis yang diverifikasi	75 %	75 %	600.000.000	75 %	600.000.000	75 %	600.000.000	75 %	1.800.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											
		Persentase lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang menjalankan pelestarian LH	100 %	100 %	600.000.000	100 %	600.000.000	100 %	600.000.000	100 %	1.800.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											
		Persentase lembaga yang mendapat penghargaan	70 %	70 %	200.000.000	70 %	200.000.000	70 %	200.000.000	70 %	600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN											
		Persentase volume sampah yang terkelola	70 %	70 %	7.050.000.000	70 %	7.050.000.000	70 %	7.050.000.000	70 %	21.150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP											
		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	80 %	80 %	600.000.000	80 %	600.000.000	80 %	600.000.000	80 %	1.800.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											
		Persentase sample pengujian berkualitas baik	60 %	60 %	1.050.000.000	60 %	1.050.000.000	60 %	1.050.000.000	60 %	3.150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)											
		Persentase pemenuhan target RTH	1,06 %	1,08 %	8.100.000.000	1,11 %	8.100.000.000	1,13 %	8.100.000.000	1,13 %	24.300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)											
		Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap pelaksanaan rekomendasi dalam dokumen persetujuan lingkungan	58 %	63 %	200.000.000	63 %	200.000.000	63 %	200.000.000	63 %	600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP											
		Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	63,20 Nilai	80,5 Nilai	18.015.000.000	80,6 Nilai	18.015.000.000	80,7 Nilai	16.015.000.000	80,7 Nilai	52.045.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK											
		Prosentase Cakupan Kepemilikan KTP	99,40 %	99,50 %	470.000.000	99,60 %	670.000.000	99,70 %	759.000.000	100 %	1.899.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Prosentase Cakupan Kepemilikan KIA	50,00 %	50,00 %	-	60,00 %	-	70,00 %	-	100 %	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL											
		Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	93,00 %	93,50 %	301.500.000	94,00 %	346.500.000	94,50 %	575.000.000	100 %	1.223.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN											
		Jumlah Instansi yang melakukan Pemanfaatan data kependudukan	0,27 %	0,27 %	445.500.000	0,33 %	475.500.000	0,40 %	515.500.000	0,47 %	1.436.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN											
		Jumlah Perkembangan data kependudukan tiap tahun	1.191.828 data	1.191.82 8 data	40.000.000	1.248.58 1 data	40.000.000	1.305.33 4 data	40.000.000	1.362.08 7 data	120.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	80,25 nilai	80,30 nilai	13.394.995.000	80,35 nilai	14.154.800.000	80,40 nilai	14.335.830.000	80,40 nilai	41.885.625.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA											
		Presentase desa dengan Penataan sesuai standar Ketentuan	24 %	24 %	266.000.000	24 %	332.000.000	24 %	398.000.000	24 %	996.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA											
		Persentase Desa dengan Pelaksanaan Kerja Sama secara Aktif	43 %	87 %	200.000.000	87 %	209.000.000	87 %	218.000.000	87 %	627.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase Desa yang telah menyelenggarakan administrasi Tata kelola Pemerintahan desa sesuai Standar	100 %	100 %	4.426.000.000	100 %	4.505.000.000	100 %	4.590.000.000	100 %	13.521.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT											
		Persentase Desa yang Kapasitas Kelembagaannya diberdayakan	32 %	32 %	662.000.000	32 %	740.000.000	32 %	770.000.000	32 %	2.172.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai Sakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	77,45	78	7.584.500.000	78,5	8.212.040.000	79	9.954.068.000	79,00 %	25.750.608.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK											
		Cakupan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal	3 Sekolah Siaga Kependudukan	3 Sekolah Siaga Kependudukan	127.285.000	3 Sekolah Siaga Kependudukan	129.150.000	3 Sekolah Siaga Kependudukan	134.765.000	9 Sekolah Siaga Kependudukan	391.200.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Rumah Data Kependudukan yang Terbentuk di Kampung Keluarga Berkualitas yang diregistrasi	70,00 %	84,29 %	593.000.000	92,00 %	620.500.000	98,75 %	650.500.000	98,75 %	1.864.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)											
		Persentase Peserta KB Aktif	78,17 %	80,05 %	9.632.960.000	80,06 %	10.091.150.000	80,07 %	10.297.300.000	80,07 %	30.021.410.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)											
		Persentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK-R)	81,29 %%	89,01 %%	700.000.000	89,02 %%	770.000.000	89,03 %%	847.000.000	89,03 %%	2.317.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Usia Nikah Pertama dibawah Usia 21 Tahun	7,51 %	10,20 %	410.000.000	10,10 %	415.500.000	10,00 %	420.500.000	10,00 %	1.246.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	77,40 Nilai	82 Nilai	9.098.774.000	84 Nilai	7.924.225.500	86 Nilai	8.094.033.000	86 Nilai	25.117.032.500	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)											
		V/C Rasio jalan perkotaan	0,3 nilai	0,3 nilai	9.837.659.200	0,3 nilai	10.326.312.300	0,3 nilai	10.743.312.300	0,3 nilai	30.907.283.800	Dinas Perhubungan
		Load Factor Angkutan Sekolah Gratis	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	Dinas Perhubungan
		Persentase Jumlah Kendaraan Angkutan Yang Lulus Uji Kir	98,36 %	99 %	-	99 %	-	99 %	-	99 %	-	Dinas Perhubungan
		Persentase pemasangan perlengkapan jalan	81,68 %	86,50 %	-	89,10 %	-	91,80 %	-	91,80 %	-	Dinas Perhubungan
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	84,20 Nilai	91 Nilai	27.594.995.799	91,5 Nilai	27.814.995.799	92 Nilai	28.120.821.961	92 Nilai	83.530.813.559	Dinas Perhubungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA											
		Nilai Aspek TIK	1,75 Nilai	2,00 Nilai	16.300.000.000	2,50 Nilai	17.900.000.000	3,50 Nilai	21.600.000.000	3,50 Nilai	55.800.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK											
		Skor keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Nganjuk	51,18 Nilai	60 Nilai	2.180.000.000	80 Nilai	2.297.000.000	90 Nilai	2.503.000.000	90 Nilai	6.980.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	78,15 Nilai	81 Nilai	6.420.592.550	86 Nilai	6.517.313.942	91 Nilai	5.967.700.000	91 Nilai	18.905.606.492	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80,44 Nilai	81 Nilai	-	82 Nilai	-	83 Nilai	-	83 Nilai	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL											
		Nilai tingkat kematangan layanan data terbuka	1 Nilai	2 Nilai	500.000.000	3 Nilai	600.000.000	3 Nilai	700.000.000	3 Nilai	1.800.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI											
		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang ada pada pemerintah daerah	86 %	87 %	700.000.000	88 %	350.000.000	89 %	400.000.000	89 %	1.450.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI											
		Persentase Koperasi yang Diawasi	20 %	20 %	132.000.000	20 %	132.400.000	20 %	132.800.000	20 %	397.200.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI											
		Persentase Koperasi yang Dinilai	21 %	21 %	117.200.000	21 %	117.600.000	21 %	118.000.000	21 %	352.800.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN											
		PersentaseKoperasi yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	15 %	15 %	111.500.000	15 %	111.700.000	15 %	111.900.000	15 %	335.100.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI											
		Persentasi Persentase koperasi yang Difasilitasi	21 %	21 %	27.500.000	21 %	27.700.000	21 %	27.900.000	21 %	83.100.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)											
		Prosentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	14 %	14 %	191.000.000	14 %	191.800.000	14 %	192.600.000	14 %	575.400.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM											
		Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan	18 %	18 %	225.100.000	18 %	225.300.000	18 %	225.500.000	18 %	675.900.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai Sakip Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	63,3 %	80,5 %	4.158.981.000	81,0 %	4.165.817.000	81,5 %	4.172.417.000	81,5 %	12.497.215.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL											
		Persentase Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota yang dibuat	100 %	100 %	180.000.000	100 %	180.000.000	100 %	180.000.000	100 %	540.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL											
		Persentase Promosi Penanaman Modal yang diikuti	100 %	100 %	200.000.000	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	700.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL											
		Persentase kegiatan pengendalian penanaman modal yang dilaksanakan	100 %	100 %	75.000.000	100 %	75.000.000	100 %	75.000.000	100 %	225.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL											
		Persentase Kegiatan Usaha yang mendapat pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal	90 %	95 %	217.927.500	95 %	217.927.500	100 %	217.927.500	100 %	653.782.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL											
		Persentase data dan informasi perizinan yang dimanfaatkan	100 %	100 %	50.000.000	100 %	75.000.000	100 %	75.000.000	100 %	200.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai Sakip Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	76 Nilai	77 Nilai	7.926.896.245	78 Nilai	5.656.889.775	78 Nilai	5.813.389.275	78 Nilai	19.397.175.295	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN											
		Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	75 %	83,5 %	1.970.000.000	89,5 %	2.740.000.000	94,5 %	3.425.000.000	94,5 %	8.135.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN											
		Persentase anggota Pramuka Terlatih	75 %	76,25 %	350.000.000	77,85 %	450.000.000	80,25 %	562.500.000	80,25 %	1.362.500.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN											
		Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	20 Cabor	21 Cabor	5.000.000.000	22 Cabor	6.120.000.000	23 Cabor	7.650.000.000	23 Cabor	18.770.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	80,75	81,25	8.452.000.000	81,50	9.524.000.000	81,75	11.905.000.000	81,75	29.881.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN											
		Persentase SDM pemaju kebudayaan yang terbina	35,14 %	36,25 %	1.710.000.000	36,75 %	2.155.000.000	37,14 %	2.668.750.000	37,14 %	6.533.750.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL											
		Persentase seni budaya yang dikembangkan	72,97 %	78,00 %	140.000.000	78,25 %	190.000.000	78,55 %	237.500.000	78,55 %	567.500.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH											
		Presentase komunitas pegiat sejarah yang aktif	90 %	92,25 %	90.000.000	93,10 %	170.000.000	95,45 %	212.500.000	95,50 %	472.500.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA											
		Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	31,50 %	32,50 %	2.300.000.000	33,50 %	2.600.000.000	34,50 %	3.250.000.000	34,50 %	8.150.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN											
		Persentase peningkatan pengunjung museum	2 %	2 %	800.000.000	2 %	950.000.000	2 %	1.187.500.000	2 %	2.937.500.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA											
		Prosentase peningkatan jumlah wisatawan	5 %	5 %	5.009.744.750	5 %	5.895.000.000	5 %	7.368.750.000	5 %	18.273.494.750	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA											
		Prosentase peningkatan jumlah wisatawan	5 %	5 %	6.470.000.000	5 %	7.300.000.000	5 %	9.125.000.000	5 %	22.895.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL											
		Presentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	1 %	1,5 %	1.200.000.000	1,75 %	1.300.000.000	2 %	1.487.500.000	2 %	3.987.500.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF											
		Persentase jenis usaha pariwisata yang berdaya saing	35,7 %	41,5 %	4.500.000.000	46,75 %	5.340.000.000	50 %	6.675.000.000	50 %	16.515.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN											
		Persentase kunjungan perpustakaan	73,42 %	10 %	1.357.520.000	10 %	1.434.020.000	10 %	1.525.520.000	10 %	4.317.060.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO											
		Persentase koleksi kuno milik daerah yang dilestarikan	100 %	100 %	46.000.000	100 %	40.000.000	100 %	45.000.000	100 %	131.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP											
		Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap kebijakan kearsipan	33 OPD	38 OPD	421.000.000	48 OPD	440.000.000	52 OPD	466.038.152	52 OPD	1.327.038.152	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP											
		Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan	100 %	100 %	104.000.000	100 %	104.000.000	100 %	104.000.000	100 %	312.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP											
		Persentase penggunaan arsip yang bersifat tertutup	100 %	100 %	25.000.000	100 %	26.000.000	100 %	27.000.000	100 %	78.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai Sakip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	77,60	77,62	7.884.386.720	77,63	7.950.644.855	77,65	7.987.000.000	77,65	23.822.031.575	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN											
		Persentase Sarana pertanian yang digunakan	100 %	100 %	4.210.000.000	100 %	4.790.000.000	100 %	5.510.000.000	100 %	14.510.000.000	Dinas Pertanian
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN											
		Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	100 %	100 %	5.510.000.000	100 %	5.580.000.000	100 %	5.680.000.000	100 %	16.770.000.000	Dinas Pertanian
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER											
		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	85,12 %	10 %	1.150.000.000	10 %	1.195.000.000	10 %	1.230.000.000	10 %	3.575.000.000	Dinas Pertanian
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN											
		Persentase pengendalian dan penanganan bencana pertanian	99,98 %	100 %	1.305.000.000	100 %	1.325.000.000	100 %	1.345.000.000	100 %	3.975.000.000	Dinas Pertanian
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN											
		Persentase perijinan usaha pertanian yang direkomendasikan	100 %	100 %	150.000.000	100 %	200.000.000	100 %	245.000.000	100 %	595.000.000	Dinas Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN											
		Persentase kelembagaan petani yang meningkat Kapasitasnya	0,78 %	0,94 %	1.200.000.000	1,10 %	1.200.000.000	1,25 %	1.200.000.000	1,25 %	3.600.000.000	Dinas Pertanian
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Dinas Pertanian	81 Nilai	81,5 Nilai	36.101.988.900	82 Nilai	37.234.488.900	82,5 Nilai	37.421.988.900	82,5 Nilai	110.758.466.700	Dinas Pertanian
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN											
		Prosentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	90 %	90 %	94.900.000	90 %	103.890.000	90 %	113.779.000	90 %	312.569.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN											
		Omzet perdagangan	0 milyar	1026 milyar	5.909.499.200	1089 milyar	6.770.000.000	1158 milyar	7.540.000.000	1158 milyar	20.219.499.200	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING											
		Prosentase Kinerja Realisasi Pupuk	0 %	95,84 %	260.936.600	96 %	445.270.000	97 %	600.000.000	97 %	1.306.206.600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR											
		Presentase fasilitasi pelaku usaha ekspor	0 %	60 %	550.000.000	60 %	550.000.000	60 %	550.000.000	60 %	1.650.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN											
		Persentase Alat Ukur takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku	62,33 %	85 %	250.000.000	85,55 %	185.000.000	86,11 %	160.000.000	86,11 %	595.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI											
		Persentase Fasilitasi Promosi Dagang dan Pemasaran Produk	N/A %	51,94 %	1.098.000.000	58,44 %	1.375.000.000	61,04 %	1.650.000.000	61,04 %	4.123.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI											
		Persentase jumlah dokumen perencanaan dan pembangunan industri yang disusun	33,3 %	50 %	505.000.000	57 %	745.000.000	62,5 %	945.000.000	62,5 %	2.195.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI											
		Persentase pemantauan dan pengawasan izin usaha industri di SIINas	75 %	77 %	120.000.000	79 %	130.000.000	80 %	130.000.000	80 %	380.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL											
		Persentase pengelolaan data dalam SIINas	20 %	25 %	225.000.000	25 %	100.000.000	25 %	240.000.000	25 %	565.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	85 Nilai	85,20 Nilai	12.278.232.059	85,30 Nilai	13.750.660.786	85,40 Nilai	14.227.424.606	85,40 Nilai	40.256.317.451	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT											
		Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terimplementasi	100 %	100 %	14.676.142.050	100 %	14.676.142.050	100 %	14.676.142.050	100 %	44.028.426.150	Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN											
		Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan yang terimplementasi	100 %	100 %	2.924.004.000	100 %	2.924.004.000	100 %	2.924.004.000	100 %	8.772.012.000	Sekretariat Daerah
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	85,70 Nilai	85,80 Nilai	44.697.240.516	88 Nilai	44.697.240.516	90 Nilai	44.697.240.516	90 Nilai	134.091.721.548	Sekretariat Daerah
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
	SEKRETARIAT DPRD											
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD											
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	0 Nilai	83 Nilai	35.850.000.000	84 Nilai	35.850.000.000	85 Nilai	35.850.000.000	85 Nilai	107.550.000.000	Sekretariat DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Pelayanan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	0 Nilai	83 Nilai	-	84 Nilai	-	85 Nilai	-	85 Nilai	-	Sekretariat DPRD
		Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	Sekretariat DPRD
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum	0 Nilai	83 Nilai	49.072.000.000	84 Nilai	49.072.000.000	85 Nilai	49.072.000.000	85 Nilai	147.216.000.000	Sekretariat DPRD
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Program dan Keuangan	0 Nilai	83 Nilai	-	84 Nilai	-	85 Nilai	-	85 Nilai	-	Sekretariat DPRD
		Nilai SAKIP	80,20 Nilai	80,25 Nilai	-	80,5 Nilai	-	81 Nilai	-	81 Nilai	-	Sekretariat DPRD
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN											
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH											
		Presentase outcome program pembangunan daerah dengan predikat capaian kinerja minimal tinggi	72,23 %	76 %	1.515.000.000	78,5 %	1.520.000.000	81 %	1.138.000.000	81 %	4.173.000.000	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											
		Presentase sasaran kinerja urusan pemerintahan pada Renstra Perangkat Daerah dengan predikat capaian kinerja minimal tinggi	80,76 %	81 %	1.600.000.000	82 %	1.600.000.000	83 %	1.605.000.000	83 %	4.805.000.000	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	75,80 Nilai	77 Nilai	8.302.500.000	79 Nilai	8.490.500.000	80 Nilai	8.770.000.000	80 Nilai	25.563.000.000	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENELITIAN											
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH											
		Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	80 %	100 %	5.175.000.000	100 %	6.900.000.000	100 %	2.500.000.000	100 %	14.575.000.000	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah
		Persentase Hasil inovasi dan teknologi daerah yang dikembangkan.	56 %	57 %	500.000.000	57 %	575.000.000	58 %	575.000.000	58 %	1.650.000.000	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN											
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH											
		Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan dokumen keuangan daerah sesuai standar	100 %	100 %	528.345.837.000	100 %	538.912.753.000	100 %	549.691.007.000	300 %	1.616.949.597.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH											
		Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD sesuai standar	100 %	100 %	2.225.000.000	100 %	2.250.000.000	100 %	2.275.000.000	300 %	6.750.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	80,60 Nilai	82 Nilai	8.673.872.000	84 Nilai	8.847.339.000	86 Nilai	9.024.283.000	252 Nilai	26.545.494.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH											
		Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat waktu	917004 WP	667000 WP	5.311.000.000	992700 WP	5.520.000.000	997600 WP	4.558.800.000	997600 WP	15.389.800.000	Badan Pendapatan Daerah
		Jumlah Wajib Pajak Baru	2869 WP	2000 WP	-	386000 WP	-	386500 WP	-	386500 WP	-	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase realisasi pajak daerah	110 %	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase realisasi retribusi daerah yang dikelola	192,74 %	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Pelayanan pajak derah	85 %	85 %	17.725.092.094	85,25 %	19.571.332.250	85,5 %	19.607.832.250	85,5 %	56.904.256.594	Badan Pendapatan Daerah
		Nilai Sakip SKPD	90 Nilai	90 Nilai	-	90 Nilai	-	90 Nilai	-	90 Nilai	-	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN											
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH											
		Persentase ASN dengan predikat kinerja pegawai minimal baik	98%	99 %	964.000.000	99%	1.174.800.000	99%	1.327.160.000	99%	3.465.960.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan	52%	55%	2.450.000.000	56%	3.165.000.000	57%	3.560.000.000	57%	9.175.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Nilai Ujian Kompetensi Minimal Cukup Optimal	70 %	75 %	2.155.000.000	77 %	2.495.000.000	80 %	2.810.000.000	80 %	7.460.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase pemenuhan formasi Jabatan struktural	72%	75 %	1.500.000.000	80 %	1.750.000.000	85 %	1.950.000.000	85 %	5.200.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											
		Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi minimal 20 JP/tahun	60 %	70 %	4.965.000.000	75 %	5.362.000.000	80 %	5.950.400.000	80 %	16.277.400.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	80 Nilai	80.5	7.641.000.000	81 Nilai	8.449.500.000	81.5 Nilai	9.153.000.000	81.5 Nilai	25.243.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN											
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN											
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan unsur SPIP	60 %	60 %	1.055.000.000	70 %	1.285.000.000	80 %	1.415.000.000	80 %	3.755.000.000	Inspektorat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI											
		Persentase Perangkat Daerah yang melakukan FCP (Fraud Control Planning)	NA %	10 %	875.000.000	15 %	1.090.000.000	20 %	1.130.000.000	20 %	3.095.000.000	Inspektorat
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	82,5 Nilai	85 Nilai	13.815.000.000	87 Nilai	13.484.000.000	89 Nilai	13.435.500.000	89 Nilai	40.734.500.000	Inspektorat
	UNSUR KEWILAYAHAN											
	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN											
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG DILAKSANAKAN DENGAN TERTIB	95 %	95 %	161.178.000	95 %	180.373.800	95 %	187.471.700	95 %	529.023.500	Kecamatan Bagor

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BAGOR	95 %	95 %	781.005.000	95 %	781.005.000	95 %	781.005.000	95 %	2.343.015.000	Kecamatan Bagor
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		PERSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG	95 %	95 %	280.465.100	95 %	283.230.100	95 %	283.230.100	95 %	846.925.300	Kecamatan Bagor
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		PERSENTASE PERMASALAHAN TRANTIBUM YANG DIKOORDINASIKAN PENANGANANNYA DENGAN FORKOPIMCAM SERTA TOGA/TOMAS	95 %	95 %	62.675.000	95 %	62.675.006	95 %	62.675.000	95 %	188.025.006	Kecamatan Bagor
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		PERSENTASE LEMBAGA/ORGANISASI MASYARAKAT YANG AKTIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN	95 %	95 %	145.137.800	95 %	145.137.800	95 %	145.137.800	95 %	435.413.400	Kecamatan Bagor

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Kecamatan	54,2 Nilai	78 Nilai	4.354.424.444	80 Nilai	4.448.161.344	82 Nilai	4.559.075.111	82 Nilai	13.361.660.899	Kecamatan Bagor
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Prosentase Desa /Kelurahan cepat berkembang	92,55% %	93 %	27.000.000	95 %	27.270.000	97 %	27.542.700	97 %	81.812.700	Kecamatan Baron
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	12/bl %	97 %	91.565.000	98 %	92.480.700	99 %	93.405.600	99 %	277.451.300	Kecamatan Baron
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	100 %	100 %	43.875.000	100 %	44.313.750	100 %	447.568.875	100 %	535.757.625	Kecamatan Baron
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Prosentase permasalahan Trantibum yang ditangani	88,64 %	89 %	35.000.000	90 %	35.350.000	91 %	35.703.500	91 %	106.053.500	Kecamatan Baron

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Prosentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	100% %	100 %	160.000.000	100 %	161.600.000	100 %	163.216.000	100 %	484.816.000	Kecamatan Baron
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Kecamatan	84,96 Nilai	86 Nilai	3.482.516.969	87 Nilai	3.523.346.021	88 Nilai	3.564.664.683	88 Nilai	10.570.527.673	Kecamatan Baron
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	16 Laporan	16 Laporan	125.000.000	16 Laporan	125.000.000	16 Laporan	125.000.000	48 Laporan	375.000.000	Kecamatan Berbek
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	11 lembaga	11 lembaga	148.650.000	11 lembaga	148.650.000	11 lembaga	148.650.000	33 lembaga	445.950.000	Kecamatan Berbek

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	200 Orang	200 Orang	75.585.000	200 Orang	75.585.000	200 Orang	75.585.000	600 Orang	226.755.000	Kecamatan Berbek
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	26 Laporan	26 Laporan	74.339.500	26 Laporan	74.339.500	26 Laporan	74.339.500	78 Laporan	223.018.500	Kecamatan Berbek
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	19 desa	19 desa	62.000.000	19 desa	62.000.000	19 desa	62.000.000	57 desa	186.000.000	Kecamatan Berbek
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	65 Nilai	70 Nilai	3.233.550.000	75 Nilai	3.233.550.000	75 Nilai	3.233.550.000	220 Nilai	9.700.650.000	Kecamatan Berbek
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	95 %	95 %	255.088.000	95 %	258.088.000	95 %	264.088.000	95 %	777.264.000	Kecamatan Gondang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	85 %	85 %	146.986.400	85 %	153.986.400	85 %	153.986.400	85 %	454.959.200	Kecamatan Gondang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa/ kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di wilayah Kecamatan Gondang	85 %	85 %	53.878.350	85 %	56.878.350	85 %	60.878.350	85 %	171.635.050	Kecamatan Gondang
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase permasalahan trantibum yang ditangani	85 %	85 %	22.170.000	85 %	23.170.000	85 %	24.170.000	85 %	69.510.000	Kecamatan Gondang
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persentase lembaga/organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan di kecamatan	85 %	85 %	20.625.000	85 %	22.625.000	85 %	23.625.000	85 %	66.875.000	Kecamatan Gondang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Kecamatan	50,4 Nilai	65 Nilai	2.678.622.739	66 Nilai	2.726.170.162	67 Nilai	2.773.988.533	67 Nilai	8.178.781.434	Kecamatan Gondang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	100 %	100 %	29.372.000	100 %	29.959.000	100 %	30.559.000	100 %	89.890.000	Kecamatan Jatikalen
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	80 %	90 %	30.221.700	90 %	30.826.134	90 %	31.442.657	90 %	92.490.491	Kecamatan Jatikalen
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	90 %	90 %	30.238.100	90 %	30.842.862	90 %	31.459.719	90 %	92.540.681	Kecamatan Jatikalen
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	100 %	100 %	10.770.750	100 %	10.986.165	100 %	11.205.888	100 %	32.962.803	Kecamatan Jatikalen

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	90 %	90 %	105.965.350	90 %	108.084.657	90 %	110.246.350	90 %	324.296.357	Kecamatan Jatikalen
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Kecamatan	61,7 Nilai	62 Nilai	2.580.367.331	65 Nilai	2.631.974.678	67 Nilai	2.684.614.171	67 Nilai	7.896.956.180	Kecamatan Jatikalen
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Prosentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	99,64 Persen	100 Persen	390.000.000	100 Persen	408.500.000	100 Persen	412.250.000	100 Persen	1.210.750.000	Kecamatan Kertosono
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Prosentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	67,06 Persen	100 Persen	129.500.000	100 Persen	130.750.000	100 Persen	131.750.000	100 Persen	392.000.000	Kecamatan Kertosono
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	98,55 Persen	100 Persen	538.500.000	100 Persen	555.000.000	100 Persen	565.000.000	100 Persen	1.658.500.000	Kecamatan Kertosono

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Prosentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	98,41 Persen	100 Persen	77.500.000	100 Persen	88.750.000	100 Persen	97.500.000	100 Persen	263.750.000	Kecamatan Kertosono
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Prosentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	47.500.000	100 Persen	55.500.000	100 Persen	62.500.000	100 Persen	165.500.000	Kecamatan Kertosono
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Kecamatan	63,60 Nilai	70 Nilai	4.348.213.158	75 Nilai	4.369.129.269	79 Nilai	4.451.181.854	79 Nilai	13.168.524.281	Kecamatan Kertosono
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	100 %	100 %	52.000.000	100 %	62.900.000	100 %	66.900.000	100 %	181.800.000	Kecamatan Lengkong
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	100 %	100 %	53.756.000	100 %	58.456.000	100 %	58.456.000	100 %	170.668.000	Kecamatan Lengkong

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	100 %	100 %	133.592.000	100 %	131.792.000	100 %	131.792.000	100 %	397.176.000	Kecamatan Lengkong
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	100 %	100 %	41.728.300	100 %	45.728.300	100 %	45.728.300	100 %	133.184.900	Kecamatan Lengkong
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	100 %	100 %	59.742.000	100 %	60.742.000	100 %	60.742.000	100 %	181.226.000	Kecamatan Lengkong
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Kecamatan	63 Nilai	64 Nilai	2.909.666.374	65 Nilai	2.950.176.397	66 Nilai	3.018.185.954	66 Nilai	8.878.028.725	Kecamatan Lengkong

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	100 %	100 %	139.961.000	100 %	145.000.000	100 %	159.961.000	100 %	444.922.000	Kecamatan Loceret
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	72,73 %	81,82 %	120.000.000	90,91 %	130.000.000	100 %	140.000.000	100 %	390.000.000	Kecamatan Loceret
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	100 %	100 %	80.000.000	100 %	92.000.000	100 %	100.000.000	100 %	272.000.000	Kecamatan Loceret
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	100 %	100 %	217.460.500	100 %	200.460.500	100 %	210.460.500	100 %	628.381.500	Kecamatan Loceret

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	100 %	100 %	135.000.000	100 %	189.000.000	100 %	220.000.000	100 %	544.000.000	Kecamatan Loceret
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Kecamatan	60,30 Nilai	83 Nilai	3.631.240.793	84 Nilai	3.770.404.888	85 Nilai	3.857.265.604	85 Nilai	11.258.911.285	Kecamatan Loceret
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	100 %	100 %	2.271.220.585	100 %	2.372.526.681	100 %	2.449.251.442	100 %	7.092.998.708	Kecamatan Nganjuk
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	86,09 %	86,09 %	72.341.450	86,09 %	75.341.450	86,09 %	78.341.450	90,00 %	226.024.350	Kecamatan Nganjuk
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di kecamatan	100 %	100 %	4.866.925.199	100 %	4.919.642.050	100 %	5.006.707.743	100 %	14.793.274.992	Kecamatan Nganjuk
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	30 %	30 %	17.609.850	30 %	19.109.850	30 %	20.609.850	35 %	57.329.550	Kecamatan Nganjuk

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	100 %	100 %	15.612.500	100 %	17.112.500	100 %	18.612.500	100 %	51.337.500	Kecamatan Nganjuk
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Kecamatan Nganjuk	62,45 Nilai	65,00 Nilai	16.224.455.380	65,00 Nilai	16.536.856.035	68,00 Nilai	16.842.042.976	70,00 Nilai	49.603.354.391	Kecamatan Nganjuk
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Persentase Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Dengan Tertib	75 %	76 %	54.425.500	78 %	54.425.500	80 %	54.425.500	82 %	163.276.500	Kecamatan Ngetos
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan Di Wilayah Kecamatan Ngetos	56 %	60 %	65.261.500	65 %	65.261.500	70 %	65.261.500	70 %	195.784.500	Kecamatan Ngetos
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase Permasalahan Trantibum Yang Dikoordinasikan Penanganannya Dengan Forkopimcam serta Toga/Tomas	0 %	80 %	12.000.000	80 %	12.000.000	80 %	12.000.000	80 %	36.000.000	Kecamatan Ngetos

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	78 %	80 %	74.050.000	82 %	74.050.000	85 %	74.050.000	88 %	222.150.000	Kecamatan Ngetos
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase Desa Cepat Berkembang	76 %	80 %	54.775.000	83 %	54.775.000	85 %	54.775.000	85 %	164.325.000	Kecamatan Ngetos
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Kecamatan	65,55 Nilai	70 Nilai	2.092.230.799	73 Nilai	2.139.285.655	75 Nilai	2.187.281.608	80 Nilai	6.418.798.062	Kecamatan Ngetos
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase Desa/kelurahan Cepat Berkembang	95 %	95 %	79.360.000	95 %	79.360.000	95 %	79.360.000	95 %	238.080.000	Kecamatan Ngluyu
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	85 %	85 %	43.000.000	85 %	43.000.000	85 %	43.000.000	85 %	129.000.000	Kecamatan Ngluyu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	85 %	85 %	25.000.000	85 %	25.000.000	85 %	25.000.000	85 %	75.000.000	Kecamatan Ngluyu
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persentase Lembaga/Organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	95 %	95 %	25.000.000	95 %	25.000.000	95 %	25.000.000	95 %	75.000.000	Kecamatan Ngluyu
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Kecamatan	61,10 Nilai	75,5 Nilai	1.799.492.087	78 Nilai	1.839.760.768	80 Nilai	1.880.834.824	80 Nilai	5.520.087.679	Kecamatan Ngluyu
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	40.85%	85%	41.582.000	85%	41.582.000	85%	41.582.000	85%	124.746.000	Kecamatan Ngluyu
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	90 %	90 %	160.163.781	90 %	163.367.056	90 %	166.634.397	90 %	490.165.234	Kecamatan Ngronggot

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	90 %	90 %	181.350.085	90 %	184.977.087	90 %	188.676.629	90 %	555.003.801	Kecamatan Ngronggot
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	90 %	90 %	35.210.103	90 %	35.914.305	90 %	36.632.591	90 %	107.756.999	Kecamatan Ngronggot
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	90 %	90 %	25.169.614	90 %	25.673.007	90 %	26.186.467	90 %	77.029.088	Kecamatan Ngronggot
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	90 %	90 %	36.659.106	90 %	37.392.289	90 %	38.140.134	90 %	112.191.529	Kecamatan Ngronggot
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Kecamatan Ngronggot	75,30 Nilai	76,50 Nilai	3.417.433.917	76,90 Nilai	3.485.782.596	76,95 Nilai	3.555.498.248	76,95 Nilai	10.458.714.761	Kecamatan Ngronggot

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase Desa/Kelurahan cepat berkembang	92 Persen	92 Persen	70.000.000	92 Persen	70.000.000	92 Persen	70.000.000	92 Persen	210.000.000	Kecamatan Pace
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan tertib	92 Persen	92 Persen	110.000.000	92 Persen	110.000.000	92 Persen	110.000.000	92 Persen	330.000.000	Kecamatan Pace
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif dalam Proses Pembangunan di Kecamatan	92 Persen	92 Persen	145.000.000	92 Persen	145.000.000	92 Persen	145.000.000	92 Persen	435.000.000	Kecamatan Pace
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase Permasalahan Trantibum yang ditangani	92 Persen	92 Persen	60.000.000	92 Persen	60.000.000	92 Persen	60.000.000	92 Persen	180.000.000	Kecamatan Pace
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	92 Persen	92 Persen	65.000.000	92 Persen	65.000.000	92 Persen	65.000.000	92 Persen	195.000.000	Kecamatan Pace

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Kecamatan	75 Nilai	75 Nilai	3.151.037.526	75 Nilai	3.080.428.947	75 Nilai	3.223.058.276	75 Nilai	9.454.524.749	Kecamatan Pace
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	79,02 %	80 %	41.000.000	82 %	41.000.000	84 %	41.000.000	84 %	123.000.000	Kecamatan Patianrowo
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	80,19 %	83 %	99.000.000	84 %	104.250.000	85 %	109.250.000	85 %	312.500.000	Kecamatan Patianrowo
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	83,40 %	85 %	50.000.000	86 %	60.000.000	87 %	60.000.000	87 %	170.000.000	Kecamatan Patianrowo
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase permasalahan trantibum yang ditangani	64,63 %	66 %	25.500.000	67 %	25.500.000	68 %	25.500.000	68 %	76.500.000	Kecamatan Patianrowo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persestase lembaga/organisasi masyarakat yang aktif penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	79,42 %	81 %	250.000.000	83 %	275.000.000	85 %	305.000.000	85 %	830.000.000	Kecamatan Patianrowo
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Kecamatan	60,05 Nilai	70 Nilai	3.241.265.000	73 Nilai	3.456.615.000	75 Nilai	3.680.865.000	75 Nilai	10.378.745.000	Kecamatan Patianrowo
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Prosentase Desa/kelurahan cepat Berkembang	86 persen	86 persen	21.929.057	87 persen	21.929.057	88 persen	21.929.057	88 persen	65.787.171	Kecamatan Prambon
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Prosentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan tertib	86 persen	87 persen	68.000.000	88 persen	68.000.000	89 persen	68.000.000	89 persen	204.000.000	Kecamatan Prambon
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam proses Pembangunan diwilayah Kecamatan Prambon	86 persen	86 persen	20.750.000	87 persen	20.750.000	88 persen	20.750.000	88 persen	62.250.000	Kecamatan Prambon

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Prosentase Permasalahan Trantibum yang di tangani	86 persen	86 persen	29.992.970	87 persen	29.992.970	88 persen	29.992.970	88 persen	89.978.910	Kecamatan Prambon
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Prosentase lembaga /organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	86 persen	86 persen	33.964.500	87 persen	33.964.500	88 persen	33.964.500	88 persen	101.893.500	Kecamatan Prambon
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Kecamatan	78,05 Nilai	80,2 Nilai	2.525.324.000	81 Nilai	2.525.324.000	82 Nilai	2.525.324.000	82 Nilai	7.575.972.000	Kecamatan Prambon
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	80 %	100 %	38.607.500	100 %	63.600.000	100 %	80.000.000	100 %	182.207.500	Kecamatan Rejoso
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	70 %	100 %	81.000.000	100 %	74.724.000	100 %	74.724.000	100 %	230.448.000	Kecamatan Rejoso

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	90 %	90 %	171.227.300	90 %	171.227.300	90 %	171.227.300	90 %	513.681.900	Kecamatan Rejoso
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	75 %	100 %	31.000.000	100 %	33.000.000	100 %	33.000.000	100 %	97.000.000	Kecamatan Rejoso
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persentase lembaga /organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	97,06 %	100 %	108.872.200	100 %	108.872.200	100 %	108.872.200	100 %	326.616.600	Kecamatan Rejoso
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Kecamatan Rejoso	51,95 Nilai	75 Nilai	3.107.774.913	80 Nilai	3.157.828.052	85 Nilai	3.213.613.083	85 Nilai	9.479.216.048	Kecamatan Rejoso
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Persentase Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Dengan Tertib	98,6 %	100 %	116.735.000	100 %	116.735.000	100 %	116.735.000	100 %	350.205.000	Kecamatan Sawahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan	100 %	100 %	51.670.000	100 %	51.670.000	100 %	51.670.000	100 %	155.010.000	Kecamatan Sawahan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	100 %	100 %	59.567.500	100 %	59.567.500	100 %	59.567.500	100 %	178.702.500	Kecamatan Sawahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase Permasalahan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Yang Ditangani	- %	100 %	21.000.000	100 %	21.000.000	100 %	21.000.000	100 %	63.000.000	Kecamatan Sawahan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan	131 %	100 %	120.067.800	100 %	120.067.800	100 %	120.067.800	100 %	360.203.400	Kecamatan Sawahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Kecamatan	61,75 Nilai	80 Nilai	2.880.124.071	81 Nilai	2.991.007.359	82 Nilai	3.058.208.312	82 Nilai	8.929.339.742	Kecamatan Sawahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase permasalahan trantibum yang di tangani	12 %	9 %	35.000.000	9 %	35.000.000	9 %	35.000.000	9 %	105.000.000	Kecamatan Sukomoro

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persentase lembaga/organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	12 %	9 %	55.000.000	9 %	55.000.000	9 %	55.000.000	9 %	165.000.000	Kecamatan Sukomoro
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Presentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan tertib	86,28 Nilai	87 Nilai	70.000.000	88 Nilai	70.000.000	89 Nilai	70.000.000	89 Nilai	210.000.000	Kecamatan Sukomoro
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	86,28 Nilai	87 Nilai	975.000.000	88 Nilai	975.000.000	89 Nilai	975.000.000	89 Nilai	2.925.000.000	Kecamatan Sukomoro
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Presentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	86,28 Nilai	87 Nilai	200.000.000	88 Nilai	200.000.000	89 Nilai	200.000.000	89 Nilai	600.000.000	Kecamatan Sukomoro
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Kecamatan	68,24 Nilai	84 Nilai	3.926.784.085	85 Nilai	4.026.784.085	86 Nilai	4.026.784.085	86 Nilai	11.980.352.255	Kecamatan Sukomoro

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	96 %	96 %	116.836.735	96 %	127.836.735	96 %	127.836.735	96 %	372.510.205	Kecamatan Tanjunganom
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	96 %	96 %	600.075.000	96 %	659.075.000	96 %	719.075.000	96 %	1.978.225.000	Kecamatan Tanjunganom
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	96 %	96 %	489.465.000	96 %	488.465.000	96 %	489.465.000	96 %	1.467.395.000	Kecamatan Tanjunganom
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	96 %	96 %	8.565.000	96 %	8.565.000	96 %	8.565.000	96 %	25.695.000	Kecamatan Tanjunganom
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	96 %	96 %	44.390.000	96 %	44.390.000	96 %	44.390.000	96 %	133.170.000	Kecamatan Tanjunganom

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Kecamatan	73,70 Nilai	75 Nilai	4.846.150.000	78 Nilai	4.899.259.635	81 Nilai	4.962.811.462	81 Nilai	14.708.221.097	Kecamatan Tanjunganom
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		Presentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan tertib	95.83 %	95.83 %	71.547.800	97.16 %	72.974.800	97.83 %	74.434.600	97.83 %	218.957.200	Kecamatan Wilangan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan di wilayah Kecamatan Wilangan	86.59 %	86.59 %	54.456.400	87.00 %	55.544.600	88.00 %	56.656.400	88.00 %	166.657.400	Kecamatan Wilangan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											
		Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	78.23 %	78.23 %	201.774.500	78.50 %	205.808.500	80.00 %	209.923.500	80.00 %	617.506.500	Kecamatan Wilangan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
		Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	94.95 %	94.95 %	65.314.800	95.00 %	66.621.800	96.00 %	67.953.800	96.00 %	199.890.400	Kecamatan Wilangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
		Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	99.37 %	99.37 %	85.890.000	99.50 %	87.607.000	100.00 %	89.359.000	100.00 %	262.856.000	Kecamatan Wilangan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Kecamatan	65.40 Nilai	68 Nilai	2.320.816.591	70 Nilai	2.367.239.393	73 Nilai	2.414.584.715	73 Nilai	7.102.640.699	Kecamatan Wilangan
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN											
		Persentase masyarakat yang berperan aktif dalam penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	80 %	80 %	988.760.000	80 %	1.056.110.000	80 %	1.029.500.000	80 %	3.074.370.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK											
		Persentase partai politik yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan	80 %	80 %	91.661.206.900	80 %	3.286.263.400	80 %	3.286.339.144	80 %	98.233.809.444	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN											
		Persentase ormas yang aktif dalam pembangunan	80 %	80 %	850.960.000	81 %	1.093.500.000	82 %	1.274.500.000	82 %	3.218.960.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPD (Capaian 2022)	Capaian Kineja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah
				Tahun-1 2024		Tahun-2 2025		Tahun-3 2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA											
		Persentase peningkatan dan pemahaman masyarakat terhadap ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	80 %	80 %	332.000.000	81 %	343.250.000	82 %	356.450.000	82 %	1.031.700.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL											
		Persentase peningkatan kewaspadaan nasional	80 %	80 %	1.169.600.000	81 %	1.282.350.000	82 %	1.274.062.500	82 %	3.726.012.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	75,90 Nilai	76 Nilai	3.953.161.000	77 Nilai	4.280.630.173	78 Nilai	4.219.540.000	78 Nilai	12.453.331.173	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah			**3.019.876.688.980**		**3.021.022.216.355**		**3.108.948.660.347**			

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja pembangunan setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

8.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran serta merupakan ikhtisar hasil berbagai Program sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi lebih lanjut penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada Tabel VIII.1.

8.2 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

8.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Penentuan capaian indikator tahunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dari gambaran pencapaian

indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, pemerataan pembangunan dan lingkungan.

8.2.2 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, iklim berinvestasi, dan nilai tukar petani.

8.2.3 Aspek Pelayanan Umum

Penentuan capaian indikator tahunan pada aspek Pelayanan Umum dapat diketahui dari gambaran pencapaian indikator Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Pelayanan non Dasar dan Urusan Pilihan

Tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal Periode RPD (Tahun 2022)	RPD			Kondisi Akhir RPD
					2024	2025	2026	
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	%	4,48	4,92	4,98	5,02	5,02
		Indeks Gini	Indeks	0,30	≤ 0,30	≤ 0,30	≤ 0,30	≤ 0,30
		Tingkat Kemiskinan Daerah	Nilai	10,70	10,50	10,37	10,15	10,15
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,98*	4.6	4.55	4.5	4.5
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	67,37	67,38	67,40	67,44	67,44
2	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72.93	73.49	73.87	74.25	74.25

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal Periode RPD (Tahun 2022)	RPD			Kondisi Akhir RPD
					2024	2025	2026	
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,18	63,79	67,40	71,01	71,01
4	Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya.	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	89,649	89,803	89,854	89,871	89,871

Tabel 8.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
				2024	2025	2026	
8.2.1	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT:**						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,48	4,92	4,98	5,02	5,02
2	Indeks Gini	Indeks	0,30	≤ 0,30	≤ 0,30	≤ 0,30	≤ 0,30
3	Tingkat Kemiskinan Daerah	%	10,70	10,50	10,37	10,15	10,15
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,93	73,49	73,87	74,25	74,25
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,98	4,6	4,55	4,5	4,5
8.2.2	**ASPEK DAYA SAING DAERAH:**						
1	Nilai Investasi Daerah	Rp	4,529,076,183,502	1,050,000,000,000	1,365,000,000,000	1,774,500,000,000	1,774,500,000,000

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
				2024	2025	2026	
8.2.3	**ASPEK PELAYANAN UMUM:**						
1	**URUSAN PENDIDIKAN**						
	Indeks Pendidikan	Indeks	0,63	0,64	0,65	0,66	0,66
2	**URUSAN KESEHATAN**						
	Indeks Kesehatan	Indeks	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3	**URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG:**						
	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	82	85	86	87	87

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
				2024	2025	2026	
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						
	Persentase Rumah Layak Huni	%	96,44	96,94	97,44	97,94	97,94
5	**URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						
	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat	%	100	85	95	100	100
	Indeks Risiko Bencana	Indeks	110,96	109,04	107,13	99,50	99,50

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
				2024	2025	2026	
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						
	Angka Kemiskinan Ekstrem	%	1,36	0,5	0,3	0,1	0,1
7	**Urusan Pemerintahan Bidang tenaga Kerja**						
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67	67,5	68	68,5	68,5
8	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**						
	Pertumbuhan koperasi sehat	%	0,8	0,95	1,1	1,25	1,25
	Rata rata peningkatan Volume usaha mikro	%	10	15	20	25	25

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
				2024	2025	2026	
9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,76	93,97	94,04	94,11	94,11
10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	95,30	88	89	90	90

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
				2024	2025	2026	
11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						
	Indeks Kualitas Air	Indeks	61,61	59,51	59,56	59,59	59,58
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	79,45	80,85	80,85	80,87	80,87
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	54,91	55,99	56	56,10	56,10
12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						
	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7421	0,7795	0,7869	0,7969	0,7969

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
				2024	2025	2026	
13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						
	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Nilai	23,61	22,5	22	21,5	21,5
14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						
	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	0,2	0,25	0,29	0,33	0,33
15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAAN DAN OLAH RAGA**						
	Jumlah pemuda berprestasi	Orang	68	70	72	74	74

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
				2024	2025	2026	
16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						
	Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan	%	27,03	29,73	32,43	35,14	35,14
17	**UrusaN PEMERINTAHAN BIDANG Pertanian**						
	NTP	Nilai	102	102,5	103	103,5	103,5
18	**Urusan PEMERINTAHAN BIDANG Perdagangan**						
	Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	5,3	5,4	5,5	5,6	5,6

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
				2024	2025	2026	
19	**Urusan PEMERINTAHAN BIDANG Perindustrian**						
	Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan	%	11,7	11,8	11,9	12	12
20	**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						
	Persentase penanganan konflik social	%	80	82	82	84	84

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
				2024	2025	2026	
21	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**						
	Nilai Sakip	Nilai	66,59	69,25	72,02	74,90	74,90
	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,32	3,50	3,60	3,70	3,70
22	**UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
	Indeks SPBE	Indeks	2,18	2,50	2,75	3,00	3,00
23	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						
	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,111	3,150	3,200	3,250	3,250

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
				2024	2025	2026	
24	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	46,43	55	63	71	71
25	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						
	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

BAB IX
PENUTUP

9.1. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan selama 3 (tiga) tahun. RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yakni dokumen perencanaan pembangunan tahunan.

RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026 yang merupakan periode transisi, dan selanjutnya RPD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum Kepala Daerah (Pilkada) pada periode berikutnya. Sedangkan penyusunan RKPD tahun 2024, dan APBD tahun anggaran 2024 berpedoman pada RPD Kabupaten Nganjuk tahun 2024-2026 dan RPJPD Kabupaten Nganjuk tahun 2005-2025 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada masa transisi setelah berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023, penyusunan RKPD dan APBD harus mempedomani Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan mendasarkan pada RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 serta RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan secara teknis, tata cara penyusunan RKPD tersebut mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Dengan adanya Dokumen RPD ini, maka ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Penyusunan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 berpedoman pada RPD 2024–2026 `sampai ada ketentuan dan arahan kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait petunjuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pada periode transisi Bupati-Wakil Bupati terpilih hasil Pemilukada serentak.

2. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk agar segera menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026 dengan berpedoman kepada RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026.
3. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPD Kabupaten Nganjuk dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026, yang dimulai Tahun 2024 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Perangkat daerah Tahun 2024 – 2026 pada Organisasi Perangkat Daerah masing-masing, yang dimulai Tahun 2024 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para pemangku kepentingan pembangunan lainnya, agar dalam melaksanakan perencanaan pembangunan tetap mendukung pencapaian target kinerja dengan mempedomani dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026 sesuai tahapan dan berkelanjutan (*sustainable*).
6. Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 54 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 178 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

7. Dalam hal terdapat Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah baru dan/atau pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah serta dinamika perubahan kebijakan Nasional bersifat mendasar yang dibentuk dan/atau berubah setelah penetapan Peraturan Kepala daerah tentang RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024–2026, maka dapat dilakukan penyesuaian atas RPD ini.
8. Dalam keadaan luar biasa yang tidak ada dalam RPD maka tetap dilaksanakan kegiatan yang menyangkut tentang kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP.19680501 199202 1 001